EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS

MENGUMUMKAN PROGRAM-PROGRAM ATAU KEGIATAN TAHUN 2024

1. **Laporan Kinerja tahun 2024**
2. **Rencana Kerja tahun 2024**
3. **Rencana Strategis tahun 2024**

BPSPL PONTIANAK

2024

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA
BPSPL PONTIANAK
TAHUN 2024

1. **Laporan Kinerja Triwulan I**
2. **Laporan Kinerja Triwulan II**
3. **Laporan Kinerja Triwulan III**
4. **Laporan Kinerja Triwulan IV**

2024

BPSPL

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Gradiano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Akmal Fathu Rohman, S.Si.

Vita Fitriana Maryadani, S.Si.

Ratih Trisunasa Dhani, S.Kel.

Kontributor:

Subbagian Umum BPSPL Pontianak

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada masyarakat dan Bangsa yang kita cintai Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan I Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja dari program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Dalam Buku LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder terkait.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan Kerjasama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 25 April 2024
Kepala BPSPL Pontianak

Ditandatangani secara elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Sc.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengendalian Kinerja secara daring melalui https://kinerjaku.kkp.go.id. Proses perhitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses pencapaian dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) PC-HKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 115 (kategori [illegible] istimewa).

Pencapaian Indikator Kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan I yaitu:

1. IKM 15 Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) target 1 dan capaian 1
2. IKM 16 Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) target 34% dan capaian 115,67%
3. IKM 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Lengkap dan Disampaikan (%) target 100% dan capaian 100%.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 18.686.113.000. Realisasi anggaran pada Triwulan I berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 31 Maret 2024 yaitu Rp 3.613.583.908 atau 19,47% dari pagu total. Berdasarkan kondisi terkini pelaksanaan program kegiatan yang menunjang kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik, namun, terdapat kendala teknis dalam kegiatan penyaluran untuk Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran masih dalam blokir. Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan II dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengupayakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka membuka anggaran yang diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengusulan sertifikasi keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2023 yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan ke Direktorat Pengelolaan Ruang Laut.

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.1.1. Kedudukan 1
1.1.2. Tugas 1
1.1.3. Fungsi 1
1.2. Susunan Organisasi 3
1.3. Keragaman SDM 4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 4
1.4.1. Potensi 4
1.4.2. Permasalahan 5
1.5. Dasar Hukum 6
1.6. Sistematika Penyajian 8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 9
2.1.1. Visi 9
2.1.2. Misi 9
2.1.3. Tujuan 10
2.1.4. Sasaran Strategis 10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 16
2.3.1. [illegible] Pengukuran 16
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja 17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 18
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai [illegible] BPSPL Pontianak 21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak 31

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 29

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 33

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 39

3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 41

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak ... 47

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 52

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 57

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 61

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak ... 63

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak ... 70

3.2. Realisasi Anggaran ... 83

BAB IV PENUTUP ... 87

4.1. Kesimpulan ... 87

4.2. Rekomendasi ... 87

4.3. Tindak Lanjut ... 87

LAMPIRAN ... 88

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 3
Gambar 1.1.3-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) 18
Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I 19
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I 20
Gambar 3.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan 26
Gambar 3.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah 26
Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 27
Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 27
Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL 31
Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 31
Gambar 3.1.4-1. [illegible] 33
Gambar 3.1.4-2. Pengamatan Populasi Pesut 36
Gambar 3.1.4-3. Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi 37
Gambar 3.1.7-1. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan 42
Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat 43
Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Hiu di Kalimantan Barat 54
Gambar 3.1.8-2. Pembuatan Coral Stock Center di Kalimantan Timur 55
Gambar 3.1.8-4. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar 56
Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi 58
Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI 59
Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Peraturan Bersama Jasa Kelautan 64
Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan 67
Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah 67
Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 68
Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 68
Gambar 3.1.12-1. Kegiatan Pelaksanaan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 82

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perbedaan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 11
Tabel 2.2-2 Perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14
Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 22
Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan I 23
Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 24
Tabel 3.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I 25
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 29
Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan I 30
Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I 32
Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Kriteria dan Jumlah Pemenuhan pada setiap Kriteria 33
Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai EVIKA 34
Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 34
Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 34
Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut 36
Tabel 3.1.4-6. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan I 37
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 39
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan I 40
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 41
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan I 42
Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 44
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 47
Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan I 50
Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Triwulan I 51
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak 53
Tabel 3.1.8-2. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat 54
Tabel 3.1.8-3. Rekapitulasi Kejadian Biota Terdampar 55
Tabel 3.1.8-4. Realisasi IKU 10 Triwulan I 56
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 57
Tabel 3.1.9-2. PNBP Triwulan I 60
Tabel 3.1.9-3. Realisasi IKU 11 Triwulan I 61
Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak 63
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Triwulan I 64
Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak 65
Tabel 3.1.11-2. Realisasi Anggaran IKU 13 Triwulan I 69
Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 70
Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan I 72
Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 NKA BPSPL Pontianak 73
Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai IKK BPSPL Pontianak 74
Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan I 76
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak 77
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17 78
Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai PM SAKIP 79
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak 80
Tabel 3.1.12-10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I 82
Tabel 3.1.12-11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak 83

Tabel 3.1.12-12. Efisiensi dan capaian IKK 19 Triwulan I 83
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK 19 pada Triwulan I 84
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKK 20 BPSPL Pontianak 85
Tabel 3.1.12-15. Efisiensi dan capaian IKK 20 Triwulan I 86
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKK 21 BPSPL Pontianak 87
Tabel 3.1.12-17. Capaian IKK 22 BPSPL Pontianak 88
Tabel 3.1.12-18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah 90
Tabel 3.1.12-19. Capaian IKK 23 BPSPL Pontianak 91
Tabel 3.1.12-20. Realisasi Anggaran IKK 23 Triwulan I 92
Tabel 3.1.12-21. Kategori Nilai [illegible] 92
Tabel 3.1.12-22. Capaian IKK 24 BPSPL Pontianak 93
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKK 24 Triwulan I 94
Tabel 3.2-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I 95
Tabel 3.2-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2020 96

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 64/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sejak terbitnya Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yang melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan pencegahan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

g. Fasilitasi penerapan ruang pesisir dan laut;
h. Pelaksanaan bimbingan dan perizinan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah antara lain sebagai berikut:

a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didesentralisasikan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis/spesies spesifik; Koleksi dan breeding; Mempunyai nilai dan kepentingan konservasi nasional (national importance); Secara ekologi bersifat lintas Negara; Melindungi habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam mendukung/meratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dilimpahkan kepada daerah (kewenangan pusat), serta menerapkan fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam mendukung/mempercepat pencapaian tujuan SDG (Sustainable Development Goals), antara lain, menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan pelestarian fungsi serta peran pesisir dalam pembangunan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat atau BPSPL Pontianak memiliki satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak dipimpin oleh seorang kepala Balai dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tersebut, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari: (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian; (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat; (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajerial yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajerial yang dibawahi oleh Kepala Subbagian Umum.

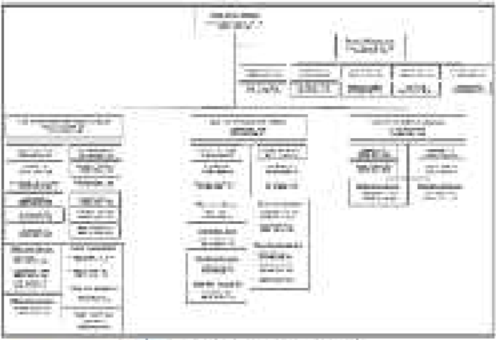

Gambar 1. 7 Bagan Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2020 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 70 orang terdiri dari 48 ASN (44 PNS dan 4 PPPK) dan 21 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun jumlah PPNPN yang berjumlah 21 orang merupakan Satpam, Pramubakti dan Petugas Kebersihan, Pramudi/Petugas Penjagaan, dan Pengemudi. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Untuk komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik di bawah sebagai berikut:

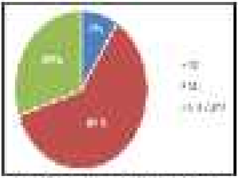

Gambar 1. 8 Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.432,59 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 33

Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 8.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 773 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dipenuhi melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian diperlukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES dalam rangka KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini perlu dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.

e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini diperlukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi sesuai fokus bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan keterpaduan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti bioteknologi laut dan jasa kelautan sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2023 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
i. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- vii. Kegiatan Pendukung;
- viii. Realisasi Anggaran:
- ix. Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   - a. Perjanjian Kinerja
   - b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan mempunyai titik kritis dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terutama kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. membangun dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2020 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tersebut, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perumusan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL".

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenang yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP bertekad melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pemberantasan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   a. Meningkatkan daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   b. Meningkatkan pengawasan dan pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan penjabaran atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Tersedianya kawasan [illegible] di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan komunikasi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan penanganan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan terwujudnya pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran kegiatan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
[SK-2] Meningkatnya Nilai [illegible] BPSPL Pontianak	[SK-?] Meningkatnya Nilai [illegible] BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	[SK-2] Meningkatnya lahan kerja yang terintegrasi dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-1] Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut,	[SK-4] Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut,

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-4] Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-4]** Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-5] Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat nasional di wilayah kerja BPSPL Pontianak	**[SK-5]** Teridentifikasinya kawasan usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	**[SK-6]** Meningkatnya pelaksanaan sinergi dan kolaborasi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-6] Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-7]** Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-7] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-8]** Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-8] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	**[SK-9]** Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	**[SK-10]** Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
Tidak Terdapat Sasaran Kegiatan	**[SK-11]** Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SS-9] Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2023 dan Maret 2024

Sedangkan untuk pencapaian IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2-3 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

IKK Tahun 2023	IKK Tahun 2024
[IK-7] Nilai PMAP BPSPL Pontianak ([illegible])	**[IK-1]** Nilai PMAP BPSPL Pontianak ([illegible])
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	**[IK-2]** Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (orang)

IKK Tahun 2021	IKK Tahun 2022
[IK-3] Dokumen Operasionalisasi Perencanaan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IK-3] Dokumen operasionalisasi perencanaan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-4] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	[IK-4] Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)
[IK-5] Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	[IK-5] Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-6] Kerjasama konservasi yang dilakukan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-7] Kemitraan konservasi yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
[IK-6] Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IK-8] Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-9] Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)
[IK-7] Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyelamatan, Pemulihan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Peningkatan Status Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IK-10] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyelamatan, pemulihan habitat atau pemulihan populasi dan peningkatan status dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IK-8] Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IK-11] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-12] Pemanfaatan air laut selain energi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	[IK-13] Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

IKK Tahun 2023	IKK Tahun 2024
[IK-8] Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	**[IK-14]** Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-9] Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	**[IK-15]** Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-10] Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Pontianak (Nilai)	**[IK-16]** Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-11] Indeks pelayanan publik yang diberikan pada BPSPL Pontianak (Indeks)	Tidak Terdapat Indikator Kegiatan
[IK-12] Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	**[IK-17]** Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-13] Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	**[IK-18]** Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-14] Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	**[IK-19]** Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-15] Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	**[IK-20]** Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)
[IK-16] Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Dimutakhirkan (%)	**[IK-21]** Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan dimutakhirkan (%)
[IK-17] Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)	**[IK-22]** Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)
[IK-18] Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)	**[IK-23]** Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)
Tidak Terdapat Indikator Kegiatan	**[IK-24]** Nilai pengelolaan internal komunikasi lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2023 dan Maret 2024

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp. 000)	2.000.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	120
3. Terselenggaranya perencanaan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Dokumen rekomendasi/izin pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	5
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5. Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6. Meningkatnya pelestarian konservasi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk terlindunginya konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kerjasama konservasi yang dibina di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
	7. Kemitraan konservasi yang dibina di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2
	9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan penataan pemanfaatan, perbaikan habitat atau penambahan populasi dan penanganan biota terdampak di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	1
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93.75
	15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	80
	16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	68
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	61
	19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	34
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Diselesaikan Tindak Lanjutnya oleh [illegible] (%)	45
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	80
	24. Nilai [illegible] lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85

Sumber data: BPSPL Pontianak [illegible]

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1 Konsep Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2020, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.2.2 Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pemantauan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
   b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level III sampai ke level I); dan
   c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kombinasi/agregasi terbaru dari pencapaian kinerja bawahannya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja
   Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), PK dan Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta didukung dalam informasi.

3. Manual IKU
   Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi, dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memahami, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot validasi IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (http://kinerja.kkp.go.id/kinerja/)

5. Atasan langsung dan setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat eselon I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan laporan hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja atasannya paling lambat 5 hari setelah periode triwulan/semester berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL mengumpulkan seluruh hasil yang dicapai dan melakukan analisis untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan.

Contents

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 8

- 2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 8
  - 2.1.1. Visi 9
  - 2.1.2. Misi 9
  - 2.1.3. Tujuan 10
  - 2.1.4. Sasaran Strategis 10
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 11
- 2.3. Metode Pengukuran Kinerja 17
  - 2.3.1. Sumber Pengukuran 17
  - 2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja 17

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023 11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023.......12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSDMP Pertanian Tahun 2024...............................14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKK). Perhitungan IKU dan IKK diukur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengendalian Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta memuat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengendalian Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta memuat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

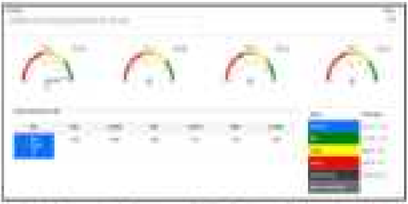

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU/IKK BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu [illegible] (masuk kategori [illegible]). NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan I) sebesar 111,45%. Terdapat peningkatan [illegible] dari Triwulan I Tahun 2023. Peningkatan nilai disebabkan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 4 indikator yang memiliki periode penilaian Triwulanan. Terdapat 3 indikator Kinerja yang tercapai dan satu indikator yang belum tercapai, yaitu IKU 8 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Hal itu disebabkan pada Triwulan I masih dilakukan identifikasi dan verifikasi Kelompok Masyarakat tersebut dahulu. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan I dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

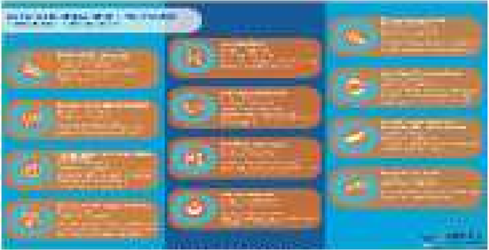

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya ([illegible]) + Pendapatan Perikanan Lainnya ([illegible]) yang diperoleh oleh Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

PNBP [illegible] = PNBP [illegible] + PNBP [illegible] + PNBP [illegible]

dimana,

PNBP [illegible] = SAJ DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda

Keterangan:

SAJ DN	=	Pungutan atas Dokumen SAJ DN ¹) + Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan ²)
Surat Rekomendasi	=	Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan
PNBP [illegible]	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perikanan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan
PNBP [illegible]	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
PNBP [illegible]	=	Nilai PNBP yang berasal dari Tambahan Gaji/TGR dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:
¹) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 0%
²) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang diterbitkan

Formulasi Penghitungan Pungutan:

Pungutan Pengambilan	=	Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Pungutan Perdagangan	=	Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Denda	=	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Rekomendasi

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SS7	Penerimaan Nilai PNBP BPSPL Pontianak								
IKU 7	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rupiah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2.274.633.955	Periode Capaian Tahunan			2.000.000.000	0	-	-	-	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak dan SIPNBP, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan. Capaian nilai PNBP TW dari I (per tanggal buku 1 Januari – 31 Maret 2024) yaitu sebesar Rp 590.509.912 atau 29,52% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena sebelumnya tidak memiliki target triwulanan. Periode pelaporan sebelumnya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2024 (Rp 590.509.912,-) mengalami peningkatan sebesar 117% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2023 (Rp 271.418.501,-).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2024 telah terealisasi sebesar 29,53% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 30% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang masih sering terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pembayaran PNBP. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan menghitung NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk mengetahui dan memvalidasi PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SPU, SAJ dan Rekomendasi) selama bulan Januari – Maret 2024. Selain itu, ada juga pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan I 2024.

Tabel 3.1.1-3 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan I

Jenis PNBP	Januari	Februari	Maret
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp166.667	Rp166.667	Rp166.667
Pendapatan Perizinan Lainnya	Rp67.630.000	Rp95.040.000	Rp82.080.000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Rp84.830.416	Rp122.104.695	Rp108.384.600
Total	Rp152.627.083	Rp217.311.362	Rp190.631.267
Total TW I			Rp560.569.712

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan I Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SPU, SAJ dan Rekomendasi) pada bulan April – Juni 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa yang memenuhi manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari penjumlahan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Menghitung:

$TK_{Pontianak} = TK_{lokasi 1} + TK_{lokasi 2} + TK_{lokasi 3} + TK_{lokasi n}$

Keterangan:

$TK_{Pontianak}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak

$TK_{lokasi n}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1 Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SKO	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			300	0	-	-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada kinerja IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gernas BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pinggir laut.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 3 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengikuti kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL**

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024. Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 20 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.

Gambar 2.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Kenaya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 18 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Kenaya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 2.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapuk Besar, Desa Kuala dan Desa Naram Kota Singkawang pada tanggal 14 – 15 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengelola sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 16 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang masuk terkumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk pengolahan sampah yang terkumpul atau model economy sirkular lainnya dari sampah dikumpulkan.

c. **Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra**

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 30 nelayan dari KUB yang telah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah/pengepul sampah juga sudah diidentifikasi sebagai mitra offtaker potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga dan kendala dan musim melaut serta musim paceklik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.

Gambar 3.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi kualitasnya.

Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya didapatkan informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil bahwa data kelompok nelayan di Setapuk Besar dan Kuala sebanyak 3 ([illegible]) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan maupun Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DP3 Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gernas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gernas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gernas BCL.

G. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4044.QDG.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (Januari–Maret 2024) yaitu Rp 75.460.534 atau 4,37% dari pagu anggaran sebesar Rp 509.280.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Tabel 3.1.30. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[4044.QDG.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp509.280.000	Rp 75.460.534 (4,37%)	-
	TOTAL	Rp509.280.000	Rp 75.460.534 (4,37%)	-

H. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gernas BCL dengan melibatkan kelompok nelayan, tenaga pendamping dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang existing, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan menghimpun/fasilitasi dan menyelesaikan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SSO	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2	Periode capaian tahunan			3	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada kinerja IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya, koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, verifikasi lapangan permohonan KKPRL di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, mengikuti bimbingan teknis KKPRL di Kota Denpasar dan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut di Kalimantan Timur.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah ini tercapai belum tercantum dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 hanya pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian Kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun berupa diberikan rekomendasi/telaah pertimbangan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NEES belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPCS, realisasi anggaran dan satuan dari NPCS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan penilaian teknis secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 15 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis PKKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 10 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Utara sebanyak satu pemohon.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis PKKPRL Triwulan I

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	1	Januari, Maret
Kalimantan Selatan	3	Januari, Februari
Kalimantan Timur	10	Januari – Maret
Kalimantan Utara	1	Februari
Total		

Kegiatan ini juga didukung lebih lanjut dengan Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL. Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21 – 24 Februari 2024. Selain itu, ada pula verifikasi lapangan untuk Permohonan KKPRL PT. Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada tanggal 5 – 8 Maret 2024.

Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut BUT Eni Muara Bakau dan BUT Eni East Ganal Limited di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Pendampingan Pengawasan KKPRL PT Citra Manajemen di Kabupaten Kayong Utara tanggal 12 – 14 Februari 2024. Pendampingan Pengawasan KKPRL PT PT. Bima Budidaya Mutiara dan CV. Borneo Mutiara di Kabupaten Bengkayang tanggal 22 – 23 Februari 2024. Selain itu, juga dilakukan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut milik PT Sima Surya Sta di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 23 – 24 Februari 2024.

Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya rapat penyelenggaraan KKPRL UPT Lingkup Ditjen PRL di Kota Bandung, Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Bandung, Pelatihan Pemanfaatan Ruang Laut Bidang Perikanan di Kota Malang, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut di DKI Jakarta.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output (3364.QAT.002) Rekomendasi kesesuaian Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 126.122.040 atau 10,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.149.093.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

Tabel 3.1.XX Realisasi Anggaran Triwulan I

No.	Komponen/Sub komponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2064.PBT.003.021] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 174.776.000	Rp 34.202.000 (19,57%)	-
2.	[2064.PBT.003.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 573.226.000	Rp 78.468.846 (13,69%)	
3.	[2064.PBT.003.062] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 402.000.000	Rp 74.432.000 (18,52%)	
	TOTAL	Rp 1.150.000.000	Rp 187.102.846 (16,27%)	-

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi lanjut permohonan KKPRL lanjutan untuk bulan April - Juni, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKK 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 43.447,96 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	8	10-25	8
Proses	6	10-25	13
Output	6	10-30	13
Outcome	4	20-30	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-1. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	NI	NMax	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	–	1070	–	0,30	–
Proses	–	420	–	0,35	–
Output	–	440	–	0,20	–
Outcome	–	420	–	0,15	–
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:

Nilai Indikator (NI)	: Hasil pengamatan skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (NMax)	: Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (NK)	: NI / NMax x 100%
Bobot Kriteria (BK)	: Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak)	: NK x BK
Nilai Akhir Evaluasi	: Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-2. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<40%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dipahami dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>40-60%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan sebagian tujuan pengelolaan sudah tercapai
>60%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindung dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 [illegible]

SP-4	Terjaminnya [illegible] dan pengelolaan [illegible]								
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi [illegible] (%)								
[illegible] 2024	Tahun 2024					Renstra [illegible]		Renstra [illegible]	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW 2024	% Capaian thd Target TW	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2024	Periode Capaian Tahunan			10	-	-	-	72,5 [illegible]	-

Sumber data: [illegible], Maret 2024

i. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya pemantauan evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi [illegible], survey jenis biota [illegible] di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu, monitoring sosial ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dan pengadaan sarana prasarana pendukung konservasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 15%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,8 juta Ha di tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam pengukuran kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PRL, sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 20% di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut sudah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 36,44%. Capaian Kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak, hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu perlu peningkatan alat penunjang survei lapangan dalam monitoring Pesut Mahakam. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam pada tanggal 3 – 13 Maret 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 16.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.

Gambar 3.1.4-2. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang dilihat berlokasi di Hulu Rempa Ayu sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pesut yaitu pukul 14.47.

Tabel 3.1.4-6. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No.	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktifitas
1.	Sebulu Modern	9	10.13	Sighting
2.	Sungai Kedang Rantau	2	14.47	Sighting
3.	Muara Wis	6	11.58	Sighting
4.	Hulu Rempa Ayu	14	10.40	Sighting
5.	Muara Danau Semayang	5	08.17	Sighting
6.	Muara Pela	3	10.01	Sighting
7.	Liang Ulu	3	10.38	Sighting

Pada hasil analisis pengamatan kualitas air menunjukan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sebenarnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di lapisan pengukuran menunjukan nilai suhu berkisar antara 28,4 – 31 C, sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,7 – 6,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 6,8 – 7,26. Sementara nilai TDS berkisar antara 10 – 49 ppm.

6. **Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Agustus 2016 bertempat di Laboratorium Pengembangan Masyarakat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi awal tim BPSPL Pontianak dilakukan bersama akademisi dosen sosial ekonomi Universitas Mulawarman dengan memaparkan rencana survei Monitoring Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Setelah pertemuan, akademisi dari Universitas Mulawarman kemudian memberikan kuisioner yang telah disiapkan, yaitu: Kuisioner Masyarakat Sekitar Kawasan (MSK), Kuisioner Rumah Tangga Perikanan (RTP), Kuisioner Partisipatif dan Kuisioner Persepsi Individu. Kemudian kuisioner yang telah

Monitoring ini akan dilaksanakan di 5 desa dan 5 kecamatan. Kemudian data yang diperoleh akan dikompilasikan dan dianalisis, untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk menjadi pertimbangan aspek sosial ekonomi di tahap berikutnya.

Gambar 3.1.A4. Koordinasi Survei Monitoring Sosial Ekonomi

c. **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi**
Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Nasional [illegible] dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2024. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya air conditioner split, longboat, speedboat, televisi, echosounder, drone DJI, alat komunikasi, longboat mini dan lab operasional.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2062.RBA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (periode dari Januari 2024) yaitu Rp 356.460.284 atau 14,33% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.481.326.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

Tabel 3.1.A4. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan I

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2062.RBA.002.051] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 600.000.000	Rp 283.477.322 (47,24%)	-
2.	[2062.RBA.002.052] Data dan informasi Kawasan Konservasi	Rp 715.388.000	Rp 29.987.134 (4,21%)	-
3.	[2062.RBA.002.053] Pemberdayaan Masyarakat	Rp 800.044.000	Rp 42.036.426 (5,27%)	-
4.	[2062.RBA.002.054] Penyiapan Penetapan Kawasan Konservasi	Rp 362.894.000	Rp 404.400 (0,11%)	-
TOTAL		Rp 2.481.326.000	Rp 356.460.284 (14,33%)	-

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan II diantaranya memantau sosial ekonomi, pendataan jenis ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi rencana pengelolaan dan survei biota dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terfasilitasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKK 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan persyaratan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi kawasan konservasi. Teknik perhitungan Indikator Kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKK 5 BPSPL Pontianak

SK 5	Terfasilitasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKK 5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum terdapat progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 3 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 23,3 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam pengusulan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat pemangku kepentingan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Belum terdapat progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2382.UBA.001] Koordinasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 3.985.526 atau 3,99% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.5.2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2382.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp 3.985.526 (3,99%)	-
	TOTAL	Rp 100.000.000	Rp 3.985.526 (3,99%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan Konservasi.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan mendokumentasikan draf kesepakatan kerja sama yang dibahas di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK 6	Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 6	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	5	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak/DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan I, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan.

Progres kegiatan yang dilakukan adalah Inisiasi Jejaring Kemitraan dan Penyusunan Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Hulu pada 24 Januari 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan Pertemuan Inisiasi Perjanjian Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dilakukan pada 25 Maret 2024 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya draf 0 Perjanjian Kerja Sama telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.855/BPSPL.2/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Penyampaian Draf 0 Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga Triwulan I tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 13 juta hektar pada 2022 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan renstra jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan/kerja sama dan komitmen dalam mendukung Konservasi dan Pengelolaan Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I, sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian IKU, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan persentase serapan anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Implementasi Perjanjian Kerjasama Konservasi dan Rencana Kegiatan 2024 pada 30 Januari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama dilakukan pemantauan capaian implementasi kerja sama setiap triwulan. Pada triwulan I, BPSPL Pontianak telah menyampaikan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.371/BPSPL.2/TU.140/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi Perjanjian Kerja Sama Triwulan I Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2302.FBD] Kerja Sama dengan Rincian Output (RO) [FBD.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut.

Tabel 3.1.4.5. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 4 pada Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	[illegible]
1.	2302.FBD.001.051.A Fasilitasi Kesepakatan Kerjasama	Rp76.000.000	Rp22.840.000 (30,05%)	-
TOTAL		Rp76.000.000	Rp22.840.000 (30,05%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 4 Triwulan I (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp22.549.655 atau 32.64% dari pagu anggaran Rp77.300.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Penggandaan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Fasilitasi kegiatan [illegible]), dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transport Peserta).

Output yang telah dicapai pada Triwulan I dengan realisasi anggaran tersebut adalah Draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun draf tersebut masih dalam proses pembahasan lanjutan pada Sekretariat DJPKRL dan para pihak.

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

1. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat DJPKRL, Direktorat terkait DJPKRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

IKU 7. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat melalui: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang dilakukan di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.63. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SS 4	Meningkatnya pelaksanaan konsensus dan kemitraan kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Pontianak								
IKU 7	Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target TW	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	5	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)", sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada triwulan I, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan.

Progres kegiatan yang dilakukan adalah Inisiasi Jejaring Kemitraan dan Penyusunan Kerja Sama Kawasan Konservasi Mahakam Hulu pada 24 Januari 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu pembahasan Maksud dan pembahasan final draft perjanjian kemitraan dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 secara daring.

Selanjutnya, Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.744/BPSPL.3/HK.120/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Permohonan Persetujuan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman (FPIK UNMUL). Surat tersebut telah diberikan tanggapan melalui Surat Plt. Sekretaris DJPRL nomor B.1742/DJPRL.1/TU.210/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Persetujuan Perjanjian Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)", sehingga Triwulan I tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 13 juta hektar pada 2023 menjadi 23 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan target kinerja jangka menengah karena pelaporan capaian pada Renstra ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan/kerja sama dan nominal dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Renstra ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kalimantan Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf Perjanjian Kemitraan tersebut telah diajukan permohonan paraf kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I, sehingga IKSS belum dapat diukur. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian IKSS, realisasi anggaran dan sasaran dari IKSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret hal Permohonan Paraf Persetujuan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman kepada Sekretaris DJPRL dan B.[illegible]/BPSPL.2/TU.210/III/2024 tanggal 28 Maret hal Permohonan Paraf Persetujuan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Selain itu, kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Pembahasan Implementasi Perjanjian Kerjasama Konservasi dan Rencana Kegiatan 2024 pada 18 Januari 2024 di Cirebon, Jawa Barat.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [3343.PEG] Kerja Sama dengan Rincian Output [PEE.001] Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut.

Tabel 33. Realisasi anggaran Kegiatan Pendukung IKU 7 pada Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[3343.PEE.001.051.A] Mitrasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp76.458.534 (76,46%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp76.458.534 (76,46%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan I (per Maret dari Januari 2024) yaitu Rp75.480.334 atau 75,48% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Gambar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi Persiapan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transport Peserta dari Pakar Publikasi di Kalimantan Timur).

Output yang telah dicapai pada Triwulan I dengan realisasi anggaran tersebut adalah Draf Perjanjian Kerjasama BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Penyadaran, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf tersebut masih dalam proses pembahasan oleh Sekretariat DJPRL dan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

B. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan II Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Penyadaran, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknis penghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK 7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Dimulai Triwulan II			2	-	3	-	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dimulai pada Triwulan II. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu identifikasi kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dimulai pada Triwulan II.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan kebencanaan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dimulai pada Triwulan II.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada kesiapan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NRS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara NRS, realisasi anggaran dan selisih dari NRS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. **Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan**

Kegiatan Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan dilakukan pada tanggal 18 s.d. 22 Januari 2024 yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang dan Desa Tanjung Sungkai Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Terdapat dua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diidentifikasi, yaitu POKMASWAS Hadiad dan POKMASWAS Kabyar Bersatu.

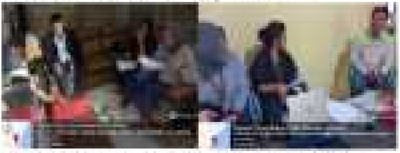

Gambar 3.1.7.1. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pesisir merupakan kelompok masyarakat yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok ini diantaranya pengawasan biota laut dilindungi, penanganan biota laut terdampar dan rehabilitasi terumbu karang. Pada tahun 2019, kelompok ini sudah/belum pernah mendapatkan bantuan KOMPAK dari Direktorat KKHL berupa peralatan selam, peralatan snorkeling dan pelampung.

b. **Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat**

Kegiatan Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari 2024 di Kabupaten Kendawangan. Identifikasi dilakukan kepada empat kelompok masyarakat: POKMASWAS Lumpasan Lautan, POKMASWAS Tangar Bersatu, POKMASWAS Sabar Wilayah Pelapis, POKMASWAS Mangrove Dilindung Bersatu.

Kelompok Masyarakat Pengawas Cempedak Lestari berlokasi di Dusun Pulau Cempedak, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba, paus dan penyu. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara penanaman mangrove dan lamun baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/perguruan tinggi. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan kapal fiber dengan kapasitas 4-6 orang dengan yang menggunakan mesin tempel 40 PK untuk mendukung kegiatan kelompok.

Gambar 3.1.7.5. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat

Kelompok Masyarakat Pengawas Tangar Bersatu berlokasi di Pulau Sawi, Dusun Sungai Tongar, Desa [illegible], Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif melakukan patroli kegiatan illegal fishing dan kebersihan perairan. Selain itu mereka juga memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba dan penyu. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara penanaman mangrove dan lamun baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/perguruan tinggi. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan peralatan pemantauan berupa teropong, [illegible], [illegible], jas hujan untuk mendukung kegiatan Kelompok.

Kelompok Masyarakat Pengawas Sabar Wilayah Pelapis berlokasi di Pelapis, Kec. Kepulauan Karimata, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif melakukan patroli kegiatan illegal fishing dan kemudian dilaporkan ke PSDKP Teluk Batang. Selain itu mereka juga memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong dan lumba-lumba. Kelompok Sabar Wilayah Pelapis juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara transplantasi terumbu karang secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi LSM/perguruan tinggi. Kelompok ini pernah menerima bantuan rompi dari Kecamatan. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan peralatan perlengkapan pelestarian atau rehabilitasi terumbu karang untuk mendukung kegiatan Kelompok.

Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Dilindung Bersatu berlokasi di Desa [illegible], Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Pada saat ini Kelompok Dilindung Bersatu aktif melakukan penanaman mangrove baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan instansi/LSM/perguruan tinggi/swasta. Kelompok ini sebelumnya pernah menerima bantuan dari [illegible] Pontianak berupa [illegible], WC dan [illegible] dari Pemerintah Kabupaten Ketapang. Adapun untuk bantuan KOMPAK, Kelompok ini mengusulkan sarana/prasarana ekowisata [illegible] yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan jenis dan kawasan konservasi.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3943.QBH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 24.033.608 atau 9,52% dari pagu anggaran sebesar Rp 252.548.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.7.2. Realisasi IKU 8 Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3943.QBH.001.051] Penyaluran bantuan KOMPAK	Rp 252.548.000	Rp 24.033.608 (9,52%)	-
TOTAL		Rp 252.548.000	Rp 24.033.608 (9,52%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Menyelesaikan pengadaan barang untuk bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Melakukan acara terima pemberian bantuan KOMPAK.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Kelompok masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan akuntabilitas dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknis menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

SKP	[illegible] Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra [illegible] 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Periode Capaian Tahunan			1	0	2	0	0	0

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], diolah 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada wilayah kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 1 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran. Perlu adanya pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3342.RBK.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Sosial Ekonominya. Belum terdapat realisasi anggaran karena masih terdapat blokir anggaran. Perlu adanya pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

Tabel 3.1.8.3 Realisasi IKU 8 Triwulan I

No	Komponen/Sub komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[3342.RBK.003.052] Pemberdayaan Ekonomi masyarakat	Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	Rp 350.000.000
TOTAL		Rp 350.000.000	Rp 0 (0,00%)	Rp 350.000.000

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Perlu adanya pembukaan blokir anggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 16. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/ pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk keberlanjutan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari air Tawar.
b. Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengkayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 16 BPSPL Pontianak

SK 6	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 16	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan dan Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
7	Periode Capaian Tahunan			7	-	7	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Dit. KKHL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator ini dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis bernama Kima (penyediaan data populasi), Karang (pendataan Coral Stock Center dan survei pemantauan coral bleaching), dan Mamalia Laut (kegiatan cepat penanganan mamalia laut terdampar).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan I tahun 2023 terdapat capaian sebesar 3 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2024 (3 jenis), maka progres kegiatan sama dengan capaian Triwulan I tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan I sebanyak 3 jenis memiliki porsi sebesar 15% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan I sebanyak 3 jenis memiliki porsi sebesar 33% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data populasi ikan, pembuatan Good Stock Center dan respon cepat mamalia laut terdampar. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelapor.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. **Survei Penyediaan Data Populasi Ikan**

Kegiatan penyediaan data populasi ikan di Kalimantan Barat dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Lemukutan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 3 – 6 Februari 2024. Sebelum survei, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Aula Kantor Desa Pulau Lemukutan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan warga Desa Pulau Lemukutan yang berprofesi sebagai nelayan, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Gambar 3.1.9-1. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

Metode survey pendataan populasi kima yang dilakukan adalah metode belt transek yaitu dengan metode garis transek lurus sejajar garis pantai dengan panjang 100 meter dan lebar area pengamatan 5 meter (2,5 meter kanan dan 2,5 meter kiri pengamat) pada 7 lokasi pendataan. Total jumlah Kima (Tridacna spp.) yang ditemukan di 7 lokasi pendataan di Pulau Lemukutan yaitu 884 ekor dengan jenis Tridacna crocea, Tridacna maxima dan Tridacna squamosa. Jumlah kima terbanyak ditemukan di Taman Kima sebanyak 278 ekor, sementara jumlah kima paling sedikit ditemukan di Teluk Surau dengan sebanyak 59 ekor.

Tabel 3.1.9-5. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

No	Stasiun	Spesies	Jumlah
1	Tel. Surau	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	59
2	Tel. Cina	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	147
3	Tj. Palembang	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	150
4	Taman Kima	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	278
5	Air Tiris	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	116
6	Tj. Batu Belah	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	85
7	Tj. Marunam	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	54
Total			884

c. **Pembuatan *Coral Stock Center***

Pembuatan Coral Stock Center dilaksanakan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 - 27 Februari 2024. Kegiatan pembuatan *Coral Stock Center* dan Survey Pemantauan Coral Bleaching di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Loka BPSPL Pontianak dan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Maratua Peduli Lingkungan (MPL), Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Maratua, TNI AL Pulau Maratua, PT. Sarga Alas Lestari (Green Nirvana Resort), dan PT. Pratasaba Jaya (Pratasaba Resort).

Gambar 3.1.8-5. Pembuatan Coral Stick Camp di Kalimantan Timur

Transplantasi karang dilakukan menggunakan media shoe paralon berukuran 1 x 1 meter, dengan jumlah stick pada masing-masing media berjumlah 14 fragmen stick karang. Bibit karang diambil dari sekitar lokasi Coral Stick Center pada kedalaman sekitar 3-13 meter. Adapun lokasi peletakan rak transplantasi berada pada kedalaman 3-13 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi substrat berupa pasir. Berdasarkan hasil pencatatan yang telah dilakukan dari 10 (sepuluh) rak pipa paralon, jenis karang yang ditanam adalah Acropora spp., Porites sp., Millepora sp. dan Hydnophora sp. dengan jumlah fragmen mencapai 140 fragmen karang.

6. Respon Cepat Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah

   Selama periode Januari hingga Maret 2024 terdapat 4 (empat) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Terdapat 4 (empat) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang ditangani penanganan yaitu dugong, lumba-lumba, penyu, dan paus. Sebanyak 1 (satu) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1) dan 3 (tiga) kejadian mengenai biota dengan kondisi mati (kode 3 dan kode 4). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada sekitar lokasi penemuan.

Gambar 3.1.8-3. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar

Tabel 3.1.8-2. Rekapitulasi Kejadian Biota Terdampar

No	Waktu Kejadian	Lokasi	Jenis Biota	Jumlah	Kode Kejadian	Respon
1	23 Januari 2024	Pantai Pulau [illegible], Kec. Pulau Sembilan	Lumba-lumba	4 Ekor	KODE 4	Dikuburkan

2	21 Februari 2024	Perairan Sungai Desa Bukit Jering, Kec. Muara Kaman	Pesut	1 Ekor	KODE 3	Dikuburkan
3	23 Februari 2024	Perairan Pantai Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota	Penyu	1 Ekor	KODE 4	Dikuburkan
4	14 Maret 2024	Pulau Derawan, Desa Kersik, Kec. Marangkayu	Dugong	1 Ekor	KODE 1	Dilepasliarkan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3942.RBS.001] Penanganan/Pengelolaan Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilindungi dan atau Dilestarikan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (terhitung dari Januari 2024) yaitu Rp 183.905.590 atau 24.23% dari pagu anggaran sebesar Rp 758.960.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

Tabel 3.1.3-4. Realisasi IKU 5 Triwulan I

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu RO	Realisasi	Ket.
1.	[3942.RBS.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp 344.720.000	Rp 43.784.348 (20.24%)	-
2.	[3942.RBS.001.052] Rehabilitasi Populasi Habitat Jenis Ikan dilindungi/terancam punah	Rp 256.000.000	Rp 135.209.400 (48.22%)	-
3.	[3942.RBS.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp 93.244.000	Rp 5.712.813 (6.22%)	-
4.	[3942.RBS.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp 71.000.000	Rp 0 (0.00%)	-
	TOTAL	Rp 758.960.000	Rp 183.905.590 (24.23%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi kegiatan pada IKU biota dilindungi/terancam punah, survei pendataan populasi tersebut di Kalimantan Barat, survei pendataan populasi penyu di Kalimantan Barat dan mengikuti kegiatan Festival Pesisir Paloh di Kalimantan Barat.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana);
b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana);
c. Identifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species, penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan identifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK 9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target thn 2024	% Realisasi thd Target thn	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan			4	-	5	-	22	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan I Tahun 2024 yaitu pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 5 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Teripang) serta identifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah tercapai sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah tercapai sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Kelancaran progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan (Januari – Maret). Kegiatan ini terdiri dari:

- Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

  Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan I terdapat 5 pelaku usaha yang melakukan permohonan verifikasi SIPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

  Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (look a like species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman sajikan.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat total 83 Surat Rekomendasi dengan 74 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 9 surat ke luar negeri (LN). Untuk jenis hiu dan pari look a like species, sebanyak 66 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 17 Surat Rekomendasi untuk jenis [illegible] telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk hiu dan pari look a like terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 20 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk [illegible] terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 11 surat.

Gambar 3.1.9-1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

  Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman sajikan.kkp.go.id. Selama Triwulan I terdapat 35 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 285 SAJI DN untuk jenis Arwana telah diterbitkan. Penerbitan SAJI DN untuk hiu dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 11 surat. Sementara penerbitan surat rekomendasi untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 285 surat.

Gambar 3.1.9-2. Pemeriksaan SAJI

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)

  Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai Syarat untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat [illegible]. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [illegible]. Selama Triwulan I terdapat 107 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 184 buah.

- Verifikasi Stok Ikan

  Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai.

- Verifikasi Hasil Panen

  Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai.

- Pengesahan Sertifikat Hasil Penangkaran

  Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai. Selama Triwulan I terdapat .. Pengesahan Sertifikat untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

  Pada Triwulan I didapatkan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sebagai berikut.

Tabel 3.1.8-6. PNBP Triwulan I

Bulan	PNBP	Total Triwulan
Januari	Rp 152.440.416	Rp 563.066.611
Februari	Rp 217.154.639	
Maret	Rp 193.434.636	

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [illegible] yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan. Realisasi anggaran [illegible] pada Triwulan I (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 110.530.000 atau 5,53% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.950.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

Tabel 3.1 SKS. Realisasi RO II Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Kendala
1.	[illegible] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp 200.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
2.	[illegible] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan appendiks CITES	Rp 1.100.000.000	Rp 110.590.077 (10,05%)	-
TOTAL		Rp 1.300.000.000	Rp 110.590.077 (8,50%)	-

K. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu Pelayanan operasional perizinan (sertifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan April – Juni 2024.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10: Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/komoditas tertentu yang berasal dari laut dalam dengan suhu lebih besar dari 50 [illegible] pada kawasan konservasi [illegible] untuk kepentingan komersial [illegible] yang memanfaatkan ruang laut [illegible] minimal 28 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah kegiatan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan atau jasa yang dapat ditinjau proses pemanfaatannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengusahaan pemanfaatan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknis perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi potensi pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 Oleh BPSPL Pontianak

SK 10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PKRL	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	5	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Dit. PKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan I yaitu pada tahap persiapan bidang jasa kelautan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 lokasi kawasan yang terfasilitasi potensi pengelolaan perairan. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Kinerja IKU tercantum dalam lampiran dalam Renstra KKP, Permen KP 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan telah dilaksanakan. Kendala dari progres kegiatan di bidang ini, kesulitan pemohon dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan I sehingga NE belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, nilai pagu anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kelautan dan melakukan sosialisasi perizinan berusaha bidang jasa kelautan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. **Sosialisasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan**

Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2024 di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh … orang yang berasal dari instansi pemerintah. Saat ini, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sedang direvisi, termasuk perizinan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan perikanan lainnya. Contoh perizinan berusaha di bidang jasa kelautan antara lain izin pemanfaatan pasir laut, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan air laut dan lain-lainnya. Pemanfaatan ALSE dibagi menjadi dua KBLI: 36001 (penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum) dan 36002 (penampungan dan penyaluran air baku). Dokumen dan persyaratan khusus mengacu pada mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Gambar 3.1.19.1. Sosialisasi Pedoman Berusaha Jasa Kelautan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2564.PBW.003] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 22.572.887 atau 22,57% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

Tabel 3.1.19.2. Capaian IKU 19 Triwulan I

No	Komponen Rincian Output	Pagu	Realisasi	Ket
1.	[2564.PBW.003.0xx] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp 100.000.000	Rp 22.572.887 (22,57%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 22.572.887 (22,57%)	-

C. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) apabila ada pengajuan permohonan persetujuan Pemanfaatan ALSE.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam penanganan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang masuk laut dan meningkatkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat dilakukan oleh masyarakat. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bersih sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK 11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			4	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada target IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan BCL, identifikasi dan verifikasi nelayan dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 3 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan I 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini baru memiliki target tahunan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, nilai baik anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan I yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL**

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024. Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2018. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjar yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 18 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Keraya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapuk Besar, Desa Kuala dan Desa Nasam Kota Singkawang pada tanggal 15 – 16 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan mitra pengolah sejauh 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang masuk tumpukan hanya dibiarkan atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model ekonomi sirkular lainnya dari sampah [illegible].

c. **Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra**

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 30 nelayan dari KUB yang sudah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah pengepul sampah juga sempat diidentifikasi sebagai mitra offtaker potensial. Indikator penilaian lainnya, seperti harga ikan kalender dan musim melaut serta musim paceklik juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.

Gambar 3.1.11-5. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Desa Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai Bakau Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut belum terverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.11-6. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya didapatkan informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah induk dan bank sampah unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Setapuk Besar dan Kuala sebanyak 3 (tiga) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DPS Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gemas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gemas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gemas BCL.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4046.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 75.460.834 atau 4,57% dari pagu anggaran sebesar Rp 830.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Tabel 3.1.11.2. Realisasi Anggaran IKU 12 Triwulan I

No.	Kode Output/Komponen/Uraian	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[4046.QDD.001.0A1] Aksi Pemberdayaan Gerakan Pembersihan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp830.000.000	Rp 64.275.834 (4,57%)	-
TOTAL		Rp830.000.000	Rp75.460.834 (4,57%)	-

C. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kegiatan sosialisasi dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gemas BCL dengan melibatkan nelayan lokal, pemerintah daerah dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Delapan indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024 Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target renstra
93,93	Periode Capaian Semesteran			93,01	-	93	-	93	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan OMSPAN, Maret 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator ini dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu nilai KPA sebesar 98 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada nilai IKU dilakukan secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 98 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung per periode pengukuran semesteran.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai KPA yang baik didukung dari koordinasi, konsistensi, ketelitian dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai KPA, tim pengelola keuangan melakukan monitoring secara berkala. Dengan begitu, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor penyelesaiannya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NKA belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKU, yaitu:

a. Revisi DIPA.
b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp 3.620.463.396 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.595.112.000.
c. Data Kontrak sebanyak 2 kontrak pada bulan Januari - Maret 2024.
d. Penyelesaian Tagihan setiap bulan.
e. Penyelesaian LS sebanyak 2 kali.
f. Pengisian Capaian Rencana Output (CRO) bulan Januari-Maret 2024.
g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal terkait fungsi pelaksanaan anggaran.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dan Klasifikasi RO dan Output [2067.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2067.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 2.664.774.668 atau 28,79% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.251.734.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang / Jasa.

Tabel 3.1.15.2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2067.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp 43.608.000	Rp 170.234 (0,39%)	-
2.	[2067.EBA.958.051] Layanan Kehumasan	Rp 52.000.000	Rp 7.433.228 (14,30%)	-
3.	[2067.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 5.237.000.000	Rp 1.352.848.730 (24,34%)	-
4.	[2067.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 3.734.484.000	Rp 1.070.732.877 (29,00%)	-
5.	[2067.EBD.955.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp 133.450.000	Rp 43.597.797 (32,50%)	-
TOTAL		Rp 9.251.734.000	Rp 2.664.774.668 (28,79%)	-

C. Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024

a. Revisi Halaman III DIPA (Pemutakhiran KPA)
b. Pelaksanaan kontrak pengadaan
c. Penyusunan laporan dan pelaporan anggaran
d. Pengajuan SPD bulan April – Juni 2024

IKM 15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-K/L melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja terhadap perubahan yang terjadi bagi Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian indikator kinerja anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
b. Baik, apabila NKA >80 – 90;
c. Cukup, apabila NKA >60 – 80;

3. Kurang apabila IKKA ≥50 – 65
4. Sangat Kurang apabila ≤ 50

Capaian IKU 12 IKKA BPSPL Pontianak sebagai berikut:

Tabel 3.1.12(3) Capaian IKU 12 IKKA BPSPL Pontianak

SP/TP	2.1.1.6. [illegible] BPSPL Pontianak								
IKU 12	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak 2024								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target th 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
93,83	Periode capaian Tahunan			85	-	85	-	85	-

Sumber data: [illegible], diolah (2024)

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2025 dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu nilai IKKA sebesar 85 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 85 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memonitor perkembangan capaian-capaian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut memudahkan tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NRSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NRSS, realisasi anggaran dan selisih dari NRSS dengan bantuan aplikasi, biaya efisiensi pengadaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi pendukung keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKSK, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari – Februari 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian dievaluasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKSK ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan input Capaian Rincian Output (CRO) bulan April – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Kemajuan Kinerja IKSK pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diberikan unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit sebesar 40;
b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase TLHP minimal 4,5;
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Inspektur V dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani MenPAN RB. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi sebesar 83,21. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

[illegible]

SK 18	3.1.18 Sasaran Kegiatan 17 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKK 18	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Kondisi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Dit. PRL [illegible]	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target FY 2024	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
30,81	Periode Capaian Tahunan			75	-	33	-	33	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Dit. PRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Nilai/target IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK ini tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKK tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 33. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan I Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat rapat secara internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKK, yaitu:

a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Januari – Maret 2024.
b. Audit Internal penerapan sistem manajemen mutu pada tanggal 13 Februari 2024 secara hybrid di Kantor BPSPL Pontianak dan zoom meeting.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2067.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2067.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan I (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 2.725.800 atau 6,23% dari pagu anggaran sebesar Rp 43.680.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang Rapat dan Konsumsi Rapat.

Tabel 3.17 IKK Realisasi Anggaran IKK 16 Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	2067.EBA.960.052 Layanan Pelaksanaan Koordinasi Sinergitas di Lingkungan KKP	Rp 43.680.000	Rp 2.725.800 (6,23%)	-
TOTAL		Rp 43.680.000	Rp 2.725.800 (6,23%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan II yaitu pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk bulan April – Juni dan sosialisasi internal dari pembangunan Zona Integritas di BPSPL Pontianak.

IKK 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA. Sementara penilaian dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 25%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 30%
d. Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat dari pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN sebagai berikut:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Rentan Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan indikator tersebut diambil langsung dari dashboard IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman http://simpeg.kkp.go.id.

Tabel 3.1.12a. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK 5	5. SK 5. Sasaran Kegiatan 5: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (indeks)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahunan	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2023	Periode Capaian Semesteran			80	-	75	-	75	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, April 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Nilai IP ASN dilakukan secara semesteran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PKRL sebesar 75 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra untuk IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak sebesar 75 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKK ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh seluruh pegawai. Pengembangan kompetensi ini tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga nilai belum dapat dihitung. Pembahasan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian IKK, realisasi anggaran dan selisih dari IKK dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK yaitu:

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak luar dan diikuti oleh pegawai bulan Januari – Maret 2024.
b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai bulan Januari – Maret dan Monitoring Triwulan I 2024.
c. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN bulan Januari – Maret tahun 2024.
d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN bulan Januari – Maret tahun 2024.
e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai bulan Januari – Maret tahun 2024.
f. Mengikuti pelatihan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut Direktorat PRL tanggal 21 Februari 2024.
g. Mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat PRL.
h. Mengikuti Bimbingan Teknis IGT Batas Laut [illegible] yang diselenggarakan oleh Direktorat [illegible] pada tanggal 6 – 7 Februari 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2847.[illegible]] Layanan Dukungan Manajemen [illegible] Internal. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan I (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp [illegible] atau 5,27% dari pagu anggaran sebesar Rp [illegible]. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja bahan.

Tabel 3.1.[illegible] Realisasi Anggaran IKK [illegible]

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	[illegible]
1.	2847.[illegible] Layanan Manajemen SDM	Rp [illegible]	Rp [illegible] (5,27%)	-
TOTAL		Rp [illegible]	Rp [illegible] (5,27%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai, rekapitulasi dan monitoring Capaian Kinerja

Pegawai, rekapitulasi dan monitoring Presensi Pegawai serta mengikuti pelatihan, diklat, seminar maupun workshop yang diselenggarakan baik dari SPSPL Pontianak maupun dari pihak lain.

IKU 15. Nilai PM SAKIP Lingkup SPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup SPSPL Pontianak dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup SPSPL Pontianak adalah didasarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori Nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.15 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak

		mendasar terutamanya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKU 18 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.18.9. Capaian IKU 18 BPSPL Pontianak

SK-8	[illegible] Pontianak									
IKU-18	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)									
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024 Pontianak		Renstra 2020-2024 [illegible]		
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target s/d 2024	% Capaian thd Target TW	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra	
80,2	Target Capaian Tahunan			81	-	-	-	53,73	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak (LAKIN), Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena indikatornya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian indikatornya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PKRL sebesar 53,75. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU ini sebagaimana tercantum dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 92. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian kinerja dengan Triwulan I dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPKK belum dapat dihitung. Pembuatan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengisian kinerja bersifat daring, pemenuhan capaian kinerja bersifat daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan dropbox, google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 29 Januari s.d. 1 Februari di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
b. Penyusunan Manual IKU Level 3 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring.
c. Sosialisasi Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Monev Anggaran lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 1 – 4 April 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
d. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024.

Gambar 3.1.18-1. Kegiatan Penyusunan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja.

g. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2347.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2347.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan I (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp 29.239.349 atau 14,16% dari pagu anggaran sebesar Rp 206.460.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel xx. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I

Tabel 3.1.18-18 Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2347.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 87.000.000	Rp 17.227.964 (19,80%)	-
2.	[2347.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 119.460.000	Rp 12.011.385 (10,05%)	-
TOTAL		Rp 206.460.000	Rp 29.239.349 (14,16%)	-

h. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan II tahun 2024, pemutakhiran pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan II tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.13-13. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SS-13	3.1.13. Tersedianya Laporan SPIP yang dibuat lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 13	Laporan SPIP yang dibuat lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL (Jangka Menengah)	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
4	1	1	100	4	25	-	-	4	25

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 telah tercapai 1 (satu) dokumen (100%) dari target 1 (satu) dokumen. Capaian IKU 13 berupa Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.30/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I Tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan I Tahun 2023 adalah sama yaitu 1 (satu) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020 – 2024 yaitu nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan I dengan jumlah 1 (satu) dokumen telah berkontribusi 25% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyusunan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Triwulan I. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (tenggat pertama adalah triwulan berakhir) maksimal tanggal 10.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.13-16. Efisiensi dan capaian IKU 13 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	% PCK (%)	Alokasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKU 13 Laporan SPIP yang dibuat lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	100	24.463.000	0	0	100

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKK, yaitu:

a. Monitoring dan Evaluasi Form Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) Triwulan IV Tahun 2023 secara daring pada 18 Januari 2024.
b. Penyampaian usulan data personil Tim SPIP dari BPSPL Pontianak melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.237/BPSPL.2/TU.110/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan Data Personil Tim SPIP DJPKRL.
c. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Satgas SPIP dan Tim SPIP Satker PKRL Tahun 2024 pada tanggal 13 Februari 2024 secara daring.
d. Workshop SPIP dan Manajemen Risiko DJPKRL pada tanggal 13-14 Februari 2024 secara daring.
e. Pembahasan Laporan SPIP Bulan Februari pada tanggal 5 Maret 2024 secara daring.
f. Focus Group Discussion (FGD) dan Monitoring Pelaporan Manajemen Risiko (MR) Satker Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 26 Maret 2024 secara daring.
g. Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember atau Triwulan IV telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.30/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023.
h. Penyelenggaraan SPIP Bulan Januari telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.275/BPSPL.2/TU.140/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember Tahun 2024.
i. Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.496/BPSPL.2/TU.140/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Februari Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2347.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.961] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK 13 Triwulan I (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp0 atau 0% dari pagu anggaran Rp24.500.000.

Tabel 3.13 IKK 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK Periode Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2347.EBD.961.051.D] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP UK)	Rp24.500.000	Rp0 (0%)	-
TOTAL		Rp24.500.000	Rp0 (0%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan II adalah:

a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024, serta melakukan publikasi Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024.
b. Menyusun Laporan SPIP Bulan April, Mei, Juni dan Triwulan II Tahun 2024.

IKK 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, mendapatkan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, dibagikan dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu

Kompilasi kegiatan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaboration Office KKP pada laman [illegible]. Penghitungan kegiatan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload kegiatan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/sosialisasi dengan melampirkan [illegible] mendapatkan poin 0,5.
b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
c. Konten video/kampanye diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 2.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan rincian:

- Kegiatan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Kegiatan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload kegiatan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level II dihitung dari kegiatan Eselon II.
- Sekretariat Ditjen menyampaikan data hasil rekapan capaian yang telah diinput pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKM MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1: IKU 14. Capaian IKU 2024 BPSPL Pontianak

SS-7	SS 7.8: Sistem Kegiatan [illegible] Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU-14	Persentase Informasi Lingkup BPSPL Pontianak yang memenuhi Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TH 2024	% Realisasi thd Target TH	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
114,65	84	113,07	134,61	84	100	85	100	85	100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Tahun 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 114,65% dari target nilai 82. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPRL telah tercapai melebihi yang diharapkan. Untuk target pada pada tahun 2023 target meningkat sebanyak 2 poin dari tahun 2022 yaitu dari 82 menjadi 84. Pada Triwulan I 2024 target MP 84 dan telah tercapai 100% dari target triwulanan dengan persentase capaian 134,11%. Capaian MP pada Triwulan I 2024 sebanding dengan capaian MP Triwulan I 2023 yaitu 100%. Capaian IKM 20 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2020/DJPRL.1/TU.540/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 yaitu 100% (105,00% dari target triwulanan), sedangkan capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu 100% (119,38% dari target triwulanan). Artinya terdapat kenaikan capaian IKK pada Triwulan I 2024 sebesar 7,88%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKK tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 50%. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKK tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar sebesar 50%. Capaian pada Triwulan I tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian sebesar 134,11% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 118,67% atau 134,11% dari target tahunan. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pelaksanaan pendukung dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.12-16 Efisiensi dari capaian IKK 16 Triwulan I

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian (%)	Alokasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKK 16. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	134,11	-	-	-	134,11

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK, yaitu:

a. Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office KKP.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKK ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan II yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office KKP pada bulan April – Juni.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan III Tahun 2023 s.d. Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam aplikasi maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian akan dihargai sebesar 100%.

Tabel 3.1.12-18. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak

SK-13	SK-13. Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM 21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	100	100	100	100	-	90	-	90	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-SAKIP KKP, TW I 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024, telah dilakukan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 6 Maret 2024. Dari hasil audit tersebut didapatkan jumlah rekomendasi sebanyak 9 dimana 9 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan upload dokumen pada SIGAK (100% ditindaklanjuti) sehingga persentase progres capaian sudah sebesar 100% dan target tercapai.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% ditindaklanjuti sama dengan Capaian Triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100% ditindaklanjuti.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen PKRL sebesar 90%. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti dan disampaikan sebesar 90%. Capaian Triwulan I tahun 2024 sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra BPSPL Pontianak sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring mengenai tindak lanjut terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya, BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIGAK untuk melakukan monitoring atas temuan beserta status tindak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan atas target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIGAK untuk melakukan monitoring atas temuan beserta status tindak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pemantauan rekomendasi hasil evaluasi atas Audit Kinerja TA. 2023-2024 dengan Nomor [illegible] pada tanggal 4 Maret 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 8 dimana 7 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan upload dokumen pada SIGAK.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memanfaatkan aplikasi SIGAK.

IKU 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang dimaksud adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.10-12. Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak

SS 12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024 Pontianak		Renstra KKP 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TW 2024	% Realisasi thd Target TW	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target RENSTRA
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	47	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan I belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan I.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi materialitas temuan pengelolaan keuangan lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra DPSRL Perubahan 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan mengalikan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan I belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan I.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I.

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU di triwulan II.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk Evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
b. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan uji [illegible]), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada form hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1.12.15 Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	**Memuaskan** Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	**Efektif** Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	**Cukup Efektif** Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	**Kurang Efektif** Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	**Tidak Efektif** Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKM 23 sebagai berikut:

Tabel 3. 1. 72-19 Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak

SK-7	7.1.7.1 Sasaran Kegiatan 7.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 22	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL (Indikatif)	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			85	-	73,5	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, (Maret 2024)

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi bantuan KONTRAK yang telah diberikan dan melakukan koordinasi terkait dengan monitoring dan evaluasi KKM Foki.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pengukuran keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,5% pada tahun 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan I.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NEE belum dapat dihitung. Perhitungan analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

4. Melakukan pemeriksaan kepada Kelompok Masyarakat yang telah menerima Bantuan KOMPAK dari BPSPL Pontianak
5. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output 2350.QEH.001 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 4.843.417 atau 10,20 % dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.19-30 Realisasi Anggaran IKU 23 Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2350.QEH.001.052 Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp 47.455.000	Rp 4.843.417 (10,20%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 4.843.417 (10,20%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan II yaitu memeriksa kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK.

IKU 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP (bersama Biro Umum dan PBJ) melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan dalam kebijakan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif dan Pengawasan penyelamatan arsip secara internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan Kearsipan.

Tabel 3.1.19-31 Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Nilai
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60

C	Kurang	>50 - 60
D	Sangat Kurang	0 - 50

Tabel 3.1.15-03 Capaian IKU SS BPSPL Pontianak

SP 3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 3.x	Nilai Pengawasan Internal Kesesuaian Lingkup BPSPL Pontianak (nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PKRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target s/d 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Target Capaian Tahunan			85	-		-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PKRL, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I 2024 belum dapat diketahui capaiannya, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Nilai ini IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL, karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan I tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan I belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam penyelesaian PK & DIPA dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU tersebut.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2067.EBA.962.001] Layanan Perkantoran, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 5.963.427 atau 15,25% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.495.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.11 IKU8 Realisasi anggaran IKU di Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Selisih
1.	[2067.EBA.962.001] Layanan Perkantoran, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 33.332.000	Rp 1.300.000 (4,22%)	-
TOTAL		Rp 47.495.000	Rp 1.300.000 (4,22%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU ini di triwulan II.

3.2 Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PKRL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagian besar indikator Kinerja diukur secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang disalurkan, semua unit kerja belum memiliki capaian dikarenakan penyaluran bantuan dijadwalkan akan dilakukan pada Triwulan II. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PKRL. Capaian IKU Manajemen Pengelolaan Tatakelola dari BPSPL Pontianak menjadi yang tertinggi diantara unit kerja lain dengan nilai sebesar 115,67% sementara unit kerja lain mendapatkan nilai 103,33%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 Nomor SP DIPA 032.07.2.477430/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.498.113.000. Realisasi anggaran dicatat dan dipantau secara online melalui di https://spanint.kemenkeu.go.id/. Pada Triwulan I tahun 2024 realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 2.603.563.966 atau 15,47% dari pagu anggaran. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 840.803.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 16,84%. Adapun pagu dan realisasi per kegiatan serta dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir (Rp)
1.	(2382) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	3.876.310.000	358.440.944	9,25	350.000.000
2.	(2383) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100.000.000	22.672.000	22,67	-
3.	(2384) Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	1.100.000.000	152.572.046	13,87	-
4.	(2387) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	10.571.803.000	2.078.477.984	19,66	-
5.	(5054) Pengelolaan dan Pemulihan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	850.000.000	34.878.934	4,10	-
	Total		16.498.113.000	2.603.563.966	15,47	

Sumber data: Aplikasi OMSPAN BPSPL Pontianak per 31 Maret 2024

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang dipergunakan untuk:
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel [illegible] Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Triwulan I	4.837.000.000	1.656.339.388	34,24
2.	(52) Barang	Triwulan I	11.508.113.000 (500.000.000*)	2.027.306.300	17,62
3.	(53) Modal	Triwulan I	750.000.000	60.400.000	7,62

*) Blokir Anggaran

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Omspan per tanggal 07 Maret 2020)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Februari/Triwulan I) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 33,6%, untuk belanja barang sebesar 61,58% dan untuk belanja modal 4,26%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan I sebesar Rp 1.656.339.388 (34,24%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan I sebesar Rp 2.027.306.300 atau 17,62% dari pagu anggaran Rp 11.508.113.000 (13,17% netto). Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa, pemeliharaan, perjalanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal Triwulan I sebesar Rp 60.400.000 (7,63%). Belanja modal digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sarpras Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 unit dan Penggantian Uang Persediaan (GUP) Untuk Keperluan Belanja Modal.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Hasilnya terlihat bahwa sebagian besar dari target/target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan I telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 yang diukur dengan nilai SAKIP dan aplikasi e-Monev sebesar 116% dengan kategori Memuaskan. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan I 2024 sebesar Rp 2.608.003.008 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 13.396.312.000. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 360.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,94%. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan I ini sebagai berikut:

1. Laporan BMN yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 100%.
2. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian 116,67%.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Diselesaikan dengan capaian 100%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan I tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan I masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 15 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengoptimalkan sinkronisasi proses revisi anggaran dalam rangka buka anggaran yang telah diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi SDM ASN sampai dengan penyesuaian gelar pendidikan, bagi ASN yang telah melakukan Tugas/Izin Belajar.
3. Mempertahankan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas bantuan pemerintah dengan melakukan pendampingan secara mandiri pada kelompok penerima bantuan dalam rangka pelaporan pemanfaatan bantuan yang telah diterima.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Selain itu juga perlu ditingkatkan sinergitas diantara seluruh unsur di BPSPL Pontianak, koordinasi dan komunikasi baik dengan Unit Pengelolaan Ruang Laut atau dengan stakeholder di daerah agar selalu terjaga bahkan ditingkatkan lagi sehingga kinerja BPSPL Pontianak akan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan dapat dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Surat Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 nomor B.1720/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024
2. Surat Penyampaian Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.
3. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor 2936.01.23/ITJ/TL.4.20/III/2024.

Contents

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak 73

3.2. Realisasi Anggaran 77

BAB IV PENUTUP 99

4.1. Kesimpulan 99

4.2. Rekomendasi 99

4.3. Tindak Lanjut 99

LAMPIRAN 100

Gambar 3.1.121: Kegiatan [illegible] [illegible] dan [illegible] Kinerja 81

Tabel 3.1.13-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 73
Tabel 3.1.13-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan I 73
Tabel 3.1.13-3. Capaian IKM 15 Nilai BPSPL Pontianak 75
Tabel 3.1.13-4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak 76
Tabel 3.1.13-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan I 76
Tabel 3.1.13-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak 77
Tabel 3.1.13-7. Realisasi Anggaran IKM 17 78
Tabel 3.1.13-8. Kategori Nilai IPM SAKIP 79
Tabel 3.1.13-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak 80
Tabel 3.1.13-10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan I 82
Tabel 3.1.13-11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak 83
Tabel 3.1.13-12. Efisiensi dan capaian IKM 19 Triwulan I 83
Tabel 3.1.13-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan I 84
Tabel 3.1.13-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak 85
Tabel 3.1.13-15. Efisiensi dan capaian IKM 20 Triwulan I 86
Tabel 3.1.13-16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak 87
Tabel 3.1.13-17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak 88
Tabel 3.1.13-18. Kategori Nilai [illegible] 89
Tabel 3.1.13-19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak 91
Tabel 3.1.13-20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan I 92
Tabel 3.1.13-21. Kategori Nilai Pengelolaan Keuangan 93
Tabel 3.1.13-22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak 93
Tabel 3.1.13-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan I 94
Tabel 3.2-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan I 97
Tabel 3.2-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023 98

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan I tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran, meskipun terlihat bahwa sebagian besar dari target/sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan I belum tercapai. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan I Tahun 2024 [illegible] sebesar [illegible]% dengan kategori [illegible]. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan I 2024 sebesar Rp 3.608.553.206 atau 19,47% dari pagu anggaran sebesar Rp [illegible]. Terdapat blokir anggaran sebesar Rp 250.000.000 sehingga realisasi anggaran dari pagu netto sebesar 19,84%. Untuk capaian indikator Kinerja yang telah tercapai di Triwulan I ini sebagai berikut:

1. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 100%.
2. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Terstandar dengan capaian 116,67%.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Diterbitkan dengan capaian 100%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan I tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan I masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 13 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengupayakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka membuka anggaran yang diblokir.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti yaitu telah dilakukan koordinasi secara aktif dan berkelanjutan terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Selain itu juga perlu ditingkatkan sosialisasi diantara seluruh unit kerja BPSPL Pontianak, koordinasi dan komunikasi baik dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut atau dengan Stakeholder di daerah agar selalu dijaga bahkan ditingkatkan terus sehingga kinerja BPSPL Pontianak akan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN

1. Surat Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 nomor B.1722/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024
2. Surat Penyampaian Capaian Prosentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024.
3. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor 2936.01.22/IT.2/PL.420/III/2024.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
JALAN [illegible] KEL. [illegible] KEC. [illegible] PONTIANAK [illegible]
TELEPON [illegible] FAKSIMILE [illegible]
LAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B.1120/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 19 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
di Kota Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2074/DJPRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 hal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2024 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak pada tautan http://[illegible].

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Sesditjen kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut
Pontianak,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA [illegible] KOTAK POS [illegible]
TELEPON [illegible] FAKSIMILE [illegible]
LAMAN [illegible] SUREL [illegible]

Nomor : B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.140/IV/2024 — 4 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Capaian Penilaian Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Berkenaan dengan pengukuran capaian kinerja Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghitungan poin [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dengan target [illegible] poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
   a. Dokumentasi kegiatan **[illegible]** yang diunggah dan dilengkapi [illegible] dan [illegible] serta [illegible] memenuhi kriteria [illegible] (what, where, when, who, why, and how), memiliki **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai.
   b. **Berbagi** informasi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sesuai tugas dan fungsi jabatan memiliki **bobot poin 1**, [illegible]
   c. **Berbagi** informasi [illegible] [illegible] atau **berbagi** dengan [illegible] [illegible] sesuai tugas dan fungsi jabatan memiliki **bobot poin 2**.

   Target [illegible] per triwulan dapat berasal dari 1 kategori [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible] rumus:

   $$\text{Kuantitas} = \frac{\text{Jumlah poin berbobot yang [illegible]}}{\text{Jumlah target poin berbobot yang [illegible]}} \times 100\%$$

3. Hasil [illegible] Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan I [illegible] sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal PKRL,
Sekretaris Ditjen PKRL,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Dirjen PKRL

Lampiran Surat
Nomor : B.[illegible]/PKRL.1/TU.140/IV/2024
Tanggal : [illegible] April 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal PKRL
Sekretaris Ditjen PKRL

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Lampiran 2 Surat
Nomor : [illegible]
Tanggal : 4 April 2024

A. Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

NO.	Satker	Target (%)	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1	BPSPL Padang	54	133,33	-	-	-	133,33
2	LKKPN Pekanbaru	54	133,33	-	-	-	133,33
3	LPSPL Serang	54	133,33	-	-	-	133,33
4	BPSPL Pontianak	54	116,67	-	-	-	116,67
5	BPSPL Makassar	54	133,33	-	-	-	133,33
6	BPSPL Denpasar	54	133,33	-	-	-	133,33
7	BKKPN Kupang	54	133,33	-	-	-	133,33
8	LPSPL Sorong	54	133,33	-	-	-	133,33

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan I Tahun 2024

1. BPSPL Padang

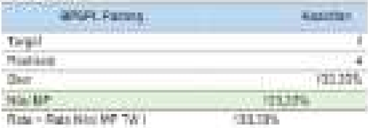

BPSPL Padang		Keterangan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,33%
Nilai MP	133,33%	
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%	

2. LKKPN Pekanbaru

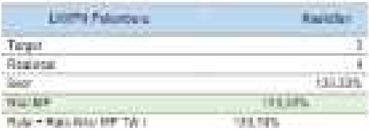

LKKPN Pekanbaru		Keterangan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,33%
Nilai MP	133,33%	
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%	

3. LPSPL Serang

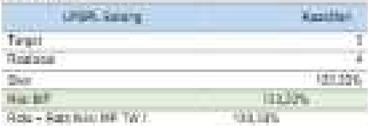

LPSPL Serang		Keterangan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,33%
Nilai MP	133,33%	
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%	

4. **BPSPL Pontianak**

BPSPL Pontianak	Kegiatan
Target	3
Realisasi	3,5
Skor	116,67%
Nilai MP	116,67%
Rata - Rata Nilai MP TW I	116,67%

5. **BPSPL Makassar**

BPSPL Makassar	Kegiatan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%

6. **BPSPL Denpasar**

BPSPL Denpasar	[illegible]	Kegiatan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133,33%
Nilai MP		133,33%
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%	

7. **BKKPN Kupang**

BKKPN Kupang	Kegiatan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%

8. **LPSPL Sorong**

LPSPL Sorong	Kegiatan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133,33%
Nilai MP	133,33%
Rata - Rata Nilai MP TW I	133,33%

a.n. Direktur Jenderal PRL,
Sekretaris Ditjen PRL

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA [illegible]
TELEPON [illegible] FAKSIMILE [illegible]
LAMAN [illegible]

BERITA ACARA [illegible]
[illegible]
NOMOR [illegible]

[illegible]

Dibuat oleh:
[illegible]

1. Nama : [illegible], S.T., M.Si.
   NIP. [illegible]
   Jabatan : [illegible]

Tim Pengawasan:

1. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Pengendali [illegible]
2. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Pengendali Teknis
3. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Ketua Tim
4. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Anggota Tim
5. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Anggota Tim
6. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Anggota Tim
7. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Anggota Tim
8. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Anggota Tim
9. Nama : [illegible]
   NIP. [illegible]
   Jabatan : Anggota Tim
10. Nama : [illegible]
    NIP. [illegible]
    Jabatan : Anggota Tim
11. Nama : [illegible]
    NIP. [illegible]
    Jabatan : Anggota Tim
12. Nama : [illegible]
    NIP. [illegible]
    Jabatan : Anggota Tim

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]

[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) [illegible] FAKSIMILE (021) [illegible]
LAMAN [illegible]

Nomor : [illegible] [illegible]
Sifat : [illegible]
Lampiran : [illegible]
Hal : [illegible]

Yth. [illegible]
[illegible]

[illegible]

NO	URAIAN	[illegible]		
		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
A.	[illegible]			
	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B.	[illegible]			[illegible]
	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2. [illegible]	0	0	0
	3. [illegible]	0	0	0
	4. [illegible]	0	0	0
C.	[illegible]			0
	1. [illegible]	0	0	0
	2. [illegible]	0	0	0
	3. [illegible]	0	0	0
	4. [illegible]	0	0	0

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

BPSPL

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

ERIAN KELAU
REKTORA

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Sc.

Penyusun:

Gradiano Raymond P., S.Pi., M.Si.

Amrul Fathu Rohman, S.Si.

Vita Pitriana Maryasari, S.Si.

Ratih Titisunara Dhani, S.Kel.

Kontributor:

Subbagian Umum BPSPL Pontianak

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada masyarakat dan Bangsa yang kita cintai Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan II Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Dalam itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder terkait.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan Kerjasama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 15 Juli 2024
Kepala BPSPL Pontianak

Ditandatangani secara elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Sc.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui https://kinerjaku.kkp.go.id. Proses perhitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas **12 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja Manajerial (IKM)** dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) IKU+IKM atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II yaitu 103,24% (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang terukur pada Triwulan II yaitu:

1. Penyaluran Bantuan kompak dengan capaian sebanyak 1 kelompok dari target 1 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian sebesar 92,55 dari target sebesar 82 sehingga tercapai 112,87%.
3. Nilai IP ASN dengan capaian sebesar 86,13 dari target sebesar 85 sehingga tercapai 101,33%.
4. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 1 laporan sehingga tercapai 100%.
5. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian 116,67 dari target 84 sehingga tercapai 130%.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian 100% dari target 93% sehingga tercapai 100%.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 15.296.112.000. Realisasi anggaran pada Triwulan II berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 Juni 2024 yaitu Rp 6.813.864.431 atau 44,55% dari pagu total. Berdasarkan hasil tersebut pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi [illegible]. Hal ini dikarenakan masih belum ada dasar hukum yang kuat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Pelayanan Perizinan di Perairan Darat.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan III dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biro Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu telah mengusulkan untuk buka blokir anggaran pada RO A.001. Anggaran sudah dibuka pada bulan Juni dan berubah menjadi [illegible]. Selain itu, peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat.

Daftar Isi

Tim Penyusun ... i
Kata Pengantar ... ii
Ringkasan Eksekutif ... iii
Daftar Isi ... iv
Daftar Gambar ... vi
Daftar Tabel ... vii
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ... 1
1.1.1. Kedudukan ... 1
1.1.2. Tugas ... 1
1.1.3. Fungsi ... 1
1.2. Susunan Organisasi ... 3
1.3. Keragaman SDM ... 4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ... 4
1.4.1. Potensi ... 4
1.4.2. Permasalahan ... 5
1.5. Dasar Hukum ... 6
1.6. Sistematika Penyajian ... 6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA ... 8
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 ... 8
2.1.1. Visi ... 8
2.1.2. Misi ... 8
2.1.3. Tujuan ... 10
2.1.4. Sasaran Strategis ... 10
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 ... 11
2.3. Metode Pengukuran Kinerja ... 16
2.3.1. Formulasi Pengukuran ... 16
2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja ... 16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ... 18
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak ... 21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Sistem [illegible] Biota Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak ... 34

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 29

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 33

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 39

3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan konsolidasi kemitraan, jejaring, dan kerjasama untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 41

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak ... 53

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 58

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak ... 69

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 71

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak.73

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak ... 110

3.2. Realisasi Anggaran ... 114

BAB IV PENUTUP ... 115

4.1. Kesimpulan ... 115

4.2. Rekomendasi ... 116

4.3. Tindak Lanjut ... 116

LAMPIRAN ... 117

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 3
Gambar 1.1.2-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak ... 4
Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) ... 18
Gambar 3.1.1-2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II ... 19
Gambar 3.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II ... 20
Gambar 3.1.1-4. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2022 ... 23
Gambar 3.1.2-1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya ... 25
Gambar 3.1.2-2. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya ... 26
Gambar 3.1.2-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang ... 27
Gambar 3.1.2-4. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang ... 28
Gambar 3.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut ... 29
Gambar 3.1.2-6. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut ... 29
Gambar 3.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan ... 30
Gambar 3.1.2-8. Realisasi Anggaran IKU 1 Triwulan II ... 30
Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL ... 32
Gambar 3.1.3-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut ... 32
Gambar 3.1.3-3. Sosialisasi KKPRL ... 33
Gambar 3.1.3-4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan II ... 34
Gambar 3.1.4-1. [illegible] ... 36
Gambar 3.1.4-2. Pengamatan Populasi Pesut ... 38
Gambar 3.1.4-3. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu ... 39
Gambar 3.1.4-4. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting ... 39
Gambar 3.1.4-5. Survei Sosial Ekonomi ... 40
Gambar 3.1.4-6. Grafik Profil Responden Survei Sosial Ekonomi ... 40
Gambar 3.1.4-7. Grafik Pengetahuan Jenis Ikan Dilindungi ... 41
Gambar 3.1.4-8. Grafik Persepsi Manfaat Kawasan Konservasi ... 41
Gambar 3.1.4-9. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi ... 43
Gambar 3.1.4-10. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan II ... 45
Gambar 3.1.5-1. Realisasi Usulan Penetapan KKPD di Kalimantan Utara ... 46
Gambar 3.1.5-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan II ... 46
Gambar 3.1.6-1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama ... 48
Gambar 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 hingga Triwulan II ... 49
Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Komitmen ... 51
Gambar 3.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan II ... 52
Gambar 3.1.7-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan II Tiap Tahun ... 54
Gambar 3.1.7-2. Serah Terima Bantuan KOMPAK ... 55
Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II ... 56
Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat ... 59
Gambar 3.1.8-2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar ... 61
Gambar 3.1.8-3. Grafik Penanganan Biota Terdampar ... 61
Gambar 3.1.8-4. Sosialisasi Biota Dilindungi ... 62
Gambar 3.1.8-5. Bimtek Penanganan Biota Dilindungi ... 62
Gambar 3.1.8-6. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat ... 63
Gambar 3.1.8-7. Dokumentasi pengukuran ... 63
Gambar 3.1.8-8. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TP Sungai Kakap ... 63
Gambar 3.1.8-9. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar ... 64
Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Pengukuran ... 64

Gambar 3.1.8.11. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 68
Gambar 3.1.9.1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi 68
Gambar 3.1.9.2. Pemeriksaan SAJ 69
Gambar 3.1.9.3. Grafik [illegible] 70
Gambar 3.1.10.1. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 73
Gambar 3.1.11.1. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya 75
Gambar 3.1.11.2. Grafik data pengumpulan sampel 76
Gambar 3.1.11.3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang 77
Gambar 3.1.11.4. Grafik data pengumpulan sampel 77
Gambar 3.1.11.5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 78
Gambar 3.1.11.6. Grafik data pengumpulan sampel 78
Gambar 3.1.11.7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan 79
Gambar 3.1.11.8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 79
Gambar 3.1.12.1. Nilai IKPA Tahun 2024 82
Gambar 3.1.12.2. Tren Nilai IKPA 83
Gambar 3.1.12.3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 88
Gambar 3.1.12.4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 89
Gambar 3.1.12.5. Tren IP ASN 91
Gambar 3.1.12.6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 93
Gambar 3.1.12.7. Kegiatan Evaluasi AKIP 96
Gambar 3.1.12.8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 97
Gambar 3.1.12.9. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II 107

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 11
Tabel 2.2-2 Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14
Tabel 3.1.1.1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 22
Tabel 3.1.1.3. Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan II 23
Tabel 3.1.2.1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 24
Tabel 3.1.2.2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya 26
Tabel 3.1.2.3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang 27
Tabel 3.1.2.4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut 28
Tabel 3.1.2.5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan 29
Tabel 3.1.2.6. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan II 30
Tabel 3.1.3.1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 31
Tabel 3.1.3.2. Jumlah Sertifikasi Teknis KKPRL Triwulan II 32
Tabel 3.1.3.3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan II 33
Tabel 3.1.4.1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria 35
Tabel 3.1.4.2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA 35
Tabel 3.1.4.3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 35
Tabel 3.1.4.4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 36
Tabel 3.1.4.5. Hasil Pengamatan Komunitas Reef 38
Tabel 3.1.4.6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mataram Hulu 39
Tabel 3.1.4.7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan II 42
Tabel 3.1.5.1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 44
Tabel 3.1.5.2. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan II 45
Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 47
Tabel 3.1.6.2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan II 48
Tabel 3.1.6.3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 50
Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 53
Tabel 3.1.7.2. Realisasi IKU 8 Triwulan II 55
Tabel 3.1.7.3. Realisasi IKU 9 Triwulan II 56
Tabel 3.1.8.1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak 57
Tabel 3.1.8.2. Realisasi IKU 10 Triwulan II 64
Tabel 3.1.9.1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 66
Tabel 3.1.9.2. Realisasi IKU 11 Triwulan II 70
Tabel 3.1.10.1. Capaian IKU 12 PIJP BPSPL Pontianak 71
Tabel 3.1.10.2. Capaian IKU 12 Triwulan II 72
Tabel 3.1.11.1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak 74
Tabel 3.1.11.2. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL 75
Tabel 3.1.11.3 Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Singkawang 76
Tabel 3.1.11.4. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kab. Tanah Laut 77
Tabel 3.1.11.5. Jumlah Nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Balikpapan 78
Tabel 3.1.11.6. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan II 79
Tabel 3.1.12.1. Capaian IKK 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 81
Tabel 3.1.12.2. Realisasi Anggaran IKK 14 Triwulan II 84
Tabel 3.1.12.3. Capaian IKK 15 Nilai BPSPL Pontianak 85
Tabel 3.1.12.4. Capaian IKK 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak 88
Tabel 3.1.12.5. Realisasi Anggaran IKK 16 Triwulan II 89

Tabel 3.1.13.6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak....89
Tabel 3.1.13.7. Realisasi Anggaran IKM 17....92
Tabel 3.1.13.8. Kategori Nilai IPM SAKIP....93
Tabel 3.1.13.9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak....94
Tabel 3.1.13.10. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan III....97
Tabel 3.1.13.11. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak....98
Tabel 3.1.13.12. Efisiensi dan capaian IKM 19 Triwulan III....99
Tabel 3.1.13.13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan III....99
Tabel 3.1.13.14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak....100
Tabel 3.1.13.16. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak....102
Tabel 3.1.13.17. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak....104
Tabel 3.1.13.18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah....105
Tabel 3.1.13.19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak....106
Tabel 3.1.13.20. Realisasi Anggaran IKM 23 Triwulan III....107
Tabel 3.1.13.21. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan....108
Tabel 3.1.13.22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak....108
Tabel 3.1.13.23. Realisasi Anggaran IKM 24 Triwulan III....109
Tabel 3.1.13.1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain....111
Tabel 3.25.1.13.1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III....113
Tabel 3.1.122.3.1.13.2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2022....114

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah unit pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemakmuran bagi masyarakat, banyak upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud barang, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya barang, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) No. 64/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 67 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sebagaimana tertuang Keputusan Pengelolaan Ruang Laut No. 67 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan pencegahan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
f. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

g. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
h. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, sarana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah antara lain sebagai berikut:

a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didesentralisasikan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan terutama spesifik; Koleksi dan breeding; Memonitor nilai dan kecenderungan konservasi habitat dan jenis internasional; Secara ekologi berlaku lintas Negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional;
d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (*Convention on Biological Diversity*), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHS (*World Heritage Site*), dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/diserahkan kepada daerah (kewenangan pusat), serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
f. Kehadiran dan fasilitas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti pencapaian tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*), antar lain, mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan pelestarian fungsi serta mitra pesisir dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat atau BPSPL Pontianak memiliki satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wilayah kerja dari BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

Gambar 1.2.1 Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, keuangan, dokumentasi dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengendali Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK).

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tersebut, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian; (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat; (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajemen yang melaksanakan instruksi/ kinerja Manajemen yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum.

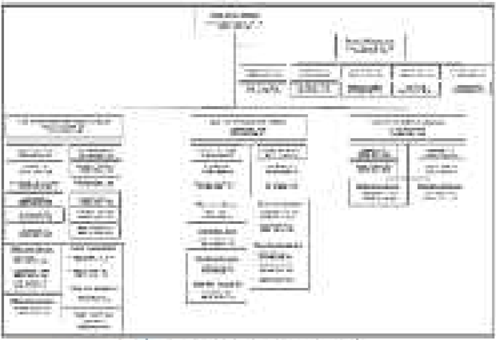

Gambar 1.1.A.B Susunan Organisasi BPSPL Pontianak

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan IV Tahun 2022 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 70 orang terdiri dari 48 ASN (44 PNS dan 4 PPPK) dan 22 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun personel PPNPN yang berjumlah 21 orang merupakan Satpam, Pramubakti dan Petugas Kebersihan, Pramusaji/Petugas Pelayanan, dan Pengemudi. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam mempengaruhi kinerja BPSPL Pontianak. Untuk komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik di bawah sebagai berikut:

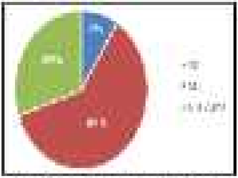

Gambar 1.1.B.B Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 743.330 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 3?

[illegible] dengan total panjang garis pantainya mencapai 8.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 776 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut existing dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini perlu dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.

e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti bioteknologi laut dan industri garam sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2023 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
i. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii. Kegiatan Pendukung;
viii. Realisasi Anggaran:
ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja
   b. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan utamanya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperbaiki dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Selain menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2020 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam penyusunan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL".

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP berperan melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3 Tujuan

Mengacu pada misi di atas, BPSPL Pontianak menetapkan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   c. Meningkatkan pengelolaan dan pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di tingkat wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:

   a. Meningkatnya [illegible] laut dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Terkendalinya kawasan [illegible] di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya jenis ikan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya jenis ikan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya jejaring, kemitraan kerjasama dan konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pendayagunaan dan pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan terwujudnya pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah berbasis pada Balanced Scorecard (BSC). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 indikator kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
[SK-1] Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-1] Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
Tidak digunakan	[SK-2] Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-2] Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-3] Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-3] Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-4] Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-4] Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-5] Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-5] Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-6] Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-6] Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	[SK-7] Meningkatnya pelaksanaan monev dan kontribusi terhadap jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-7] Meningkatnya nilai RMBP BPSPL Pontianak	[SK-8] Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
[SK-8] Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	[SK-9] Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	[SK-10] Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	[SK-11] Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	[SK-12] Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sedangkan untuk perubahan IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. IKK Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023

IKK Tahun 2023	IKK Tahun 2024
[IKK-1] Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)	Tidak digunakan, diganti dengan [IKK-1] Dokumen operasional dari perizinan pemanfaatan ruang laut yang diawasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

IKU Tahun [illegible]	IKU Tahun [illegible]
[IKU-2] Kerjasama jejaring aktivitas konservasi yang dibentuk di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak digunakan
Tidak Terdapat IKU	[IKU-2] Sasaran yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Sasaran)
[IKU-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IKU-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diberikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat IKU	[IKU-4] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)
[IKU-4] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan, pengendalian, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKU-5] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan, pengendalian, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKU-5] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKU-6] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKU-6] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)	[IKU-7] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)
[IKU-7] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKU-8] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IKU-8] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKU-9] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-9] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKU-10] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak Terdapat IKU	[IKU-11] Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BPSPL Pontianak (Inovasi)
[IK-10] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	[IKU-12] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-11] Nilai akuntabilitas kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak digunakan, diganti dengan [IKU-13] Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-12] Laporan BMN yang dibuat Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IKU-14] Laporan BMN yang dibuat Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-13] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	[IKU-15] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

IKU Tahun 2023	IKU Tahun 2024
[IK-14] Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	[IKK-16] Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
[IK-15] Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IKK-17] Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
[IK-16] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IKK-18] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Renstra 2023 dan Revisi 2024

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3-3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp 000)	2.063.000
2. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	100
3. Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Dokumen rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan ruang laut yang diterbitkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	8
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5. Terfasilitasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6. Meningkatnya jejaring kerja konservasi dan kerja sama kemitraan jejaring, dan kemitraan untuk kawasan konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kerjasama konservasi yang dibinakan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
	7. Kemitraan konservasi yang dibinakan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	3
	9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan dilindungi prioritas yang dilakukan penataan (penyadartahuan, perbaikan habitat, aksi pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan pengendalian pemanfaatan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,75
	15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	90
	16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	61

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	19. Laporan BMN yang akurat lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	4
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	74
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah lengkap dan disampaikan (%)	40
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	40
	24. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	55

Sumber data: BPSPL Pontianak : LAPKIN, Maret 2020

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1. Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.2.2. Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
   b. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas (level n sampai ke level 0); dan

c. Pencapaian kinerja adalah menyajikan akumulasi/rata-rata/rata-rata tertimbang/angka langsung dari pencapaian kinerja terakhirnya.

2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Target Indikator Kinerja, Rencana aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara perhitungan, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menterjemahkan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Menetapkan capaian (score) setiap IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (http://simpkin.kkp.go.id/kinerja/)
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat se-Eselon I dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja dibawahnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulan/semester/tahunan berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKK). Perhitungan IKU dan IKK diatur berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

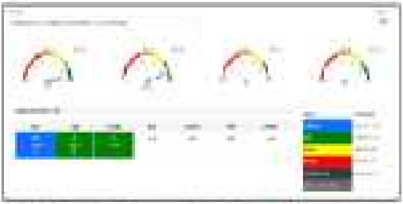

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu 108,38% (masuk kategori Biru = Istimewa), mengalami penurunan sebesar 9,74% dari Triwulan I, NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan II) sebesar 118%. Terdapat penurunan 10,75% dari Triwulan II Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena penurunan capaian dari target dan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 34 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 6 indikator yang memiliki periode penilaian Triwulan II. Terdapat 6 indikator Kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan II dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

[illegible]

[illegible]

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2019 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan ([illegible]) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya ([illegible]) + Pendapatan Penerbitan Lainnya ([illegible]) yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

PNBP [illegible] = PNBP [illegible] + PNBP [illegible] + PNBP [illegible]

dimana,

PNBP [illegible] = SAJI DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda

Keterangan:

SAJI DN	=	Pungutan atas Dokumen SAJI DN *) + Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan **)
Surat Rekomendasi	=	Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan
PNBP [illegible]	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perikanan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan
PNBP [illegible]	=	Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
PNBP [illegible]	=	Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:
*) = Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 0%
**) = Dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang diberikan

Formulasi Penghitungan Pungutan:

Pungutan Pengambilan	=	Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Pungutan Perdagangan	=	Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Denda	=	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Rekomendasi

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak								
IKU	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rupiah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2.575.820.905	Periode Capaian Tahunan			2.000.000.000	0	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Dit. [illegible], Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian nilai PNBP Triwulan II (per tanggal buku 1 Januari – 30 Juni 2024) yaitu sebesar Rp1.234.323.077 atau 64,20% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBP Triwulan II tahun 2024 (Rp1.234.323.077) mengalami peningkatan sebesar 114,47% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBP Triwulan I tahun 2023 (Rp1.125.220.402).

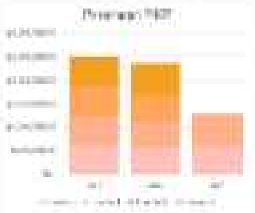

Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I tahun dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 – 2024 karena IKU tersebut memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja Triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024. Namun, progres nilai PNBP Triwulan II tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 64,20% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 64,20% dari target tahunan. Hal itu didukung oleh penggunaan aplikasi dan komputer oleh petugas pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Kemudian analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, hasil perbandingan dari capaian dan NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk mencatat dan memungut PNBP yang efektif.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Januari – Maret 2024. Selain itu ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP hingga Triwulan II 2024.

Tabel 3.7.1-8 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan II

Jenis PNBP	Januari	Februari	Maret
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendapatan Perizinan Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total TW II			[illegible]

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan II Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan IKU sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Juli – September 2024, pemungutan PNBP untuk layanan dan izin yang diterbitkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

3.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas Balai [illegible]. Tenaga kerja berasal dari penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Menghitung:

TK[illegible] = TK[illegible] + TK[illegible] + TK[illegible] + TK[illegible]

Keterangan:

TK[illegible] = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak

TK[illegible] = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SKKB	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target TW 2024	% Capaian thd Target TW	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			320	0	[illegible]	[illegible]		[illegible]

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada kinerja IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang, Kab. Tanah Laut dan Kota Balikpapan. Progres jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 320 nelayan tradisional ([illegible]%) dari target sebesar 320 orang yang tersebar merata setiap lokasi masing-masing 80 orang di empat lokasi Bulan Cinta Laut.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra BPSPL 2020-2024 yaitu sebanyak 5 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Kinerja Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan proses kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan menghemat kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 3 Mei 2024 dengan sosialisasi dan identifikasi nelayan. Kegiatan ini melibatkan 88 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 25 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 63 orang). Kegiatan ini juga melibatkan tenaga pengolah sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Penimbangan Sampah serta Pemantauan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3-4. Jumlah nelayan yang terlibat dalam Kegiatan ISC di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jungkat Besar	KUB Galak Sepat	10
	KUB Kakap Intan	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Lumbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei 20 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni tata cara pengumpulan sampah, tata cara penanganan sampah dan prospek usaha pengolahan sampah dan mitra dan evaluasi pelaksanaan ISC, dan 57,5% [illegible].

Gambar 3.1.3-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

- Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2023 didapatkan sebanyak 33.947,8 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa nonplastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.868.000. KUB Berembang Laut II menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 9.879,2 kg.

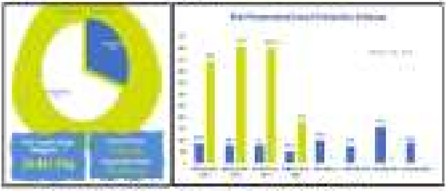

Gambar 3.1.3-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya

d. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 78 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 25 orang, Kel. Naram sebanyak 33 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengumpulan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.3.3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapuk Besar	KUB Surya Pertama	9
	KUB Sumber Rejeki	5
	KUB Nelayan Mutiara	11
Kel. Naram	KUB Naram Jaya Abadi	33
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bersatu	10
	KUB Bersahaja	10

e. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 15 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.3-5. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.850,45 kg total sampah terkumpul. Sebanyak [illegible] sampah berupa nonplastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 67% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.333.000. KUB Nelayan Bersatu menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.333 kg.

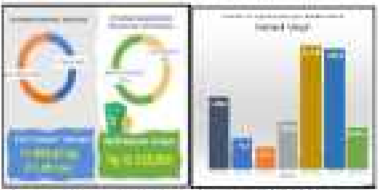

Gambar 3.1.9-4. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

c. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 23 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Rakau sebanyak 76 orang dan Desa Kemuning Lajung sebanyak 4 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Bersinar Bersama. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.9-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Rakau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	12
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Cinta Lestari	34
Desa Kemuning Lajung	KUB Bina Harapan Bersama	4

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, penilaian sampah, elemen utama pengelolaan sampah, teknologi kapal pengumpul sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.9-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang selama Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.849,8 kg total sampah terkumpul sebanyak 2.970 kg sampah berupa [illegible] dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.196.395.

Gambar 3.1.3-4. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 68 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Manggar) sebanyak 68 orang. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Manggar	KUB Minasari	20
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Sabaya	12
	KUB Lau Bolobah Fajar	12
	KUB Amanah Manggar	12

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Materi yang disampaikan yaitu upaya penanganan sampah, analisis usaha pengolahan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.3-5. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4044.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-6 Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4044.QDD.001.302] Kaji Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp500.000.000	Rp 413.750.000 (82,75%)	-
TOTAL		Rp500.000.000	Rp413.750.000 (82,75%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp. Rp413.750.000 atau 82,75% dari pagu anggaran sebesar Rp 500.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.

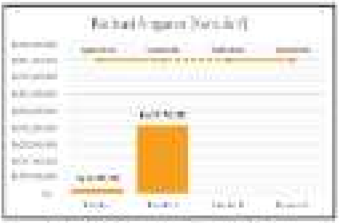

Gambar 3.1.3-6 Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan I

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Melakukan kegiatan evaluasi dan pemetaan Sebaran Habitat Tutupan Biota Laut. Kegiatan pemetaan dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Survey BDL dengan melibatkan nelayan lokal, mitra pesisir dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3.1 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang dikawal di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang dikawal adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan kesesuaian persetujuan/perizinan yang diberikan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang existing, dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang telah dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang disebabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.31. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SS-3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-5	Dokumen rekomendasi/evaluasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang dikeluarkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya: koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi lapangan permohonan KKPRL di Kalimantan Utara, Sosialisasi KKPRL di Kota Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian perizinan sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen rekomendasi/evaluasi perizinan pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah terbit regulasi terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang tata, kewajiban dan sanksi bagi pelaku pemanfaatan ruang laut. Selain itu BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan 1 sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan pertemuan teknis secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut**

Pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 19 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 14 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Barat sebanyak satu pemohon.

Tabel 3.1.3-6. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan II

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Barat	1	April
Kalimantan Timur	14	April - Juni
Kalimantan Utara	4	Mei - Juni
Total	**19**	**April - Juni**

Kegiatan ini juga dilakukan tindak lanjut dengan Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL. Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL PT Sinar Pesisir Tanggon di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada tanggal 6 Juni 2024.

Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. **Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang laut sebanyak 19 subjek yang berada di Kalimantan Tengah (8 subjek), Kalimantan Selatan (2 Subjek), Kalimantan Timur (2 Subjek) dan Kalimantan Utara (7 Subjek). Sebanyak 2 subjek merupakan Lembaga pemerintahan (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Pangkalan TNI Angkatan Laut). Sementara 17 subjek lainnya merupakan perusahaan dan perseorangan.

Gambar 2.1.2-2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. **Sosialisasi KKPRL**

BPSPL Pontianak sebagai UPT Lingkup Ditjen PKRL menghadiri undangan sosialisasi KKPRL yang diselenggarakan oleh Tim kerja Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut, Dit. PRL kepada Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO). IPERINDO merupakan asosiasi yang beranggotakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berupa galangan kapal di seluruh Indonesia. Sosialisasi yang disampaikan meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengawasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Gambar 2.1.2-3. Sosialisasi KKPRL

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya: koordinasi pelaksanaan pelayanan ruang laut di Jakarta Pusat pada tanggal 2 s.d. 5 April 2024 dan sinkronisasi pelaksanaan KKPRL di Makassar pada tanggal 14 s.d. 16 April 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3364.PBT.003] Rekomendasi kegiatan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.2-2. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan I

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket
1.	[3364.PBT.003.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Ruang	Rp 174.774.000	Rp 34.380.390 (19.42%)	-

2.	[2564.PB1.003.043] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 276.224.000	Rp 100.711.140 (34.83%)	-
3.	[2564.PB1.003.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 180.000.000	Rp 127.948.197 (71.22%)	-
TOTAL		Rp 1.190.000.000	Rp203.031.437 (16.85%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp253.031.437 atau 24.48% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.196.360.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

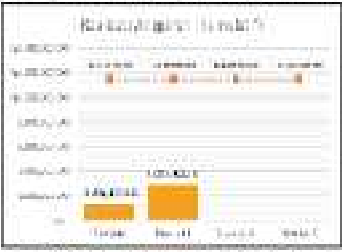

Gambar 3.1.34: Grafik Realisasi Anggaran KU 3 hingga Triwulan II

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi serta pemrosesan KKPRL lanjutan untuk bulan Juli – September, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 43.447,80 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

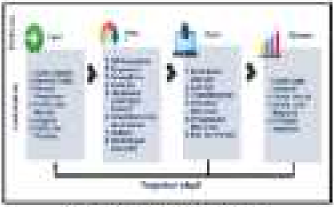

Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	15,00	9
Proses	8	15,00	12
Output	6	15,00	13
Outcome	4	20,00	8
Total	24		42

Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi

Kriteria	NI	NMaks	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	–	1070	–	0,20	–
Proses	–	420	–	0,35	–
Output	–	420	–	0,30	–
Outcome	–	420	–	0,15	–
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:
Nilai Indikator (NI) : Hasil pengamatan/skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (NMaks) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (NK) : NI / NMaks X 100%
Bobot Kriteria (BK) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak) : NK x BK
Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<40%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan tatanan kawasan sudah ditetapkan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
≥40-80%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan sebagian tujuan pengelolaan sudah tercapai
>80%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU II BKSDA Kaltim

SS-4	Terjaganya keragaman jenis [illegible] dan [illegible] yang [illegible], [illegible] dan [illegible] pada BKSDA Kaltim								
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi nasional di wilayah kerja BKSDA Kaltim (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BKSDA Kaltim		Renstra DJKSDAE 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Capaian thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
35,66	Periode Capaian Tahunan			1%	-	-	-	17,5 (%)	-

Sumber data: BKSDA Kaltim dan DJKSDAE, Maret 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya: survey jenis satwa dilindungi, monitoring kualitas air, penetapan ikan ekonomis penting, survei sosial ekonomi dan sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kawasan Mahakam Hulu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 36,44%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 50,44%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

Target jangka menengah terkait dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,3 juta Ha di tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam perjanjian kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.303 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 30% di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut sudah tercapai di tahun 2023 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 36,44%. Capaian Kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak. Hal itu dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu perlu peningkatan alat penunjang survei terutama dalam monitoring Pesut mahakam. Kendala tersebut telah diminimalisir dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan menghitung nilai NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan alokasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan II yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam pada periode April – Juni 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI antara pada pukul 08.00 – 16.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari atas kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.

Gambar 3.1.4-5 Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 43 ekor. Individu terbanyak yang dijumpai berada di Hulu Rantau Aya sebanyak 14 ekor. Sementara individu paling sedikit dijumpai di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 16 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pesut yaitu pukul 18.37.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	Batupukimai	6	18.13	Sighting
2.	Sungai Kedang Rantau	2	18.37	Sighting
3.	Muara Wis	4	17.58	Sighting
4.	Hulu Rantau Aya	14	15.48	Sighting
5	Muara Danau Semayang	5	08.17	Sighting
6	Muara Pela	3	15.21	Sighting
7	Ulang Wis	2	15.28	Sighting

Pada hasil stasiun pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan berada pada baku mutu sungai dan sejenisnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukkan nilai suhu berkisar antara 30,4 – 31,0. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,7 – 3,2. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,5 – 7,86. Sementara nilai TDS berkisar antara 18 – 49 ppm.

b. **Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Kegiatan survei monitoring kualitas air di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada periode bulan April – Juni 2024. Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 10 titik stasiun. Parameter yang diukur meliputi kecepatan arus, kejernihan, suhu air, konduktivitas, oksigen terlarut, dan total padat terlarut. Alat yang digunakan yaitu Water Quality Checker, kamera dan GPS.

Gambar 3.1.4-3. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang [illegible] di tahun 2024 diketahui bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di bawah ambang kelayakan baku mutu kelas dua menurut PP Nomor 22 tahun 2021.

Tabel 3.1.4-4. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Parameter	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Suhu (°C)	33,8	27,4	29,59
pH	6,85	5,6	6,54
TDS (mg/L)	39,5	13,5	24
DO (mg/L)	15,8	2,6	5,87
DC (S/m)	78,4	24,3	45,23
Kuat Arus (m/s)	1,90	0	0,76

c. **Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Survei ikan ekonomis penting dilakukan di sepanjang perairan Desa [illegible], Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara pada tanggal [illegible] Mei 2024 dengan mengambil sampel yang berasal dari nelayan setempat. Sampel ikan kemudian diukur secara morfometrik dengan mencatat kolom parameter yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang hingga pangkal ekor, panjang hingga [illegible] ekor, jari-jari keras pada sirip, jari-jari lemah mengeras pada sirip, jari-jari lemah pada sirip, berdasarkan sirip Dorsal, Pectoral, Ventral, Anal, dan Caudal (D-P-V-A-C). Selain itu, pengambilan gonad, dan penimbangan bobot TKG. Selain itu, tim juga mendokumentasikan alat tangkap apa yang digunakan.

Gambar 3.1.4-4. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

[illegible] Survei Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 19 April (Desa Liang Ilir, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara), 20 Mei (Desa Pela, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara), dan 18 Juni (Desa Liang Ilir, Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara). Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (depth interview) dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku perikanan dan pariwisata sebagai objek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Objek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara purposive sampling, sehingga sampel data dianggap sebagai pemaktian yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Responden yang ditarget untuk kegiatan wawancara adalah minimal sejumlah 30 hingga maksimal 40 orang.

Gambar 3.1.4-45. Survei Sosial Ekonomi

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden yang berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu adalah laki-laki (73,0%) dengan perempuan sebanyak 27,0%. Kebanyakan responden ini berprofesi sebagai nelayan dan usia mereka berkisar antara 25 hingga 65 tahun. Pendidikan mereka sebagian besar hanya sampai SD, dilanjutkan dengan SMP dan SMA. Pendapatan dari penangkapan ikan yang merupakan sumber utama penghasilan berfluktuasi tergantung musim dan hasil tangkapan. Nelayan menjual ikan seperti haruan, sepat siam, lais, biawan, baung, patin, dan udang kepada pengepul untuk tujuan domestik. Nelayan budidaya terutama mengembangbiakkan ikan patin, nila, dan baung.

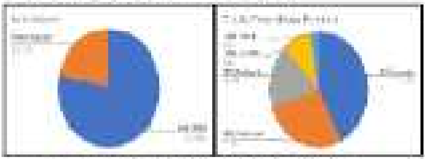

Gambar 3.1.4-46. Grafik Profil Responden Survei Sosial Ekonomi

Sekitar 50,0% masyarakat mengetahui tentang perlindungan pesut dan jenis ikan lain seperti Belida, namun hanya 40% yang memahami peraturan dan regulasi yang berlaku. Masyarakat mengenal biota dilindungi seperti Belida Kalimantan (Chitala borneensis) dan Belida Jawa (Notopterus notopterus), namun sebanyak 57,5% memahaminya untuk konsumsi atau dijual. Ikan Air Tawar ([illegible]) dan Sidat (*Anguilla sp.*) serta Ikan Pesa (*Schismatorhynchos heterorhynchos*) umumnya hanya tertangkap sebagai bycatch.

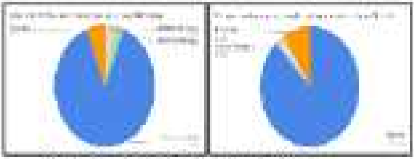

Gambar 3.3.47. Grafik Pengetahuan Jenis Ikan Dilindungi

Sekitar 71,5% responden belum mengetahui keberadaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Setelah diberi penjelasan, 75% memandangnya positif, meskipun hanya 63% yang benar-benar memahami [illegible] positifnya. Mayoritas responden juga menyadari bahwa penangkapan ikan ilegal merusak ekosistem, tetapi hanya 58,1% yang [illegible] dari [illegible]. Persepsi tentang manfaat jangka panjang kawasan konservasi bervariasi, dengan 84,5% setuju bahwa kawasan konservasi meningkatkan kualitas hidup, namun ada yang skeptis karena pembatasan akses dan dampak ekonomi negatif.

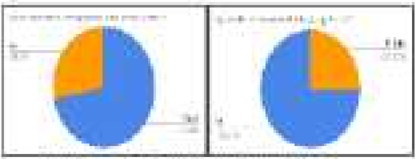

Gambar 3.3.48. Grafik Persepsi Manfaat Kawasan Konservasi

Sebanyak 44,5% responden memandang kurangnya pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu, sementara 27,3% berpendapat sektor pariwisata tidak berkembang. Masyarakat berharap adanya peningkatan infrastruktur pariwisata untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Selain itu, 27,3% responden merasa kontribusi pariwisata kurang berdampak pada lapangan pekerjaan. Meskipun manfaat potensi pariwisata terbatas karena kurangnya point of interest selain pantai danau dan Tanjung [illegible], [illegible] demikian, 66,3% responden percaya sektor pariwisata menciptakan tenaga kerja lokal dan dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang mendukung konservasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Kegiatan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Juni 2024 di Desa Kota Bangun III dan Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, berikut yang disampaikan dalam kegiatan diantaranya: pengelolaan kawasan konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, kebijakan pengelolaan kawasan konservasi serta upaya konservasi pesut mahakam dan habitatnya.

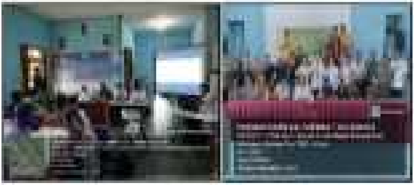

Gambar 3.1.4.6. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi

Selain itu, pengenalan materi kawasan konservasi dilakukan melalui pemberian sarana cetak dalam bentuk poster dan [illegible] kepada masyarakat yang tinggal [illegible] hulu dan [illegible]. Sosialisasi di Desa Kota Bangun III menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi, yang ditandai dengan keaktifan peserta sosialisasi dan [illegible].

f. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi**

Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan April hingga Juni 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan diantaranya: Televisi, Kursi, Drawer, Lemari, Laptop, CCTV dan Alat Pengukur Arus.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [illegible] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [illegible] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4.7. Realisasi Anggaran IKU 4 (Triwulan II)

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[illegible] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Rp [illegible]	Rp [illegible] ([illegible])	-
2.	[illegible] Pelayanan [illegible] Kawasan Konservasi	Rp [illegible]	Rp 0 (0%)	-
3.	[illegible] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp [illegible]	Rp 0 (0%)	-

4.	[2541.RAA.002.221] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 949.000.000	Rp 336.436.223 (35.16%)	-
5.	[2542.EBA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp 715.560.000	Rp 112.073.660 (15.67%)	-
6.	[2542.QEA.002.052] Pemberdayaan Masyarakat	Rp 369.044.000	Rp 258.002.600 (27.94%)	-
7.	[2542.SBA.002.054] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp 343.594.000	Rp 1.278.400 (0.37%)	-
TOTAL		Rp 2.994.224.000	Rp794.754.663 (26.25%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulasi dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp794.754.663 atau 26.26% dari pagu anggaran sebesar Rp 3.026.504.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

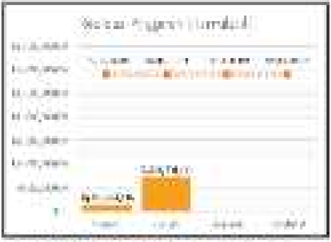

Gambar 3.1.4-18. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan III diantaranya: monitoring sosial ekonomi, penataan zonasi dan ekosistem, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi serta dilindungi di kawasan konservasi kepulauan kecil.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan/penyiapan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses penyiapan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SKO	Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu melakukan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjungpalas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 26,9 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan

Kendala BPSPL Pontianak karena capaian capaian pada triwulan ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung dari kesiapan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam pengusulan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan pengusulan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan Tanjungselor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 9 – 10 Juni 2024. Terdapat dua Kawasan Konservasi Pencadangan Daerah dengan luas total sekitar 35.480,20 hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan Bunyu dan Pulau Sebatik, serta Kawasan Konservasi di Perairan Tanjung Palas Timur. Usulan kawasan konservasi perairan baru di Pulau Derawan dengan luas 1163,84 hektar sedang diproses.

Gambar 2.3.6-4. Fasilitasi Usulan Penetapan KKPD di Kalimantan Utara

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2392.EBA.051] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.6-5. Realisasi anggaran IKU 6 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Efisiensi
1.	[2392.EBA.051.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp 2.982.656 (2,98%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp 2.982.656 (2,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung [illegible] pada Triwulan II (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp [illegible] atau [illegible] dari pagu anggaran sebesar Rp [illegible]. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

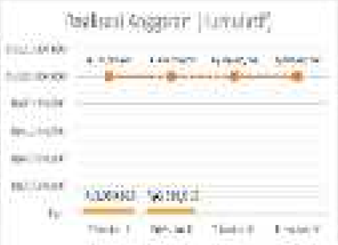

Gambar [illegible]. Realisasi anggaran Kumulatif [illegible] hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja [illegible] Pemkab dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penjajakan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknis menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang dibuat di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK 6	**Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak**								
IKU 6	**Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)**								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	5	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak, [illegible], Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan II capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pencapaian dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun terdapat progress kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama, sehingga progress capaian untuk IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor 37/DJPRL/KS.220/V/2024 dan Nomor B-[illegible]/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan [illegible] wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di [illegible] Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)".

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (juta hektar) 13 juta hektar pada 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan kinerja jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan/kerja sama dan komitmen dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPKRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan belum tercapai target di Triwulan II, sehingga NPKK belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan capaian NPKK, realisasi anggaran dan selisih dari NPKK dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 27/DJPKRL/KS.330/V/2024 dan Nomor B-830/KS/KSDH/374-38/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 22 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.6.1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2062.PBD] Kerja Sama, dengan Rincian Output (RO) [PBD.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Berdasarkan Komponen sebagai berikut.

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 4 pada Triwulan II

No.	Komponen/Sub komponen	Pagu	Realisasi	[illegible]
1.	[3965.PBC.001.051.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp75.000.000	Rp64.233.471 (85,65%)	-
TOTAL		Rp75.000.000	Rp64.233.471 (85,65%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 4 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp64.233.471 atau 85,65% dari pagu anggaran Rp75.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Barang (Spanduk, Perlengkapan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan/Assessment) dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transport Peserta).

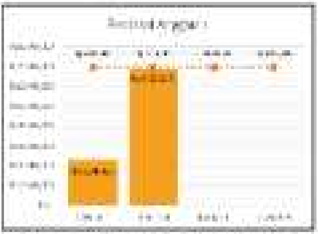

Gambar 3.1.4-8. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2024.

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

a. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama dari Sekretariat DJPKRL, Direktorat [illegible] DJPKRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.

b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

IKU 7. Kemitraan konservasi yang dibinaan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat melalui kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang dibuat di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.63. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SKA	[illegible] untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Pontianak								
IKU 7	Kemitraan konservasi yang dibinaan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target TH 2024	% Realisasi thd Target TH	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	1	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang dibinaan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)", sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan II, capaian tersebut belum dapat dikatakan pengukuran karena periode pelaporan dan pelaksanaan capaian adalah tahunan. Namun progress kegiatan telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga progress untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Progress kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan Nomor B.1490/BPSPL.2/KS.220/V/2024 dan Nomor 8003/UN17.4/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 23 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang dibinaan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga Triwulan II tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 19 juta hektar pada 2023 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Renstra IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan/kerja sama dan komitmen dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 2 kesepakatan pada 2024. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Renstra IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 50% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf Perjanjian Kemitraan tersebut telah diajukan permohonan paraf kepada Sekretaris DJPRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan capaian IKSS, realisasi anggaran dan output dan NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pencapaian IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan Nomor B.1460/BPSPL.3/PS.320/V/2024 dan Nomor [illegible]/UN17.5/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 23 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.8.3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) 2061.PBG Kerja Sama, dengan Rincian Output (PBG.001) Jejaring dan Komitmen Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut.

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Kendala
1.	2052.PEE.001.051.A Mitra Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp95.925.400 (95,93%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp95.925.400 (95,93%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari Kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp95.925.400 atau 95,93% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transport Peserta dan Rapat Fullday di Kalimantan Timur).

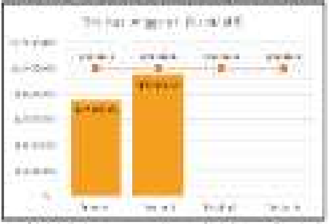

Gambar 3.3.4-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan II

Output yang telah dicapai pada Triwulan II dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan III Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknis menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK 7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	1	1	100	2	50	2	50,00	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 telah dilakukan pengukuran dengan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah disalurkan Bantuan Pemerintah dari target Triwulan II sebesar 1 (kelompok) dan target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi terhadap target triwulanan sebesar 100% dan terhadap target tahunan sebesar 50%. Progres capaian yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 yaitu salah satunya bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pesisir di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2023 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 2 kelompok atau 66% menurun. Hal capaian kinerja IKU ini pada Triwulan II mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp[illegible] pada tahun 2023 menjadi Rp[illegible] pada tahun 2024.

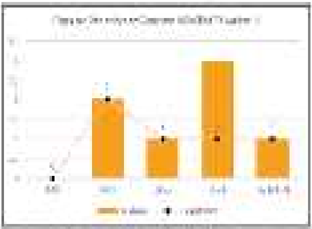

Gambar 3.1.14. Grafik Capaian Kelompok KONPAK Triwulan II tiap Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan II tahun 2024 sebanyak 1 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 33,33% dari target Rencana Strategis BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2023. Hal ini disebabkan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KONPAK dari Rp260.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp200.240.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada kesiapan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi penyaluran sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2023. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi penyaluran telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKU, yaitu:

a. **Penyampaian Hasil Identifikasi**

Penyampaian hasil identifikasi dan verifikasi Pokmaswas Pesisir dilakukan melalui melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor [illegible] tanggal 14 Mei 2024.

b. **Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan**

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KOMPAK melalui:

- SP Nomor [illegible] tanggal 22 Mei 2024 untuk Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Pesisir di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket.
- BAPB No. [illegible] tanggal 30 Mei 2024.
- BAST No. [illegible] tanggal 30 Mei 2024.
- BAP No. [illegible] tanggal 30 Mei 2024.

c. **Serah Terima Bantuan**

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Pesisir dari Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Juni 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kompresor, satu unit kamera underwater dan satu unit housing underwater dengan nilai sebesar Rp. 96.200.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi [illegible] tanggal 4 Juni 2024.

Gambar 3.3.79. Serah Terima Bantuan KOMPAK

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2392.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.[illegible] Realisasi IKU 8 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[illegible] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp 252.546.000	Rp 123.465.629 (48,89%)	-
TOTAL		Rp 252.546.000	Rp 123.465.629 (48,89%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 123.465.629 atau 48,89% dari pagu anggaran sebesar Rp 252.546.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

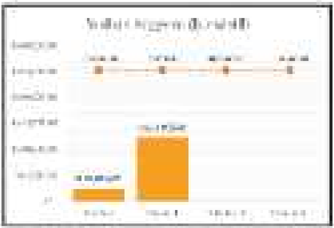

Gambar 3.3.[illegible]. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II

4. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2023

Memperlakukan pengadaan barang untuk Bantuan Kelompok Masyarakat Penggiat Konservasi di Kalimantan Barat. Melakukan [illegible] tahap pemberian bantuan KOMPAK di Kalimantan Barat.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/kontes yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bantuan masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan anggota/ketua dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 9 BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

SK-7	Meningkatnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU-9	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)								
Capaian 2022	TW III 2023					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target FY 2023	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Tidak Ada Capaian Triwulan			1	-	3	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-[illegible], [illegible] 2023

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Belum ada progress kegiatan yang dilakukan karena masih terdapat blokir anggaran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada wilayah kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Baru". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Rencana Strategis BPSPL 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 1 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum terdapat progres kegiatan yang dilakukan karena blokir anggaran baru dibuka pada bulan Juni. Terdapat perubahan klasifikasi Rincian Output menjadi [3948.BCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang difasilitasi kapasitasnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan mengalikan angka NPSS, nilai pagu anggaran dan selisih dari NKS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini belum dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output [3392.RBA.005] Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada Bulan Juni. Terdapat perubahan klasifikasi Rincian Output menjadi [3948.BCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang difasilitasi kapasitasnya.

Tabel 3.1.72. Realisasi IKU 9 Triwulan II

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2364.QDO.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp 240.000.000	Rp 0 (0,00%)	-
	TOTAL	Rp 240.000.000	Rp 0 (0,00%)	-

h. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan identifikasi Kelompok Masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat pemanfaat kawasan konservasi.

3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Pontianak adalah jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk keberlanjutan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari air Tawar.
b. Perbaikan Habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengkayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra (Ditjen) 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Tahunan	% Realisasi thd Target [illegible]	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
13	Tidak ada Capaian Triwulan			[illegible]	-	8	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak [illegible]

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Kima (penyediaan data populasi), Karang (pembuatan [illegible] dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Sementara progress kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu untuk 2 jenis berikut: Penyu (penyediaan data populasi), [illegible] Hiu dan Pari apendiks (penyediaan data populasi) dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Total progress kegiatan kumulatif yang sudah dilakukan hingga Triwulan II yaitu 5 jenis ikan terancam punah telah dilakukan. Selain itu, pada Triwulan II juga dilakukan Sosialisasi Biota Dilindungi dan Ikan terancam punah di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan II tahun 2023 terdapat capaian kumulatif sebesar 5 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 (kumulatif 5 jenis), maka progres kegiatan sama dengan capaian Triwulan II tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan II sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 25% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 8 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan Triwulan II sebanyak 5 jenis memiliki peran sebesar 63% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh terlaksananya kegiatan penyediaan data sebaran penyu, respon cepat mamalia laut terdampar dan sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dari masyarakat yang melapor, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pelapor. Selain itu, akses lokasi kejadian biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring penanganan di wilayah kerja sebagai solusi untuk respon cepat biota terdampar.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Survei Pengambilan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Kegiatan penyediaan data sebaran penyu di Kalimantan Barat dilaksanakan di Pantai Sungai Belacan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 8 s.d. 14 Mei 2024. Sebelum survei, dilakukan koordinasi dengan anggota Kelompok Masyarakat Wahana Sahabat Paloh. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Pantai Tanjung Api yang merupakan sekretariat atau Pos monitoring penyu dari Kelompok Masyarakat Pengawas Kambau Borneo. Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

Gambar 2.1.5-4. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Survey pemantauan populasi penyu dilakukan dengan penyisiran tepi pantai pada malam hari yang dibagi menjadi 8 sektor dengan jarak antar sektor bernilai [illegible] meter. Pada saat melakukan monitoring penyu yang naik ke pantai pada umumnya ditemukan penyu di sektor 3 sampai dengan sektor 7, tetapi ada juga ditemukan penyu yang naik bertelur pada sektor 1. Penyu yang naik biasanya ditemukan 1 sampai 4 ekor setiap malamnya. Terdapat lebih dari 10 sarang hasil relokasi dengan jumlah telur per sarang sekitar 77 – 100 butir yang dilepasliarkan akan menetas sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Pesisir Paloh. Jenis penyu yang selanjutnya ditetaskan adalah penyu hijau, penyu sisik dan penyu lekang.

5. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah

- Respon cepat penanganan biota laut dilindungi/terancam punah

Selama periode April hingga Juni 2024 terdapat 5 (lima) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Terdapat 3 (tiga) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang ditangani penanganan yaitu pesut sebanyak 1 ekor, penyu sebanyak 2 ekor dan paus sebanyak 2 ekor. Sebanyak 1 (satu) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (Biota 1), 3 (tiga) kejadian mendapatkan biota dengan kondisi mati (Biota 2, 3 dan 4) dan 1 (satu) kejadian sudah menjadi kerangka (Biota 5). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pelepasliaran sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada sekitar lokasi penemuan.

Gambar 3.1.9-4. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar

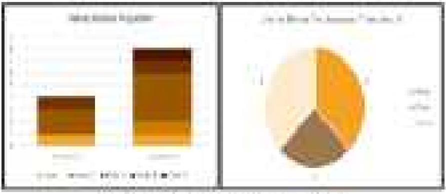

Gambar 3.1.9-5. Grafik Penanganan Biota Terdampar

- Sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah

Kegiatan Sosialisasi Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2024 di Politeknik Negeri Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh pegiat konservasi serta akademisi yang ada di KKPD Kendawangan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa hal tentang pentingnya menjaga kelestarian hidup biota perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah.

Gambar 3.1.8-4. Sosialisasi Biota Dilindungi

- Bimbingan teknis penanganan biota laut dilindungi/terancam punah

Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2024 di [illegible] Resort, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode [illegible] paparan, diskusi dan praktek dengan mengundang beberapa stakeholder terkait. Kegiatan ini bekerja sama dengan [illegible] sebagai pemateri dalam bimbingan teknis penanganan biota laut dilindungi/terancam punah.

Gambar 3.1.8-5. Bimtek Penanganan Biota Dilindungi

c. **Enumerasi/Pendataan Hiu Pari Apendiks**

Kegiatan pendataan data hiu dan pari apendiks di wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga enumerator dari bulan April – Juni 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap lokasi:

- *Pendataan Hiu dan Apendiks di PPN Pemangkat*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPN Pemangkat pada periode April – Juni didapatkan 9 jenis hiu apendiks sebanyak 274 ekor dan 4 jenis pari apendiks sebanyak 26 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus sorrah* sebanyak 133 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Rhynchobatus springeri* sebanyak 14 Ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus leucas* sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Mobula thurstoni* sebanyak 1 ekor.

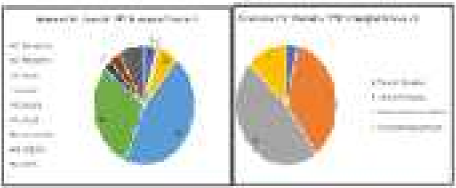

Gambar 3.1.3-6. Grafik Hasil Pendataan Hiu dan Apendiks di PPN Pemangkat

Gambar 3.1.3-7. Dokumentasi pengukuran

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap pada periode April – Juni didapatkan 4 jenis hiu apendiks sebanyak 13 ekor dan 3 jenis pari apendiks sebanyak 293 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus sorrah* sebanyak 4 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Rhynchobatus australiae* sebanyak 167 ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus brevipinna* sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Glaucostegus typus* sebanyak 21 ekor.

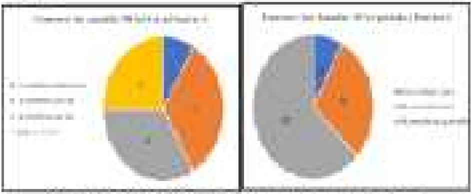

Gambar 3.1.3-8. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPI Mempawah

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPI Mempawah pada periode April – Juni, didapatkan 3 jenis hiu apendiks sebanyak 1.823 ekor dan 1 jenis pari apendiks sebanyak 24 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus* [illegible] sebanyak 753 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang dilaporkan yaitu Pari [illegible] sebanyak 54.860 / Jenis hiu [illegible] paling sedikit yang ditemukan yaitu [illegible] sebanyak 5 ekor.

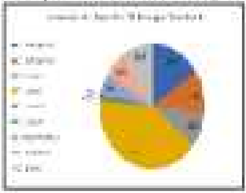

Gambar 2.1.5-9. Grafik Pendataan Hiu dan Pari [illegible]

Gambar 2.1.5-10. Dokumentasi Pengukuran

6. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3362.RBS.001] Konservasi/Pengelolaan Hayati Perairan Terancam Punah yang dilindungi dan/atau Dilestarikan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5-6. Realisasi IKU 10 Triwulan III

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Ket
1.	[3362.RBS.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp 216.420.000	Rp 116.276.900 (54,77%)	-
2.	[3362.RBS.001.052] Rehabilitasi Populasi Habitat untuk jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp 136.816.000	Rp 122.288.408 (90,17%)	-
3.	[3362.RBS.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp 56.612.000	Rp 22.201.072 (37,50%)	-
4.	[3362.RBS.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp 344.372.000	Rp 121.041.812 (35,15%)	-
	TOTAL	Rp 758.300.000	Rp375.808.282	-

		(49,73%)	

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp373.058.350 atau 49,73% dari pagu anggaran sebesar Rp 750.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

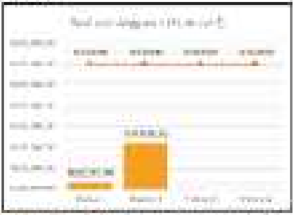

Gambar 2.1.8-41. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melaksanakan akan kegiatan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], survei [illegible] populasi tertentu di Kalimantan Barat, survei pendataan populasi penyu di Kalimantan Barat dan mengikuti kegiatan Festival Pesisir Paloh di Kalimantan Barat.

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana);
b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana);
c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK 9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan			5	-	5	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Juli 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan II Tahun 2024 yaitu, pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 5 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Teripang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver). Selain itu, dilakukan Survei Pemanfaatan Teripang di Kalimantan Barat dan Sosialisasi Pelayanan Perizinan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 30 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah tercapai sebesar 33% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah tercapai sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Kelancaran progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi secara daring (online) dalam rangka penerbitan dokumen angkut jenis ikan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu:

a. **Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan (Januari – Juni). Kegiatan ini terdiri dari:

- Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

  Kegiatan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan II terdapat 8 pelaku usaha yang melakukan permohonan sertifikasi SIPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi
  Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [illegible]. Selama Triwulan II terdapat total 37 Surat Rekomendasi dengan 34 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 3 surat ke luar negeri (LN). Untuk jenis hiu dan pari look alike species, sebanyak 37 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 33 Surat Rekomendasi untuk jenis teripang telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk hiu dan pari look alike terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 23 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk teripang terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 18 surat.

Gambar [illegible] Pemeriksaan Surat Rekomendasi

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)
  Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [illegible]. Selama Triwulan II terdapat 18 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 771 SAJI DN untuk jenis Arwana telah diterbitkan. Penerbitan SAJI DN untuk hiu dan pari Appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 18 surat. Sementara penerbitan SAJI DN untuk Arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 757 surat.

Gambar 3.3.9-2. Penerbitan SAJI

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)
  Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KKHL. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [illegible]. Selama Triwulan II terdapat 314 Verifikasi SAJI LN untuk jenis Arwana telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 211 surat.

- Verifikasi Stok Ikan
  Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Verifikasi Hasil Panen
  Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Pengesahan Sertifikat Hasil Pembesaran
  Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  Pencapaian PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan Triwulan II (kumulatif) sebesar Rp1.232.833.341. Total PNBP yang diterima pada April – Juni sebesar Rp693.622.400. Nilai PNBP tertinggi pada Triwulan II didapatkan pada bulan Mei sebesar Rp271.113.180, sementara terendah didapatkan pada bulan Juni sebesar Rp201.458.876.

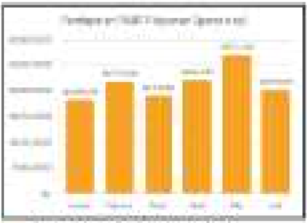

Gambar 3.1.9-5. Grafik Pendapatan PNBP

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2062.BEJ.003] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.9-6. Alokasi IKU 11 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2062.BEJ.003.001] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES	Rp 200.000.000	Rp 23.321.937 (11,76%)	-
2.	[2062.BEJ.003.002] Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	Rp 1.700.000.000	Rp 323.973.016 (27,40%)	-
	TOTAL	Rp 1.900.000.000	Rp327.294.947 (25,10%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 327.294.947 atau 34,10% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.900.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

C. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu Pelayanan operasional perizinan (Sertifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Juli – September 2024.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/senyawa/komoditas yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 30 hari/tidak bersifat sementara pada kawasan konservasi serta dilakukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah kegiatan inventarisasi pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan atau jasa yang akan ditunjang proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengusulan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan kepada pelaku pemohon perizinan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 Entitas BPSPL Pontianak

SK 10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra [illegible]	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target FY 2024	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	8	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible] 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan II yaitu persiapan verifikasi perizinan Air Laut Selain Energi (ALSE).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Rencana Strategis PRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 lokasi kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU ini tidak tercantum dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu sosialisasi perizinan [illegible] telah dilaksanakan. Kendala [illegible] masih kurang aktifnya pemohon dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan II sehingga NPKS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPKS, realisasi anggaran dan selisih dari NPKS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan [illegible] dan melakukan sosialisasi perizinan [illegible] secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu percepatan verifikasi perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Namun, tidak ada permohonan verifikasi perizinan pemanfaatan ALSE di wilayah BPSPL Pontianak pada Triwulan II sehingga tidak terdapat kegiatan lapangan.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2383.PBW.002] Rekomendasi [illegible] Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1. [illegible] Capaian IKU [illegible] Triwulan II

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2383.PBW.002.050] Pengelolaan dan Pemantauan [illegible] Pemanfaatan Air Laut	Rp 120.000.000	Rp 33.139.485 (28,12%)	-
TOTAL		Rp 120.000.000	Rp 33.872.997 (28,22%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp [illegible] atau [illegible]% dari pagu anggaran sebesar Rp 120.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk [illegible] Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

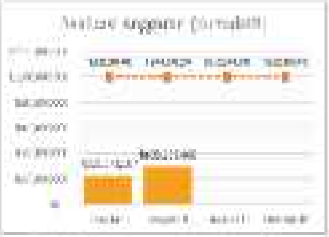

Gambar 3.1.10-1. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

6. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) apabila ada pengajuan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 12. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengajak/menumbuhkan kesadaran/upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknik pembinaan [illegible] dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyelenggarakan kegiatan gerakan bersih sampah di pesisir dan pulau-pulau Kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.17-4. Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak

SS 7	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			4	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan BCL, identifikasi dan verifikasi peserta dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020-2024 yaitu sebanyak 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan 1 sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan 1 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Pelaksanaan Bersih Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bersih Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jangkang Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-6. Jumlah nelayan pengumpul pelaksanaan BCL

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jangkang Besar	KUB Sekat Bakti	10
	KUB Sekati Merah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 20 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan proses usaha pengolahan sampah oleh mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL dan SPSPL Kecamatan.

Gambar 3.1.11-6. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

- Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 23.461,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.948.000. KUB Bintang Laut 3 menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.875,2 kg.

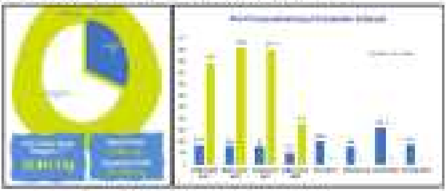

Gambar 2.1.11-8. Grafik data pengumpulan sampah

b. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 70 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 28 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.11-3. Jumlah nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah Orang
Kel. Setapuk Besar	KUB Bunga Pandana	9
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mulia	11
Kel. Naram	KUB Selam Jaya Abadi	22
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bersi	10
	KUB Bakahade	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.11-3. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.953,65 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa nonplastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 37% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp10.526.000. KUB Nelayan Bonai menjadi kelompok nelayan dengan perolehan sampah paling banyak sebesar 3.233 kg.

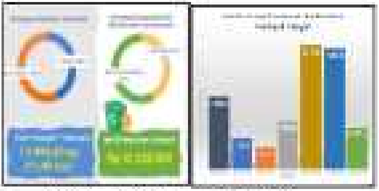

Gambar 2.1.11-4. Grafik data pengumpulan sampah

d. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 24 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 83 orang nelayan yang berasal dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Rasau sebanyak 79 orang dan Desa Rowah Layang sebanyak 4 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Bersinar Bersamasih. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.11-4. Jumlah nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Rasau	KUB Bina Bersama	25
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Bina Lestari	34
Desa Rowah Layang	KUB Bina Harapan Bersama	4

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 21 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengumpulan sampah, pemilahan sampah, [illegible] [illegible] pengolahan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang sejak Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.849,8 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 2.392 kg sampah berupa plastik dengan nilai ekonomi hasil penjualan sampah sebesar Rp4.196.900.

Gambar 3.1.11-6. Contoh data pengumpulan sampah

c. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 3 Mei 2024 dengan sosialisasi dan sinergi nelayan. Kegiatan ini melibatkan 48 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 60 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengumpulan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-6. Jumlah nelayan yang terlibat pelaksanaan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (orang)
Kel. Sepinggan	KUB Mina [illegible]	24
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Selatan	10
	KUB Las [illegible] Fajar	12
	KUB [illegible] [illegible]	12

e. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 21 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, analisis aksi pengolahan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan [illegible] oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output 3494.QDC.001 Fasilitasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.11-4. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 4 pada Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[3494.QDC.001.051] Kota Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 415.783.033 (51,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp415.783.033 (51,97%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 11 Oktober 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan I sampai III sejak Januari 2024 yaitu Rp. Rp415.783.033 atau 51,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini.

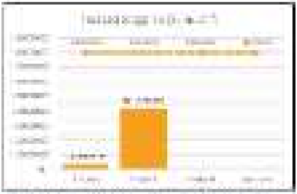

Gambar 3.1.11-8. Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2023

Melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring pasca Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut, kegiatan tersebut dilakukan di empat lokasi pelaksanaan Gernas BCL dengan melibatkan nelayan lokal, aparat desa dan stakeholder lain yang terkait.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Delapan indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RPD Halaman III DIPA – Bobot Penilaian 15%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman [illegible]

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024 Pontianak		Capaian 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
93,93	93	93,88	100,95	93,75	100,14	93	100,95	93	100,95

Sumber data: BPSPL Pontianak dan OM-SPAN, Juni 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak pada triwulan II didapatkan nilai sebesar 93,88 dengan kategori baik. Nilai ini didapatkan dari penjumlahan nilai masing-masing indikator sebagai berikut: Revisi DIPA (10,00), Deviasi Halaman III DIPA (13,34), Penyerapan Anggaran (16,75), Belanja Kontraktual (10,00), Penyelesaian Tagihan (10,00), Pengelolaan UP dan TUP (9,19) dan Capaian Output (24,60).

Secara umum capaian pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 telah melebihi dari target 82 pada periode tersebut (113,85%). Capaian ini juga telah melebihi target pada Renstra BPSPL Pontianak untuk tahun 2024 yaitu 88 (102,9%), dan Renstra DJPRL untuk tahun 2024 yaitu 90 (103,0%). Namun, capaian pada triwulan II/semester 1 belum dapat mencapai target PK BPSPL Pontianak Tahun 2024 yaitu 93,79 atau sekitar 98,71%. Capaian nilai IKPA disampaikan melalui Nota Dinas Biro Keuangan KKP Nomor [illegible] tanggal 10 Juli 2024 hal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2024 (Sumber: Satpel KKP, 10 Juli 2024).

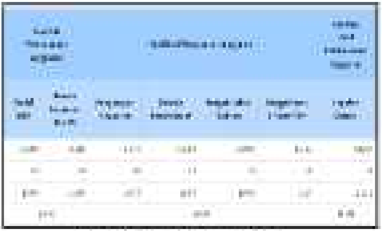

Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]				[illegible]

Gambar 3.1.15-1. Nilai IKPA Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester I tahun 2024 adalah 92,64 (113,84% dari target sebesar 82 dan 98,77% dari target tahunan sebesar 93,79), sedangkan capaian triwulan II/semester I tahun 2023 adalah 90,56 (97,34% dari target tahunan 93,03). Sehingga capaian triwulan II/semester I tahun 2024 mengalami peningkatan [illegible]% dibandingkan capaian triwulan II/semester I tahun 2023.

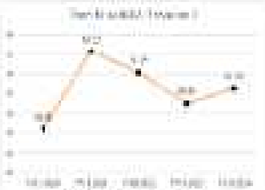

Gambar 3.1.15-2. Tren Nilai IKPA

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tercantum dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 101,8% (92,64 dari 90). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 91 untuk tahun 2024. Capaian triwulan II/semester I tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 102,2% (93,00 dari 91). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketelitian dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, tim pengelola keuangan melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPAS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPAS, realisasi anggaran dan selisih dari NPAS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu:

a. Revisi DIPA
  - Revisi Halaman III DIPA pada 22 April 2024 (Revisi ke 5)
  - Revisi Kewenangan KPA pada 25 April 2024 (Revisi ke 6)
  - Revisi Kewenangan Kanwil pada 3 Juni 2024 (Revisi ke 7)
  - Revisi Kewenangan DJA pada 11 Juni 2024 (Revisi ke 8)

b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp8.278.364.477 atau 44,45% dari pagu anggaran sebesar Rp18.623.115.000 (sumber data: OM SPAN per 30 Juni 2024)

c. Data Kontrak sebanyak 3 kontrak pada April – Juni 2024
  - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 3 Paket sesuai Kontrak No.SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
  - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Drawer, dan Lemari Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
  - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak No.SP.46/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

  - Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No. SPK.45/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
  - Pengadaan Barang Bantuan KOLAMKU TA 2024 Kelompok Pokdakan di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
  - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
  - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/2024 tanggal 3 Juni 2024.
  - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pengelola TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
  - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.51/BPSPL.2/SPK/PPK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

d. Pembayaran Tagihan setiap bulan

e. Penyesuaian LP sebanyak 3 kali dan RUP 3 kali

f. Pengisian Capaian Rincian Output (CRO) periode April – Juni 2024

g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran:
  - Workshop IKPA "Optimalisasi Capaian IKPA TA 2024, Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I, Optimalisasi Penyerapan Anggaran serta Identifikasi Satker pada 2 s.d. 4 April 2024 di Jakarta.
  - Pembahasan Penetapan Area Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi Lingkup DJPKRL Tahun 2024 pada 22 April 2024.
  - Tindak lanjut Usulan Penetapan Area Signifikan PIPK BPSPL Pontianak Tahun 2024.
  - Finalisasi Penetapan Area Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi Lingkup DJPKRL tahun 2024 pada 8 Mei 2024 secara daring.
  - Pelaksanaan Rekonsiliasi Data/Transaksi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2023 Audited Satuan Kerja BPSPL Pontianak.
  - Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Area Signifikan Belanja Barang, Barang Konsumsi, Persediaan, Barang Diserahkan ke Masyarakat dan Properti Investasi atas Penerapan PIPK Tahun 2024 pada 3 s.d. 6 Juni 2024 di Jakarta Pusat.
  - Penyampaian Penyusunan Identifikasi Risiko dan Kebijakan Rancangan Pengendalian (Tabel 4) dan atau Pemetaan Identifikasi Risiko dan Pengendalian (Tabel 4.1).
  - Revisi atas Pemetaan Tabel Identifikasi Risiko dan Kebijakan Rancangan Pengendaliannya (Tabel 4) dan atau Penyusunan Kebijakan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel 4.1) PIPK Tahun 2024 Lingkup DJPKRL pada 11 s.d. 13 Juni 2024 di Yogyakarta.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2347.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2347.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

Tabel 3.1.72.5 Realisasi Anggaran IKK 14 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2567.EBA.994.001] Layanan BMN	Rp 45.000.000	Rp 348.000 (0,78%)	-
2.	[2567.EBA.994.001] Layanan Kehumasan	Rp 25.000.000	Rp 13.537.871 (54,15%)	-
3.	[2567.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 6.297.000.000	Rp 3.436.758.834 (54,43%)	-
4.	[2567.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.734.034.000	Rp1.373.270.883 (50,23%)	-
5.	[2567.EBD.955.001] Layanan Manajemen Keuangan	Rp 150.080.000	Rp 49.750.000 (37,21%)	-
TOTAL		Rp 9.251.134.000	Rp5.068.600.608 (54,08%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan II (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp 5.068.600.608 atau 54,08% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.251.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang Jasa.

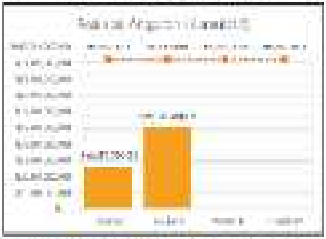

Gambar 3.1.72.5 Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

a. Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan KPA)
b. Pelaksanaan kontrak pengadaan
c. Pelaksanaan tagihan dan penyerapan anggaran
d. Pengisian DRC bulan Juli – September 2024

IKM 15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (NKA)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-K/L melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penyerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai relevansi informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila NKA > 90
b. Baik, apabila NKA >80 – 90
c. Cukup, apabila NKA >60 – 80
d. Kurang, apabila NKA >50 – 60
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Capaian IKU 13 NKA BPSPL Pontianak Sebagai berikut:

Tabel 3.1.13.3. Capaian IKU 13 NKA BPSPL Pontianak

SS-[illegible]	[illegible]								
IKU 13	Nilai Kinerja Anggaran [illegible] BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW-I	Realisasi TW-I	% Capaian	Target [illegible] 2024	% realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
[illegible]	Periode capaian Tahunan			[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-

Sumber data: BPSPL Pontianak [illegible], diolah (2024)

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu nilai NKA sebesar [illegible] pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu [illegible] di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan II dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung/periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM tersebut didukung dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran, adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan I sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyesuaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, pembaharuan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan IKA yang tersedia di aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKM yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian direalisasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKM ini sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Melakukan input Capaian Rincian Output (CRO) bulan April – Juni 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Semester I tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16: Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60%, untuk semua area pengungkit.
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentase TLHP minimal 3,5.
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 14.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau dokumen pelaksanaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal / KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi sebesar 90,31. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2021.

Tabel 3.1. IKU-16. Capaian IKU 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SS 13	SS 13 Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKSK 16	[illegible]								
Capaian 2023	TW II 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Jangka [illegible]	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target FY 2024	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Jangka
90,31	Periode Capaian Tahunan			75	-	80	-	80	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Juni 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 13 unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra indikator tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 80. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan dan bimbingan dari Inspektorat secara berkala pendampingan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NRKS belum dapat dihitung. Pembahasan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan HPS, realisasi anggaran dan selisih dari HPS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK, yaitu:

a. Pengumpulan dokumen komponen pendukung setiap bulannya untuk periode Januari – Juni 2024.
b. Audit internal penerapan sistem manajemen mutu pada tanggal 14 Februari 2024 secara hybrid di Kantor BPSPL Pontianak dan zoom meeting.

8. Realisasi Anggaran

Keluaran IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output [2347.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2347.EBA] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.104. Realisasi Anggaran IKK 14 Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[2347.EBA.960.051] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp 60.000.000	Rp17.729.000 (29,44%)	-
TOTAL		Rp 60.000.000	Rp 17.729.000 (29,44%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp17.729.000 atau 29,44% dari pagu anggaran sebesar Rp 60.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang WBK dan Konsumsi Rapat.

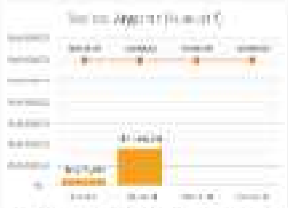

Gambar 3.1.104. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan II yaitu pengumpulan dokumen komponen pendukung setiap bulannya untuk bulan April – Juni dan sosialisasi/internalisasi pembangunan Zona Integritas di BPSPL Pontianak.

IKM 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN mengukur gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 25%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 30%
d. Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Kurang Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan indikator tersebut diambil langsung dari dashboard IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman https://simpeg.kkp.go.id.

Tabel 3.1.174. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak

SK 17	SK 17. Sasaran Kegiatan 17: Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM 17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)								
Baseline 2022	Tahun 2022					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PRL 2020-2024	
	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Target FY 2022	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
85.84	83	85.13	102.56	88	96.73	75	113	75	113

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PRL, Tahun 2022

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024, IKU 17 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak telah tercapai 85,12 (106,39%) dari target 80. Capaian IKU 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.4884/DJPRL.1/KP.720/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester I Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PRL (Sumber: Setditjen PRL 15 Juli 2024). Adapun capaian IKU 17 pada triwulan ini belum dapat mencapai target pada PK BPSPL Pontianak tahun 2024 yaitu 88 (96,73%).

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 adalah 85,12 (96,73% dari target tahunan 88), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah 81,74 (96,16% dari target tahunan 85). Sehingga capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,38% dibandingkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023.

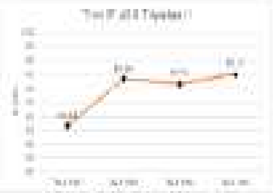

Gambar 3.1.12-5. Tren IP ASN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 112% (85,12 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 112% (85,12 dari 76). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi ini tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga RPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan HPS, realisasi anggaran dari sampai dari HPS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu:

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak internal/eksternal oleh pegawai pada April – Juni 2024, diantaranya adalah:
   - Rapat Kerja Teknis Tahun 2024 pada 24 s.d. 25 April 2024 di Semarang;
   - Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pemetaan Habitat Dasar Perairan Dangkal pada 6 s.d. 7 Mei 2024 di Bogor;
   - Pelatihan Pemodelan Numerik Perubahan Garis Pantai pada 8 s.d. 9 Mei 2024 di Makassar;
   - Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 14 s.d. 16 Mei 2024 di Bandung;
   - Pelatihan Identifikasi Ikan Hiu dan Pari "Biologi dan Ekologi Ikan Pari" pada 22 Mei 2024 secara daring;
   - Pelatihan Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pada 31 Mei 2024 secara daring;
   - Orientasi Kehumasan "Mengasah Keterampilan, Menguatkan Reputasi" pada 11 s.d. 13 Juni 2024 di Yogyakarta;
   - Training Assessment Coastal Engineering: Pemodelan Hidrodinamika dan Morfodinamika dengan Software Delft3D pada 15 s.d. 16 Juni 2024 secara daring.

b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada April – Juni 2024 dan Monitoring Triwulan II 2024.

c. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada April – Juni 2024.

d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada April – Juni 2024.

e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada April – Juni 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2047.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12.7 Realisasi Anggaran IKU 7

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	2047.EBC.004.251 Layanan Manajemen SDM	Rp346,462,000	Rp281,912,413 (81,37%)	-
TOTAL		Rp346,462,000	Rp281,912,413 (81,37%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp346,462,000 atau 81,37% dari pagu anggaran sebesar Rp346,462,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan.

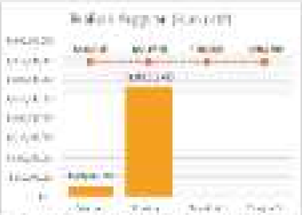

Gambar 3.1.35.4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

B. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu:

a. Rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai
b. Rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai
c. Rekapitulasi dan monitoring Presensi Pegawai serta mengikuti pelatihan, diklat, seminar ataupun workshop yang diselenggarakan baik dari BPSPL Pontianak maupun dari pihak lain.

IKK 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah didasarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.12.5. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengelolaan kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengelolaan kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKU 18 sebagai berikut:

Tabel 3.1.18-8. Capaian IKU 18 BPSPL Pontianak

SP 1.3	**[illegible] Pontianak**								
IKU 18	**Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)**								
Capaian [illegible]	**Tahun [illegible]**					**Renstra BPSPL Pontianak**		**Renstra DJPRL [illegible]**	
	Target TW I	**Realisasi TW I**	**% Capaian**	**Target FY [illegible]**	**% Realisasi thd Target FY**	**Target [illegible]**	**% Realisasi thd Target [illegible]**	**Target [illegible]**	**% Capaian thd Target Renstra**
60,3	Target Capaian Tahunan			61	-	-	-	[illegible]	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, [illegible]

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator ini dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pengukuran keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PRL sebesar 82,75. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PRL karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator ini dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Renstra dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai Pengukuran Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 82. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator ini dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan sub tim pelaksanaan, pengumpulan dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai kesepakatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NRKS belum dapat dihitung. Sementara analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian NRKS, realisasi anggaran dan selisih dari NRKS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengelolaan kinerja berbasis daring (pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan dropbox, google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya.

7. Kegiatan Pendukung

a. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Asistensi dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan eMonev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat pada tanggal 1 s.d 4 April 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.1[illegible]/DJPRL.1/TU.410/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.

b. Mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis DJPRL Tahun 2024 pada 24 dan 25 April 2024 di Padma Hotel, Semarang sesuai Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2170/DJPRL.1/TU.210/IV/2024 tanggal 18 April 2024.

5. Melakukan penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1220/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
6. Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelayanan Teknis Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 pada 29 dan 30 April 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Inspektur Nomor B.28/ITJ.2/2023/IV/2024 tanggal 15 April 2024.
7. Mengikuti kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL pada 17 s.d. 19 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2125/DJPKRL.1/TU.320/IV/2024 tanggal 16 April 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I tahun 2024, didapatkan hasil capaian kinerja 118 (estimasi).
8. Mengikuti kegiatan Forum Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.1214/SJ.1/RO.410/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
9. Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor M.BPSPL.2/TU.210/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.
10. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2530/DJPKRL.1/RO.410/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan surat tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 118 (estimasi) dan NKO Verifikasi sebesar 118 (estimasi).
11. Mengikuti kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di lingkungan Ditjen PKRL pada tanggal 24 – 27 Juni 2024 di Kab. Sleman sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL Nomor B.3228/DJPKRL.1/RO.410/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai PM SAKIP sementara sebesar 81,75. Nilai ini telah mencapai target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, namun masih menurun dibandingkan nilai tahun lalu. Untuk itu, perlu dipertahankan dokumen tambahan dalam rangka menaikkan nilai SAKIP hingga ditetapkan pada saat final.

Gambar 2.1.69. Kegiatan Evaluasi AKIP

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan II

No	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 87.000.000	Rp 65.573.277 (37,75%)	-
2.	[2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 109.280.000	Rp 41.168.827 (37,69%)	-
	TOTAL	Rp245,280,000	Rp106,634,081 (46,03%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKM ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp106,624,081 atau 46,20% dari pagu anggaran sebesar Rp243,230,000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

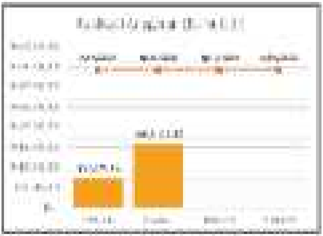

Gambar 3.1.12-8. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan III tahun 2024, pemantauan pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan III tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun tingkat SPSPL Pertanahan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menghimpun/merekap dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.19-13. Capaian IKU 19 BPSPL Pontianak

SS-19	3.1.19. Sasaran Kegiatan 19 Tata Kelola Pembangunan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKSK 19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL (Dokumen)	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
4	2	2	100	4	50	–	–	3	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Juni 2024

1. Capaian IKSK Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 telah tercapai 2 (dua) dokumen (100%) dari target 2 (dua) dokumen. Capaian IKSK 19 berdasarkan:

a. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.30/BPSPL.3/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP akhir Desember dan Triwulan IV Tahun 2023; dan

b. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1122/BPSPL.3/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 dibandingkan dengan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah sama/sebanding yaitu 2 (dua) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 dengan jumlah 2 (dua) dokumen telah berkontribusi 50% dari Target Renstra BPSPL Pontianak. Tidak terdapat target pada Renstra BPSPL Pontianak 2020 - 2024. Pemenuhan dokumen telah berkontribusi pada pemenuhan target PK BPSPL Pontianak Tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian dokumen SPIP telah sesuai dengan target 100% dari target triwulan II/semester I tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPRL tepat waktu setiap triwulan (tenggat pertama setelah triwulan berakhir), maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Triwulan I tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu sebelum tanggal 22 April 2024 (berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2074/DJPRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

Tabel 3.1.10-19. Efisiensi dan capaian IKK 19 Triwulan II

Indikator Kinerja Kegiatan	% Kin (%)	Alokasi Anggaran			Efisiensi (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
IKK 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	100	24.503.000	0	0	100

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK yaitu :

a. Pembahasan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2024 secara daring pada 23 April 2024.
b. Penilaian Hasil Pemantauan Kegiatan Pengendalian dengan Penilaian Manajemen Risiko Tahun 2024.
c. Pembahasan Pencatatan Pemantauan MR TA 2024 secara daring pada 29 Mei 2024.
d. Persiapan Penilaian Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 7 Juni 2024.
e. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1120/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 18 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024.
f. Pelaporan penyelenggaraan SPIP Bulan April Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1323/BPSPL.2/TU.140/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan April Tahun 2024.
g. Pelaporan penyelenggaraan SPIP Bulan Mei Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1615/BPSPL.2/TU.140/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Mei Tahun 2024.
h. Ikut serta pada Webinar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada 16 Mei 2024 secara daring.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2067.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.961] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK 19 Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp0,- atau 0% dari pagu anggaran Rp24.503.000.

Tabel 3.1.10-19. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKK 19 pada Triwulan II

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	2067.EBD.961.001.E Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP & MR)	Rp24.503.000	Rp0 (0%)	-
	TOTAL	Rp24.503.000	Rp0 (0%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan III adalah:

a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024, serta melakukan pembahasan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024.
b. Menyusun Laporan SPIP Bulan Juli, Agustus dan Triwulan III Tahun 2024.

IKM 23. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh material pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, menyebarkan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, inovasi dan kebijakan. Penghitungan indikator ini terdiri dari komponen 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaboration Office KKP pada laman https://portal.kkp.go.id/kbo. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5
b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
c. Konten video/campaign dihasilkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan rincian:

- Keaktifan akan dihitung setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II.
- Sesditjen PRL menyediakan data hasil rekapan capaian yang telah aktif pada setiap triwulan untuk dicek dan dijadikan nilai IKM KKP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.92.14 Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak

SS 23	[illegible] lingkup BPSPL Pontianak								
IKM 23	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target TH 2024	% Realisasi TW thd Target TH	Target 2024	% Realisasi TW thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
116,62	34	116,67	100	34	100	95	100	95	100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, 2024

1. Capaian IKM Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 116,67% dari target nilai 34. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPRL telah tercapai melebihi yang diharapkan. Lebih lanjut pada pada tahun 2024 target meningkat sebanyak 2 poin dari tahun 2023 yaitu dari 32 menjadi 34. Pada triwulan ini indikator 1 target IKP 34 dan telah tercapai 100% dari target triwulanan dengan persentase capaian 124,71%. Capaian IKP pada Triwulan I 2024 sebanding dengan capaian IKP Triwulan II 2023 yaitu 100%. Capaian IKM 23 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.887/DJPRL.1/TU.140/IV/2024 tanggal 4 April 2024 perihal Penyampaian Capaian

Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 yaitu 114,67 (134% dari target triwulanan 84), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 yaitu 100 (135,78% dari target triwulanan 80), artinya terdapat kenaikan capaian IKP pada triwulan II/semester 1 tahun 2024 sebesar 14,6%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 123% (114,67 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 123% (114,67 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 113,27% (124,11% dari target triwulanan 84). Hal itu didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena pelaporan pendukung dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu Kepatuhan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office KKP. Dokumentasi kegiatan tugas/kontribusi yang diunggah telah dilengkapi dengan foto dan notulensi serta sesuai [illegible].

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk penunjang kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan III yaitu Kepatuhan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office KKP pada Juli – September 2024.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dinilai dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan III Tahun 2023 s.d. Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti sesuai format (status tindak lanjut adalah TL/HTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam aplikasi maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada [illegible] sebesar 125%.

Tabel 3.1.12-19. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

SK 19	SS 19. [illegible] BPSPL Pontianak								
IKM 21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Capaian DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	80	100	125	80	125	80	125	80	125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Juni 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II/semester 1 tahun 2024, IKU 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah tercapai 100% (125% dari target 80). Capaian IKU 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.2072/DJPRL.1/KP.470/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PRL" Triwulan II Tahun 2024 (Sumber: Setditjen PRL, 11 Juli 2024). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIGAKINKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 adalah 100% (125% dari target triwulanan 80%), sedangkan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023 adalah 100% (120% dari target triwulanan 75), sehingga capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 sama dengan capaian triwulan II/semester 1 tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah dari indikator tersebut dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian triwulan II/semester 1 tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 125% (100% dari 80%), sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 125% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Persentase Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 30% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 100% (100% dari 30%) sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPKS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dari perbandingan/selisih antara NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi atas audit kinerja TA. 2023/2024 dengan nomor T.132/ITJ.3/HP.11/03/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 5 dimana 5 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan unggah dokumen pada SIDAK.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKU 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.13-19 Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak

SS-13	3.1.13. Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL (2020-2024)		Renstra DJPRL (2020-2024)	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	✓	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Juni 2024

1. Capaian IKM Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan II belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan II.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi ineefektifitas temuan pengawasan eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKM belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan II belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan II.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan II.

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2023

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Triwulan III.

IKM 22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk Evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

b. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan uji petik) yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMUNAL. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada menu hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1.22.17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan.
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan

4.	3	0-49	**Tidak Efektif** Kegiatan bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan bantuan pemerintah tersebut.

Capaian IKU 23 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.57-18 Capaian IKU 23 BPSPL Pontianak

SS-7	**7.1 - 6. Sasaran Kegiatan 23 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak**								
IKU 23	**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)**								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Target Capaian Tahunan			80	-	73,6	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Tahun 2024

1. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Renstra/IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi bantuan KONSAK yang telah disalurkan dan melakukan koordinasi terkait dengan Monitoring dan Evaluasi KONSAK.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,6% pada tahun 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan II.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan IKK tidak terdapat target di Triwulan II sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk menyampaikan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKK, yaitu:

a. Melakukan inventarisasi Kelompok Masyarakat yang telah menerima Bantuan KOMPAK dari BPSKL Pontianak
b. Melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK yang telah diberikan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [5962.QDH.001] Kelompok Masyarakat Penggiat Konservasi. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12.18. Realisasi Anggaran IKK 22 Triwulan II

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[5962.QDH.001.053] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp 47.455.000	Rp 8.682.427 (18,30%)	-
TOTAL		Rp 47.455.000	Rp 8.682.427 (18,30%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKK ini pada Triwulan II (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.682.427 atau 18,30% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.455.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

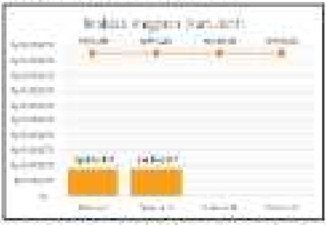

Gambar 3.1.12.9. Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan II

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencanan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan III yaitu memantau kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: Pengawasan sistem kearsipan internal, Pengawasan Pengelolaan Arsip, AKB dan Pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan tersebut.

Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 3.1.12-21. Capaian IKU 24 BPSPL Pontianak

SS-10	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU-24	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL	
	Target TW	Realisasi TW	% Capaian	Target TH 2024	% Capaian thd Target TH	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
B	Target capaian tahunan			80	-		-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan LAKIP, Juni 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan II 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Nilai di IKU ditentukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan, melalui pencapaian kinerjanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan II tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan II belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam penyelenggaraan [illegible] dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu:

a. Rapat Telaah Rencana Aksi Penyelamatan Arsip Kementerian secara daring pada 4 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.[illegible]/SJ.4/TU.[illegible]/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

b. Bimbingan Teknis Alih Media Arsip secara daring pada 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.[illegible]/SJ.4/TU.[illegible]/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Undangan Bimbingan Teknis Alih Media Arsip.

c. Uji Coba [illegible] secara daring pada 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Plt. Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.[illegible]/SJ.4/TU.[illegible]/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2347.EBA.962.051] Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan II (akumulasi sejak Januari 2024) yaitu Rp [illegible] atau [illegible]% dari pagu anggaran sebesar Rp 47.453.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 2.1.12.[illegible] Realisasi Anggaran IKU [illegible] Triwulan II

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	[illegible]
1.	[2347.EBA.962.051] Layanan Perkantoran Tata Usaha dan Kearsipan	Rp [illegible]	Rp [illegible] ([illegible]%)	-
TOTAL		Rp 47.453.000	Rp [illegible] ([illegible]%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang cukup signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU di Triwulan III.

3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PRL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagian besar indikator kinerja disusun secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang disalurkan, BPSPL Pontianak memiliki capaian 1 kelompok dari target 1 kelompok (100%), jika dibandingkan dengan Unit Kerja lain, capaian BPSPL Pontianak termasuk terendah. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak menjadi yang terendah diantara Unit Kerja lain dengan nilai 82,22. Capaian IKU IP ASN BPSPL Pontianak sebesar 44,11 menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan capaian Unit Kerja lain. Pada IKU pelaporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar oleh BPSPL Pontianak menjadi yang terendah diantara unit kerja lain dengan nilai capaian 114,47% sementara unit kerja lain mendapatkan nilai 125,33%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 100%.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-032.07.2.477438/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp 18.596.113.000. Realisasi anggaran dicatat dan dipantau secara online melalui di https://spanint.kemenkeu.go.id/ . Pada Triwulan II tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 8.279.264.471 atau 44,52% dari pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi per kegiatan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20.1. Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan II

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Keterangan
1.	[2346] Pembinaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	6.548.306.000	1.750.383.870	26,80	-
2.	[2348] Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	150.000.000	53.720.498	35,81	-
3.	[2350] Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	1.150.000.000	223.021.307	19,40	-
4.	[2357] Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	9.947.807.000	5.853.383.420	58,84	-
5.	[2348] Pendayagunaan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800.000.000	415.780.000	51,97	-
	Total		18.596.113.000	8.279.264.471	44,52	

Sumber data: aplikasi OM-SPAN Modul Kementerian per 30 Juni 2024

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 4 (empat) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang dikelompokkan untuk:
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
4. Belanja Barang Non Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

5. Belanja Modal: pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau penambahan nilai asset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel [illegible]: Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1	(51) Pegawai	Triwulan II	4.[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	(52) Barang	Triwulan II	11.[illegible]	[illegible]	47,[illegible]
[illegible]	(53) Modal	Triwulan II	[illegible]	[illegible]	51,22

*) Blokir Anggaran

Sumber Data : BPSPL Pontianak (Aplikasi Sakti per tanggal 30 Juni 2024)

Dari total pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir (Bulan Juni/Triwulan II) alokasi untuk belanja pegawai sebesar [illegible]%, untuk belanja barang sebesar [illegible]% dan untuk belanja modal [illegible]%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan I sebesar Rp [illegible] ([illegible]%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 PNS.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan II sebesar Rp [illegible] atau 47,[illegible]% dari pagu anggaran Rp 11.[illegible]. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional, digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), sewa kendaraan, pelayanan jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, honor, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Triwulan II sebesar Rp [illegible] (51,22%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
   - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 2 Paket sesuai Kontrak No.SP.[illegible] tanggal 1 April 2024.
   - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Drawer, dan Lemari Sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SP.[illegible] tanggal 1 April 2024.
   - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak No.SP.[illegible] tanggal 23 April 2024.

- Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak No.SPK.45/BPSPL.2/PPK.SPK/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
- Pengadaan Barang Kompos KOMPAK TA 2024 Kelompok Pokdak di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SP/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.48/BPSPL.2/PPK/SP/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai Kontrak Nomor SP.49/BPSPL.2/PPK/SP/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai Kontrak Nomor SP.51/BPSPL.2/SPK/PPK/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar dari keseluruhan target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan II telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan II Tahun 2024 jika dilihat dari nilai [illegible] dari aplikasi e-kinerja sebesar 103,34% dengan kategori Baik. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan II 2024 sebesar Rp 5.275.834.471 atau 44,32% dari pagu anggaran sebesar Rp 11.908.313.000. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan II ini sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Kompak dengan capaian sebanyak 1 kelompok dari target 1 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian sebesar 93,64 dari target sebesar 82 sehingga tercapai 115,37%.
3. Nilai IP ASN dengan capaian sebesar 85,10 dari target sebesar 85 sehingga tercapai 100,99%.
4. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 1 laporan sehingga tercapai 100%.
5. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian 116,67 dari target 84 sehingga tercapai 139%.
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian 100% dari target 83% sehingga tercapai 120%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan II tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan II masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 13 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah direncanakan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Darat.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti yaitu mengusulkan untuk buka blokir anggaran pada RDK.002. Anggaran sudah dibuka pada bulan Juni dan berubah menjadi SDD.001. Selain itu juga telah dilakukan pengumpulan sertifikat bimbingan teknis, diklat dan seminar lingkup BPSPL Pontianak dalam rangka peningkatan kualifikasi IP ASN.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

BPSPL
PONTIANAK

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Sc.

Penyusun:

Ghazianto Raymond P., S.Pi., M.Si.

Ahmad Fathu Rohman, S.Si.

Vita Rimaza Marpaung, S.Si.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

[illegible]

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada negara dan bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder terkait.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Oktober 2024
Kepala BPSPL Pontianak

Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Kinerjaku (Aplikasi Pengelolaan Kinerja) secara daring melalui https://kinerjaku.kkp.go.id. Proses perhitungan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta melihat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 Indikator Kinerja **Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan I yaitu 107,88% (kategori Hijau + Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang tercapai pada Triwulan III yaitu:

1. [illegible] [illegible] kampus dengan capaian sebanyak 3 kelompok dari target 3 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 3 laporan dari target 3 laporan sehingga tercapai 100%.
3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian 133,33 dari target 94 sehingga tercapai 120%.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Diterima dengan capaian 100% dari target 83% sehingga tercapai 120%.

Pagu awal anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp 18.396.113.000. Realisasi anggaran pada Triwulan III berdasarkan aplikasi Omspan per tanggal 30 September 2024 yaitu Rp14.344.889.193 atau 78,00% dari pagu total. Keseluruhan kondisi teknis pelaksanaan program kegiatan yang mendukung kinerja BPSPL Pontianak berjalan dengan baik. Namun, terdapat kendala terkait dengan kegiatan pendukung untuk Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Mangrove Hulu. Hal ini dikarenakan masih belum ada dasar hukum yang kuat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan Pelayanan Perizinan di Perairan Umum Daratan. Terdapat perubahan Rincian Output pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang semula 524.002 (output 27.000 hektar) menjadi 500.001 (output 63 orang) sehingga perlu adanya penyesuaian target IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Upaya yang akan dilakukan pada Triwulan IV dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang belum tercapai yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengusulan sertifikasi kebutuhan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar secara luring atau daring.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Pesisir yang difasilitasi maka perubahan satu menjadi 60 (Orang).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada Triwulan II tahun 2024 yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, pelatihan, lokakarya dan seminar secara langsung atau daring. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) terkait dengan tugas fungsi Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi di Perairan Umum Daratan dan KKP. Berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan didapatkan informasi bahwa KKP masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan umum daratan dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga sampai dengan Triwulan II BPSPL Pontianak belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan Kabupaten Kapuas Hulu.

Daftar Isi

Tim Penyusun ... i

Kata Pengantar ... ii

Ringkasan Eksekutif ... iii

Daftar Isi ... iv

Daftar Gambar ... vi

Daftar Tabel ... vii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ... 1

1.1.1. Kedudukan ... 1

1.1.2. Tugas ... 1

1.1.3. Fungsi ... 1

1.2. Susunan Organisasi ... 3

1.3. Keragaman SDM ... 4

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ... 4

1.4.1. Potensi ... 4

1.4.2. Permasalahan ... 5

1.5. Dasar Hukum ... 6

1.6. Sistematika Penyajian ... 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ... 9

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 ... 9

2.1.1. Visi ... 9

2.1.2. Misi ... 9

2.1.3. Tujuan ... 10

2.1.4. Sasaran Strategis ... 10

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 ... 11

2.3. Metode Pengukuran Kinerja ... 15

2.3.1. Formulasi Pengukuran ... 15

2.3.2. Pedoman Pengukuran Kinerja ... 15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ... 18

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ... 18

3.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak ... 21

3.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak ... 24

[illegible]

3.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 29

3.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 34

3.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 44

3.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan komitmen kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 47

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak 53

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak 59

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak 65

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 74

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak .77

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak 83

3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain 112

3.3. Alokasi Anggaran 113

BAB IV PENUTUP 116

4.1. Kesimpulan 116

4.2. Rekomendasi 116

4.3. Tindak Lanjut 116

LAMPIRAN 117

Daftar Gambar

Gambar 1.1.3.1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 3
Gambar 1.1.3.2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 3.1.1.1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku) 18
Gambar 3.1.1.2. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III 19
Gambar 3.1.1.3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan III 20
Gambar 3.1.1.1. Nilai Capaian PNBP dari Tahun 2022 22
Gambar 3.1.2.1. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya 25
Gambar 3.1.2.2. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 26
Gambar 3.1.2.3. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 27
Gambar 3.1.2.4. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan 27
Gambar 3.1.2.5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang 28
Gambar 3.1.2.6. Sebaran Berat Sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 28
Gambar 3.1.2.7. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III 30
Gambar 3.1.3.1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL 31
Gambar 3.1.3.2. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 32
Gambar 3.1.3.3. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut 32
Gambar 3.1.3.4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan III 33
Gambar 3.1.4.1. Aspek Penilaian EVIKA 34
Gambar 3.1.4.2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Kecamatan Paloh 37
Gambar 3.1.4.3. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan 38
Gambar 3.1.4.4. Pelaksanaan Conservation Goes to School 38
Gambar 3.1.4.5. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi 39
Gambar 3.1.4.6. Pengamatan Populasi Pesut 39
Gambar 3.1.4.7. Survei Kualitas Air Kawasan Mahakam Hulu 40
Gambar 3.1.4.8. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting 41
Gambar 3.1.4.9. Survei Sosial Ekonomi 42
Gambar 3.1.4.10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 43
Gambar 3.1.4.11. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan III 45
Gambar 3.1.5.1. Realisasi Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah 46
Gambar 3.1.5.2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 hingga Triwulan III 46
Gambar 3.1.6.1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama 48
Gambar 3.1.6.2. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 hingga Triwulan III 49
Gambar 3.1.6.3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Komitmen 51
Gambar 3.1.6.4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan III 52
Gambar 3.1.7.1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan III Per Tahun 54
Gambar 3.1.7.2. Serah Terima Bantuan KOMPAK 55
Gambar 3.1.7.3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III 56
Gambar 3.1.7.4. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu 58
Gambar 3.1.8.1. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat 61
Gambar 3.1.8.2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar 61
Gambar 3.1.8.3. Grafik Penanganan Biota Terdampar 62
Gambar 3.1.8.4. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Appendiks di PPN Pemangkat 63
Gambar 3.1.8.5. Dokumentasi pengukuran 63
Gambar 3.1.8.6. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Appendiks di TPI Sungai Kakap 63
Gambar 3.1.8.7. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Appendiks PPI Manggar 64
Gambar 3.1.8.8. Dokumentasi Pengukuran 64
Gambar 3.1.8.9. Workshop Konsultasi [illegible] 64

[illegible]

Gambar 3.1.8.10. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III 68
Gambar 3.1.9.1. Pemeriksaan Surat Rekomendasi 68
Gambar 3.1.9.2. Pemeriksaan SAJ 69
Gambar 3.1.9.3. Pengecekan Arwana 69
Gambar 3.1.9.4. Pemeriksaan [illegible] 70
Gambar 3.1.9.5. Grafik Pendapatan PNBP 70
Gambar 3.1.9.6. Survei Pemanfaatan Arwana 71
Gambar 3.1.9.7. Bimbingan Teknis Identifikasi [illegible] 71
Gambar 3.1.9.8. Diskusi Morfometrik Arwana 72
Gambar 3.1.9.9. Pemantauan dan Peninjauan Stok Produk [illegible] Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan 73
Gambar 3.1.10.1. Identifikasi Pemanfaatan ALBE di Kalimantan Barat 75
Gambar 3.1.10.2. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III 76
Gambar 3.1.11.1. Evaluasi dan Pendugaan Status Biota Laut di Kab. Kubu Raya 79
Gambar 3.1.11.2. Evaluasi dan Pendugaan Status Biota Laut di Kota Singkawang 79
Gambar 3.1.11.3. Evaluasi dan Pendugaan Status Biota Laut di Kab. Tanah Laut 80
Gambar 3.1.11.4. Evaluasi dan Pendugaan Status Biota Laut di Kota Balikpapan 80
Gambar 3.1.11.5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang 80
Gambar 3.1.11.6. Gerakan Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 81
Gambar 3.1.11.7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III 82
Gambar 3.1.12.1. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 84
Gambar 3.1.12.2. Tren Nilai IKPA Triwulan III 84
Gambar 3.1.12.3. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III ....[illegible]
Gambar 3.1.12.4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III ....[illegible]
Gambar 3.1.12.5. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III ....[illegible]
Gambar 3.1.12.6. [illegible] ....[illegible]
Gambar 3.1.12.7. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III ....[illegible]
Gambar 3.1.12.8. Hasil IKP BPSPL Pontianak ....[illegible]
Gambar 3.1.12.9. Monitoring dan Evaluasi Bantuan [illegible] 111
Gambar 3.1.12.10. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III 112

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perbedaan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 11
Tabel 2.2-2 Perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 12
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 14
Tabel 3.1.1.1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 18
Tabel 3.1.1.3. Progres Capaian PIAKI BPSPL Pontianak Triwulan III 21
Tabel 3.1.2.1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 24
Tabel 3.1.2.6. Realisasi Anggaran IKU 2 Triwulan III 29
Tabel 3.1.3.1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 30
Tabel 3.1.3.2. Jumlah Verifikasi Teknis PKKPRL Triwulan III 31
Tabel 3.1.3.3. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III 33
Tabel 3.1.4.1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria 34
Tabel 3.1.4.2. Pembagian Nilai akhir EVIKA 34
Tabel 3.1.4.3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 35
Tabel 3.1.4.4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 36
Tabel 3.1.4.5. Hasil Pengamatan Komunitas Pesut 39
Tabel 3.1.4.6. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mempawah Hulu 40
Tabel 3.1.4.7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III 42
Tabel 3.1.5.1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 44
Tabel 3.1.5.3. Realisasi Anggaran IKU 5 Triwulan III 46
Tabel 3.1.6.1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 47
Tabel 3.1.6.3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Triwulan III 49
Tabel 3.1.6.5. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 50
Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 53
Tabel 3.1.7.3. Realisasi IKU 8 Triwulan III 56
Tabel 3.1.7.5. Realisasi IKU 9 Triwulan III 58
Tabel 3.1.8.1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak 59
Tabel 3.1.8.3. Realisasi IKU 10 Triwulan III 63
Tabel 3.1.9.1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 66
Tabel 3.1.9.3. Realisasi IKU 11 Triwulan III 70
Tabel 3.1.10.1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak 74
Tabel 3.1.10.2. Capaian IKU 12 Triwulan III 76
Tabel 3.1.11.1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak 77
Tabel 3.1.2.4. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III 81
Tabel 3.1.12.1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak 85
Tabel 3.1.12.2. Realisasi Anggaran IKM 14 Triwulan III 87
Tabel 3.1.12.3. Capaian IKM 15 IKA BPSPL Pontianak 89
Tabel 3.1.12.4. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak 90
Tabel 3.1.12.5. Realisasi Anggaran IKM 16 Triwulan III 92
Tabel 3.1.12.6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak 93
Tabel 3.1.12.7. Realisasi Anggaran IKM 17 95
Tabel 3.1.12.8. Kategori Nilai PM SAKIP 96
Tabel 3.1.12.9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak 97
Tabel 3.1.12.10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP 98
Tabel 3.1.12.11. Realisasi Anggaran IKM 18 Triwulan III 100
Tabel 3.1.12.12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak 101
Tabel 3.1.12.14. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Triwulan III 103

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Tabel 3.1.13.15. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak 104
Tabel 3.1.13.16. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak....105
Tabel 3.1.13.17. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak....108
Tabel 3.1.13.18. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah....109
Tabel 3.1.13.19. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak 110
Tabel 3.1.13.20. Realisasi Anggaran IKU 23 Triwulan III....111
Tabel 3.1.13.21. Kategori Nilai Pengawasan Kawasan....112
Tabel 3.1.13.22. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak 113
Tabel 3.1.13.23. Tabel Nilai pengawasan kawasan....113
Tabel 3.1.13.24. Realisasi Anggaran IKU 24 Triwulan III....114
Tabel 3.1.13.1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain....111
Tabel 3.25.1.13.1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III 113
Tabel 3.1.122.3.1.13.2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024 114

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 49/PERMEN-KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sejak terbitnya Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 63 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan yaitu melakukan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan [illegible] Wilayah [illegible] Kabupaten [illegible].

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, sesuai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah antara lain sebagai berikut:

a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didesentralisasikan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah: Monitoring habitat dan populasi dan karakteristik spesifik; Kontrol dan breeding; Memonitor nilai dan kecenderungan konservasi nasional dan internasional (secara ekologis bersifat lintas Negara); Memonitor habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan atau warisan wilayah nasional;
d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/diserahkan kepada daerah (kewenangan pusat), serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah;
e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut;
f. Kehadiran dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir;
g. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam mendukung/mewujudkan tujuan SDG (Sustainable Development Goals), antara lain: mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan fungsi pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan peran serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut menjelaskan Lokasi, Satuan Kerja, dan Wilayah Kerja Masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat dengan satuan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adapun wilayah kerja BPSPL Pontianak meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelas dapat melihat peta di bawah ini.

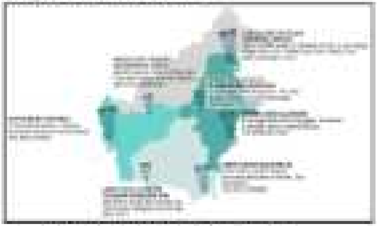

Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, keuangan, dokumentasi dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian, (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat, (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) tim kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajemen yang melaksanakan Indikator Kinerja Manajemen yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

[illegible]

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 memiliki jumlah personil secara keseluruhan sebanyak 73 orang terdiri dari 40 ASN (40 PNS dan 0 PPPK), 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 31 Pegawai Non ASN. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian Pegawai Non ASN yang berjumlah 31 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak tergambar dalam infografis di bawah ini.

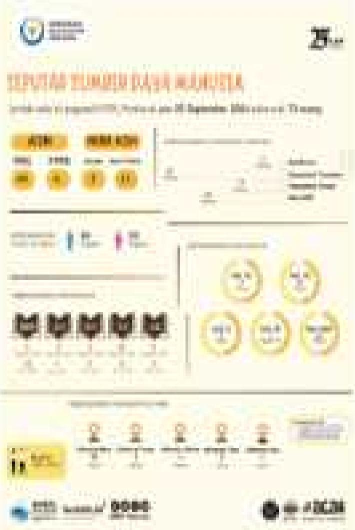

Gambar 1. 1 Info Keragaman SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1 Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.453,39 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total kabupaten/kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 32 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.769,94 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2 Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu diperkuat melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut existing dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini harus disiasati dengan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.

e. Kerusakan abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

g. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil, maupun koordinasi dengan pihak terkait mengembangkan upaya pelestarian ekosistem.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal akibat ketidakseimbangan laut dan wilayah darat sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii. Kegiatan Pendukung.
viii. Realisasi Anggaran
ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja
   b. Lain-lain yang dianggap perlu

[illegible]

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan mengarah titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan utamanya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. membenahi dan memaksimalkan program perikanan budi daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Selain menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam penyusunan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL".

2.1.2 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenang yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP turut serta melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Berdasarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Penataan Ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
    a. Meningkatkan daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
    b. Meningkatkan penanganan dan pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Misi Pelestarian dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan komitmen konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan penanganan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
6. Tujuan meningkatkan kinerja organisasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi, program, dan kegiatan. Selain itu, dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard* (BSC). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

[illegible]

Tabel 3. 2-1 Perbandingan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan Tahun 2023	Sasaran Kegiatan Tahun 2024
(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai [illegible] BPSPL Pontianak
-	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka peningkatan [illegible] di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai [illegible] BPSPL Pontianak	(SK-8) Meningkatnya jejaring dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, tahun 2023 dan tahun 2024

Sedangkan untuk pencapaian IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

IKK Tahun 2023	IKO Tahun 2024
[IKK-1] Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi kebijakan)	Tidak digunakan, diganti dengan: [IKO-1] Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IKK-2] Kerjasama jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Tidak digunakan
Tidak Terdapat IKU	[IKO-2] Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)
[IKK-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IKO-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
Tidak Terdapat IKU	[IKO-4] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)
[IKK-4] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKO-5] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKK-5] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKO-6] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKK-6] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)	[IKO-7] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)
[IKK-7] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKO-8] Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IKK-8] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKO-9] Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
[IK-9] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	[IKO-10] Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
Tidak Terdapat IKU	[IKO-11] Indeks Pelayanan Publik yang diselenggarakan pada BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-10] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	[IKO-12] Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
[IK-11] Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak digunakan, diganti dengan: [IKO-13] Nilai PK SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

IKU Tahun 2023	IKK Tahun 2024
[IK-12] Laporan SPIP yang Dikelola Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IKK-14] Laporan SPIP yang Dikelola Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
[IK-13] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	[IKK-15] Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
[IK-14] Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	[IKK-16] Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
[IK-15] Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IKK-17] Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
[IK-16] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	[IKK-18] Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2023 dan Maret 2024

Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1.	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.500.000
2.	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2.	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	330
3.	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3.	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	3
4.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4.	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	14
5.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5.	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1

[illegible]

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6. Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kemitraan kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kerjasama konservasi yang difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
	7. Kemitraan konservasi yang dilakukan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAKS) yang disalurkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	7
	9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Kelompok)	1
8. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan, pemeliharaan, pelestarian habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dalam rangka penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,75
	15. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	80

[illegible]

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	81
	19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
	20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	34
	21. Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dibuatkan Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	90
	22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
	23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	80
	24. Nilai pengawasan internal keuangan lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	85

Sumber data: BPSPL Pontianak (2023), diolah

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

2.3.1 Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.3.2 Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memonitor pencapaian target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulanan/semesteran/tahunan sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
    a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
    b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari bawah keatas (level III sampai ke level 0); dan
    c. Pencapaian Kinerja atasan merupakan akumulasi/rata-rata/kombinasi/secara langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.
2. Syarat Pengukuran Kinerja

    Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

    Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam merencanakan, memonitor, mengevaluasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data mentah (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengisikan capaian sesuai periode IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja ([illegible])
5. Atasan langsung dari setiap level melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan [illegible]
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat level I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja diatasnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/semester berakhir.

Capaian kinerja triwulanan dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggungjawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggungjawab kegiatan, Sesditjen PRL merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan percepatan pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

[illegible]

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKK). Perhitungan IKU dan IKK dilakukan berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id/. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

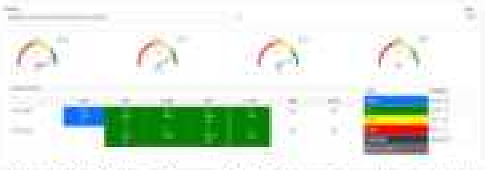

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) lingkup BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu 107,50% (masuk kategori hijau = Baik). NKO mengalami peningkatan sebesar [illegible] dari Triwulan II. NKO IKU pada Tahun 2023 (Triwulan III) sebesar 111,11%. Terdapat penurunan [illegible] dari Triwulan III Tahun 2023. Penurunan nilai disebabkan karena perubahan capaian dan target dan bertambahnya target dalam perhitungan tahunan. Dari 24 Indikator Kinerja Kegiatan, hanya 4 indikator yang memiliki periode penilaian Triwulan III. Terdapat 4 indikator kinerja yang tercapai telah tercapai seluruhnya. Secara singkat capaian kegiatan pada Triwulan III dapat dilihat pada infografis di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

[illegible]

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp[illegible])

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425121) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya ([illegible]) + Pendapatan Perikanan Lainnya ([illegible]) yang diperoleh dari Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

PNBP [illegible] = PNBP [illegible] + PNBP [illegible] + PNBP [illegible]

dimana,

PNBP [illegible] = SAJI DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda

Keterangan:

SAJI DN	•	Pungutan atas Dokumen SAJI (DN) = Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan
Surat Rekomendasi	•	Pungutan atas Dokumen Rekomendasi = Pungutan Perdagangan
PNBP [illegible]	•	Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perikanan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan
PNBP [illegible]	•	Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
PNBP [illegible]	•	Nilai PNBP yang berasal dari Tambahan [illegible] dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:

[illegible] = Nilai Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 0%.

[illegible] = Kerjasama untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang ditetapkan.

Formulasi Penghitungan Pungutan:

Pungutan Pengambilan	=	Jumlah individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Pungutan Perdagangan	=	Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan
Denda	=	Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Rekomendasi

Tabel 3.3.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK1	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Pontianak								
IKU1	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rupiah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
[illegible]	Periode Capaian Tahunan			2.000.000.000	[illegible]	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SIPNBP, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU ditetapkan secara tahunan. Capaian nilai PNBP Triwulan III (per tanggal (periode 1 Januari – 30 September 2024) yaitu sebesar Rp1.928.745.132 atau 96,44% dari target tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena sebelumnya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian sebelumnya dilakukan secara tahunan. Namun untuk progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2024 (Rp1.928.745.132) mengalami peningkatan sebesar 115,06% jika dibandingkan dengan progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2023 (Rp1.676.064.700).

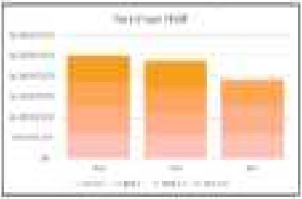

Gambar 3.3.1-1. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tercantum dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tercantum dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar Rp 2.000.000.000,-. Capaian kinerja triwulan I belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Tahun 2023 – 2024 karena IKU ini baru masuk dalam target Renstra di tahun 2024, namun progres nilai PNBP Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 96,44% dari target tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 96,44% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak tercapai target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk menerbitkan dan membayar PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SAJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Juli – September 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian capaian PNBP hingga Triwulan III 2024.

Tabel 3.1.1-7 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Triwulan III

Jenis PNBP	Juli	Agustus	September
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp166.667	Rp333.334	Rp333.334
Pendapatan Perizinan Lainnya	Rp113.020.000	Rp103.192.000	Rp114.240.000
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Rp99.691.816	Rp60.507.000	Rp100.481.000
Jumlah	Rp212.878.483	Rp164.032.334	Rp215.054.334
Total TW III			Rp591.965.151

8. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SAJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Oktober – Desember 2024 pemungutan PNBP untuk layanan dari tim yang ditetapkan oleh BPSPL Pontianak, serta pemungutan PNBP dari Sewa Gedung dan Bangunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima imbalan, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas baik [illegible] maupun [illegible]. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.

Teknik Menghitung:

$TK_{tercapai} = TK_{TW I} + TK_{TW II} + TK_{TW III} + TK_{TW IV}$

Keterangan:

$TK_{tercapai}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah kerja BPSPL Pontianak

TK_{target} = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SKO	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target FY 2024	% Capaian thd Target FY	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			330	0	-	-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya, Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak, Evaluasi dan Penetapan Aksar Bulan Cinta Laut di Kota Makassar, Monitoring Sampah Laut di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kabupaten Sambas. Progres jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Bulan Cinta Laut sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 330 nelayan [illegible] (100% dari target sebesar 400 orang) yang tersebar [illegible] masing-masing 40 orang di [illegible] lokasi Bulan Cinta Laut.

[illegible]

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu sebanyak 6 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NEIS belum dapat dihitung. Pembahasan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NEIS, rasio anggaran dari selisih dari NEIS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengatur kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Penunjang

Pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 88 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jaraju Besar sebanyak 33 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 55 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,98 ton. Sampah tangkapan dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.863.500.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Gambar 3.1.61. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

b. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**
Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 22 orang, Kel. [illegible] sebanyak 20 orang dan Kel Kuala sebanyak 33 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,9 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 5,07 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp15.005.000.

Gambar 3.1.62. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

c. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut**
Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 75 orang dan Desa Sawah Layung sebanyak 5 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Gemar Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.194.960.

[illegible]

Gambar 3.1.5-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

c. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan**
   Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 20 orang). Kegiatan ini juga bermitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 35,04 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.260.000.

Gambar 3.1.5-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

d. **Monitoring Sampah Pasar dan Laut di Kota Singkawang**
   Monitoring sampah pasar dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pasar dan laut sebelumnya pada pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan menghitung jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pasar Yeci. Pada masing-masing lokasi ditemukan sampah sebanyak 1.348 kg di Pantai Singka, 7.687 kg di Pantai Kuala Singkawang, dan 5.678 kg sampah di Pantai Yeci. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Gambar 3.1.2-3. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

f. **Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas**
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan oleh Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta kegiatan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik dan kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng biskuit dan lain sebagainya.

Gambar 3.1.2-4. Kegiatan Bersih Sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah dan kemasan makanan dan minuman, botol kaca dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4244.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3.7. Realisasi Anggaran RO 3 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4044.QDC.001.307] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp930.000.000	Rp715.252.271 (55,42%)	-
	TOTAL	Rp930.000.000	Rp715.252.271 (55,42%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung RO ini pada Triwulan III (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp715.252.271 atau 55,42% dari pagu anggaran sebesar Rp 930.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini:

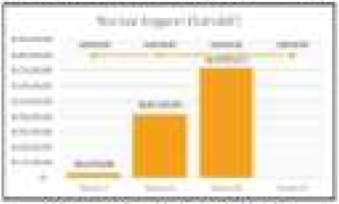

Gambar 3.1.3.7. Realisasi Anggaran RO 3 Triwulan III

h. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember yaitu menyusun laporan kegiatan Bulan Cinta Laut yang telah dilaksanakan.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

RO 3. Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan kebijakan pemerintah/peraturan yang berlaku melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang existing dan/atau verifikasi perizinan. Teknik menghitung dilakukan dengan mengkompilasikan dan menyampaikan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Tabel [illegible] Capaian IKU [illegible] BPSPL Pontianak

SK-[illegible]	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU-[illegible]	Dokumen operasionalisasi pedoman pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan	% Realisasi thd Target thn	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	Periode Capaian Tahunan			3	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Matriks IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah Kerja BPSPL Pontianak, verifikasi kelayakan permohonan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020-2024 yaitu persentase penyelesaian pedoman sebesar 100% di tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, namun pada tahun 2024 terdapat target sebesar 3 Dokumen. Capaian kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun berupa dokumen operasionalisasi pedoman pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan saat ini telah [illegible] dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang tata, kewajiban dan sanksi bagi subjek pemanfaatan ruang laut. Selain itu BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Stasiun PSDKP Pontianak dan Stasiun PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga IKE belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan biaya IKU, realisasi anggaran dan capaian dari IKU dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan pemaduan teknis secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Pada Triwulan III, pendampingan dalam verifikasi teknis PKKPRL telah dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut kepada 33 pemohon pemanfaatan ruang laut di wilayah Kalimantan. Verifikasi teknis KKPRL terbanyak dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 30 pemohon, sementara verifikasi teknis paling sedikit dilakukan di Kalimantan Selatan sebanyak tiga pemohon.

Tabel 3.1.3-2. Jumlah Verifikasi Teknis KKPRL Triwulan III

Provinsi	Jumlah Pemohon	Waktu Pelaksanaan
Kalimantan Timur	30	Juli - September
Kalimantan Selatan	3	Juli & September
Total	33	Juli - September

Kegiatan ini juga didukung salah satunya dengan penilaian teknis secara luring di Kota Balikpapan pada tanggal 4 – 6 September 2024. Penilaian teknis dan verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan diantaranya untuk Permohonan KKPRL Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, [illegible] dan [illegible] Kelompok Nelayan Budidaya [illegible], dan [illegible].

Gambar 3.1.3-1. Verifikasi Lapangan Permohonan KKPRL

b. Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Telah dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk pelaku pemanfaatan ruang laut sebanyak 37 subjek yang berada di Kalimantan Selatan (4 Subjek), Kalimantan Timur (32 Subjek) dan Kalimantan Barat (1 Subjek).

[illegible]

Gambar 3.1.3-8. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. **Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut**

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024 di Hotel [illegible] Pontianak. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perizinan pemanfaatan ruang laut pada Nelayan di Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi Sosial Budaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa berdasarkan mandat UU [illegible] kewenangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut berada di Pemerintah Pusat. [illegible] dan penerbitan [illegible] adalah hasil penetapan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar penerbitan Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan penerbitan persetujuan KKPRL disertakan 14 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk melestarikan biota laut dan ekosistem [illegible], memberdayakan masyarakat dan menghormati kepentingan bersama antar pemanfaat ruang laut salah satunya adalah nelayan. Jadi tidak ada privatisasi untuk para pemegang persetujuan KKPRL karena diatur kewajiban memberikan akses nelayan.

Gambar 3.1.3-9. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

d. **Kegiatan Pendukung Lainnya**

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana aksi pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 29 s.d. 30 Juli 2024, koordinasi ke Direktorat PRL pada Pertemuan Teknis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tanggal 12 – 14 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2063.PBT.009] Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3.5. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III

No.	Komponen/Sub komponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2063.PBT.009.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp190.813.000	Rp54.481.298 ([illegible])	-
2.	[2063.PBT.009.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp434.190.000	Rp233.032.133 ([illegible])	-
3.	[2063.PBT.009.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp 560.000.000	Rp436.707.678 ([illegible])	-
	TOTAL	Rp 1.185.003.000	Rp649.241.058 ([illegible])	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp649.241.058 atau [illegible] dari pagu anggaran sebesar Rp 1.185.003.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Jasa.

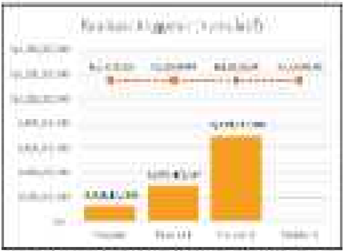

Gambar 3.1.3.4. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, melakukan verifikasi teknis permohonan KKPRL lanjutan untuk bulan Oktober – Desember, serta melakukan monitoring dan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Selain itu penyusunan laporan kegiatan direncanakan pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Konservasi Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 43.447,80 Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) [illegible] Wilayah [illegible] Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

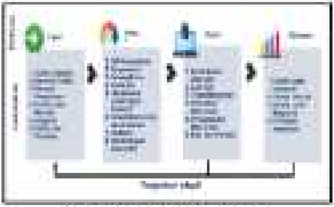

Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10%	9
Proses	8	10%	12
Output	6	10%	15
Outcome	4	20%	6
Total	24		42

Tabel 3.1.4-2. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA

Kriteria	Ni	Nmax	NK (%)	BK	Nak (%)
Input	...	1070	...	0,25	...
Proses	...	400	...	0,25	...
Output	...	420	...	0,25	...
Outcome	...	420	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					

Keterangan:
Nilai Indikator (Ni) : Hasil pengukuran skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (NMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (Nk) : Ni / NMax X 100%
Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak) : Nk x Bk
Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<40%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rencana kawasan sudah ditetapkan dan proses yang dijalankan sudah dilaksanakan namun masih dibutuhkan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>40-80%	Perak	Dikelola Optimum	Kegiatan pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan sebagian tujuan pengelolaan sudah tercapai
>80%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat yang dicapai dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SS-4	Terkelolanya kawasan konservasi dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak								
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas Kawasan Konservasi nasional di wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
35,55	Periode Capaian Tahunan			74	-	-	-	17,50 %	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan Konservasi di Perairan Mempawah Hulu mendapatkan nilai akhir sebesar 83,74% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Nilai EVIKA BPSPL Pontianak mengalami peningkatan sebesar 15,21% dan telah mencapai target Perjanjian Kinerja sebesar 74% dengan persentase capaian sebesar 113%. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

[illegible] dan telah Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi (Conservation Goals) EVIKA, sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi, survey [illegible] survey sosial ekonomi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 34,44% lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 4%. Hal ini karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 38,44%. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 52,75% sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 18,31%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan sebesar 17,5 juta ha di tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Selain itu, satuan yang digunakan dalam perjanjian kinerja berbeda dengan target Renstra Ditjen PKRL sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 38% di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Target tersebut dapat tercapai di tahun 2026 yaitu dengan nilai EVIKA sebesar 38,44%. Capaian Kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 52,75% sehingga telah melebihi target dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Perlu upaya peningkatan koordinasi dengan kelompok masyarakat serta stakeholder terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu perlu peningkatan alat penunjang survei terutama dalam monitoring Pesut Mahakam. Kendala tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi. Terdapat kendala pada pelaksanaan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu yang belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan belum terdapat aturan mengenai perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah perairan darat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Penunjang

Beberapa kegiatan penunjang lainnya s.d. pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi**

Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PRL dan didampingi oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu BPSPL Pontianak. Hasil penilaian didapatkan sebagai berikut:

- Skor penilaian kriteria input 763 dari total 1075 (71%)
- Skor penilaian kriteria proses 235 dari total 455 (52%)
- Skor penilaian kriteria output 220 dari total 550 (40%)
- Skor penilaian kriteria outcome 1218 dari total skor 2183 (62,75%)

Gambar 2.1.4.2. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan pada tahun 2024 mencapai nilai skor sebesar 52,75% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, melengkapi sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan, Menyusun dan melengkapi SOP pengelolaan beserta pelaksanaannya, meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melakukan program perlindungan yang terencana, pemantauan target konservasi dan sosial ekonomi secara berkala, melakukan koordinasi terkait peraturan yang mengakomodasi perikanan dan pemanfaatan di perairan darat, meningkatkan program pendampingan masyarakat, meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat, monitoring dan analisis kondisi target konservasi di masing-masing zona.

b. **Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Umum**

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Perairan Umum Daratan. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya menguatkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan Kawasan Konservasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Gambar 3.1.4-5. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

c. *Conservation Goes to School*

Kegiatan Conservation Goes to School di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu upaya pembentukan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan peduli lingkungan hidup melalui perlindungan dan pelestarian kepada generasi muda di wilayah Kawasan Konservasi. Acara ini telah diselenggarakan di MTsN 2 Kutai Kartanegara, SMPN 1 Muara Wis, SMPN 1 Muara Kaman dan SMPN 1 Muara Muntai. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang ekosistem Pesut Mahakam. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya khususnya sumber daya air dan kehidupan di DAS Mahakam dengan bijak dan menjaga prinsip kelestarian. Sebagai bahan evaluasi, kegiatan diakhiri dengan kuis interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan.

Gambar 3.1.4-6. Pelaksanaan Conservation Goes to School

d. **Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi**

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah kepada masyarakat/kelompok masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait dalam rangka upaya pengelolaan, serta pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Muara Kaman dan Desa Muara Kaman Ilir pada tanggal 3 s.d. 4 September 2024. Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa tujuan dari Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi yaitu untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem, habitat dan sumber daya hayati di dalam Kawasan. Adapun zonasi Kawasan Konservasi dibagi menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas, Zona Lainnya dan Zona Rehabilitasi. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang ekosistem Pesut Mahakam yang bernilai strategis secara nasional serta upaya-upaya untuk melindungi habitat pesut. Selain itu, penyampaian materi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

kawasan konservasi dilakukan dalam pembuatan bahan bahan dalam bentuk poster dan X-Banner kepada masyarakat yang terdiri dari tamu dan stakeholder.

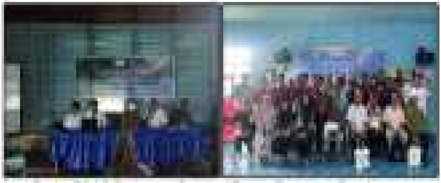

Gambar 3.1.4-4. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan [illegible]

c. **Survei Jenis Biota Dilindungi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam pada periode Juli - September 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan keberadaan pesut dilakukan menggunakan kapal Orcaella milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 - 18.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal sehingga pengamat dapat mengamati dari atas kapal. Selain itu, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan.

Gambar 3.1.4-5. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari di atas kapal, didapatkan tujuh kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 42 ekor. Individu terbanyak yang diamati berada di muara Pahu yaitu sebanyak 14 ekor. Sementara, individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Pahu yaitu sebanyak dua ekor. Waktu kemunculan pesut sebagian besar terlihat pada sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Tengah. Waktu paling pagi ditemukannya pesut yaitu pukul 08.17. Sementara waktu paling sore ditemukannya pesut yaitu pukul 18.27.

Tabel 3.1.4-5. Hasil Pengamatan Kemunculan Pesut

No	Lokasi Kemunculan	Jumlah Pesut	Waktu	Aktivitas
1.	[illegible]	9	12.12	Sighting
2.	Sungai Kedang Pahu	2	14.57	Sighting
3.	Muara Pahu	6	17.58	Sighting

[illegible]

4	Hulu Sirinsa Ilir	14	15.48	Ringan
5	Muara Sungai Sembayang	6	38.11	Ringan
6	Muara Pela	3	16.01	Ringan
7	Liang Ulu	1	16.08	Ringan

Pada hasil status pengamatan kualitas air menunjukan status kondisi perairan tercemar ringan baku mutu sungai dari kelasnya kelas 2 yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di stasiun pengukuran menunjukan nilai suhu berkisar antara 23,4 – 31,5. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 2,7 – 5,5. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,5 – 7,25. Sementara nilai TDS berkisar antara 10 – 45 ppm.

f. **Monitoring Kualitas Air di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Kegiatan survei monitoring kualitas air di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan pada periode bulan Juli – September 2024. Monitoring kualitas air dilakukan langsung di 14 titik stasiun. Parameter yang diukur meliputi kecepatan arus, kecerahan, suhu air, konduktivitas, oksigen terlarut, dan total bahan terlarut. Alat yang digunakan yaitu Water Quality Checker Horiba dan DO.

Gambar 3.1.4-7. Survei Kualitas air Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Triwulan III tahun 2024 diketahui bahwa hasil parameter perairan sungai Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di dalam ambang batas baku mutu sesuai menurut PP Nomor 22 tahun 2021.

Tabel 3.1.4-4. Hasil Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Parameter	Tertinggi	Terendah	Rata-rata
Suhu (°C)	33,8	27,4	29,59
pH	6,85	5,8	6,34
TDS (mg/L)	35,8	12,2	24
DO (mg/L)	18,6	3,6	8,57
EC (S/m)	79,8	26,0	49,26
Kuat Arus (m/s)	1,84	0	0,76

g. **Pendataan Ikan Ekonomis Penting di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilakukan pada tanggal 14 – 15 September 2024 di Desa Muara [illegible], Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini mencakup kegiatan dan penyediaan data dan informasi kawasan konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampel pengambilan data dilaksanakan dari zona pemanfaatan dan zona inti di dalam KK Mahakam Hulu. Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan puyau (*Osteochilus vittatus*) dan ikan [illegible] (*Ompok miostoma*). Sebanyak 75 ekor ikan puyau dan 75 ekor ikan [illegible] dilakukan pengukuran meristik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang tinggi pangkal ekor, panjang tinggi belahan ekor, jari-jari keras pada sirip, jari-jari lemah [illegible] pada sirip [illegible] (Dorsal, Pectoral, Ventral, Anal, dan Caudal (D-P-V-A-C). Selain itu pengukuran bobot gonad, dan pembedahan [illegible].

Gambar 2.5.48. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

h. **Survei Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada tanggal 9-13 September di Desa Muara Wis dan Desa Muara Muntai Ilir. Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Wawancara dilakukan kepada pelaku, pemimpin dan [illegible] sebagai subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan, dan sebagainya. Subjek berada di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara purposive sampling, sehingga sampel data dianggap sebagai perwakilan yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Informasi yang dibutuhkan oleh responden diantaranya: profil responden, sikap terhadap kawasan konservasi, dukungan terhadap kawasan konservasi perairan, relasi masyarakat dengan kawasan konservasi, profil nelayan dan produksi, pola pemanfaatan [illegible], kelompok dan kelembagaan masyarakat, pengolahan dan pemasaran, konsumsi rumah tangga. Hasil akhir diperoleh 30 responden yang memiliki sebagai nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan.

Gambar 3.1.4-9. Survei Sosial Ekonomi

i. **Focus Group Discussion Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu**
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada tanggal 15 – 20 September 2024 di Desa Muara Wis, Desa Pela dan Desa Liang Ilir. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menampung usulan terkait pengelolaan Kawasan Konservasi di wilayah Hulu. Beberapa permasalahan di kawasan konservasi yang disampaikan oleh peserta FGD diantaranya: pendangkalan danau akibat pengendapan tanah, gangguan dan dampak ramainya kapal ponton, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan berkurangnya area tangkap pada [illegible] Zona Inti. Usulan prioritas [illegible] dari masyarakat yaitu penegakan hukum bagi pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan, monitoring pesut, dan serta pelatihan pengolahan dan budidaya ikan.

Gambar 3.1.4-10. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

j. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi**
Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan Agustus dan September 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan yaitu CCTV dan Rumah Rakit untuk Monitoring Pesut.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3362.PBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [3362.RBx.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran IKU 4 Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[3362.PBW.001.052] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan	Rp [illegible]	Rp[illegible] ([illegible]%)	-

	Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
2.	[2063.PBW.001.056] Pelayanan Publikasi Bersama Kawasan Konservasi	Rp120.000.000	Rp0 (0%)	-
3.	[2063.PBW.001.066] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp21.347.000	Rp[illegible] ([illegible])	-
4.	[2063.PBA.002.051] Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp855.000.000	Rp287.196.552 (34,[illegible]%)	-
5.	[2063.PBA.002.052] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp444.311.000	Rp200.730.284 ([illegible])	-
6.	[2063.PBA.002.053] Pendampingan Masyarakat	Rp1.187.312.000	Rp[illegible] (71,[illegible]%)	-
7.	[2063.PBA.002.054] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp246.280.000	Rp1.278.400 ([illegible])	-
TOTAL		Rp[illegible]	Rp1.[illegible] ([illegible])	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp1.[illegible] atau [illegible]% dari pagu anggaran sebesar Rp [illegible]. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

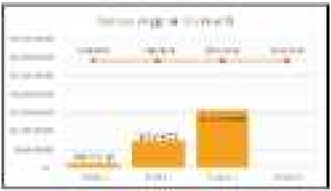

Gambar 2.1.4-41. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU hingga Triwulan III

B. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan di Triwulan IV diantaranya: monitoring sosial ekonomi, pendataan jenis ikan ekonomis, survei pemanfaatan kawasan, sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi [illegible] di Kawasan Konservasi [illegible]. Selain itu penyusunan laporan kegiatan juga dilaksanakan pada Triwulan IV.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan/pengajuan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau pendampingan lain sesuai kondisi Kawasan Konservasi. Teknik perhitungan indikator kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses pengajuan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK 5	Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan Konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
2	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU tersebut pada tahun 2023 sebesar 2 daerah, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 1 daerah.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebesar 32,5 juta Ha di Tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 1 dokumen di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

[illegible]

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini bergantung dari keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dalam pengusulan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah sebagai dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada TW II dan III tahun 2024 yaitu Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Sebuku dan Pulau Sinelak & Kawasan Konservasi Perairan Tanjung Palas Timur. Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian kawasan konservasi yang berada di Kalimantan Utara didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 705 dari total skor 2780 (25,36%). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: Penetapan dokumen rencana pengelolaan sesuai dengan PERMEN KP No. 31 Tahun 2020; Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kawasan Konservasi; Peningkatan alokasi Anggaran Pengelolaan Kawasan Konservasi; Penyusunan dan Penerapan SOP Pengelolaan dan Perizinan Kegiatan di Kawasan Konservasi; Peningkatan intensitas Pengawasan dan Patroli; Melakukan kegiatan pemantauan dalam hal pendampingan ke kelompok masyarakat; Peningkatan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi; Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dengan berkolaborasi dengan akademisi dan lainnya.

Gambar 3.1.8-1. Fasilitasi Penilaian EVIKA di Kalimantan Utara & Kalimantan Tengah

Sementara itu, penilaian EVIKA di Kalimantan Tengah dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam Sampai Tanjung Keluang Serta Perairan Sekitarnya. Berdasarkan pertemuan verifikasi hasil penilaian Kawasan Konservasi yang berada di Kalimantan Tengah didapatkan jumlah skor penilaian sebesar 1483 dari total skor 2780 (53,35%). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan diantaranya: - Mengusulkan BLUD sebagai status UPTD; Dokumen Rencana Pengelolaan perlu disusun kembali dengan menyesuaikan dengan Permen KP No. 31/2020; Perlu ditambahkan jumlah SDM serta ditingkatkan kompetensi pengelola kawasan konservasi sesuai dengan fungsi pengelolaan kawasan konservasi. Rekomendasi penilaian EVIKA agar dijadikan dasar dalam melakukan pengusulan anggaran pengelolaan kawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

konservasi yang berasal dari APBN, APBD atau sumber pendanaan lainnya; Perlu meningkatkan frekuensi kegiatan di bidang pengamanan minimal 3 bulan 1 kali dengan melibatkan PSDKP dan pihak terkait lainnya serta mendokumentasikan pelaporan dengan baik; Perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan penjangkauan, penyadartahuan dan pemberdayaan masyarakat dengan menyesuaikan target populasi masyarakat yang dijangkau dengan baik; Perlu dilakukan kegiatan pendukung perizinan dalam bentuk sosialisasi atau penyadartahuan, pelayanan, materi dan informasi perizinan serta prosedural pemberian izin perikanan dan lainnya yang dilakukan di dalam kawasan konservasi.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.EBA.097] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.9.5. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2362.EBA.097.001] Fasilitasi kegiatan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp84.927.482 (84,93%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp84.927.482 (84,93%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp84.927.482 atau 84,93% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

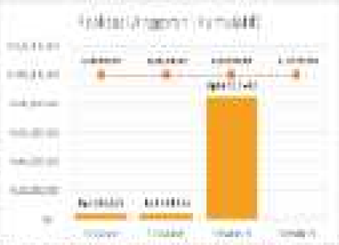

Gambar 3.1.9.5. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 3 hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja [illegible]. Komunikasi dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan konservasi. Selain itu, penyusunan laporan juga dilaksanakan sesuai pada Triwulan III.

[illegible]

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan draf kesepakatan kerja sama yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan kawasan konservasi [illegible] laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK 6	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 6	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TH 2024	% Realisasi thd Target TH	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	1	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)". Sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan III, capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun terdapat progress kegiatan pencapaian target kesepakatan kerja sama, sehingga progress capaian untuk IKU ini sebesar 100%. Progres kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 37/DJPKRL/KS.220/V/2024 dan Nomor B-[illegible] tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan [illegible] Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada [illegible] Mei 2024 di [illegible] Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)".

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Jangka Menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (juta hektar) 14 juta hektar pada 2020 menjadi 32 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

capaian kinerja belum ditentukan karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan sejumlah kemitraan/kerja sama dan komersial dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 5 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 belum dapat kita bandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun progres kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 20% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat menunjang tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya draf Perjanjian Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, draf tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat DJPKRL untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan belum tercapai target di Triwulan III, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor Nomor 27/DJPKRL/KS.330/V/2024 dan Nomor B-500.5/KSDH/274-38/05/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 22 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.6.1. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2042.PBD] Kerja Sama, dengan Rincian Output [RO 001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut berdasarkan komponen sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 4 pada Triwulan III

No.	Komponen/Sub komponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	3593.PBC.001.051.A2 Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp75.000.000	Rp66.233.471 (88,31%)	-
	TOTAL	Rp75.000.000	Rp66.233.471 (88,31%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 4 Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp66.233.471 atau 88,31% dari pagu anggaran Rp75.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Barang (Spanduk, Penyelenggaraan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan Kesepakatan), dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transport Peserta).

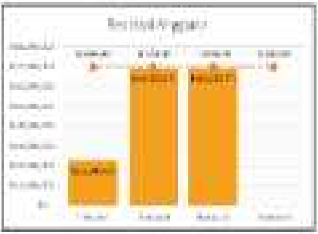

Gambar 3.1.4-6. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 hingga Triwulan III

Output yang telah dicapai pada Triwulan III dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2024.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

a. Pembahasan Draf Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretariat Ditjen PKRL, Direktorat Jenderal PKRL, BPSPL Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pihak terkait lainnya.

b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

IKU 7. Kemitraan konservasi yang dibinakan di Wilayah Kerja SPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat melalui: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan indikator Kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menghimpun kesepakatan kemitraan yang dibuat di wilayah kerja SPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Tabel 3.1.8.3. Capaian IKU 7 SPSPL Pontianak

SK-4	Meningkatnya pelaksanaan kemitraan dan kolaborasi konservasi, pesisir, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja SPSPL Pontianak								
IKU 7	Kemitraan konservasi yang dibinakan di Wilayah Kerja SPSPL Pontianak (Kesepakatan)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra SPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PKRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TH 2024	% Realisasi thd Target TH	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	100	3	-	-	-

Sumber data: SPSPL Pontianak dan Dit. PRKL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang dibinakan di Wilayah Kerja SPSPL Pontianak (Kesepakatan)", sehingga dapat dikatakan pada tahun 2024 mengalami peningkatan capaian. Pada Triwulan III capaian tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian adalah tahunan. Namun progress kegiatan telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga progress untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Progress kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara SPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan Nomor B.1480/SPSPL.3/KS.220/V/2024 dan Nomor 6555/UN17.4/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengkajian Sumber Daya Perikanan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat pada 23 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Kemitraan konservasi yang dibinakan di Wilayah Kerja SPSPL Pontianak (Kesepakatan)", sehingga Triwulan III tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

IKU ini mendukung target jangka menengah dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan (kumulatif) 13 juta hektar pada 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024. Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan rencana jangka menengah karena pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu kesepakatan jejaring kemitraan/kerja sama dan komitmen dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 5 kesepakatan pada 2024. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra karena pelaporan capaian pada Renstra (IKU) dilakukan secara tahunan. Namun prognosa kegiatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 20% dari target renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Prognosa kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat mendorong tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kerjasama BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun draf Perjanjian Kerjasama tersebut telah diajukan permohonan paraf kepada Sekretaris Ditjen PRL dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III, sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan capaian NPSS, realisasi anggaran dan output dari NPSS dengan persentase realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan Nomor B.1463/BPSPL.3/KS.220/V/2024 dan Nomor 0352/UN17.10/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 20 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.8.3. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) 2332.PBG Kerja Sama, dengan Rincian Output (PBG.001) Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Kendala
1.	2352.PBE.001.051.A Mitra Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp99.288.436 (99,29%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.288.436 (99,29%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 7 Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.288.436 atau 99,29% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi); Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas); Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan); dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transport Peserta dari Pulau Pulau di Kalimantan Timur).

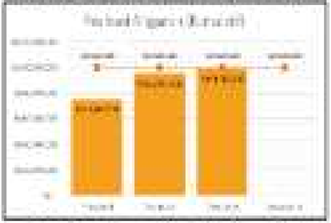

Gambar 3.1.9-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Triwulan III

Output yang telah dicapai pada Triwulan III dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi di Triwulan IV Tahun 2024 adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknik menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7.1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK 7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
3	2	2	100	2	100	3	66,67	-	

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-PRIMA, September 2024

I. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 telah dilakukan pengukuran dengan capaian sebanyak 1 (satu) Kelompok Masyarakat yang telah diserahkan Bantuan Pemerintah dari target Triwulan III sebesar 1 (kelompok) dan target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi terhadap target triwulanan sebesar 100% dan kumulatif terhadap target tahunan sebesar 100%. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu pencairan dan serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sempadan Lestari di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

II. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 1 kelompok atau 33% menurun. Tren capaian kinerja IKU ini pada Triwulan III mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp345.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp243.846.000 pada tahun 2024.

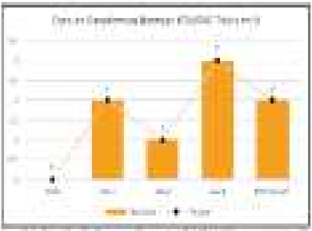

Gambar 3.1.24. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK Triwulan III tiap Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Capaian kumulatif Triwulan III tahun 2024 sebanyak 2 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 66,67% dari target Rencana Strategis BPSPL Pontianak. Hal itu disebabkan terdapat penurunan target kinerja dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok yang disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp348.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp232.548.000 pada tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2023. Hal ini disebabkan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp348.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp232.548.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada kesiapan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan tahap awal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

7. Kegiatan Penunjang

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang tercapainya IKU yaitu:

a. **Penyampaian Hasil Identifikasi**

Penyampaian Hasil Identifikasi dan Verifikasi Pokmaswas Pesisir dilakukan melalui melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor B.1444/DJPRL.5/PRL.440/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.

b. **Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan**

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KOMPAK melalui:

- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) nomor B.2026/PP.2/13/PRL.460/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 84/BPSPL.3/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 untuk Pengadaan Barang Bantuan KOMPAK TA. 2024 Kelompok [illegible] Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
- Berita Acara Pembayaran No. 61-1/BPSPL.3/PPK/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
- Berita Acara Pembayaran No. 61-2/BPSPL.3/PPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BAPB.20/BPSPL.3/PPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No. 30/BPSPL.3/PPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

c. **Serah Terima Bantuan**

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat Sampatau Lestari dan Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 20 September 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kapal speedboat bermesin fiber beserta kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp. 99.900.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi B.2090/BPSPL.3/PRL.440/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Gambar 3.1.7-6. Serah Terima Bantuan KOMPAK

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2563.QBA.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7.2. Realisasi IKU 8 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2063.QBA.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp 252.545.000	Rp243.011.995 (96,22%)	-
TOTAL		Rp 252.545.000	Rp243.011.995 (96,22%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp243.011.995 atau 96,22% dari pagu anggaran sebesar Rp 252.545.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

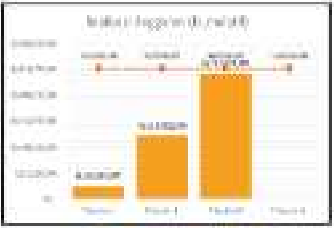

Gambar 3.1.7.3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang telah mendapatkan bantuan di tahun berjalan. Menyusun laporan penggunaan dan serah terima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

IKU 9. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan Konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Kelompok masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan anggota dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknis menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak sebagai berikut:

SK 2	[illegible] di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 4	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Diklasifikasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru/Alternatif								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	3	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III yaitu koordinasi awal dan identifikasi peningkatan mata pencaharian alternatif di Kawasan Konservasi Mempawah Hulu.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Diklasifikasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 sebanyak 3 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum terdapat progres kegiatan yang dilakukan karena draft anggaran baru diterima pada bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2062.BDC.002] Masyarakat Penerima Manfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Target Rincian Output juga mengalami perubahan dari 1 Kelompok menjadi 55 Orang, sehingga terdapat perbedaan antara target Rincian Output dengan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun ini, perlu berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja dan menyesuaikan target PK dengan target RO.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan RPD, sehingga anggaran dan sesuai dari RPD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

a. Identifikasi Kelompok Untuk Mata Pencaharian Alternatif di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu.

Kegiatan identifikasi kelompok dilakukan pada tanggal 20-21 Juni 2024 bertempat di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk mata pencaharian yang dapat dijadikan alternatif selain sebagai nelayan bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu wawancara menggunakan alat panduan kepada kelompok pada enam desa: Desa Sangkuliman, Desa Pela, Desa Liang Ulu, Desa Liang Ilir, Desa Sebelimbingan, Desa Kota Bangun Seberang. Hasil dari wawancara secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar responden berprofesi sebagai nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan.

Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.RBA.005] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realisasi anggaran karena blokir anggaran baru dibuka pada bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2362.QCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Triwulan III

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	[illegible]
1.	[2362.QCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp 350.000.000	Rp65.594.331 (18,74%)	-
	TOTAL	Rp 350.000.000	Rp65.594.331 (18,74%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan pelatihan dalam rangka fasilitasi mata pencaharian alternatif kepada nelayan yang berlokasi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga ditargetkan selesai pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Kima, Lola, Terubuk, Pari Air Tawar, Karang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Kima, Lola, Terubuk, dan Pari air Tawar.
b. Perbaikan habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Karang.
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8.1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK 8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 13	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
13	Periode Capaian Tahunan			7	-	7	-	22	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan e-Monev, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan I 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Kima (penyediaan data populasi), Karang (pembuatan Gene dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Sementara progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 yaitu untuk 3 jenis berikut: Lola (penyediaan data populasi), Ikhumama Hiu dan Pari Appendiks (penyediaan data populasi) dan Mamalia Laut (respon cepat penanganan mamalia laut terdampar). Total progress kegiatan kumulatif yang sudah dilakukan hingga Triwulan III yaitu 6 jenis ikan terancam punah telah dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak memiliki target triwulanan. Namun, pada Triwulan III tahun 2023 terdapat progres capaian kumulatif sebesar 8 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 (kumulatif 6 jenis), maka progres kegiatan mengalami penurunan sebesar 25% dari progres kegiatan pada Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan kumulatif Triwulan III sebanyak 6 jenis memiliki peran sebesar 30% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 9 jenis di tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra Ditjen PKRL karena tidak memiliki target triwulanan. Namun, progres kegiatan kumulatif Triwulan III sebanyak 6 jenis memiliki peran sebesar 66,67% dari capaian target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data sebaran penyu, respon cepat mamalia laut terdampar dan evaluasi/kajian biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat mamalia laut terdampar memerlukan informasi yang akurat dan menyeluruh yang memadai, sehingga perlu koordinasi dan kerja sama yang aktif dengan jejaring. Selain itu, akses lokasi kejadian biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring penanganan di wilayah kerja sebagai ujung tombak respon cepat biota terdampar. Pada Triwulan sebelumnya, belum terdapat mata anggaran untuk Pendataan Populasi Tembakul dan Pari Air Tawar sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Sekretaris Ditjen PKRL terkait dengan revisi anggaran kedua kegiatan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Pemberdayaan jejaring penanganan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

a. **Survei Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan**

Kegiatan penyediaan data populasi lola (*Trochus niloticus*) di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 8 – 14 September 2014. Sebelum survei dilakukan koordinasi dengan BKSDA dan PSDKP Kalimantan Selatan untuk mencari informasi mengenai sebaran lola dan penangkapan lola di Kalimantan Selatan. Selain itu dilakukan koordinasi juga dengan Kelompok Masyarakat Pesisir yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi mengenai informan yang mengetahui lokasi sebaran lola. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk melakukan pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan nelayan sekitar terkait lokasi potensial Lola di Pulau Kerayaan.

Gambar 3.1.8-1. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat

Survei lapangan dilakukan di 3 lokasi/stasiun pengamatan yang merupakan lokasi potensial berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pemetaan Partisipatif terhadap masyarakat pada kegiatan FGD. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan [illegible] pada titik sampel. Stasiun pertama berlokasi di bagian barat Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 4 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun kedua berlokasi di bagian barat daya Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 11 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun ketiga berlokasi di bagian timur Pulau Kerayaan. Ditemukan sebanyak 9 individu lola di sekitar transek pengamatan. Total sebanyak 24 individu lola yang ditemukan selama pelaksanaan survei penyediaan data populasi Lola di 3 lokasi/stasiun pengamatan di sekitar Pulau Kerayaan.

b. **Penanganan Biota Laut Dilindungi Terancam Punah**

Selama periode Triwulan III (Juli hingga September 2014) terdapat 14 (empat belas) informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang [illegible]. Terdapat 4 (empat) jenis biota dilindungi dan/atau terancam punah yang dilakukan penanganan yaitu paus, penyu, dugong dan pari. Sebanyak 2 (dua) kejadian ditemukan dalam kondisi hidup (kode 1), 12 (dua belas) kejadian menyatakan biota dengan kondisi mati (kode 2, 3 dan 4). Penanganan biota dalam kondisi hidup dilakukan pengembalian ke habitatnya, sedangkan penanganan biota mati dengan cara dikuburkan pada sekitar lokasi penemuan.

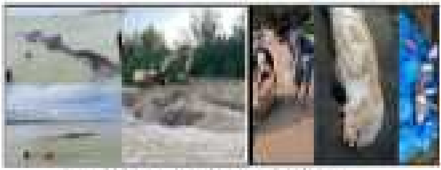

Gambar 2.1.9.2. Dokumentasi Penanganan Biota Terdampar

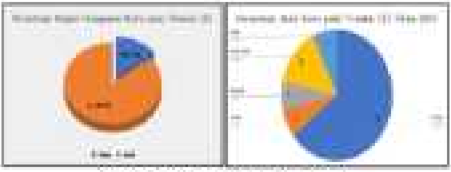

Gambar 2.1.9.3. Grafik Penanganan Biota Terdampar

c. **Monitoring/Pendataan Hiu Pari Apendiks**

Kegiatan pendataan jenis hiu dan pari apendiks di Wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga Enumerator dari bulan Juli – September 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan Hiu dan Pari Apendiks dari tiap-tiap lokasi:

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPN Pemangkat pada periode Juli – September, didapatkan total 438 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 384 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 373 ekor. Sementara itu, sebanyak total 46 ekor pari didaratkan sepanjang Triwulan III dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 41 ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 33 ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari famili Hemiscylliidae sebanyak 1 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Gymnuridae dan Glaucostegidae sebanyak masing-masing 3 ekor.

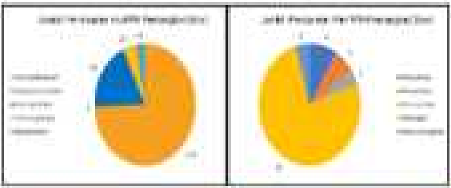

Gambar 3.1.8-4. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat

Gambar 3.1.8-4. Dokumentasi pengukuran

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap pada periode Juli – September, didapatkan 4 jenis hiu apendiks sebanyak 13 ekor dan 3 jenis pari apendiks sebanyak 235 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Carcharhinus sorrah* sebanyak 4 ekor dan jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu *Rhynchobatus australiae* sebanyak 167 ekor. Jenis hiu apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Carcharhinus brevipinna* sebanyak 1 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu *Glaucostegus typus* sebanyak 31 ekor.

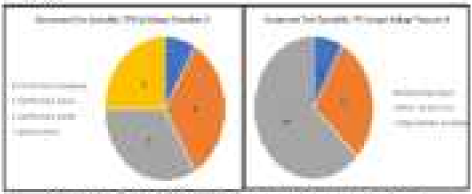

Gambar 3.1.8-4. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPI Manggar

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Apendiks di PPI Manggar pada periode Juli – September, didapatkan total 409 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 441 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 276 ekor. Sementara itu, sebanyak total 123 ekor pari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

didaratkan sepanjang Triwulan III dengan dari apendiks yang ditemukan sebanyak 7 ekor. Jenis dari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 7 ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari famili [illegible] dan [illegible] sebanyak masing-masing 1 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 7 ekor.

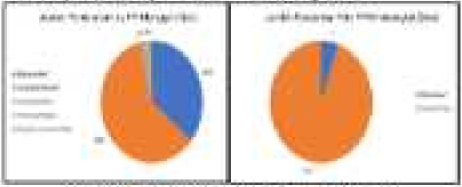

Gambar 3.1.8-7. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Apendiks PP [illegible]

Gambar 3.1.8-8. Dokumentasi Pengukuran

8. Workshop Penilaian E-PAN 3.0 Tahun 2024

Kegiatan Workshop Penilaian E-PAN 3.0 dilaksanakan pada tanggal 16-17 September 2024 di Hotel Ibis Style Bogor Raya Kab. Bogor. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks CITES (EPANJI) tahun 2024 serta yang menjadi 30 jenis ikan prioritas pengelolaan konservasi [illegible] dan [illegible]. Kerangka penilaian EPANJI memiliki kriteria dan indikator penilaian memiliki bobot berdasarkan jumlah pertanyaan yang terbagi menjadi input, proses, output, outcome. Hasil penilaian didapatkan nilai sebesar 83.83 dengan kategori berkelanjutan.

Gambar 3.1.8-9. Workshop Penilaian E-PAN 3.0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.RBS.001] Keanekaragaman Hayati Satwa Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.8.3. Realisasi IKU 10 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Akhir	Realisasi	Ket
1.	[2362.RBS.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp199.341.000	Rp119.876.280 (59,59%)	-
2.	[2362.RBS.001.052] Rehabilitasi Populasi habitat biota jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp130.114.000	Rp122.285.488 (94,71%)	-
3.	[2362.RBS.001.053] Rescue Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp45.415.000	Rp32.971.313 (72,59%)	-
4.	[2362.RBS.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp385.013.000	Rp 333.274.227 (86,56%)	-
	TOTAL	Rp 760.000.000	Rp607.408.711 (80,47%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp607.408.711 atau 80,47% dari pagu anggaran sebesar Rp 760.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

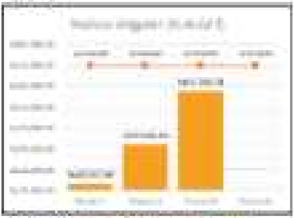

Gambar 3.1.8.10. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melaksanakan kegiatan sosialisasi biota dilindungi/terancam punah, survei pendataan populasi ikan di Kalimantan Barat, survei pemantauan populasi Pari air Tawar di Kalimantan Tengah dan rescue cepat penanganan mamalia laut terdampar. Selain itu, penyusunan laporan juga dilaksanakan pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya melalui:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana);
b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana);
c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang, dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species; penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK 9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL 2020-2024	
	Target TW 3	Realisasi TW 3	% Capaian	Target thn 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
5	Periode Capaian Tahunan			4	-	5	-	20	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan. Namun, progress capaian Triwulan III Tahun 2024 yaitu pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan untuk 5 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red, Arwana Silver dan Teripang) serta verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan untuk 4 jenis ikan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Super Red dan Arwana Silver). Selain itu, dilakukan Survei Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat dan Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang.

[illegible]

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, pada Triwulan III tahun 2023 terdapat progres capaian sudah sebesar 4 jenis. Jika dibandingkan dengan progres kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 (sebesar 5 jenis), maka progres kegiatan sama dengan Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena IKU tersebut tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah tercapai sebesar 25% dari Target Jangka Menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 5 jenis pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra BPSPL Pontianak karena IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Namun progres kegiatan sebanyak 5 jenis telah tercapai sebesar 100% dari Target Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember). Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses penyetoran PNBP. Untuk menanggulangi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan memerlukan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Pengadaan Pegawai Kontrak sebagai Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan melakukan koordinasi secara daring (online) dalam rangka penerbitan dokumen angkut jenis ikan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU perlu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

a. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada Triwulan III (Juli – September). Kegiatan ini terdiri dari:

- Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

  Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada Triwulan III terdapat 2 pelaku usaha yang melakukan permohonan verifikasi SIPJI di Provinsi Kalimantan Barat.

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

  Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk jenis ikan yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat total 57 Surat Rekomendasi dengan 55 surat diterbitkan ke dalam negeri (DN) dan 2 surat ke luar negeri (LN). Tujuan pengiriman Surat Rekomendasi DN paling banyak ditujukan ke Kota Administrasi Jakarta Utara. Sementara itu, untuk tujuan pengiriman Surat Rekomendasi Luar Negeri paling banyak ditujukan ke Negara Malaysia. Untuk jenis hiu dan pari *look alike species*, sebanyak 42 surat telah diterbitkan. Sementara itu, sebanyak 15 Surat Rekomendasi untuk jenis teripang telah diterbitkan. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk hiu dan pari *look alike* terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 surat. Sementara penerbitan Surat Rekomendasi untuk teripang terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 surat.

Gambar 2.1.94. Pemeriksaan Surat Rekomendasi

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

  Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Triwulan III terdapat 81 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu sebanyak 903 SAJI DN untuk jenis Arwana *Scleropages formosus* telah diterbitkan, 44 SAJI DN diantaranya juga mengangkut Arwana *Osteoglossum bicirrhosum* (Arwana Silver). Penerbitan SAJI DN untuk hiu dan pari appendiks CITES terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 34 surat, sementara penerbitan SAJI DN untuk arwana terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 821 surat.

Gambar 3.1.9-2 Pemeriksaan SAJI

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)
  Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat [illegible]. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [illegible]. Selama Triwulan III terdapat 266 verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 262 surat. Negara dengan tujuan ekspor terbanyak yaitu China dengan 140 surat, kemudian Vietnam dengan 28 surat dan Taiwan dengan 21 surat.

- Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana
  Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang telah memiliki SAJI LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan Arwana yang dikirim telah sesuai dengan SAJI LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (scan) pada ikan Arwana. Sepanjang Triwulan III (Juli – September) telah dilakukan 117 pemeriksaan penandaan.

Gambar 3.1.9-3 Penandaan Arwana

- Pemeriksaan Keberangkatan
  Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang sudah terbit. Sepanjang Triwulan III (Juli – September) telah dilakukan 768 pemeriksaan keberangkatan.

[illegible]

Gambar 2.1.9-5. Pemeriksaan kedatangan

- Verifikasi Stok Ikan
  Verifikasi Stok Ikan dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Stok Ikan berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Verifikasi Hasil Panen
  Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan.

- Pengesahan Sertifikat Hasil Pemeriksaan
  Pengesahan Sertifikat dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Hasil akhir dari Pengesahan Sertifikat berupa sertifikat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak. Total sertifikat Analisa Hasil Pemeriksaan yang telah disahkan pada Triwulan III 37.775 sertifikat.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan TW I dan III (Kumulatif) sebesar Rp1.314.204.281. Total PNBP yang diterima pada Juli – September sebesar Rp643.211.500. Total PNBP tertinggi pada Triwulan III didapatkan pada bulan September sebesar Rp214.784.500, sementara terendah didapatkan pada bulan Agustus sebesar Rp203.702.000.

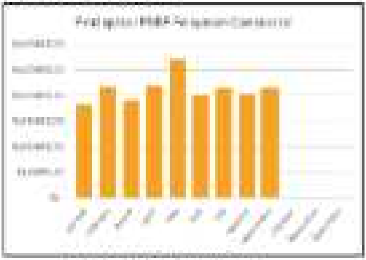

Gambar 2.1.9-6. Grafik Pendapatan PNBP

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

5. **Survey Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat**

Kegiatan Survey Pemanfaatan Arwana dilakukan pada tanggal 23 – 27 Juli 2024 di Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari survey tersebut yaitu untuk mengumpulkan data pemanfaatan arwana para pelaku usaha arwana, baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pelaku usaha dan pengambilan foto secara fasilitas pengembangbiakan arwana. Data - data yang diambil pada kegiatan survey meliputi identitas yang dimiliki, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki, lokasi area pengembangbiakan, jumlah indukan atau benih, periode produksi, metode dan teknologi yang digunakan, tingkat kelangsungan hidup arwana [illegible], dan alur perdagangan. Sebanyak 14 pelaku usaha [illegible] yang teridentifikasi dengan 8 perusahaan [illegible] telah dilakukan wawancara dan pengambilan data.

Gambar 2.1.9-6. Survei Pemanfaatan Arwana

6. **Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang**

Kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang dilakukan pada tanggal 01 Agustus 2024 bertempat di Kantor BPSPL Pontianak secara daring dan luring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai peningkatan kapasitas pegawai BPSPL Pontianak yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan verifikasi SAJI maupun Rekomendasi. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai etika pelayanan publik dengan narasumber dari Balai Diklat Aparatur (BDA) KKP Sukamandi. Disampaikan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk dan keputusan untuk menghasilkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik sehingga menghasilkan fokus pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Gambar 2.1.9-7. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai biologi, identifikasi, pemanfaatan dan status perlindungan teripang dengan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dijelaskan bahwa teripang merupakan salah satu famili dari timun laut, yaitu famili Holothuridae. Dalam pemanfaatan jenis teripang salah satu bagian tubuh yang dapat dijadikan acuan yaitu spikula (kerangka dalam) yang terdapat di dalam teripang. Teripang umumnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk memperbaiki stamina tubuh manusia serta untuk kosmetik. Terdapat beberapa jenis teripang yang masuk ke dalam Appendiks CITES, yaitu Holothuria fuscogilva, Holothuria nobilis, Holothuria whitmaei, Thelenota ananas, Thelenota anax, dan Thelenota rubralineata. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan praktek identifikasi teripang dan post test sebagai evaluasi kegiatan.

d. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan look alike species diantaranya:

➤ Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan

Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan dilakukan secara rutin setiap bulan dalam rangka membahas perkembangan perizinan dan tata niaga perdagangan jenis ikan dilindungi, appendiks CITES dan look alike species.

➤ Diskusi morfometrik arwana

Diskusi morfometrik arwana dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan mengundang Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) dan peneliti BRIN. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari pola pertumbuhan ikan arwana berdasarkan riset yang sudah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya diskusi morfometrik, petugas pelayanan dapat melakukan simulasi performa ikan arwana melalui cara pengolahan data yang memenuhi kaidah ilmiah sebagai dasar validasi stok arwana.

Gambar 3.1.96. Diskusi Morfometrik Arwana

➤ Pemantauan dan Pembinaan Bisnis Proses Bagian Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 20 September dengan melibatkan Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Asosiasi Penangkar dan Pedagang Ikan Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan perpindahan tugas dan fungsi dari KLHK ke KKP untuk tata niaga jenis dapat berjalan secara lancar pasca perpindahan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk meminta informasi kendala yang dihadapi untuk selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

dapat dilakukan pertemuan tatap muka, mengenai informasi dan jenis-jenis usaha dan tinjauan ke lapangan.

Gambar 3.1.5-6. Pertemuan dan Pembinaan Kinerja Proses Wajar Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.RBS.002] Pendampingan/Pemanfaatan Hayati Perairan yang dibatasi pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.5-5. Realisasi IKU VI Triwulan III

No.	Komponen/Kegiatan Kelembagaan	Pagu	Realisasi	Hasil
1.	[2362.RBS.002.051] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Rp200.000.000	Rp144.329.832 (34,10%)	-
2.	[2362.RBS.002.052] Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp1.100.000.000	Rp538.651.592 (47,79%)	-
	TOTAL	Rp1.300.000.000	Rp682.974.424 (52,61%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 682.974.424 atau 52,61% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.300.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu Pelayanan operasional perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) pada bulan Oktober – Desember 2024, survey pemanfaatan teripang di Kalimantan Timur, survei pemanfaatan arwana di Kalimantan Barat. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga dilaksanakan pada Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/komoditas tertentu yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 30 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah kegiatan inventarisasi yang mencakup data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan dibawa ke pasar pemasarannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengajuan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknik perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 Kinerja BPSPL Pontianak

SK 10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak								
IKU 12	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PKRL 2020-2024	
	Target TW3	Realisasi TW3	% Capaian	Target FY 2024	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			1	-	-	-	8	-

Sumber data: aplikasi Kinerjaku KKP, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan pada Triwulan III yaitu Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di Kalimantan Barat.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada Tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1 lokasi kawasan yang terfasilitasi perizinan pengelolaan perairan. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut belum tercantum dalam Renstra KKP/Ditjen Pamsel 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra karena periode pengukuran dan pelaporan capaian dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat dalam Renstra.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan telah dilaksanakan. Keberhasilan progres kegiatan didukung oleh kesadaran pelaku usaha dalam mengajukan pemanfaatan perizinan air laut selain energi. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Kelautan dan melakukan sosialisasi perizinan berusaha bidang jasa kelautan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 September 2024 pada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. PLN Indonesia Power UBP Singkawang, PT. SCL Indo Tenaga yang berlokasi di Kota Mempawah dan PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kabupaten Mempawah. Sebelum kegiatan identifikasi, dilakukan sosialisasi dengan menyampaikan jenis-jenis pemanfaatan ALSE, KBLI yang digunakan, dasar hukum, persyaratan untuk pemanfaatan ALSE, pembayaran kewajiban dan tarif PNBP.

Gambar 3.1.10-1. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat

Metode yang digunakan dalam kegiatan identifikasi yaitu wawancara dengan alat bantu berupa kuesioner. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diantaranya: tujuan pemanfaatan ALSE, kapasitas pemanfaatan ALSE, metode dan teknologi yang digunakan, sarana yang digunakan, waktu operasi dan intensitas dan tenaga kerja yang digunakan. Dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Hasil wawancara pada ketiga perusahaan tersebut didapatkan informasi bahwa tujuan dari pemanfaatan ALSE yaitu untuk bahan baku pembuatan uap, metode demineralisasi, air pendingin kompresor dan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Rerata debit volume pemanfaatan ALSE pada ketiga perusahaan tersebut yaitu [illegible] – [illegible] m3/detik (saat intake) dan [illegible] – [illegible] m3/detik (saat outfall). Metode yang digunakan dari ketiga perusahaan tersebut yaitu Metode Air Baku dan Metode Air Pendingin. Selanjutnya, hasil identifikasi pemanfaatan ALSE ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan profil pemanfaatan ALSE di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2343.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.13-5. Capaian IKU 13 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2343.PBW.002.052] Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp100.000.000	Rp37.494.903 (37,49%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp37.494.903 (37,49%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp37.494.903 atau 37,49% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

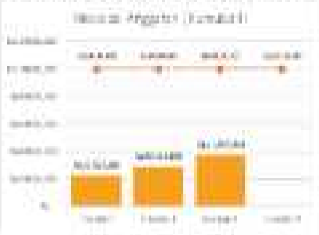

Gambar 3.1.13-6. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu verifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) apabila ada pengajuan permohonan perizinan Pemanfaatan ALSE. Selain itu, penyusunan laporan kegiatan juga dilanjutkan sesuai pada Triwulan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengendalian sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang masuk laut dan mengarahkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.11-4. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK 11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak								
IKU 13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TA 2024	% Realisasi thd Target TW	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
-	Periode Capaian Tahunan			4	-	-	-	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SAPKIN, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 diantaranya identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gema BCL, identifikasi dan verifikasi wilayah dan mitra serta koordinasi terkait dengan pengangkutan sampah ke pihak terkait.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Indikator Kinerja "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BPSPL 2020-2024 yaitu sebanyak 3 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian Kinerja Triwulan III 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah [illegible] IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung di akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Rencana Strategis IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Kinerja Triwulan III belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024, karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III dapat menunjang tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan pendukung tercapainya IKU pada Triwulan III yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 50 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Kupah sebanyak 30 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama sebulan hingga telah mengumpulkan sebanyak 25,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,13 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp[illegible].

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Gambar 3.1.11-1. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

b. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 33 orang, Kel. [illegible] sebanyak 23 orang dan Kel. Kuala sebanyak 19 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan [illegible] ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 0,27 ton. Sampah nelayan dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp 10.626.600.

Gambar 3.1.11-2. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

c. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 75 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 5 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah [illegible]. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,8 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp 4.196.000.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Gambar 3.1.11-3. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

c. **Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan**

   Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan) sebanyak 30 orang.

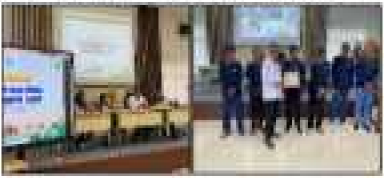

Gambar 3.1.11-4. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

d. **Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang**

   Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut setelahnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau jumlah sampah pada tiga lokasi sampling : Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viat. Pada masing – masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,248 kg di Pantai Singka; 7,067 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 0,978 kg sampah di Pantai Viat. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.

Gambar 3.1.11-5. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

7. **Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dan [illegible] PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta diperkirakan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik atau kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, batang [illegible] dan lain sebagainya.

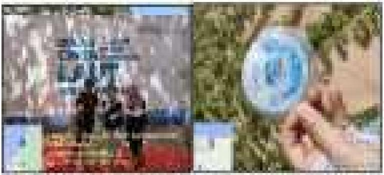

Gambar 3.1 11-6. Gelaran Bersih pantai dan identifikasi lokasi monitoring sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah atau kemasan makanan dan minuman, botol kaca dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (4546.QDC.001) Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 11-6. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Kendala
1.	[4546.QDC.001.351] Aksi Penanggulangan Sampah [illegible] di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp300.000.000	Rp178.252.571 (59,42%)	-
	TOTAL	Rp300.000.000	Rp178.252.571 (59,42%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp178.252.571 atau 59,42% dari pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

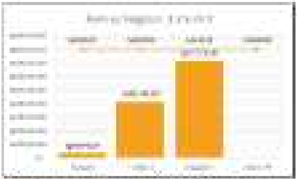

Gambar 3.1.17. Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember yaitu menyusun laporan kegiatan Kelas Cinta Laut yang telah dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKU 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70

Pemenuhan nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman [illegible]

Tabel 3.1.12-14. Capaian IKU 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SS-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra 2020-2024 Pontianak		Renstra KKP 2020-2024	
	Target PK TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	95	[illegible]	95	[illegible]

Sumber data: BPSPL Pontianak dan OMSPAN, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada triwulan III dilakukan secara semesteran. Namun, berdasarkan hasil pemantauan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) laporan pada situs OMSPAN progres nilai IKPA lingkup BPSPL Pontianak sampai dengan 30 September 2024 sebesar [illegible] dengan kategori baik. Secara umum capaian pada Triwulan III tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

belum mencapai target tahunan sebesar 93,75. Tren bulanan nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami penurunan tajam pada bulan Maret ke bulan April. Namun, nilai IKPA mengalami peningkatan secara perlahan dari bulan Mei ke bulan September (Triwulan III).

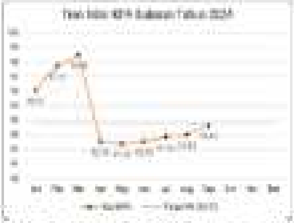

Gambar 3.1.11 Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Namun progres nilai IKPA Triwulan III tahun 2024 adalah 93,65 (99,89% dari target tahunan sebesar 93,75), sedangkan nilai Triwulan III tahun 2023 adalah 91,84 (97,96% dari target tahunan 93,75). Sehingga progres nilai pada Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan 2,12% dibandingkan capaian Triwulan III 2023.

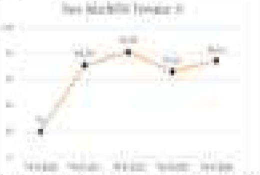

Gambar 3.1.12 Tren Nilai IKPA Triwulan III (Sumber: Aplikasi OMSPAN)

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 104,06% (93,65 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

[illegible]

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian Tahun 2023 dilakukan secara semesteran. Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 - 2024 yaitu 90 untuk tahun 2024. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 104,05% (93,65 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketelitian dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mempertahankan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Revisi DIPA
   - 1 (satu) kali pada 8 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
   - 1 (satu) kali pada 10 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
   - 1 (satu) kali pada 8 Agustus 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
   - 1 (satu) kali pada 23 September 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)

b. Penyerapan Anggaran sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp15.183.475.716 atau 70,56% dari pagu anggaran sebesar Rp21.518.113.000 (Sumber Data: OM SPAN per 30 September 2024)

c. Data kontrak sebanyak 16 kontrak pada Juli – September 2024
   - Pengadaan Peralatan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 03.SP/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
   - Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 04.SP/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

- Pengadaan Belanja Bantuan KOMPAK TA 2024 Kelompok Cempedak Lestari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultan Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mempawah Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wisata Mempawah Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wisata Mempawah Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor [illegible]/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 6 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 58B/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 59/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya (Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 60/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display KKPRL sebanyak 1 Unit SP Nomor 61/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Pantau Monitoring Penyu di Kawasan Mempawah Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
- Pembayaran Honorarium Pegawai Non ASN periode Juli s.d. September 2024.
- Pembayaran atas Belanja Bahan (Bahan Penunjang WBK).
- Pembayaran atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

d. Penyusunan Tagihan setiap bulan

e. Pelaksanaan LT sebanyak 3 kali dan TLR 3 kali

f. Pengisian Capaian Rencana Output (CRO) periode Juli – September 2024

g. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran:
   - Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkungan Ditjen PKRL dengan LAPRAKEU Periode Semester I TA 2024 pada 10 s.d. 12 Juli 2024 di Yogyakarta.
   - Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Realisasi PNBP DJPKRL s.d. 31 Agustus 2024 pada 10 September 2024 pada tautan berikut https://s.id/Lap_Realisasi_PNBP_Agust2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B. [illegible]/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
   - Menghadiri kegiatan Penyusunan Proyeksi PNBP DJPKRL s.d. 31 Agustus 2024 pada 11 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B. [illegible]/DJPKRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
   - Menghadiri Undangan Penyusunan Dokumen Penganggaran Satker Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plh. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.330/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

[illegible]

- Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PNBP ... TA. Tahun 2025/2027 pada 13 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2413/DJPKRL.1/TU.320/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Penggunaan PNBP ... TA. 2024-2027 pada 27 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2756/DJPKRL.1/TU.320/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September – 3 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.2790/DJPKRL.1/TU.320/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Keuangan lingkup UPT Balai Unit Pelaksana Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4166/SJ.5/TU.320/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2047.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2047.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut:

Tabel 3.1. KRO Realisasi Anggaran IKU Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2047.EBA.956.051] Layanan BMN	Rp45.000.000	Rp27.126.266 (60,28%)	-
2.	[2047.EBA.962.051] Layanan Perkantoran	Rp22.000.000	Rp20.806.780 (94,57%)	-
3.	[2047.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp6.297.800.000	Rp4.883.324.202 (77,54%)	-
4.	[2047.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp2.754.334.000	Rp2.063.413.279 (74,91%)	-
5.	[2047.EBD.962.051] Layanan Manajemen Keuangan	Rp135.000.000	Rp103.271.720 (76,50%)	-
TOTAL		Rp9.231.134.000	Rp7.103.172.168 (77,16%)	-

Realisasi anggaran dan kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp 7.103.172.168 atau 77,16% dari pagu anggaran sebesar Rp 9.231.134.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.

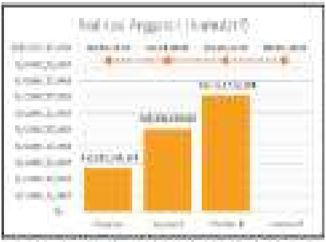

Gambar 3.1.12.3. Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

B. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

a. Revisi Halaman III DIPA (Kewenangan KPA)
b. Pelaksanaan kontrak pengadaan
c. Penyelesaian tagihan dan penyerapan anggaran
d. Pengisian DRS bulan Oktober – Desember 2024

IKU 15: Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-K/L melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya pertimbangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Level Satuan Kerja, cakupan evaluasi kinerja mencakup Aspek Implementasi. Kategori Capaian Indikator Kinerja Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
b. Baik, apabila NKA >80 – 90;
c. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Capaian IKU 18 NKA BPSPL Pontianak sebagai berikut:

Tabel 3.1.18-b. Capaian IKU 18 NKA BPSPL Pontianak

SK-13	SK-13. Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU-18	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (NKA)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
88	Periode Capaian Tahunan			85	-	85	-	80	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan penetapan capaian pada indikator ini dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu nilai NKA sebesar 80 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena periode pengukuran dan penetapan capaian pada indikator IKU dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 yaitu 85 di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan III dengan target Renstra BPSPL belum dapat dibandingkan karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung periode pengukuran tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NKA belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NKA, realisasi anggaran dan capaian dari NKA dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA dapat secara daring. Selain itu, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi pendukung keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKM, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Juli – Agustus 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Melakukan Input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Oktober – Desember 2024 pada aplikasi SAKTI. Menyusun Laporan Semester II tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA.

IKM 16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diberikan unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,5 dan sub komponen Persentase TLHP minimal 3,0;
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tanggal 14 – 17 Agustus 2023 dengan hasil evaluasi sebesar 90,81. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2023.

Tabel 3.1.16-A. Capaian IKM 16 Nilai WBK BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM-16	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra KKP 2020-2024	
	Target TW3	Realisasi TW3	% Capaian	Target FY 2024	% Realisasi thd Target FY	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
90,81	Periode Capaian Tahunan			75	-	80	-	75	-

[illegible]

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada indikator ini dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena indikatornya tidak memiliki target triwulanan. Karena pencapaian indikatornya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini tercantum dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 12 Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 92. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2023 karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan Zona Integritas secara berkala pendampingan dari pemonitor masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat koordinasi internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit sesuai tupoksinya untuk periode Juli – September 2024.

b. Menghadiri Rapat Rencana Aksi Data Dukung RB/ZI Nasional dengan Lokus BPSPL Pontianak Tahun 2024 pada 7 s.d. 9 Juli 2024 di Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal KKP Nomor B.2787/SJ.2/TL.230/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

c. Menghadiri Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL pada 14 s.d. 16 Agustus 2024 di Yogyakarta berdasarkan Undangan dari Sekretariat Ditjen PKRL Nomor B.4404/DJPKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2067.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2067.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.[illegible]. Realisasi Anggaran IKU 16 Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	2067.EBA.[illegible] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp [illegible]	Rp[illegible] ([illegible]%)	-
TOTAL		Rp [illegible]	Rp[illegible] ([illegible]%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp[illegible] atau [illegible]% dari pagu anggaran sebesar Rp [illegible]. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja Bahan Penunjang WBK dan konsumsi Rapat.

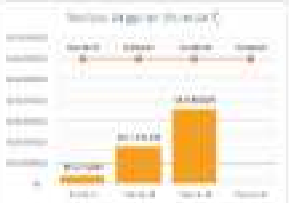

Gambar 3.1.13-4. Realisasi Anggaran Kumulatif Hingga Triwulan III

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan IV yaitu penyampaian dokumen komponen pendukung setiap bulannya untuk bulan Oktober – Desember.

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 25%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 30%

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

5. Capaian IP ASN BPSPL PN

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Kurang Tidak Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran berdasarkan indikator tersebut ditampilkan langsung dari dashboard IP ASN KKP yang tersedia Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman https://simpeg.kkp.go.id.

Tabel 3.1.12. Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak

SS 13	SS 13 - Terwujudnya Kapasitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target TH 2024	% Realisasi thd Target TH	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
93,84	-	-	-	80	95,13	75	118	75	118

Sumber data: SIMPEG, Pemeriksaan [illegible], September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Namun, berdasarkan pemantauan Nilai IP ASN melalui situs simpeg.kkp.go.id per tanggal 30 September 2024, 87,88% Pontianak mendapatkan nilai capaian 93,48 dengan kategori sangat tinggi. Progres capaian nilai ini telah melebihi target pada perjanjian kinerja dengan persentase 136,22%.

II. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara semesteran. Namun, progress nilai IP ASN pada Triwulan III tahun 2024 adalah 93,48 (116,85% dari target tahunan 80), sedangkan progres capaian Triwulan III tahun 2023 adalah 93,84 (138,44% dari target tahunan 68). Sehingga progres capaian Triwulan III tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,44% dibandingkan progres capaian Triwulan III tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2024 karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran. Progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 122% (95,45 dari 78). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan Renstra BPSPL Pontianak Triwulan III Tahun 2024 karena periode pencapaian dilakukan secara semesteran. Namun progres capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah [illegible]. Sehingga capaian tersebut telah melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi ini berupa secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak.

6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan memperhitungkan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, Workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh instansi lain telah diikuti oleh pegawai pada April – Juni 2024 diantaranya adalah:
   - Menghadiri Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Risiko pada 10-13 September 2024 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat sesuai Surat Undangan nomor B.3474/DJPRL.1/TU.330/IX/2024.
   - Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PRL nomor B.4093/DJPRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024.
   - Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sertifikasi Tabpeng pada tanggal 22 Agustus 2024.
   - Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 13 - 14 Agustus 2024 sesuai Undangan Sekretaris Ditjen PRL nomor 4404/DJPRL/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
   - Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.5032/DJPRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

- Menyelenggarakan Pelatihan Mentoring dan Pengawasan Kawasan Kehutanan dan Perairan Umum tanggal 22 - 26 Juli 2024.
- Menghadiri Forum Koordinasi, Kolaborasi dan Evaluasi Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaan pada tanggal 23 Juli - 23 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.2042/SJ/KP.350/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024.
- Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial pada tanggal 30 Agustus 2024. Acara ini turut melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai narasumber.

b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada Juli – September 2024 dan Monitoring Triwulan III 2024.
c. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN pada Juli – September 2024.
d. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja BKN pada Juli – September 2024.
e. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada Juli – September 2024.
f. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 118/KEPMEN-KP/SJ/2024 tentang Perpanjangan Kedua Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Kepala BPSPL Pontianak nomor B.2638/BPSPL.2/KP.330/VIII/2024 tanggal 2 Agustus perihal Pemanggilan untuk Aktif Bekerja Kembali.
g. Penyampaian Usulan Calon Peserta Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Perizinan melalui Penyesuaian dan Permohonan tanda tangan sesuai Surat nomor B.2656/BPSPL.2/KP.330/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
h. Melakukan tindak lanjut atas Surat Pengantar Kepala BPSPL Pontianak nomor B.2657/BPSPL.2/KP.440/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 atas Berkas Pengajuan Tugas Belajar.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi RO dan Output (2262.EBD) Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran per Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.10.2 Realisasi Anggaran IKU 17

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket
1	2262.EBD.994.051 Layanan Manajemen SDM	Rp 304.432.000	Rp 277.016.701 (90,99%)	-
TOTAL		Rp 304.432.000	Rp277.016.701 (90,99%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 277.016.701 atau 90,99% dari pagu anggaran sebesar Rp304.432.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Barang.

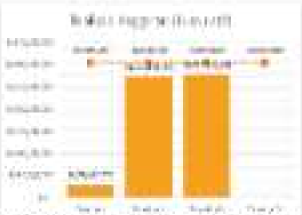

Gambar 2.1.19.3. Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

B. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

d. Rekapitulasi dan monitoring Pengembangan Kompetensi Pegawai.
e. Rekapitulasi dan monitoring Sasaran Kinerja Pegawai.
f. Rekapitulasi dan monitoring Prestasi Pegawai serta mengikuti pelatihan, diklat, seminar ataupun workshop yang diselenggarakan baik oleh BPSPL Pontianak maupun dari pihak lain.

IKM 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah didasarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 2.1.12.9. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/koordinator
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3/unit kerja
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKU 18 sebagai berikut:

Tabel 3.1.18-9. Capaian IKU 18 BPSPL Pontianak

[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
Realisasi 2021	Tahun 2022					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target FY 2022	% Realisasi thd Target [illegible]	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
68.2	Target Capaian Tahunan			61	-	-	-	62.13	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2022

[illegible]

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan hasil (dari) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2024 BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar 86,25 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak. Berdasarkan nilai tersebut, BPSPL Pontianak telah mencapai target sebesar 81 dengan persentase capaian sebesar 106,48%. Hasil penilaian per komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.17-15 Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,80
2	Pengukuran Kinerja	30	27,30
3	Pelaporan Kinerja	15	13,90
4	Evaluasi Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	86,25
Predikat Penilaian			A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Namun, capaian nilai IPK SAKIP pada tahun 2023 yaitu sebesar 83,2 sehingga terdapat peningkatan nilai IPK SAKIP sebesar 3,05 jika dibandingkan dengan nilai IPK SAKIP berdasarkan hasil [illegible].

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu nilai IPK SAKIP Lingkup Ditjen PKRL sebesar 80,78. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian sebesar 86,25 telah melebihi target renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai Akuntabilitas Kinerja BPSPL Pontianak sebesar 90. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra BPSPL Pontianak karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, progres capaian sebesar 86,25 belum dapat memenuhi target renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III dapat dikatakan berhasil terpenuhinya target di akhir tahun. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan seluruh tim perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

keperluan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Terdapat beberapa target Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang belum sepenuhnya achievable. Laporan Kinerja BPSPL Pontianak telah memuat tabel perbandingan capaian kinerja BPSPL Makassar. Namun, belum memuat analisis sebab terkait perbedaan capaian kinerja, khususnya justifikasi capaian kinerja yang sangat rendah. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja karena berdasarkan hasil IKA pada BPSPL Pontianak terdapat penurunan efisiensi kinerja. Nilai efisiensi BPSPL Pontianak pada tahun 2022 sebesar 1,43 sedangkan 2023 sebesar 1,19.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan dropbox, google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan google form Mentor Monitoring Kegiatan BPSPL Pontianak sebagai inovasi pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis google form untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta persiapan ke depannya. Rangkaian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, capaian output di SMART, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

7. Kegiatan Pendukung

a. Mengikuti kegiatan Verifikasi Pelaporan e-Monev Bappenas dan SMART DJA pada tanggal 7 – 8 Juli 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Pada verifikasi e-Monev Bappenas untuk BPSPL Pontianak, persentase kemantapan hingga bulan Juni 2024 telah mencapai 46%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Persentase serapan anggaran hingga bulan Juni 2024 sebesar 46,85%, sementara persentase pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2024 sebesar 50,28%.

b. Pengisian Capaian Kinerja Triwulan II pada aplikasi Kinerjaku (http://kinerjaku.kkp.go.id/). Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk KU dan KU BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 105,24% dengan kategori Hijau (Baik). Capaian Kinerja Triwulan II mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yang sebesar 114%.

c. Menghadiri kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4080/DJPKRL.1/TU.200/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II tahun 2024. Laporan Kinerja telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.2482/BPSPL.2/TU.240/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

e. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat Undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4632/DJPKRL.1/TU.220/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

1. Berdasarkan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 120,24 dengan predikat baik sesuai surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4346/DJPKRL.1/RC.410/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024.
2. Mengikuti Desk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 11 – 13 September 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, BPSPL Pontianak memperoleh nilai sebesar 83,63 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (Memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

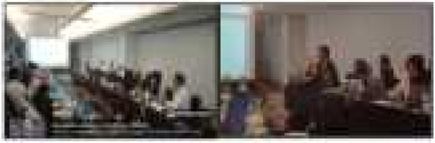

Gambar 3.1.12-6. Kegiatan Desk Evaluasi AKIP

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2347.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2347.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran IKU 12 Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Kendala
1.	[2347.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 97.500.000	Rp 95.300.952 (97,74%)	-
2.	[2347.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 108.880.000	Rp 85.500.527 (78,53%)	-
TOTAL		Rp206.400.000	Rp188.501.479 (91,29%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp188.501.479 atau 91,39% dari pagu anggaran sebesar Rp206.530.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

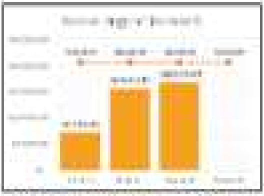

Gambar 3.1.12-7. Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Triwulan III

4. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu menyusun laporan kinerja Triwulan IV tahun 2024, pembahasan pengukuran kinerja lingkup Ditjen PKRL Triwulan IV tahun 2024, verifikasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

IKM 19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024. Teknis perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.19-19. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak

SS/TS	SK 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKM 19	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
4	3	3	100	4	75	-	-	3	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 telah tercapai 3 (tiga) dokumen (100%) dari target 3 (tiga) dokumen. Capaian IKM 19 berdasarkan:

a. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.80/BPSPL.3/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023; dan

b. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1108/BPSPL.3/TU.140/IV/2024 tanggal 10 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

c. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.3/TU.140/VII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

d. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3443/BPSPL.3/TU.140/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 dibandingkan dengan Capaian Triwulan III tahun 2023 adalah sama sebanyak 3 (tiga) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL 2020 – 2024 yaitu Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar 3. Capaian kinerja pada Triwulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

i tahun 2024 telah berkontribusi dalam pemenuhan dokumen SPIP pada target Renstra DJPRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen di tahun 2024. Capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2024 dengan jumlah 3 (tiga) dokumen telah berkontribusi 75% dari Target Renstra BPSPL Pontianak. Tidak terdapat target pada Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Pemenuhan dokumen telah berkontribusi pada pemenuhan target PK BPSPL Pontianak Tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan dokumen SPIP telah berhasil tercapai 100% dari target Triwulan III tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dalam dibuatnya Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (paling lambat setelah triwulan berakhir), maksimal tanggal 10. Sedangkan Laporan SPIP Triwulan III tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu sebelum tanggal 10 Oktober 2024 (berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2440/BPSPL.3/TU.140/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terhadap IKU, yaitu:

a. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4132/DJPKRL.1/HP.600/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Model).

b. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4207/DJPKRL.1/TU.220/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4208/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

d. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4132/DJPKRL.1/HP.600/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Model).

e. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4207/DJPKRL.1/TU.220/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

f. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4208/DJPKRL.1/TU.210/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

g. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4132/DJPKRL.1/HP.600/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Penguatan Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Model).

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

h. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 26 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4037/DJPKRL.1/TU.338/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.
i. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4036/DJPKRL.1/TU.213/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.
j. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan II Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3244/BPSPL.3/TU.140/VII/2024 5 Juli 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan II Tahun 2024.
k. Bulan Juli 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2703/BPSPL.3/TU.140/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024.
l. Bulan Agustus telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3171/BPSPL.3/TU.140/IX/2024 tanggal 5 September 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2347.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output [EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 19 Triwulan III (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp5.340.866 atau 37,95% dari pagu anggaran Rp15.388.000.

Tabel 3.1.19-8 Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 19 pada Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket
1.	[2347.EBD.953.051.C] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP MR)	Rp15.388.000	Rp5.340.866 (37,95%)	-
TOTAL		Rp15.388.000	Rp5.340.866 (37,95%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan IV adalah:

a. Penyusunan dan penyampaian Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, serta melakukan evaluasi Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2024.
b. Menyusun Laporan SPIP Bulan Oktober, November, dan Triwulan IV Tahun 2024.

IKU 20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan antar organisasi, individu dan kebijakan. Penghitungan indikator ini berasal dari perolehan 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaboration Office KKP pada laman https://portal.kkp.go.id/kip. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan bobot poin target minimal mendapatkan 3 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin sebagai keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditetapkan. Pembobotan yang dimaksud adalah:

a. Kirimkan dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dengan melampirkan untuk SMPH mendapatkan poin 0,5.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

b. Konten berupa infografis sebesar poin 1.

c. Konten video/kampanye diberikan [illegible] atau sebesar dengan poin 3.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan rincian:

- Keaktifan akan dinilai setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin dan maksimal 5 poin (upload/keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan).
- Pengukuran level [illegible] dari keaktifan [illegible]
- Sekretariat PPSL menyajikan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU IKP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 3.1.13-14. Capaian IKU 30 BPSPL Pontianak

SP 13	3.1.13. Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 30	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang [illegible] Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
Tidak ada	94	133,33	100	94	100	95	100	95	100

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024 IKU tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 100% dengan persentase capaian 133,33% dari target triwulan 94. Sehingga target pada Renstra BPSPL Pontianak maupun Renstra DJPRL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Capaian IKU 30 disampaikan oleh melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.140/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024. Nilai IKP pada Triwulan III mengalami peningkatan sebesar 13,33% dari Triwulan II dengan rata-rata nilai IKP sebesar 103,33%.

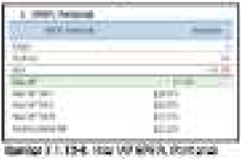

Gambar 3.1.13-6. Nilai IKP BPSPL Pontianak

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 yaitu 133,33 (133% dari target triwulanan 94), sedangkan capaian Triwulan III tahun 2023 yaitu 100 (106,70% dari target triwulanan 90). Artinya terdapat kenaikan capaian IKP pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 33,33%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah IKSK tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 120% (113,31 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah memenuhi/melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Triwulan III tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III/semester I tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 120% (113,31 dari 93). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Triwulan III sebesar 133,33% (100% dari target triwulanan 3*). Hal ini didukung oleh pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai lingkup BPSPL Pontianak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena kegiatan pendukung dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKSK, yaitu Kesekretariatan/Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam mengisi portal Collaboration Office KKP (kolaborasi) kegiatan sosialisasi/seminar yang diunggah telah dilengkapi dengan foto dan notulensi serta narasi 5W1H.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pendukung kegiatan yang mendukung IKSK ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi Triwulan IV yaitu Kesekretariatan/Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam mengisi portal Collaboration Office KKP pada Oktober – Desember 2024.

IKSK 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dihitung dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan III Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TLA/TAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam aplikasi maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

dengan target. Jika ada audit ternyata sesuai/bermanfaat namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada triwulan sebesar 125%.

Tabel 3.1.12-13. Capaian IKU 21 BPSPL Pontianak

SS 7	S.7.13. [illegible] BPSPL Pontianak								
IKU 21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Th 2024	% Realisasi thd Target Th	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Jangka
100	80	100	125	80	125	80	125	80	125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-SAKIP, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III tahun 2024, IKU 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah tercapai 100% (125%) dari target 80. Capaian IKU 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor [illegible] tanggal 10 Oktober 2024 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PKRL" Triwulan III Tahun 2024 (Sumber: Setditjen PKRL, 10 Oktober 2024). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIDAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 adalah 100% (125%) dari target triwulanan 80%, sedangkan capaian Triwulan III tahun 2023 adalah 100% (125% dari target triwulanan 80), sehingga capaian Triwulan III tahun 2024 sama dengan capaian Triwulan III tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 125% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 80% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 125% (100% dari 80%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target Renstra periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam

[illegible]

tindak lanjutnya. BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring atas temuan beserta status tindak lanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSD belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan NPSD, realisasi anggaran dan selisih dari NPSD dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring atas temuan beserta status tindak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada bulan sebelumnya, terdapat rekomendasi yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor [illegible]/2024 tanggal 3 Juli hal Laporan Hasil Evaluasi PNBP TA 2022 – 2023 pada BPSPL Pontianak. Adapun rekomendasi yang diberikan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan diunggah pada SIDAK sebagai berikut.

a. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. [illegible]/2024 Tanggal 5 Juli 2024 hal Laporan Penggunaan PNBP Semester I Tahun 2024.
b. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. [illegible]/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Koordinasi Hasil Rekomendasi [illegible].
c. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 14/BPSPL.2/[illegible]/2024 Tanggal 11 Juli 2024 hal Instruksi kpd Ketua Tim Kerja dan Bendahara Penerimaan.
d. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. 15/BPSPL.2/PRL.4[illegible]/2024 Tanggal 11 Juli 2024.
e. Penyampaian BAP Stok No. [illegible]/2024 Tanggal 3 Juli 2024.

Selanjutnya BPSPL Pontianak menghadiri Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Ditjen PRL Periode Triwulan III Tahun 2024 secara daring pada 24 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor [illegible]/2024 tanggal 23 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memantau aplikasi SIDAK.

IKU 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang dimaksudkan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.13-16 Capaian IKU 22 BPSPL Pontianak

SS 13	S.1.13 Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU 22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)								
Target Tahunan 2024	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra DJPKRL (DJPKRL)	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
100	Periode Capaian Tahunan			100	-	100	-	✓	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan SJ BPSPL, September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan. Pada Triwulan III belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan III.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi nilai efektivitas temuan pengawasan eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena periode capaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III belum ada audit dari BPK sehingga belum terdapat progres capaian pada Triwulan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

3. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Triwulan III.

4. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2020

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU ini di Triwulan IV.

IKU 22. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan oleh pengelola program/kegiatan.

b. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan uji substantif), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan [illegible]. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada menu hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.22.17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu diberikan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan

[illegible]

4.	3	0-49	**Tidak Efektif** Kegiatan prioritas bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas bantuan pemerintah tersebut.

Capaian IKU 25 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.[illegible] Capaian IKU 25 BPSPL Pontianak

[illegible]	**[illegible] Sasaran Kegiatan [illegible] Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak**								
IKU 25	**Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)**								
Realisasi 2023	**Tahun 2024**					**Renstra BPSPL Pontianak**		**Renstra DJPRL 2020-2024**	
	Target TW3	**Realisasi TW3**	**% Capaian**	**Target Tahunan**	**% Realisasi thd Target (th)**	**Target 2024**	**% Realisasi thd Target 2024**	**Target 2024**	**% Capaian thd Target Renstra**
100	Target Capaian Tahunan			80	-	73,6	-		

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan inventarisasi bantuan [illegible] yang telah diberikan dan melakukan koordinasi [illegible] terkait dengan monitoring dan evaluasi [illegible].

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,6% pada tahun 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPSPL Pontianak karena periode pencapaian dilakukan secara tahunan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja karena belum dapat dilakukan pada Triwulan III.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikarenakan tidak terdapat target di Triwulan III sehingga NPSS belum dapat dihitung. Perhitungan analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan NPSS, realisasi anggaran dan selisih dari NPSS dengan realisasi anggaran. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi bantuan KOMPAK yang sudah diserahkan pada tahun 2023. Pelaksanaan monitoring dilakukan kepada Pokmaswas Panga Baru yang beralamat di Desa Sungai Kunan, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan Perempuan Pesisir Mangrove Surya Pertiwi Nasional yang beralamat di Kel. Setapuk Besar, Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang. Secara umum, kondisi barang bantuan sebagian besar dalam kondisi baik. Pemanfaatan bantuan sudah sesuai dengan peruntukannya. Selain untuk menunjang kegiatan konservasi, barang bantuan juga bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. Selain itu pelaporan kegiatan dan keuangan, kelompok telah berkomitmen dan melaksanakan pelaporan tersebut.

Gambar 3.1.12-5 Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [3362.QBA.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi anggaran per klasifikasi Output ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.12-5 Realisasi Anggaran IKU di Triwulan III

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Blokir
1.	[3362.QBA.001.052] Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp26.916.000	Rp8.892.437 (33,03%)	-
TOTAL		Rp26.916.000	Rp8.892.437 (33,03%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 8.892.437 atau 33,03% dari pagu anggaran sebesar Rp26.916.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

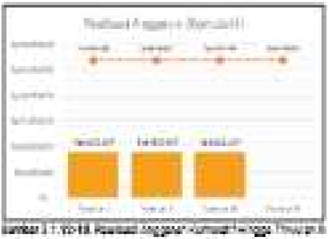

Gambar 2.1.15-18. Realisasi Anggaran Komunal hingga Triwulan III

4. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu memeriksa kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan serta melakukan koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK.

IKU 2.6. Nilai Pengawasan Internal Keuangan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Audit Keuangan Internal adalah Audit Keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Keuangan Internal atas pengelolaan aset/anggaran di lingkungan pengelola aset. Pengawasan keuangan internal yang menjadi tanggung jawab KPA dimana Sub Umum dan PKU melakukan pengawasan keuangan internal meliputi: Pengawasan sistem keuangan internal, Pengawasan Pengelolaan Aset aktif dan Pengawasan penyelamatan aset secara internal. Nilai pengawasan keuangan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Sub Umum dan PKU dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Keuangan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 2.1.15-20. Kategori Nilai Pengawasan Keuangan

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

[illegible]

Tabel 3.1.[illegible]. Capaian IKU [illegible] BPSPL Pontianak

SS-12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak								
IKU-33	Nilai Pengawasan Internal Kepatuhan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)								
Capaian 2023	Tahun 2024					Renstra BPSPL Pontianak		Renstra Ditjen PKRL 2020-2024	
	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Target Tahunan	% Realisasi thd Target TW III	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target Renstra
0	Target Capaian Tahunan			88	-		-		-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], September 2024

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 belum dapat dilakukan pengukuran, karena periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara tahunan. Namun, berdasarkan Verifikasi Data Pengawasan Internal Kepatuhan Internal Lingkup UPT pada tanggal 7 Agustus 2024, BPSPL Pontianak memperoleh nilai pengawasan internal kepatuhan sebesar 96 dengan kategori A (Memuaskan).

Tabel 3.1.12(2). Tabel nilai pengawasan kepatuhan

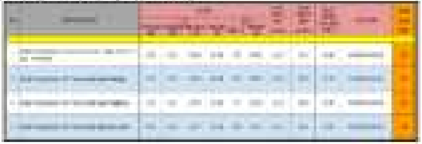

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 karena keduanya tidak memiliki target triwulanan. Periode pencapaian keduanya dilakukan secara tahunan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra BPSPL Pontianak 2020 – 2024. Capaian Triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra BPSPL Pontianak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, hal ini dikarenakan pada Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran.

[illegible]

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yaitu dalam penyampaian Kinerja IKU dapat dilakukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu:

a. Koordinasi Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 3 s.d. 5 Juli 2024 di Bandung sesuai Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.2342/SJ.8/TU.320/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

b. Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Satuan Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4165/SJ.8/TU.320/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

c. Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.5090/DJPRL.1/TU.330/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2267.EBA.962.001] Layanan Perkantoran, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Triwulan III (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp 23.098.452 atau 67,30% dari pagu anggaran sebesar Rp 34.320.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.12/23 Realisasi Anggaran IKU 24 Triwulan III

No	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket
1.	[2267.EBA.962.001] Layanan Perkantoran, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp34.320.000	Rp23.098.452 (67,30%)	-
	TOTAL	Rp34.320.000	Rp23.098.452 (67,30%)	-

9. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU ini di Triwulan IV.

3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSDPL) lain di Lingkup Ditjen PRL dapat dilihat pada Tabel 3.1.13 di bawah ini. Sebagian besar indikator kinerja diukur secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan unit kerja lain. Pada IKU Bantuan Kelompok Masyarakat yang disalurkan, BPSPL Pontianak memiliki capaian 2 kelompok dari target 2 kelompok (100%). Jika dibandingkan dengan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak dan LPSPL Serang (2 kelompok) lebih rendah dibandingkan dengan unit kerja lain (3 kelompok). Hal itu dikarenakan terdapat penurunan target di BPSPL Pontianak dan LPSPL Serang menjadi 2 kelompok disebabkan terdapat penurunan anggaran sehingga perlu penyesuaian target terhadap anggaran. Pada IKU Laporan SPIP, semua unit kerja telah menyampaikan Laporan SPIP kepada Ditjen PRL. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar oleh BPSPL Pontianak pada Triwulan III dengan unit kerja lain yaitu mencapaian nilai 100.00%. Pada IKU Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti, semua unit kerja telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]

[illegible]

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-[illegible]/2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp[illegible]. Realisasi anggaran diakses dari aplikasi online OM-SPAN di https://spanint.kemenkeu.go.id/ . Pada Triwulan III tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp[illegible] atau [illegible]% dari pagu anggaran. Adapun pagu dan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.[illegible] Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Triwulan III

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	[illegible]
1.	[[illegible]] Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNBP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
2.	[[illegible]] Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100.000.000	90.280.000	90,28	-
3.	[[illegible]] Pemantauan Ruang Laut	RM dan PNBP	1.100.000.000	[illegible]	[illegible]	-
4.	[[illegible]] Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
5.	[[illegible]] Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	800.000.000	778.717.880	97,34	-
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Sumber data: aplikasi OMSPAN [illegible] per 30 September 2024

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang dikelompokkan untuk :
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang Non Operasional merupakan pemberian belanja dan /atau jasa yang habis dipakai ditujukan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal, pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau penambahan nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran BPSPL Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3. [illegible] Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Periode	Pagu (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	(51) Pegawai	Triwulan III	4.327.000.000	2.333.902.391	53,93
2.	(52) Barang	Triwulan III	11.808.113.000	8.776.675.000	74,33
3.	(53) Modal	Triwulan III	793.000.000	632.096.822	79,71

*) Blokir Anggaran

Sumber data : SAKTI, Monsakti [illegible] per tanggal 30 September 2024

Dari total pagu anggaran berdasarkan bulan kalender (Bulan September/Triwulan III) alokasi untuk belanja pegawai sebesar 23,55%, untuk belanja barang sebesar 61,55% dan untuk belanja modal 4,23%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada Triwulan III sebesar Rp 2.333.902.391 (53,93%). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami / Istri PNS, Anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Triwulan III sebesar Rp 8.776.675.000 atau 74,33% dari pagu anggaran Rp 11.808.113.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), jasa keamanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 632.096.822 (79,71%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
   - Pengadaan Barang Bantuan [illegible] TA 2024 Kelompok [illegible] di Kecamatan [illegible] sebanyak 1 Paket SPK Nomor [illegible] tanggal 15 Juli 2024.
   - Pengadaan Sarpras Wisata [illegible] sebanyak 1 Paket SP Nomor 07/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.

- Pengadaan Sarpras Wilker Makassar Pulo Berupa Peralatan Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 57/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 59/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display [illegible] sebanyak 1 Unit SP Nomor 61/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Rakit Monitoring Pesut di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 3 September 2024.

[illegible]

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Triwulan III tahun 2024 BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran, meskipun terlihat bahwa sebagian besar dari target/target sasaran yang ingin dicapai pada Triwulan III telah tercapai. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada Triwulan III Tahun 2024 jika dilihat dari nilai NKO KEU-e/SM dari aplikasi e-kinerja sebesar 107,2% dengan kategori Baik. Realisasi anggaran BPSPL Pontianak pada Triwulan III 2024 sebesar Rp14.764.929.183 atau 78,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 18.286.312.000. Untuk capaian indikator kinerja yang telah tercapai di Triwulan III ini sebagai berikut:

1. Penyaluran Bantuan Kompak dengan capaian sebanyak 2 kelompok dari target 2 kelompok sehingga tercapai 100%.
2. Laporan SPIP yang disusun Lingkup BPSPL Pontianak dengan capaian 1 laporan dari target 2 laporan sehingga tercapai 100%.
3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar dengan capaian 135,35 dari target 64 sehingga tercapai 135%.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dengan capaian 100% dari target 50% sehingga tercapai 100%.

Target IKU dan IKK yang memiliki target pada Triwulan III tercapai secara keseluruhan dengan persentase capaian 100%. Pencapaian target pada Triwulan III masih belum terlihat secara signifikan terhadap target tahunan. Hal ini karena sebanyak 15 Indikator Kinerja Kegiatan memiliki periode capaian yang diukur tahunan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PRL terkait dengan Penetapan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 40 Orang.

4.3. Tindak Lanjut

Rekomendasi Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti yaitu mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar. Selain itu, telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum Pelayanan Dokumen Kawasan Konservasi di Perairan Darat oleh KKP. Hasilnya adalah KKP masih belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi di perairan darat dikarenakan belum terdapat aturan yang mengatur hal tersebut. Kedepannya, hingga Triwulan III BPSPL belum dapat melakukan pelayanan perizinan kawasan konservasi untuk Perairan Hulu.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja di Lingkungan BPSPL Pontianak dan data dukung penyusunan kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

LAMPIRAN

1. Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2024 No. B.2063/BPSPL.2/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
2. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.3171/BPSPL.2/TU.140/IX/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Agustus Tahun 2024.
3. Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.2803/DJPKRL.1/KP.720/X/2024 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024.
4. Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4802/DJPKRL.1/KP.720/X/2024 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan" Triwulan III Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

BPSPL
PONTIANAK

LAPORAN KINERJA
TAHUNAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR
DAN LAUT PONTIANAK

2024

Tim Penyusun

Pengarah:

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Penyusun:

Ghaniardi Raymondz F., S.Pi., M.Si.

Ahmad Fathu Rohman, S.Si.

Vita Pitriana Margaleni, S.Si.

Kontributor:

Subbagian Umum

Tim Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut

Tim Perlindungan dan Pelestarian

Tim Pemberdayaan Masyarakat

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga masih diberi kesempatan untuk terus mengabdi kepada-Nya dan mengabdi kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Negara ini adalah disusunnya Laporan Kinerja (LKj) BPSPL Pontianak Tahun 2024.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait program dan kegiatan BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKj ini memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi capaian penyelenggaraan program dan kegiatan BPSPL Pontianak sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Diharapkan program dan kegiatan di Satker BPSPL Pontianak akan menjadi lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi stakeholder kami.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Pontianak, diucapkan terima kasih.

Pontianak, 17 Januari 2025
Kepala BPSPL Pontianak

Ditandatangani
Secara Elektronik

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis BPSPL Pontianak dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak menggunakan aplikasi Kinerjaku Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara daring melalui https://kinerjaku.kkp.go.id. Proses pembuatan kinerja menggunakan manual IKU dan Pedoman Pengukuran Kinerja yang telah disusun sebelumnya serta manfaat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses perhitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya. Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 **Indikator Kinerja Utama** (IKU) dan **11 Indikator Kinerja Manajerial** (IKM) dengan total **24 Indikator Kinerja Kegiatan**. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BLU/KKP atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 yaitu 107,56% (kategori Hijau = Baik).

Pencapaian indikator kinerja BPSPL Pontianak yang tercapai pada tahun 2024 yaitu:

1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000) tercapai **Rp8.401.607** dari target **Rp8.000.000** sehingga persentase capaian sebesar 105%.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai 300 orang dari target 300 orang sehingga persentase capaian sebesar 100%.
3. Dokumen Operasionalisasi Pedoman Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 3 Dokumen dari target 3 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
4. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 16,27% dari target 14% sehingga persentase capaian sebesar 116,2%.
5. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) tercapai 1 Daerah dari target 1 Daerah sehingga persentase capaian sebesar 100%.
6. Kerjasama Konservasi yang Dilakukan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 1 **Kesepakatan** dari target 1 **Kesepakatan** sehingga persentase capaian sebesar 100%.
7. Kemitraan Konservasi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 1 **Kesepakatan** dari target 1 **Kesepakatan** sehingga persentase capaian sebesar 100%.
8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) tercapai **3 Kelompok** dari target **3 Kelompok** sehingga persentase capaian sebesar 100%.
9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang) tercapai **70 Orang** dari target **60 Orang** sehingga persentase capaian sebesar 116,67%.

10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyelamatan/Pemulihan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 7 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 114,29%.
11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 4 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 100%.
12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan) tercapai 4 Kawasan dari target 4 Kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 94,96 dari target 95% sehingga persentase capaian sebesar 101,38%.
15. Nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 86,11 dari target 71 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
16. Nilai LKE Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 86,81 dari target 75 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai 93,46 dari target 88 sehingga persentase capaian sebesar 106,20%.
18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 85,35 dari target 81 sehingga persentase capaian sebesar 105,37%.
19. Laporan BMN yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target 4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) tercapai 120,00% dari target 84% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Diselesaikan dan Disampaikan (%) tercapai 100% dari target 85% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 80% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
24. Nilai Pengendalian Internal Kegiatan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 85,26 dari target 68 sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-032.07.2.479424/2024, dengan Pagu Revisi anggaran sebesar Rp15.989.425.000. Realisasi anggaran diakses dari aplikasi online SAKTI di https://spanint.kemenkeu.go.id/ . Pada Tahun 2024, realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar Rp15.739.096.815 atau 98,43% dari Pagu Revisi anggaran. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target telah tercapai. Namun capaian kinerja masih dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan pembahasan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara internal sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2024.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

Tindak lanjut dari upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 berdasarkan rekomendasi laporan kinerja triwulan sebelumnya yaitu mendorong peningkatan kualifikasi SP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring. Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang difasilitasi mata pencaharian baru menjadi 40 Orang.

Daftar Isi

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi vi
Daftar Gambar viii
Daftar Tabel ix
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
1.1.1. Kedudukan 1
1.1.2. Tugas 1
1.1.3. Fungsi 2
1.2. Susunan Organisasi 3
1.3. Keragaman SDM 4
1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 5
1.4.1. Potensi 5
1.4.2. Permasalahan 6
1.5. Dasar Hukum 7
1.6. Sistematika Penyajian 7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9
2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024 9
2.1.1. Visi 10
2.1.2. Misi 10
2.1.3. Tujuan 11
2.1.4. Sasaran Strategis 11
2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 12
2.3. Metode Pengukuran Kinerja 17
2.3.1. Formulasi Pengukuran 17
2.3.2. Pedoman Penyimpulan Kinerja 18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 20
3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai [illegible] BPSPL Pontianak 21
3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Sektor Kelautan Bukan [illegible] di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 24

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... 47

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan kemitraan kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.8. Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan PSN yang Difasilitasi dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak ... [illegible]

3.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain ... [illegible]

3.3. Realisasi Anggaran ... [illegible]

BAB IV PENUTUP ... [illegible]

4.1. Kesimpulan ... [illegible]

4.2. Rekomendasi ... [illegible]

4.3. Tindak Lanjut ... [illegible]

DAFTAR LAMPIRAN ... [illegible]

Daftar Gambar

Gambar 1.1.2-1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak 3
Gambar 1.1.2-2. Susunan Organisasi BPSPL Pontianak 4
Gambar 1.1.3-1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak 5
Gambar 2.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak 20
Gambar 2.1.1-2. Tren Nilai Kinerja Organisasi Selama Lima Tahun 22
Gambar 2.1.1-3. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 18
Gambar 2.1.1-4. Capaian Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 23
Gambar 2.1.1-1. Tren Capaian PN 07 dari Tahun 2022 23
Gambar 2.1.1-2. Tren Sebaran Penerimaan PNBP tahun 2024 24
Gambar 2.1.2-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan 28
Gambar 2.1.2-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah 28
Gambar 2.1.2-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 28
Gambar 2.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 29
Gambar 2.1.2-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya 31
Gambar 2.1.2-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya 31
Gambar 2.1.2-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang 32
Gambar 2.1.2-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang 32
Gambar 2.1.2-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 33
Gambar 2.1.2-10. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut 33
Gambar 2.1.2-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan 34
Gambar 2.1.2-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya 35
Gambar 2.1.2-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 35
Gambar 2.1.2-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 36
Gambar 2.1.2-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan 36
Gambar 2.1.2-16. Monitoring Sampah Plastik di Kota Singkawang 36
Gambar 2.1.2-17. Contoh Botol sampel dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 37
Gambar 2.1.2-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024 38
Gambar 2.1.2-19. Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gernas BCL 38
Gambar 2.1.3-1. Tren Target dan Capaian IKU 40
Gambar 2.1.3-2. Verifikasi Permohonan KKPRL 41
Gambar 2.1.3-3. Sebaran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL 42
Gambar 2.1.3-4. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut 42
Gambar 2.1.3-5. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Universitas Tanjungpura 43
Gambar 2.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Mocoro Hotel 44
Gambar 2.1.3-7. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Samarinda 44
Gambar 2.1.3-8. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024 46
Gambar 2.1.3-9. Pengarusutamaan Gender pada Kegiatan Operasionalisasi KKPRL 46
Gambar 2.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA 47
Gambar 2.1.4-2. Tren Target dan Capaian IKU 4 49
Gambar 2.1.4-3. Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 50
Gambar 2.1.4-4. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan 51
Gambar 2.1.4-5. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi 51
Gambar 2.1.4-6. Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting 52
Gambar 2.1.4-7. Hasil Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting 53
Gambar 2.1.4-8. Pengamatan Populasi Pesut 53
Gambar 2.1.4-9. Hasil Pengamatan Populasi Pesut 53
Gambar 2.1.4-10. Survei Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu 54

Gambar 3.1.4-11. Survei Sosial Ekonomi 54
Gambar 3.1.4-12. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi 55
Gambar 3.1.4-13. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu 55
Gambar 3.1.4-14. Pelaksanaan Conservation Goes to School 56
Gambar 3.1.4-15. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 Tahun 2024 57
Gambar 3.1.5-1. Tren Capaian IKU 5 58
Gambar 3.1.5-2. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara 60
Gambar 3.1.5-3. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 5 Selama Tahun 2024 61
Gambar 3.1.6-1. Tren Capaian Kerja Sama selama 5 tahun terakhir 64
Gambar 3.1.6-2. Inisiasi dan Pembahasan Draft Kerja Sama 65
Gambar 3.1.6-3. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama 66
Gambar 3.1.6-4. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 Tahun 2024 66
Gambar 3.1.6-5. Capaian Kinerja Kerjasama/Kemitraan dalam 5 tahun terakhir 68
Gambar 3.1.6-6. Kegiatan Inisiasi dan Pembahasan Kemitraan 69
Gambar 3.1.6-7. Penandatanganan Naskah Kesepakatan Kemitraan 69
Gambar 3.1.6-8. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 7 hingga Tahun 2024 70
Gambar 3.1.7-1. Grafik Capaian Bantuan KUB/FAN dalam 5 tahun 72
Gambar 3.1.7-2. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan 73
Gambar 3.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Tahun 2024 73
Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat di KKPN Mahakam Hulu 75
Gambar 3.1.7-5. Identifikasi Kelompok Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu 76
Gambar 3.1.7-6. Pelatihan Mata Pencaharian alternatif di KK Mahakam Hulu 78
Gambar 3.1.7-7. Pengarusutamaan Gender pada Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif 80
Gambar 3.1.8-1. Grafik Capaian IKU 10 dalam 5 tahun 82
Gambar 3.1.8-2. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat 83
Gambar 3.1.8-3. Survei Populasi Pari Hiu di Kalimantan Barat 83
Gambar 3.1.8-4. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat 84
Gambar 3.1.8-5. Penyediaan Data Populasi Terubuk 85
Gambar 3.1.8-6. Survei Penyediaan Data Populasi Pari Air Tawar 86
Gambar 3.1.8-7. Penyediaan Data Potensi Belida 86
Gambar 3.1.8-8. Pembuatan Coral Stock Center di Kalimantan Timur 87
Gambar 3.1.8-9. Monitoring Coral Stock Center di Kalimantan Timur 87
Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Penanganan Biota Dilindungi 88
Gambar 3.1.8-11. Grafik Penanganan Biota Dilindungi 88
Gambar 3.1.8-12. Bimbingan Teknis Penanganan Biota Dilindungi 89
Gambar 3.1.8-13. Sosialisasi Biota Dilindungi 89
Gambar 3.1.8-14. Workshop Penilaian EPANJI 90
Gambar 3.1.8-15. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 91
Gambar 3.1.9-1. Grafik Capaian IKU 11 dalam 5 tahun 93
Gambar 3.1.9-2. Pemanfaatan Surat Rekomendasi 94
Gambar 3.1.9-3. Pemanfaatan Surat Rekomendasi 95
Gambar 3.1.9-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Hiu dan Pari 96
Gambar 3.1.9-5. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Tangkap 96
Gambar 3.1.9-6. Pemanfaatan SAJI 96
Gambar 3.1.9-7. Grafik Pengiriman SAJI DN Hiu dan Pari 97
Gambar 3.1.9-8. Grafik Pengiriman SAJI DN Sarang Burung 98
Gambar 3.1.9-9. Grafik Pengiriman SAJI DN Sarang Burung 98
Gambar 3.1.9-10. Pemanfaatan Arwana 99
Gambar 3.1.9-11. Pemanfaatan Kepiting 99

Gambar 3.1.9-12. Grafik Pendapatan PNBP 100
Gambar 3.1.9-13. Survei Pemanfaatan Arwana 101
Gambar 3.1.9-14. Pemeriksaan Legalitas Pemanfaatan Jenis Ikan Arwana 101
Gambar 3.1.9-15. Kunjungan Pembudidaya Arwana Super Red di Kalimantan Barat 102
Gambar 3.1.9-16. Survei Pemanfaatan Teripang 102
Gambar 3.1.9-17. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang 103
Gambar 3.1.9-18. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Appendiks di PPN Pemangkat 104
Gambar 3.1.9-19. Dokumentasi pengukuran 104
Gambar 3.1.9-20. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Appendiks di TPI Sungai Kakap 104
Gambar 3.1.9-21. Grafik Pendataan Hiu dan Pari Appendiks PPI Manggar 105
Gambar 3.1.9-22. Dokumentasi Pengukuran 106
Gambar 3.1.9-23. Pelaksanaan dan Pemeriksaan Biota Produk Bagian Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengambilan sampel 106
Gambar 3.1.10-1. Sosialisasi Penataan Kawasan Jasa Kelautan 110
Gambar 3.1.10-2. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat 110
Gambar 3.1.10-3. Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat 110
Gambar 3.1.10-4. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 111
Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan 114
Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah 114
Gambar 3.1.11-3. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah 115
Gambar 3.1.11-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan 115
Gambar 3.1.11-5. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya 116
Gambar 3.1.11-6. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya 117
Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang 118
Gambar 3.1.11-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang 118
Gambar 3.1.11-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut 119
Gambar 3.1.11-10. Dokumentasi penimbangan sampah di Tanah Laut 119
Gambar 3.1.11-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan 120
Gambar 3.1.11-12. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya 120
Gambar 3.1.11-13. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang 121
Gambar 3.1.11-14. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut 121
Gambar 3.1.11-15. Evaluasi dan Penetapan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan 121
Gambar 3.1.11-16. Monitoring Sampah Plastik di Kota Singkawang 122
Gambar 3.1.11-17. Gerakan Bersih sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah 122
Gambar 3.1.11-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024 123
Gambar 3.1.11-19. Pengambilan Contoh Data Pendahuluan Sampel BCL 124
Gambar 3.1.12-1. Tren Target dan Capaian Nilai IKPA Tahunan 126
Gambar 3.1.12-2. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OMSPAN) 127
Gambar 3.1.12-3. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 136
Gambar 3.1.12-4. Capaian IKPA BPSPL Pontianak Tahun 2024 138
Gambar 3.1.12-5. Tren target dan capaian RB BPSPL Pontianak 140
Gambar 3.1.12-6. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 143
Gambar 3.1.12-7. Tren Capaian IP ASN 144
Gambar 3.1.12-8. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 146
Gambar 3.1.12-9. Perbandingan Komponen Nilai PM SAKIP Tahun 2023 dan 2024 151
Gambar 3.1.12-10. Kegiatan pada Evaluasi AKIP 154
Gambar 3.1.12-11. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 155
Gambar 3.1.12-12. Nilai IKP BPSPL Pontianak 159
Gambar 3.1.12-13. Tren Target dan Capaian Tahunan 160

Gambar 3.1.12-14. Tren Target dan Capaian IKU 165
Gambar 3.1.12-15. Tren Capaian Kinerja Efektivitas Bantuan Pemerintah 167
Gambar 3.1.12-16. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Pakan Lestari 168
Gambar 3.1.12-17. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Perahu Baru 168
Gambar 3.1.12-18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kelompok Kerja Perikanan Mangrove 169
Gambar 3.1.12-19. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024 169
Gambar 3.1.13-1. Perbandingan Penerimaan PNBP dengan Unit Kerja Lain 172
Gambar 3.1.13-2. Perbandingan Capaian Realisasi KKPD dengan Unit Kerja Lain 174
Gambar 3.1.13-3. Perbandingan Capaian Kerja Sama dengan Unit Kerja Lain 174
Gambar 3.1.13-4. Perbandingan Capaian Realisasi IKPA dengan Unit Kerja Lain 175
Gambar 3.1.13-5. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain 175
Gambar 3.1.13-6. Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain 176
Gambar 3.1.13-7. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain 176
Gambar 3.1.13-8. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain 177
Gambar 3.1.13-9. Perbandingan Capaian NKPA dengan Unit Kerja Lain 177
Gambar 3.1.13-10. Perbandingan Capaian IP ASN dengan Unit Kerja Lain 177
Gambar 3.1.13-11. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP dengan Unit Kerja Lain 178
Gambar 3.1.13-12. Perbandingan Nilai Pengawasan Keuangan 178

Daftar Tabel

Tabel 2.2-1 Perbandingan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 13
Tabel 2.2-2 Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 14
Tabel 2.2-3 Sasaran Kegiatan dan IKK BPSPL Pontianak Tahun 2024 15
Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak 22
Tabel 3.1.1-2 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Tahun 2024 26
Tabel 3.1.2-1. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak 28
Tabel 3.1.2-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya 32
Tabel 3.1.2-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang 32
Tabel 3.1.2-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut 33
Tabel 3.1.2-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan 34
Tabel 3.1.2-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024 37
Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak 38
Tabel 3.1.3-2. Jumlah dan Lokasi Verifikasi Permohonan KKPRL 41
Tabel 3.1.3-3. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024 45
Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap atribut 47
Tabel 3.1.4-2. Pembobotan Nilai Akhir EVIKA 48
Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 48
Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak 48
Tabel 3.1.4-5. Realisasi Anggaran IKU 4 Tahun 2024 56
Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak 56
Tabel 3.1.5-2. Realisasi Anggaran IKU 5 Tahun 2024 61
Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak 62
Tabel 3.1.6-2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 6 pada Tahun 2024 65
Tabel 3.1.6-3. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak 67
Tabel 3.1.6-4. Realisasi Anggaran IKU Konfirmasi Konservasi 70
Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak 71
Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 8 Tahun 2024 75
Tabel 3.1.7-3. Realisasi IKU 9 Tahun 2024 79
Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak 81
Tabel 3.1.8-2. Hasil Survei Populasi Hiu di Kalimantan Barat 84
Tabel 3.1.8-3. Realisasi IKU 10 Tahun 2024 93
Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak 95
Tabel 3.1.9-2. Jumlah SAP Peran Pal Pelaku 98
Tabel 3.1.9-3. Realisasi IKU 11 Tahun 2024 105
Tabel 3.1.10-1. Capaian IKU 12 PNBP BPSPL Pontianak 109
Tabel 3.1.10-2. Capaian IKU 12 Tahun 2024 111
Tabel 3.1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak 112
Tabel 3.1.11-2. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya 116
Tabel 3.1.11-3. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang 117
Tabel 3.1.11-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut 118
Tabel 3.1.11-5. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan 119
Tabel 3.1.11-6. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024 122
Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai KKA BPSPL Pontianak 126
Tabel 3.1.12-2. Realisasi Anggaran IKM 14 Tahun 2024 128
Tabel 3.1.12-3. Capaian IKM 15 Nilai KKA BPSPL Pontianak 128
Tabel 3.1.12-4. Capaian IKM 16 Nilai IKBI BPSPL Pontianak 129

Tabel 3.1.12-5. Realisasi Anggaran IKM 16 Tahun 2024 142
Tabel 3.1.12-6. Capaian IKM 17 BPSPL Pontianak 144
Tabel 3.1.12-7. Realisasi Anggaran IKM 17 146
Tabel 3.1.12-8. Kategori Nilai IKM SAKIP 148
Tabel 3.1.12-9. Capaian IKM 18 BPSPL Pontianak 150
Tabel 3.1.12-10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP 152
Tabel 3.1.12-11. Realisasi Anggaran IKM 18 Tahun 2024 154
Tabel 3.1.12-12. Capaian IKM 19 BPSPL Pontianak 156
Tabel 3.1.12-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKM 19 pada Tahun 2024 157
Tabel 3.1.12-14. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak 158
Tabel 3.1.12-15. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak 161
Tabel 3.1.12-16. Capaian IKM 22 BPSPL Pontianak 164
Tabel 3.1.12-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah 166
Tabel 3.1.12-18. Capaian IKM 23 BPSPL Pontianak 168
Tabel 3.1.12-19. Realisasi Anggaran IKM 23 Tahun 2024 169
Tabel 3.1.12-20. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan 170
Tabel 3.1.12-21. Capaian IKM 24 BPSPL Pontianak 171
Tabel 3.1.12-22. Tabel nilai pengawasan kearsipan 171
Tabel 3.1.12-23. Realisasi Anggaran IKM 24 Tahun 2024 172
Tabel 3.1.12-1. Perbandingan Capaian Kinerja BPSPL Pontianak dengan Unit Kerja Lain 177
Tabel 3.23.1.13-1 Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2024 179
Tabel 3.1.13-2/3.1.13-2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 180
Tabel 3.1.12-1. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja pada tahun 2024 182

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Fokus pada program pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Adapun penetapan lebih lanjut terkait kedudukan, tugas dan fungsi BPSPL Pontianak yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 07/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 05/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Ruang Laut No. 40 Tahun 2022 tentang Tugas Tambahan BPSPL Pontianak.

1.1.1. Kedudukan

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh kepala. BPSPL Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut lingkup Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

1.1.2. Tugas

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut No. 40 Tahun 2022, BPSPL Pontianak memiliki tugas tambahan dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, meliputi:

a. melakukan penyusunan dan peninjauan kembali rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. melaksanakan program dan kegiatan dalam rencana pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
c. melakukan penataan batas;
d. memantau status target konservasi dan aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkala;
e. melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
f. melakukan upaya penyadartahuan kepada masyarakat;
g. melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

h. melaksanakan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Nasional Wilayah Pulau [illegible] secara berkala.

1.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;
d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Disamping itu, bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSPL Pontianak secara umum memiliki beberapa alasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara ekosistemnya di daerah, antara lain sebagai berikut:

a. Percepatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara terpadu dan berkelanjutan;
b. Pengelolaan konservasi jenis dan genetika ikan dengan karakteristik tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak dapat didesentralisasikan ke daerah;
c. Monitoring ekosistem dan jenis ikan langka/terancam punah; Monitoring habitat dan populasi dan jenis-jenis spesifik, khusus dan endemik; Memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional; Secara ekologi bersifat lintas negara; Mencakup habitat dan daerah ruaya jenis migrasi; Potensi sebagai warisan alam, dunia dan/atau warisan wilayah nasional.
d. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam meratifikasi/menindaklanjuti ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti CBD (Convention on Biological Diversity), Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, WHS (World Heritage Site), dan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) yang pelaksanaannya tidak bisa didelegasikan/dilimpahkan kepada daerah (kewenangan pusat); serta menangani fungsi-fungsi Direktorat Jenderal PRL di daerah.
e. Pelaksanaan sebagian fungsi Ditjen PRL dalam memfasilitasi daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan memberikan bimbingan secara langsung kepada stakeholder yang ada di daerah terkait dengan fungsi pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
f. Pembinaan dan fasilitasi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat pesisir.

3. Penyelenggaraan komitmen Indonesia dalam melaksanakan pencapaian tujuan SDG (Sustainable Development Goals), antar lain, menghadapi dampak kemiskinan dan kelaparan, menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dalam pemberdayaan dan pesisir serta masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

1.2. Susunan Organisasi

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kantor BPSPL Pontianak berpusat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan kantor satuan kerja di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kotawaringin Barat, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.

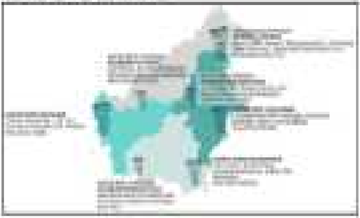

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak, dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPSPL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta pelestariannya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional di BPSPL Pontianak yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP), Analis Pemanfaatan Jasa Kelautan (APJK), Perencana, Analis Pengelolaan Keuangan (APK) APBN, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Arsiparis, dan Statistisi.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, BPSPL Pontianak telah menyampaikan usulan tim kerja BPSPL Pontianak kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Usulan tim kerja tersebut terdiri dari (1) Tim Kerja 1, menangani Perlindungan dan Pelestarian; (2) Tim Kerja 2, menangani Pemberdayaan Masyarakat; (3) Tim Kerja 3, menangani Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut. Selain 3 (tiga) Tim Kerja tersebut terdapat 1 (satu) Tim Kerja Dukungan Manajemen yang melaksanakan tindakan kinerja Manajemen yang diketuai oleh Kepala Subbagian Umum.

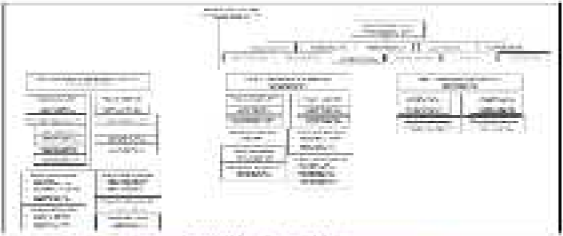

1.3. Keragaman SDM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSPL Pontianak pada tahun 2024 memiliki jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 73 orang terdiri dari 50 ASN (46 PNS dan 4 PPPK), 3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 21 Pegawai Non ASN. Pegawai BPSPL Pontianak berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Adapun rincian Pegawai Non ASN yang berjumlah 27 orang merupakan Sekretaris Pimpinan, Petugas Keamanan, Pramubakti, Pengemudi, dan Enumerator Kelautan dan Perikanan. Tingkat pendidikan pegawai BPSPL Pontianak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam menunjang capaian kinerja BPSPL Pontianak. Adapun keragaman Sumber Daya Manusia (SDM) di BPSPL Pontianak terangkum dalam infografis di bawah ini.

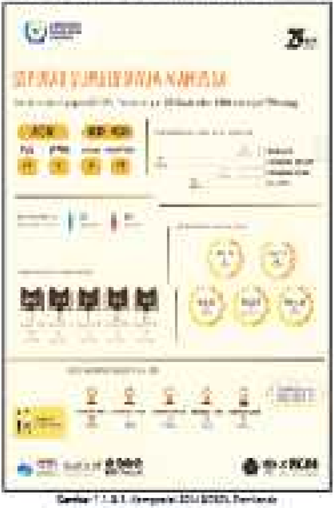

Gambar 1.3.1. Komposisi SDM BPSPL Pontianak

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.4.1. Potensi

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar [illegible] km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 38 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.793,34 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

1.4.2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

a. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi, kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengawal kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

b. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

c. Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES belum optimal. BPSPL sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna* dan *Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

d. Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini perlu dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.

e. Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Perlu dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

f. Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini diperlukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

g. Rendahnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian serta keseimbangan ekosistem untuk pengelolaan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

h. Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Tahun 2024 disusun dengan dasar hukum:

a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
c. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sistematika penyajian laporan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian umum tentang Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak seperti kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta jumlah pegawai secara keseluruhan. Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issue) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Alternatif solusi yang telah dilakukan;
vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
vii. Kegiatan Penunjang;
viii. Realisasi Anggaran
ix. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
   a. Perjanjian Kinerja;
   b. Lainnya yang dianggap perlu.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020 – 2024 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan, utamanya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperbaiki dan mengoptimalkan program perikanan budi daya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dari penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi dasar dalam perumusan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah "Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL".

2.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP turut melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pada tahun 2024 Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kebijakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, BPSPL Pontianak mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Pontianak.

2.1.3. Tujuan

Mengacu pada misi di atas, BPSPL Pontianak menetapkan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Pengelolaan Ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   a. Meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   b. Meningkatkan pengawasan dan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang di dalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan daya guna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
    a. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
3. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
    a. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
    a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
    b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
    c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
    d. Meningkatnya agenda, kemitraan/kerjasama dan komitmen konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
5. Tujuan meningkatkan penanganan dan perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
    a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
6. Tujuan meningkatkan kinerja organisasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh BPSPL Pontianak melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen BPSPL Pontianak untuk mencapainya pada tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja kegiatan, rencana capaiannya (target), anggaran, lokasi program, dan kegiatan. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Dokumen RKT 2024 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah berbasis pada *Balanced Scorecard* (BSC). PK BPSPL Pontianak ditandatangani oleh Kepala BPSPL Pontianak dengan Dirjen PRL. Pada tahun 2024 BPSPL Pontianak memiliki 12 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja (13 IKU dan 11 IKK). Adapun Sasaran Kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Sasaran Kegiatan pada Tahun 2024 dari Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Tahun 2023	Tahun 2024
(SK-1) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-1) Meningkatnya Nilai PMPRB BPSPL Pontianak
-	(SK-2) Meningkatnya tenaga kerja yang terlatih sesuai Standar Nasional Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-2) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-3) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselesaikan dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-3) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-4) Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-4) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-5) Meningkatnya efektivitas kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-5) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-6) Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-6) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	(SK-7) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan komitmen kerjasama, sinergi, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-7) Meningkatnya nilai PMPRB BPSPL Pontianak	(SK-8) Meningkatnya sinergi dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
(SK-8) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	(SK-9) Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-10) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-11) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak
-	(SK-12) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak

Sumber data: BPSPL Pontianak, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sedangkan untuk penjabaran IKK pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel [illegible] Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun [illegible] dan Tahun [illegible]

IKK Tahun [illegible]	IKK Tahun [illegible]
[IKK-1] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	[IKK-6] Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)
[IKU-2] Tenaga kerja yang terlibat dalam Kawasan Konservasi Perairan Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	Tidak terdapat IKU
[IKK-3] Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	[IKK-1] Rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Rekomendasi Kebijakan)
[IKU-4] Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	[IKK-9] Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional wilayah kerja BPSPL Pontianak (%)
[IKK-5] Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja di BPSPL Pontianak (Daerah)
[IKK-6] Kerjasama konservasi yang dibangun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	[IKK-2] Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)
[IKK-7] Kemitraan konservasi yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	
[IKK-9] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	[IKK-3] Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)
[IKU-8] Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	Tidak terdapat IKU
[IKK-10] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota terdampar di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKK-4] Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota terdampar di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKK-11] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	[IKK-5] Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)
[IKU-12] Pemanfaatan air laut selain energi yang teridentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	Tidak terdapat IKU
[IKU-13] Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	Tidak terdapat IKU

IKU Tahun 2024	IKU Tahun 2023
(IKM-14) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-15) Nilai kinerja perencanaan anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IKM-8) Nilai kinerja anggaran Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-16) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)	(IK-9) Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-17) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	(IK-10) Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)
(IKM-18) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	(IK-11) Nilai akuntabilitas kinerja lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)
(IKM-19) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	(IK-12) Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)
(IKM-20) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	(IK-13) Persentase unit kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
(IKM-21) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	(IK-14) Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
(IKM-22) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IK-15) Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-23) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	(IK-16) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)
(IKM-24) Nilai pengawasan internal terpadu lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	Tidak terdapat IKU
Tidak terdapat IKU	(IKM-11) Indeks Pelayanan Publik yang Diberikan pada BPSPL Pontianak (Indeks)

Sumber data: BPSPL Pontianak, Desember 2023 dan Oktober 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penambahan IKU baru sebanyak empat indikator pada tahun 2024. Penambahan IKU 2 dan IKU 3 dilaksanakan menindaklanjuti program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut. Sementara itu, penambahan IKU 24 dilakukan untuk mengakomodir penilaian kapabilitas lingkup APIP yang dilaksanakan setiap tahun. Penambahan IKU 12 dilakukan untuk mengakomodir anggaran Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang diberikan ke UPT.

Dalam perkembangan pelaksanaan kinerja pada tahun 2024, terdapat arahan untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor [illegible]/2024. Kemudian menindaklanjuti pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Sektor Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 8 Oktober 2024, BPSPL Pontianak melakukan perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 14 Oktober 2024. Terdapat perubahan redaksi dan target pada IKU 9 menjadi "Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)" dengan target menjadi 50 orang. Selain itu, terdapat juga perubahan pada IKU 14 menjadi "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak". Secara lengkap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3-4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak	1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000)	2.300.000
2. Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)	100
3. Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	3. Dokumen rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)	10
5. Teridentifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)	1
6. Meningkatnya pelestarian konservasi dan identifikasi keragaman, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	6. Kelembagaan konservasi yang dibina di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelembagaan)	1
	7. Kemitraan konservasi yang dibina di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	1
7. Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)	40
8. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan atau dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	10. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan kasus dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	7
9. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	11. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	4
10. Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	12. Pemanfaatan air laut selain energi yang diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)	1
11. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	13. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	4
12. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93,70
	15. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	77
	16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)	75
	17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)	88
	18. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	87
	19. Laporan BMN yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)	1

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak	20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)	50
		21	Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah diterima dan dimonitor (%)	90
		22	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Pontianak (%)	100
		23	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	40
		24	Nilai pengelolaan kinerja anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)	93

Sumber data: BPSPL Pontianak / LAKIN, Desember 2022

2.2. Metode Pengukuran Kinerja

2.2.1 Rumusan Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Pontianak tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja pada setiap periode capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Manual IKU pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scored Card (BSC).

2.2.2 Pedoman Pengukuran Kinerja

Dalam memantau perkembangan target kinerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut telah dijelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai dan tata cara pengukurannya. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/Triwulanan/semester/Tahun sesuai tipe IKU. Setiap IKU memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual IKU.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Prinsip Pengukuran Kinerja
   a. Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik;
   b. Pengukuran Kinerja dilakukan dari tataran atas (level 0 sampai ke level 2); dan
   c. Pencapaian kinerja dapat menjelaskan akumulasi/rata-rata/kondisi/relasi langsung dari pencapaian kinerja bawahannya.
2. Syarat Pengukuran Kinerja

Terdapat Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi atas PK, manual pengukuran dan pengumpulan data IKU serta dukungan sistem informasi.

3. Manual IKU

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU berpedoman pada Manual IKU yang berisi informasi karakteristik IKU, definisi dan cara pengukuran, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memformulasikan, mengukur, menginterpretasi dan menganalisa IKU.

Tahapan pengukuran capaian indikator kinerja dan rencana aksi dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan data masuk (Raw Data)
2. Menghitung Realisasi IKU
3. Mengalikan dengan bobot setiap IKU
4. Memasukkan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (http://kinerjaku.kkp.go.id/app/)
5. Atasan langsung dan setiap level melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliabel dan obyektif.
6. Sub tim verifikasi kinerja di tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Manual IKU.
7. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
8. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
9. Menyampaikan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.
10. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal menyampaikan seluruh hasil pengukuran unit kerja di tingkat Kementerian dan unit kerja level I kepada masing-masing pimpinan unit kerja di atasnya paling lambat 5 hari setelah periode triwulanan/tahunan berakhir.

Capaian kinerja ini dalam dalam pelaksanaannya dipantau oleh tim yang menjadi penanggungjawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PRL. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sesditjen PRL menganalisis seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKU dan IKK). Perhitungan IKU dan IKK dilaksanakan berdasarkan tingkat validitas IKU. Pelaksanaan pengukuran kinerja pada BPSPL Pontianak, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) secara online yaitu http://kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU dan Pedoman Penyusunan Kinerja yang telah disusun sebelumnya, serta memuat capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggungjawabnya.

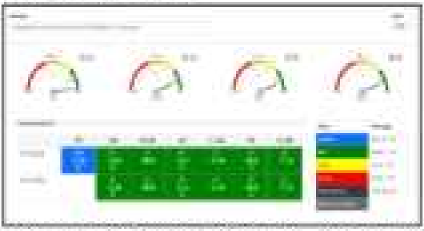

Gambar 3.1.1-1. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Pontianak (Sumber: Aplikasi Kinerjaku)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) IKU/IKK BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 yaitu **107,38%** (masuk kategori **Hijau – Baik**). NKO tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan NKO pada Triwulan III, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan II dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan NKO Triwulan I. Secara umum, seluruh capaian IKU pada tahun 2024 berhasil tercapai dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp.000) tercapai **Rp8.401.437** dari target **Rp8.000.000** sehingga persentase capaian sebesar 105%.
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang) tercapai 350 orang dari target 350 orang sehingga persentase capaian sebesar 100%.
3. Dokumen Operasionalisasi Rencana Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 3 Dokumen dari target 3 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
4. Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%) tercapai 16,31% dari target 14% sehingga persentase capaian sebesar 116,5%.

5. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah) tercapai 1 Daerah dari target 1 Daerah sehingga persentase capaian sebesar 100%.
6. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
7. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan) tercapai 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) tercapai 3 Kelompok dari target 3 Kelompok sehingga persentase capaian sebesar 100%.
9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang) tercapai 70 Orang dari target 60 Orang sehingga persentase capaian sebesar 116,67%.
10. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyelamatan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai 8 Jenis dari target 7 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 114,29%.
11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis) tercapai 4 Jenis dari target 4 Jenis sehingga persentase capaian sebesar 100%.
12. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 1 Dokumen dari target 1 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan) tercapai 4 Kawasan dari target 4 Kawasan sehingga persentase capaian sebesar 100%.
14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 94,96 dari target 93,75 sehingga persentase capaian sebesar 101,29%.
15. Nilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 98,11 dari target 91 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
16. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 90,81 dari target 75 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks) tercapai 90,48 dari target 85 sehingga persentase capaian sebesar 106,45%.
18. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai) tercapai 83,55 dari target 81 sehingga persentase capaian sebesar 103,15%.
19. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen) tercapai 4 Dokumen dari target 4 Dokumen sehingga persentase capaian sebesar 100%.
20. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%) tercapai 100,00 dari target 94 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) tercapai 100 dari target 100 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%) tercapai 100% dari target 100% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

33. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah (bobot 85%), Realisasi (%) tercapai 100% dari target 85% sehingga persentase capaian sebesar 100%.
34. Nilai Pengelolaan Internal Keuangan (bobot 85%), Realisasi (Nilai) tercapai 91,24 dari target 88 sehingga persentase capaian sebesar 100%.

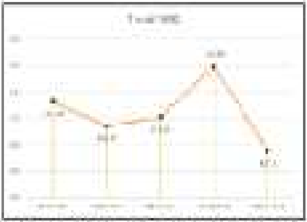

Gambar 3.1.1.5. Tren Nilai Kinerja Organisasi Selama Lima Tahun

NKO pada Tahun 2023 sebesar 112,60%. Terdapat penurunan 6,20% dari Tahun 2022. Jika dibandingkan Nilai Kinerja Organisasi selama lima tahun terakhir, NKO pada tahun 2023 merupakan nilai yang terendah. Penurunan nilai disebabkan karena bertambahnya jumlah Sasaran Kinerja membuat jumlah penyebut menjadi lebih besar sehingga dapat mengurangi nilai akhir jika nilai pembilang tidak terdapat peningkatan. Selain itu, terdapat beberapa sasaran kinerja yang mencapai nilai maksimum 100% seperti Operasionalisasi KPPBL, Jumlah Kawasan BSL dan Sertifikasi ALGS, hal itu membuat nilai persen capaian untuk sasaran kinerja lain perlu ditingkatkan. Namun, terdapat sasaran kinerja yang mengalami penurunan capaian secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu pada Sasaran Kinerja Fasilitasi KKPD. Beberapa sasaran kinerja juga seharusnya dapat dimaksimalkan capaiannya yaitu Tenaga Kerja BSL, Fasilitasi KKPD, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan/kerjasama.

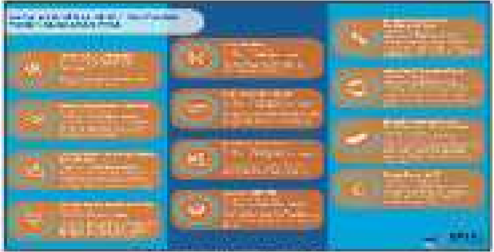

[illegible]

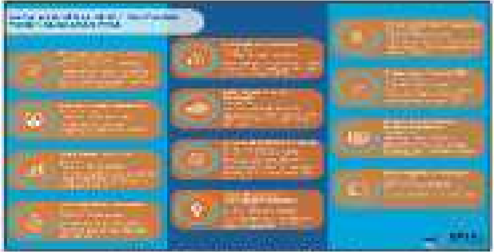

[illegible]

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Pontianak adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, berupa kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya serta penerimaan dari sumber lain.

Teknik Menghitung:

Nilai PNBP 2024 = Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425111) + Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425525) + Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) yang diperoleh oleh Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

PNBP [illegible] = PNBP [illegible] + PNBP [illegible] + PNBP [illegible]

Dimana:

PNBP [illegible] = SAJI DN + Surat Rekomendasi DN + Surat Rekomendasi LN + Denda

Keterangan:

SAJI DN = Pungutan atas Dokumen SAJI DN) = Pungutan Perdagangan + Pungutan Pengambilan)

Surat Rekomendasi = Pungutan atas Dokumen Rekomendasi + Pungutan Perdagangan

PNBP [illegible] = Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan

PNBP [illegible] = Nilai PNBP yang berasal dari Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)

PNBP [illegible] = Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut.

Keterangan:

- Untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif [illegible]%
- Dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang diberikan

Formulasi Penghitungan Pungutan

Pungutan Pengambilan = Jumlah Individu x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Pungutan Perdagangan = Volume x Tarif PNBP x Harga Patokan Jenis Ikan

Denda = Tarif PNBP x Jumlah Produk yang Tidak Sesuai dengan Permohonan

Tabel 3.1.1-1. Capaian IKU 1 BPSPL Pontianak

SK 1	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Pontianak							
IKU 1	Nilai PNBP BPSPL Pontianak (Rp)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Target Renstra Jangka Menengah	
	Capaian 2024	Peningkatan	Target [illegible]	% Realisasi thd Target [illegible]	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
Rp2.374.630.000	Rp2.421.407.418	+Rp46.668.998	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-PNBP, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Indikator IKU dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui mekanisme Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Sekretariat Ditjen PRL. Capaian nilai PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 (dari tanggal bulan 1 Januari – 31 Desember 2024) yaitu senilai Rp2.421.407.418 atau 121,38% dari target tahunan. Realisasi PNBP tahun ini didapatkan dari Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.344.678, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 11.758.504, Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya sebesar Rp1.187.220.241, dan Pendapatan Perizinan Lainnya sebesar Rp1.219.446.000.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar Rp2.374.630.000 dari target renstra sebesar Rp600.000.000 (340%). Realisasi PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi Rp2.421.407.418 atau terdapat peningkatan sebesar Rp46.668.998 (1,97%) jika dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2022 sebesar Rp2.508.022.224, terdapat penurunan pendapatan sebesar 3,47%. Peningkatan PNBP pada tahun 2024 disebabkan terdapat perubahan metode perhitungan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat penambahan penerimaan PNBP dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

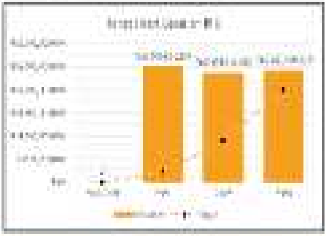

Gambar 3.1.1-1. Tren Capaian PNBP dari Tahun 2022

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024. Capaian kinerja pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 – 2024 karena IKU ini tidak memiliki target Renstra di tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000.000,-. Capaian kinerja tahun 2024 jika dapat dibandingkan dengan target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan Tahun 2020 – 2024 telah mencapai target tahunan sebesar 121,38%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 121,38% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang timbul apabila terdapat gangguan atau perbaikan pada aplikasi tersebut sehingga menghambat proses pemungutan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMPONI untuk mencatatkan dan memonitoring PNBP yang diterima.

7. Kegiatan Pendukung

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terhadap IKU yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) selama bulan Juli – September 2024. Selain itu, ada pula pungutan PNBP dari sewa Gedung dan Bangunan. Berikut ini merupakan rincian pungutan PNBP pada tahun 2024.

Tabel 2.1.1-3 Progres Capaian PNBP BPSPL Pontianak Tahun 2024

Bulan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Pendapatan Perizinan Lainnya	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Januari	Rp156.667	Rp97.628.000	Rp84.835.416	
Februari	Rp156.667	Rp85.940.000	Rp132.154.893	
Maret	Rp156.667	Rp83.858.000	Rp100.608.700	Rp11.474.109
April	Rp156.667	Rp119.870.000	Rp100.946.315	
Mei	Rp156.667	Rp135.408.000	Rp126.707.140	
Juni	Rp606.391	Rp134.228.000	Rp77.166.275	
Juli	Rp156.667	Rp115.828.000	Rp95.621.315	
Agustus	Rp818.884	Rp108.144.000	Rp84.447.328	
September	Rp333.334	Rp114.348.000	Rp100.481.300	
Oktober	Rp333.334	Rp73.448.000	Rp62.482.000	

Bulan	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan Perizinan Lainnya	Pendapatan Jasa Kesehatan dan Pertanian Lainnya	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
November	Rp222.224	Rp72.762.000	Rp81.306.780	Rp21.404
Desember	Rp222.224	Rp62.216.000	Rp59.841.790	
Jumlah	Rp2.444.470	Rp1.319.444.000	Rp1.199.808.241	Rp11.766.608
Total PNBP				Rp2.421.463.418

Berdasarkan pemantauan penerimaan PNBP bulanan, target PNBP tahun 2024 telah tercapai pada bulan Oktober. Tren penerimaan PNBP pada tahun 2024 fluktuatif tiap bulannya namun cenderung menurun dengan nilai rata-rata bulanan sebesar Rp201.762.001. Pendapatan tertinggi didapatkan pada bulan Mei dengan nilai Rp271.079.891 sedangkan pendapatan terendah pada bulan November sebesar Rp154.403.114.

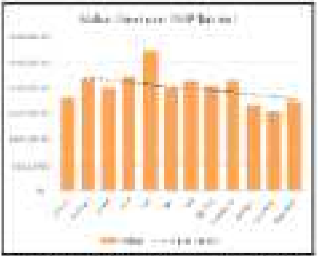

Gambar 3.1.1-3. Tren Bulanan Penerimaan PNBP tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian target IKU pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

K. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan melibatkan pegawai laki-laki dan perempuan secara proporsional sebagai petugas pelaksana PNBP. Hal ini didukung melalui keseimbangan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor [illegible] tentang Struktur Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

L. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PKRL terkait konsep pengelolaan PNBP tahun 2025. Target IKU pada tahun 2025 sebesar Rp[illegible] dengan periode pengukuran IKU dilakukan secara tahunan. Kegiatan pendukung untuk IKU ini yang dilaksanakan yaitu Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi) dan Rekomendasi PNBP sesuai Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 2. Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat dan/atau operasional/fasilitas dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru ditambahkan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu Pembersihan Sampah di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut.

Teknik Menghitung:

$TK_{BPSPL\ Pontianak} = TK_{lokasi\ 1} + TK_{lokasi\ 2} + TK_{lokasi\ 3} + TK_{lokasi\ 4}$

Keterangan:
$TK_{BPSPL\ Pontianak}$ = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak
TK_{lokasi} = Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut di lokasi yang menjadi target pada tahun 2024

Tabel 3.1.2-4. Capaian IKU 2 BPSPL Pontianak

SK-2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU-2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Orang)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Renstra (Target) & Perubahan		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Penyesuaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
-	222	-	222	100	222	100	88	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak Nomor [illegible] tanggal 31 Desember 2024. Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 telah melibatkan total 222 (dua ratus dua puluh dua) nelayan meliputi Kota Balikpapan sebanyak 55 nelayan, Kabupaten Tanah Laut sebanyak 60 nelayan, Kabupaten Kubu Raya sebanyak 49 nelayan dan Kota Singkawang sebanyak 58 nelayan. Jumlah nelayan yang terlibat telah dilakukan verifikasi melalui Berita Acara Verifikasi dan Validasi Data Nelayan di aplikasi Gemas BCL.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat IKU "Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Indikator ini merupakan indikator kinerja yang baru dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yaitu Pembersihan Sampah di Laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Target Rencana Jangka Menengah yaitu sebanyak 45 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Terdapat perbedaan antara antara target jangka menengah Ditjen PKRL dengan target dan capaian IKU ini, sehingga tidak dibandingkan dengan target jangka menengah. Meskipun begitu capaian IKU ini berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu sebanyak 313 orang tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Matriks Kinerja & Pendanaan, capaian kinerja IKU ini tahun 2024 telah mencapai target sebesar 130% dibandingkan dengan target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan Tahun 2020 – 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun. Meskipun begitu, keberhasilan progres capaian yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor aksesibilitas lokasi yang mudah diakses juga mendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam membantu keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja pelaksana kegiatan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meminimalkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan menggabungkan kegiatan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

4. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gerakan BCL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tanipah Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 – 20 Januari 2024. Di Desa Tanipah, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2015. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang (rusak). Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tanipah, namun terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih yang berjarak 33 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.3-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Kubu Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 14 – 16 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih terbatas. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Kubu belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.3-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Sungai Rasau, Desa Kuala dan Desa Naram Kota Singkawang pada tanggal 14 – 15 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengumpulan sampah di lokasi desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut. Meskipun sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan titik pengolahan sejauh 5 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya ditimbun atau dibuang ke TPA terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model ekonomi sirkular lainnya dari sampah dikumpulkan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan nelayan setempat. Terdapat 60 nelayan dan KUB yang telah diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah pengepul sampah juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra offtaker potensial. Indikator penilaian lainnya seperti harga beli terbaik dan mudah mencari serta mudah dijangkau juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini bisa mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.

Gambar 3.1.3-1. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Sungai Alalak-Kab. Banjar dan Sungai Batakan-Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja, dari data bank sampah tersebut, belum teridentifikasi yang aktifnya.

Gambar 3.1.2-4. Identifikasi dan Verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang Bank Sampah yang ada di Kota Pontianak dan diperoleh data bahwa di Kota Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Kelapa Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan DP3 Kota Balikpapan pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gemas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gemas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gemas BCL.

c. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Haju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-2. Jumlah nelayan yang terlibat dalam kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Jeruju Besar	KUB Bakti Segar	10
	KUB Kakap Indah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Limbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 23 Mei dan 28 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan prospek usaha pengelolaan sampah dari mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.3-4. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

- Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 23.441,8 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 49% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 51%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp4.682.000. KUB Batambang Laut I menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 5.675,2 kg.

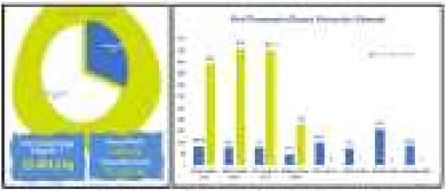

Gambar 3.1.3-5. Grafik data pengumpulan sampah di Kab. Kubu Raya

c. **Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan sosialisasi dan edukasi nelayan. Kegiatan ini melibatkan 65 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 20 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 23 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.3.6. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapuk Besar	KUB Surya Pandang	7
	KUB Sumber Rejeki	8
	KUB Nelayan Mufakat	11
Kel. Naram	KUB Naram Jaya Abadi	33
Kel. Kuala	KUB Nelayan Bawal	10
	KUB Bersahaja	13

7. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 18 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.3-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.505,44 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non plastik, sementara sampah plastik berongsok sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 27% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp13.428.500. KUB Nelayan Bawal menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.223 kg.

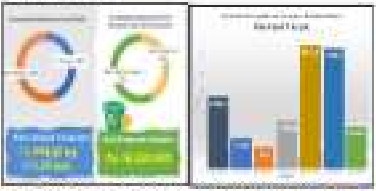

Gambar 3.1.3-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

4. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 23 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 70 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua desa (Desa Sungai Rasau sebanyak 64 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga dihadiri oleh [illegible] Induk Bahari Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Pendampingan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.2-8. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Rasau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Duta Laut	10
	KUB Cinta Lestari	24
Desa Bawah Layung	KUB Bina Harapan Bersama	6

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan dan Pemanfaatan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL dan BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.2-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.843,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 3.363 kg sampah bernilai ekonomi dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.136.950.

Gambar 3.1.2-10. Dokumentasi pengumpulan dan pengangkutan sampah di Tanah Laut

f. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan [illegible] Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 88 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 88 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.3-5 Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Sepinggan	KUB Minasadi	36
	KUB Sinar Bahari	12
	KUB Sinar Laut Bahagia	18
	KUB Laa Batasah Fajar	11
	KUB Anugerah Sepinggan	11

h. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengumpulan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, analisis usaha pengolahan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL dari BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.3-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

g. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 93 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jongkat sebanyak 30 orang dan Desa Sungai Kakap sebanyak 63 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 22,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,15 ton. Sampah hasil dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomis sejumlah Rp4.163.300.

Gambar 3.1.2-12 Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

k. **Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 32 orang, Kel. Sedau sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 26 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,4 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 4,37 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.558.000.

Gambar 3.1.2-13 Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

l. **Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 82 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 76 orang dan Desa Sawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Bamboo Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,5 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.136.333.

Gambar 3.1.2-14 Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

j. **Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 80 orang). Kegiatan ini juga bermitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 33,54 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.161.300.

Gambar 3.1.2-18. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

k. **Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang**

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 9 – 12 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut setelahnya pasca pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan menghitung jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Sinka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,84 kg di Pantai Sinka, 1,67 kg di Pantai Kuala Singkawang dan 0,575 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, karet, foam/busa, kertas, kain, kaca dan logam.

Gambar 3.1.2-19. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

l. **Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 September 2024 dalam rangka menghadiri Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dari Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan dari pesisir didapatkan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik, sisa kemasan makanan bungkus roti, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng cat dan lain sebagainya.

Gambar 3.1.3-17. Sosialisasi Bersih Sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Gamal Batam, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Asli. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Asli. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah sisa kemasan makanan dan minuman, botol kaca dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Kegiatan Wilayah Daerah [4044.QDC.001.051] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3-4. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Efisiensi
1.	[4044.QDC.001.051] Aksi 7K Penanggulangan Sampah Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Perairan Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 799.760.034 (99,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp 799.760.034 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp799.760.034 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan bulan disajikan pada grafik berikut ini.

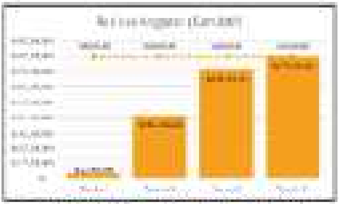

Gambar 3.1.3-18 Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

15. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada keseluruhan kegiatan Gernas BCL masih didominasi oleh laki-laki, namun terdapat keterlibatan perempuan sebesar 14% dalam Gernas BCL. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gernas BCL banyak terlibatkan dalam kepanitiaan kegiatan, pemberian materi dan evaluasi kegiatan.

Gambar 3.1.3-19 Pengarusutamaan Gender Pada Pelaksanaan Gernas BCL

Pada pelaksanaan Gernas BCL dilaksanakan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan. Secara umum, partisipasi dan keterwakilan (informasi dari peserta laki-laki), ketimpangan pemahaman aspirasi ini karena sebanyak 330 nelayan yang menjadi peserta Gernas BCL adalah laki-laki. Perempuan yang mengajukan pertanyaan berasal dari Dinas dan Lembaga terkait pengelolaan sampah. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Gernas BCL ini yaitu peningkatan kesadaran dari nelayan peserta dan tamu undangan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan pesisir baik laki-laki maupun perempuan.

16. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait dengan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut pada tahun 2025.

3.1.3. Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 3. Dokumen operasionalisasi pertimbangan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Pertimbangan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang existing, maupun verifikasi gambaran. Teknis menghitung dilakukan dengan mengimplementasikan dan menyampaikan dokumen operasionalisasi pertimbangan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi dan verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.1.3-1. Capaian IKU 3 BPSPL Pontianak

SK 3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU 3	Dokumen operasionalisasi pertimbangan pemanfaatan ruang laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Target Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Kendala/Hambatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
2	3	0	3	100	3	100	15	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-SAKIP, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini dibuktikan melalui Memorandum Kepala Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Telah disusun dokumen operasionalisasi pertimbangan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak sebanyak 3 (tiga) dokumen yang: Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut, Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut dan Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak serta koordinasi terkait dengan pelayanan pemanfaatan ruang laut. Jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja, capaian IKU ini telah mencapai realisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat realisasi sebanyak 2 dokumen dan target sebesar 2 dokumen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, tidak terdapat kenaikan ataupun penurunan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 1 dokumen.

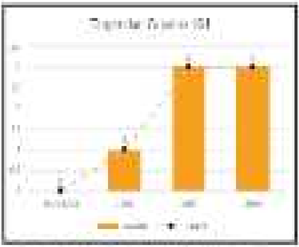

Gambar 3.3.3-1. Tren Target dan Capaian IKU

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Target Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL yaitu "Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Pusat dan Daerah (Lokasi)" sebanyak 46 lokasi pada tahun 2024. Terdapat perbedaan satuan antara target renstra DJPKRL dengan target kinerja sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun, Capaian IKU ini dapat berkontribusi dalam pencapaian target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024, dengan target pada tahun 2024 sebanyak 3 Dokumen. Capaian Kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada Matriks Kinerja dan Pendanaan BPSPL Pontianak sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target 3 dokumen berupa dokumen operasionalisasi [illegible] pemanfaatan ruang laut. Hal ini disebabkan [illegible] terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang mengatur tentang hak, kewajiban dan sanksi bagi pelaku pemanfaatan ruang laut. Selain itu, BPSPL Pontianak juga bekerja sama dengan Satker PSDKP Pontianak dan Satker PSDKP Tarakan dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut [illegible] pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan melakukan pertemuan secara daring. Selain itu, penggunaan sistem aplikasi berbasis web [illegible] dalam pengawasan dan pengendalian ruang laut. Sistem aplikasi berbasis web dan mobile ini memiliki fungsi dan kelebihan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, proses ini dapat mempersingkat waktu proses [illegible] pemanfaatan dan pengendalian ruang laut.

7. Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Sepanjang tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan penilaian teknis dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di seluruh provinsi di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan verifikasi ini berupa penugasan dari 2 (dua) eselon pendampingan perizinan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Ruang Laut. Tercatat telah telah dilaksanakan penilaian teknis terhadap 100 permohon dan verifikasi terhadap 88 permohonan yang tersebar di lima provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak. Jumlah verifikasi paling banyak berada di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 58 permohonan, sementara jumlah verifikasi paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 permohonan.

Tabel 3.1.3-5. Jumlah dan Lokasi Verifikasi Permohonan KKPRL

Provinsi	Jumlah Permohonan	Lokasi
Kalimantan Barat	6	Kab. Mempawah, Kab. Bengkayang, Kab. Ketapang
Kalimantan Tengah	1	Kab. Pulang Pisau
Kalimantan Selatan	15	Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru
Kalimantan Timur	58	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Timur
Kalimantan Utara	8	Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kota Tanjung Selor, Kab. Bulungan
Total	88	

Dari 88 permohonan KKPRL yang telah diverifikasi, sebanyak 48 permohonan telah diterbitkan KKPRL. Sebanyak 24 permohonan KKPRL telah direkomendasikan dari Direktorat Pengendalian Ruang Laut kepada BPSPL Pontianak. Sebanyak 40 permohonan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) telah diberikan pembayaran sebesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total penerimaan PNBP dari PKKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sejumlah Rp46.778.215.400, dengan total luasan permohonan sebesar 3.228,30 hektar dan panjang permohonan 18,40 km.

Gambar 3.1.3-5. Verifikasi Permohonan KKPRL

b. **Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**

Monitoring pemanfaatan ruang laut merupakan identifikasi pemanfaatan ruang laut yang ada di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL. Sepanjang tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut pada 40 subjek hukum di 13 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan monitoring terbanyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 21 subjek hukum yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Sementara kegiatan monitoring paling sedikit dilakukan di Kalimantan Tengah sebanyak 5 subjek hukum yang tersebar di 2 Kabupaten.

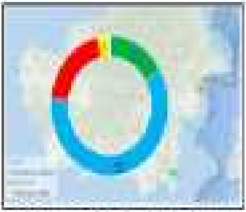

Gambar 3.1.3-3. Sebaran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL

Sebanyak 30 subjek hukum dilakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPRL, sementara 10 subjek hukum lainnya hanya dilakukan kegiatan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Pelaksanaan penilaian kepatuhan berdasarkan prioritas yang memiliki risiko tinggi, bersifat strategis nasional, berdampak luas, dapat mengubah bentang alam, berpotensi menimbulkan konflik, atau belum menyampaikan kewajiban laporan. Dari 30 subjek hukum yang dilakukan penilaian kepatuhan, sebanyak 9 subjek hukum berpredikat "Taat", 14 subjek hukum berpredikat "Taat dengan catatan", 6 subjek hukum berpredikat "Tidak Taat" dan satu subjek hukum tidak dapat dinilai kepatuhan pelaksanaan KKPRL.

Gambar 3.1.3-4. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

c. **Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut**

Pada tahun 2024, BPSPL Pontianak menyelenggarakan sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak tiga kali yaitu:

- Sosialisasi KKPRL di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 di Aula Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Civitas Akademika Universitas Tanjungpura sebanyak 68 orang. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari BPSPL Pontianak dan Program Studi Teknik Kelautan, Universitas Tanjungpura. Disampaikan bahwa KKPRL (Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut) adalah izin dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pihak yang memanfaatkan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari, baik untuk kegiatan berusaha melalui OSS maupun nonberusaha melalui aplikasi elektronik KKP (E-Sea), dan harus diperoleh sebelum kegiatan dimulai. Izin ini diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang di lokasi kegiatan dan berlaku untuk bangunan serta instalasi laut seperti pelabuhan, bangunan lepas pantai, [illegible] dan [illegible] [illegible]. Kegiatan seperti tournament, yang melibatkan pengelolaan dan [illegible] juga memerlukan KKPRL. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Gambar 3.1.3.18. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Universitas Tanjungpura

- Sosialisasi KKPRL di Maestro Hotel Pontianak

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2024 di Hotel Maestro Pontianak. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perizinan pemanfaatan ruang laut pada kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat, Universitas Muhammadiyah Pontianak serta instansi terkait lainnya. Narasumber dari kegiatan ini berasal dari Staf Ahli Menteri KP Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Disampaikan bahwa berdasarkan amanat UUCK kewenangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut berada di Pemerintah Pusat. Peranan dari pemerintah daerah adalah hasil perencanaan ruang daerah berupa RTRW Provinsi digunakan sebagai dasar penerbitan Persetujuan KKPRL. Upaya menjaga kelestarian lingkungan laut dengan penerbitan persetujuan KKPRL diberlakukan 15 kewajiban bagi pemegang KKPRL untuk melestarikan biota laut dan ekosistem pesisir/laut, pemberdayaan masyarakat, dan menghormati kepentingan bersama antar pemanfaatan ruang laut salah satunya adalah nelayan. Jadi [illegible] [illegible] untuk [illegible] pemegang persetujuan KKPRL karena diatur kewajiban [illegible] [illegible] nelayan.

Gambar 3.1.3-6. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di [illegible]

- Sosialisasi KKPRL di Kota Samarinda

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2024 di Hotel Aston Samarinda, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut di perairan Pulau Kalimantan, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan peserta luring sejumlah 26 orang. Disampaikan bahwa laporan tahunan KKPRL wajib disampaikan melalui aplikasi E-Sea, dan pelaku usaha yang sebelumnya menyampaikan via e-mail akan beralih ke E-Sea pada 2025. Laporan tahunan menjadi kewajiban bagi setiap KKPRL yang diterbitkan dengan jumlah laporan sesuai jumlah KKPRL yang dimiliki, termasuk bagi kegiatan nonaktif yang harus dilaporkan untuk pencabutan agar terhindar dari sanksi administratif. Pelaporan dilakukan oleh subjek hukum yang tercantum dalam KKPRL, sementara tanggung jawab kegiatan disesuaikan dengan penanggung jawab tahun berjalan. Laporan ini berbeda dari laporan izin usaha, yang ditujukan ke instansi pengampu, karena laporan KKPRL disampaikan ke KKP (Ditjen PKRL) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan ruang laut.

Gambar 3.1.3-7. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Kota Samarinda

c. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung IKU ini diantaranya rapat evaluasi kegiatan tahun 2024 dan rencana usulan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut pada tanggal 25 s.d. 28 Juli 2024; koordinasi ke Direktorat PRL pada Pendataan Teknis Dinas Kelautan Kota Balikpapan pada tanggal 12 – 14 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Rincian Output [2061.PBT.005] Rekomendasi Kegiatan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan Komponen/Subkomponen, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.3-6. Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Ket
1.	[2061.PBT.005.051] Sosialisasi Penyelenggaraan Perizinan Ruang	Rp336.240.000	Rp336.120.542 (99,96%)	-
2.	[2061.PBT.005.052] Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	Rp546.760.000	Rp546.709.498 (99,99%)	-
3.	[2061.PBT.005.053] Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	Rp265.900.000	Rp265.700.384 (99,96%)	-
TOTAL		Rp1.148.900.000	Rp1.148.481.933 (99,96%)	–

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung ini pada tahun 2024 (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp1.148.481.933 atau 99,96% dari pagu anggaran sebesar Rp1.148.900.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

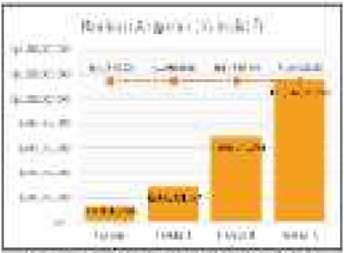

Gambar 3.1.3-6. Grafik Realisasi Anggaran IKU 3 Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada kegiatan verifikasi dan monitoring KKPRL yang dilakukan BPSPL. Pelaksana telah melibatkan pegawai dengan gender laki-laki (75%) dan perempuan (25%). Selain itu, upaya pengarusutamaan gender juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi KKPRL dengan mengundang perempuan sebagai narasumber.

Gambar 2.1.2.9. Pengamatan [illegible] pada Kegiatan Operasionalisasi [illegible]

1.6. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pemanfaatan Ruang Laut [illegible] Ditjen PKRL dalam rangka mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

3.1.4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 4. Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)

Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas [illegible] Hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) [illegible] Wilayah [illegible] Kabupaten [illegible]. Dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah dokumen tahun sebelumnya dan status tahun berjalan. Nilai tersebut dapat tercapai setelah dilakukan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dengan mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor [illegible]. Aspek penilaian EVIKA yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/dituangkan menjadi kriteria/indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

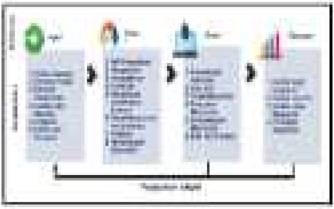

Gambar 3.1.4-1. Aspek Penilaian EVIKA

Tabel 3.1.4-1. Jumlah Indikator, Bobot dan Jumlah Pertanyaan pada setiap Kriteria

Kriteria	Jumlah Indikator	Bobot	Jumlah Pertanyaan
Input	6	10-25	[illegible]
Proses	8	10-25	15
Output	6	15-30	15
Outcome	4	20-30	[illegible]
Total	24		42

Tabel 3.1.4-5. Perhitungan Nilai Akhir EVIKA

Kriteria	Ni	NMax	NK %	BK	NAK %
Input	...	1076	...	0,30	...
Proses	...	430	...	0,25	...
Output	...	440	...	0,35	...
Outcome	...	423	...	0,10	...
Nilai akhir evaluasi					

Keterangan:

Nilai Indikator (Ni) : Hasil pengamatan skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (NMax) : Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (NK) : Ni / NMax x 100%
Bobot Kriteria (Bk) : Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (Nak) : NK x Bk
Nilai Akhir Evaluasi : Penjumlahan Nak

Tabel 3.1.4-3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Kawasan dan rancangan kawasan telah disiapkan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
≥50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara efektif dan tujuan dari pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Tabel 3.1.4-4. Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak

SS-4	Terlindunginya sumber daya dan pengelolaan ruang laut [illegible]							
IKU-4	Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Kinerja Renstra & Perjanjian		Target Renstra Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
66,48	82,79	+16,51	14	117,9	14	117,9	20,14%	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan pada tanggal 7 Agustus 2024, Kawasan Konservasi di Perairan [illegible] mendapatkan nilai akhir sebesar 82,79% dengan status Perak (Dikelola Optimum). Nilai EVIKA BPSPL Pontianak mengalami peningkatan sebesar 16,51% dan telah mencapai target Perjanjian Kinerja sebesar 14% dengan persentase capaian sebesar 117,9%. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya: penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi, identifikasi

Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi, Penelitian Nilai Ekonomis Penting, Survei Jenis Ikan Dilindungi, Monitoring Sosial Ekonomi Sosialisasi Kawasan Konservasi, Peningkatan SDM Pengelola Kawasan, Conservation Goes to School dan Sosialisasi Layanan Perizinan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian IKU ini tersebut pada tahun 2023 sebesar 39,33%, lebih besar daripada target tahun ini yang sebesar 14%. Hal itu karena target tahun ini merupakan peningkatan nilai EVIKA, sehingga target nilai EVIKA kumulatif pada tahun ini sebesar 53,33%. Namun, berdasarkan hasil penilaian EVIKA pada tanggal 7 Agustus 2024, didapatkan nilai EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu sebesar 55,70%, sehingga terdapat peningkatan nilai EVIKA sebesar 16,37%.

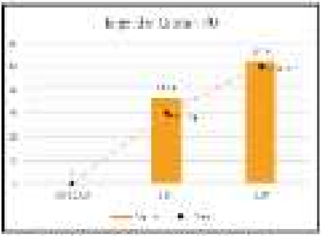

Gambar 3.1.4-5. Tren Target dan Capaian IKU 4

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target jangka menengah Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu luas Kawasan Konservasi yang Operasional seluas 20 juta Ha di tahun 2024. Capaian kinerja 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena terdapat perbedaan antara satuan yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL dengan target kinerja tahun 2024. Namun, pengelolaan Kawasan Konservasi Mahakam Hulu seluas 42.000 hektar berkontribusi terhadap target pengelolaan Kawasan Konservasi yang operasional sebesar 0,21% dari target Rencana Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu Persentase peningkatan nilai efektivitas kawasan konservasi nasional di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebesar 14% pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 dengan peningkatan nilai EVIKA sebesar 16,37% telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 116,93%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini yaitu adanya SDM yang kompeten, kerjasama yang baik dengan mitra kerja, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala pada pelaksanaan perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu yang belum dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan belum terdapat aturan mengenai perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah perairan darat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja penanganan kegiatan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, efisiensi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, akademisi, organisasi non profit dan stakeholder lainnya dalam mendukung kegiatan dan pencapaian IKU.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi

Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024 di Kota Samarinda. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL dan dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi yaitu BPSPL Pontianak. Hasil penilaian disajikan sebagai berikut:

- Skor penilaian kriteria input: 762 dari total 1075 (71%)
- Skor penilaian kriteria proses: 285 dari total 475 (60%)
- Skor penilaian kriteria output: 295 dari total 650 (45%)
- Skor penilaian kriteria outcome: 1425 dari total skor 2700 (52,78%)

Gambar 3.1.4-3 Penilaian EVIKA Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

Berdasarkan hasil penilaian, Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan pada tahun 2024 mempunyai nilai akhir sebesar 52,78% dengan status Baik (Dikelola Optimum). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan status Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Mahakam Hulu diantaranya sebagai berikut: meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM, melengkapi sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pemantauan kawasan, menyusun dan melengkapi SOP pengelolaan beserta penerapannya, meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan kelompok masyarakat, melakukan program penjangkauan yang terencana, menetapkan target konservasi dan sosial ekonomi secara tertulis, melakukan koordinasi terkait perizinan yang mengakomodasi perikanan dan pemanfaatan di perairan darat, meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat, monitoring dan analisa kondisi target konservasi di masing-masing zona.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kawasan

BPSPL Pontianak bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Pelatihan Umum [illegible]. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juli 2024 di Kantor BPSPL Pontianak dan Kantor Stasiun PSDKP Pontianak, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Kalimantan. Pelatihan ini dilaksanakan dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal monitoring dan pengawasan Kawasan Konservasi.

Gambar 3.1.4-4. Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan

c. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan, menganalisa memvalidasi jumlah pelanggaran dan menilai kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi di dalam Kawasan Konservasi Perairan [illegible] Wilayah Hulu. Kegiatan survei dilaksanakan secara rutin setiap tiga kali dalam satu minggu pada bulan Januari hingga November bersama Yayasan Konservasi RASI dan mitra lokal. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapang dan Focus Group Discussion (FGD), sementara metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

Gambar 3.1.4-5. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi

Selama tahun 2024, telah dilakukan pemantauan sebanyak 88 kali dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal yang teridentifikasi sebanyak 50 kejadian dengan melibatkan 135 nelayan. Kegiatan penangkapan ikan ilegal paling sering terjadi pada bulan April sebanyak 22 kejadian. Aktivitas penangkapan ilegal yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat tangkap destruktif berupa setrum, [illegible] dan racun. Sementara itu, hasil dari identifikasi pemanfaatan dan zonasi mendapatkan 8 orang nelayan yang menangkap ikan di Zona Inti yang tidak sesuai peruntukannya.

3. Pendataan Ikan Ekonomis Penting

Kegiatan Survei Ekonomis Penting dilakukan pada Mei hingga November 2024 di Semayang Desa di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Survei ini merupakan bagian dari Penyediaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengambilan data dilakukan dari hasil tangkapan nelayan. Jenis ikan yang dilakukan pengukuran yaitu ikan puyau (Osteochilus vittatus) dan ikan lepok (Cirrhinus microlepis) yang merupakan komoditi ikan ekonomis di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Hulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendataan statistik sebanyak jenis ikan yang tertangkap serta penilaian kematangan gonad secara visual.

Gambar 3.1.4-6. Survei Pencatatan Ikan Ekonomis Penting

Sebanyak 847 ekor ikan puyau dan 13x ekor ikan lepok dilakukan pengukuran morfometrik yang terdiri dari bobot total, panjang total, panjang hingga pangkal ekor, panjang dan lebar. Hasil morfologi ikan puyau yang didapatkan berada pada rentang panjang 10 – 20,5 cm dan ikan lepok sekitar 11,2 – 24,2 cm. Hasil pendataan didapatkan betina sebanyak 52,3% dan jantan sebanyak 45,9%. Pada tingkat kematangan gonad, sebanyak 33% tidak dapat diidentifikasi, matang gonad sebanyak 30,5%, diikuti TKG II sebanyak 19%, TKG I sebanyak 13,2% dan TKG V sebanyak 1,7%. Sebaran daerah penangkapan oleh nelayan paling besar di Danau Semayang sebanyak 39,3% sedangkan paling kecil di Muara Muntai ini sebanyak 3,4%.

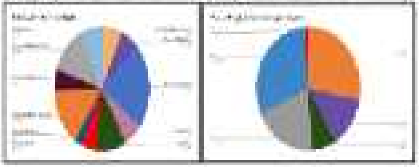

Gambar 3.1.4-7. Hasil Survei Pendataan Ikan Ekonomis Penting

4. Survei Jenis Ikan Bilindang & Monitoring Kualitas Air

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengamatan pada populasi pesut mahakam tiap Triwulan pada tahun 2024 di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Survei pemantauan kelimpahan pesut dilakukan menggunakan kapal Bilongka milik Yayasan Konservasi RASI dimulai pada pukul 08.00 – 16.00 WITA, dengan satu pengamat melakukan pengamatan di atas platform kapal dan tiga pengamat lainnya mengamati dari sisi kapal. Kemudian, dilakukan pencatatan hasil data berdasarkan metrik yang telah disusun. Pada saat pengamatan pesut, dilakukan pencatatan lokasi, pengambilan koordinat GPS dan jumlah pesut yang dilakukan Balai ini, juga dilakukan pengambilan data kualitas air di lokasi pengamatan dengan parameter pH, DO, EC, TDS, Kecerahan, Temperatur secara insitu menggunakan Water Quality Checker.

Gambar 3.1.4-8. Pengamatan Populasi Pesut

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 didapatkan 23 kemunculan pesut dengan jumlah individu sebanyak 145 ekor. Individu terbanyak yang diamati terdapat di Sangkulirang sebanyak 27 ekor. Sementara individu paling sedikit diamati di Sungai Kedang Rantau sebanyak dua ekor. Aktifitas pesut yang diamati sebagian besar berupa sighting (teramati) sebanyak 35%, diikuti oleh milling (melakukan aktifitas tanpa orientasi jelas) dan feeding (mencari makan) sebesar 30%. Sebesar 27% pesut yang teramati sedang melakukan traveling (berenang cepat).

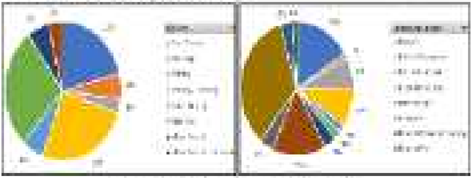

Gambar 3.1.4-9. Hasil Pengamatan Populasi Pesut

Pada hasil ukuran pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa kondisi perairan berada pada fase muka surut dan sebagiannya kelas II yaitu peruntukan untuk prasarana/sarana rekreasi air dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu tersebut. Pada pengukuran temperatur air yang didapatkan di seluruh pengukuran menunjukkan nilai suhu berkisar antara 28,4 – 31°C. Sementara untuk nilai Oksigen Terlarut berkisar antara 3,4 – 6,7 mg/L. Nilai pH pada saat observasi didapatkan sebesar 5,5 – 7,5. Sementara nilai TDS berkisar antara 5,5 – 74 ppm.

Gambar 3.1.4-13. Survei Kualitas Air di Kawasan Mahakam Hulu

Sebagai rujukan, regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari monitoring kualitas air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil monitoring sepanjang Tahun 2024 diketahui bahwa hasil pengukuran parameter air pada Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu berada di dalam ambang batas dari baku mutu kelas dua menurut PP Nomor 22 tahun 2021.

f. Monitoring Sosial Ekonomi

Kegiatan survey sosial ekonomi dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2024. Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung secara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan alat bantu berupa kuesioner. Variabel target adalah pelaku perikanan dan pemanfaat sebagai subjek seperti nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah perikanan dan sebagainya. Sampel berasal di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu dan diambil secara purposive sampling, sehingga sampel data dianggap sebagai pemanfaat yang representatif dari populasi Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Informasi yang didapatkan dari responden di antaranya profil responden, sikap terhadap kawasan konservasi, dukungan terhadap kawasan konservasi perairan, manfaat masyarakat terhadap kawasan konservasi, profil hunian dan properti, mata pencaharian utama, kelompok dan kelembagaan masyarakat, penangkapan dan pemasaran, ekonomi rumah tangga.

Gambar 3.1.4-14. Survei Sosial Ekonomi

Hasil akhir diperoleh 120 responden yang tersebar di 4 kecamatan. Responden yang didapatkan berprofesi sebagai nelayan tangkap, budidaya, dan pengolah perikanan. Masyarakat pemanfaat di sekitar Kawasan Konservasi memiliki variasi pendapatan antara Rp1.000.000 s.d. Rp3.000.000 tiap bulannya. Namun, pendapatan dari penangkapan ikan yang menjadi sumber utama penghasilan mengalami fluktuasi tergantung pada musim dan hasil tangkapan. Mayoritas responden menyadari bahwa aktivitas penangkapan ikan secara ilegal dapat merusak ekosistem, namun hanya 38% responden yang mengetahui tentang kebutuhan dan aturan yang berlaku. Sekitar 68% responden setuju bahwa Kawasan konservasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun sebagian masyarakat masih khawatir dan menganggap bahwa pembatasan akses dan aktifitas dapat merugikan secara ekonomi.

g. Sosialisasi Kawasan Konservasi

Kegiatan Sosialisasi Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah kepada masyarakat/kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah, dan stakeholders terkait bertujuan untuk upaya pengelolaan, serta penyebarluasan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni – September 2024. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang ekosistem Pesut Mahakam yang bernilai strategis secara nasional serta urgensi untuk melindungi habitat pesut. Selain itu, penyampaian materi kawasan konservasi dilakukan dalam pembagian bahan cetak dalam bentuk poster dan X-Banner kepada masyarakat yang telah ikut serta dan stakeholder. Hasil kegiatan sosialisasi berdasarkan pretest dan posttest evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan setelah kegiatan.

Gambar 3.1.4-112. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Zonasi

h. Sosialisasi Perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi

Tujuan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perizinan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan yaitu untuk memfasilitasi penyampaian maksud sosialisasi dan materi kepada pemangku kepentingan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2024 di Desa Pela dan Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bekerjasama dengan Direktorat KKHL dan Yayasan RASI sebagai narasumber:

Gambar 3.1.4-113. FGD Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu

i. *Conservation Goes to School*

Kegiatan Conservation Goes to School di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu upaya pembentukan pola pikir, serta pemahaman konservasi dan peduli lingkungan hidup melalui pembinaan dan penyuluhan kepada generasi muda di wilayah Kawasan

Konservasi. Acara ini telah dilaksanakan di MAN 2 Kutai Kartanegara, SMAN 1 Muara Wis, SMPN 1 Muara Kaman dan SMPN 1 Muara Muntai. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Yayasan Konservasi RASI sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang ekosistem Pesut Mahakam. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini generasi mendatang mampu mengelola lingkungan hidup di sekitarnya khususnya sumber daya air dan kehidupan di DAS Mahakam dengan bijak dan menjaga prinsip kelestarian. Sebagai bahan evaluasi, kegiatan diakhiri dengan kuis interaktif bersama siswa dan guru mengenai materi yang telah disampaikan.

Gambar 3.1.4-14 Pelaksanaan Conservation Goes to School

j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di Kawasan Konservasi Mahakam Hulu dilakukan pada bulan Januari - Desember 2024. Sarana dan prasarana yang disediakan yaitu Longboat Operasional, Drone, Tablet Pelayanan, [illegible], Alat Komunikasi, Genset [illegible], Alat Pengolah Data, CCTV dan Rumah Rakit.

H. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2562.RBW.001] Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan [2562.PBA.002] Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.4-5. Realisasi Anggaran IKU Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Ket.
1.	[2562.RBW.001.053] Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir-Pulau Kecil	Rp 53.546.000	Rp 53.544.332 (100%)	-
2.	[2562.PBW.001.055] Pelayanan Pelibatan Bersama Kawasan Konservasi	Rp 138.478.000	Rp 136.907.974 (98,86%)	-
3.	[2562.PBW.001.056] Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan	Rp 310.837.000	Rp 310.836.224 (100%)	-
4.	[2562.PBA.002.001]	Rp 250.000.000	Rp 249.846.300 (99,94%)	-

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Ket.
	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil]			
5.	[2142.RBA.002.062] Data dan Informasi Kawasan Konservasi	Rp380.875.000	Rp 380.833.110 (99.91%)	-
6.	[2142.QDA.002.050] Pemberdayaan Masyarakat	Rp1.197.799.000	Rp1.213.408.075 (100%)	-
7.	[2142.RBA.002.064] Pelayanan Perizinan Kawasan Konservasi	Rp334.808.000	Rp333.147.087 (99.51%)	-
TOTAL		Rp2.966.236.000	Rp2.951.902.122 (99.16%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu sebesar Rp2.951.902.122 atau 99.16% dari pagu anggaran sebesar Rp 2.966.236.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Barang.

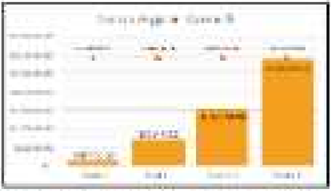

Gambar 3.1.x-16 Realisasi Anggaran Kumulatif IKU x Tahun 2024

4. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat.

5. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan Direktorat KKHL dalam rangka membahas/mengubah Penetapan Kawasan Konservasi Perairan daerah yang belum bisa ditetapkan oleh KKP. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan rutin seperti monitoring biota dilindungi dan penerapan nilai ekonomi padang.

3.1.5. Sasaran Kegiatan 5 Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 5. Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi adalah provinsi yang didampingi penyusunan penetapan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan atau bahkan dengan tahapan sesuai kondisi kawasan konservasi. Teknik perhitungan indikator Kinerja dilakukan dengan menghimpun data dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang didampingi dalam proses penetapan usulan penetapan kawasan konservasi.

Tabel 3.1.5-1. Capaian IKU 5 BPSPL Pontianak

SK 5	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU 5	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Daerah)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Perjanjian Kinerja & Pendukung		Target Renstra Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
2	1	-1	1	100	1	100	[illegible] %	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian kegiatan IKU ini disampaikan melalui memo Ketua Tim Kerja Pendayagunaan dan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor: B/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu melakukan Pendampingan Penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Namun, hanya Provinsi Kalimantan Utara saja yang menyampaikan Surat Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau [illegible] di Kabupaten Nunukan melalui surat Gubernur Kalimantan Utara nomor: 500.5.5.4/[illegible]/DKP/GUB tanggal 13 Februari 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak telah difasilitasi penetapan usulan Kawasan Konservasi. Jika dibandingkan, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1 daerah atau 50%. Bila dibandingkan dengan capaian IKU ini selama 3 tahun terakhir, capaian tahun 2024 merupakan capaian terendah. Hal ini disebabkan anggaran adanya penurunan anggaran bila dibandingkan dengan tahun 2023.

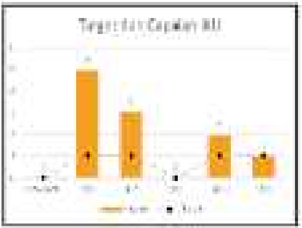

Gambar 3.1.2-4. Tren Capaian IKU 6

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Ditjen PKTL 2020 – 2024 yaitu sebesar 300.000 hektare luasan kawasan konservasi baru pada tahun 2024. Terdapat perbedaan satuan antara Rencana Jangka Menengah Ditjen PKTL dengan target kinerja tahun 2024 sehingga capaian tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun luasan Kawasan Konservasi Pulau [illegible] adalah 1.100,5 hektar yang diusulkan oleh Provinsi Kalimantan Utara telah berkontribusi sebesar 0,13% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPKH Pontianak tahun 2020 – 2024 yaitu 1 daerah pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian target IKU ini didukung oleh keaktifan Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja BPKH Pontianak dalam pengusulan usulan penetapan kawasan konservasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka percepatan penyusunan usulan penetapan Kawasan Konservasi. Sedangkan faktor penghambat pencapaian IKU ini yaitu terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi daerah secara luring jika lebih dari satu daerah.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Usulan yang difasilitasi penyusunan penetapan kawasan konservasi yaitu Kawasan Konservasi Perairan di Pulau [illegible], Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Terdapat beberapa kegiatan pendukung untuk penyusunan penetapan Kawasan Konservasi, yaitu:

a. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi

Kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau [illegible] dilakukan pada Triwulan I – Triwulan II 2024. Tahapan awal penyusunan dilakukan dengan menentukan target konservasi biota prioritas di Pulau [illegible]. Setelah itu dilakukan survey pengambilan data ekologis dan pemanfaatan di Kawasan Konservasi. Kemudian untuk menentukan Zonasi daerah konservasi, digunakan perangkat lunak MARXAN (Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Annealing). Setelah itu dilakukan konsultasi publik untuk menjaring masukan dari stakeholder terkait mengenai zonasi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Gambar 3.1.6-5. Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara

b. Pendampingan dan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi

Kegiatan pendukung yang dilakukan pada Triwulan II tahun 2024 yaitu Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Kecamatan [illegible], Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 5 – 13 Juni 2024. Terdapat dua Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan luas total sekitar 25.483,28 hektar yaitu Kawasan Konservasi di Perairan [illegible] dan Pulau [illegible], serta Kawasan Konservasi di Perairan Tanjung Palas Timur. Usulan kawasan konservasi perairan baru di Pulau [illegible] dengan luas 7.148,99 hektar sedang diproses.

Gambar 3.1.6-6. Asistensi Usulan Penetapan KKP3K di Kalimantan Utara

c. Evaluasi Teknis Usulan Kawasan Konservasi

Tahapan evaluasi penetapan di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari penyampaian usulan penetapan, evaluasi teknis dan dokumen pendukung, penyusunan dokumen penetapan, pembahasan lingkup kementerian dan pengesahan Keputusan Menteri.

Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan Surat Usulan Pencadangan KK Pulau Sambit melalui surat Gubernur Kalimantan Utara nomor 500.5.5.5/2946/DKP/GUB. Hasil evaluasi teknis proses penetapan Kawasan Konservasi Pulau Sambit di Provinsi Kalimantan Utara diantaranya terdapat perbedaan koordinat lokasi yang tumpang tindih dengan alokasi. Materi RTRW provinsi dengan yang diusulkan, perlu memastikan garis pantai yang akan digunakan, perlu memastikan kepemilikan lahan pada area yang diusulkan Zona Inti.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2502.UBA.001] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran per komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.6-3. Realisasi Anggaran IKU 6 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Status
1.	2502.UBA.001.051 Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp 100.000.000	Rp99.063.526 (99,06%)	-
TOTAL		Rp 100.000.000	Rp99.063.526 (99,06%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada tahun 2024 (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.063.526 atau 99,06% dari pagu anggaran sebesar Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

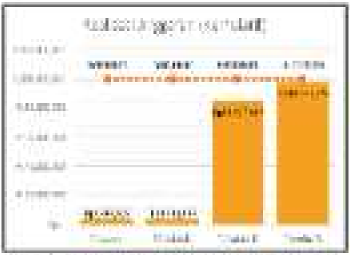

Gambar 3.1.6-3. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 6 pada tahun 2024

8. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada [illegible] sebagai berikut.

1.6 Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Sekretariat [illegible] dan Direktorat [illegible], dalam rangka menetapkan target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.6. Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kemitraan kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 6. Kerjasama konservasi yang dinilai di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih mitra kerja/lembaga/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Teknik menghitung indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan mendokumentasikan draf kesepakatan kerja sama yang dibuat di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU "Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang dinilai di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.6-1. Capaian IKU 6 BPSPL Pontianak

SK 6	Meningkatnya pelaksanaan konservasi dan kemitraan kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU 6	Kerjasama konservasi yang dinilai di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Target Renstra Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	[illegible]	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	-	1	100	1	100	4	25

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Capaian IKU ini yaitu telah dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 07/DJPKRL/KS.300/V/2024 dan Nomor B-[illegible] tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Terdapat sebanyak 1 (satu) kesepakatan kerja sama yang dilakukan pada tahun 2024, sehingga capaian untuk IKU ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Target IKU ini baru terdapat pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU "Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang dinilai di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU ini pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan.

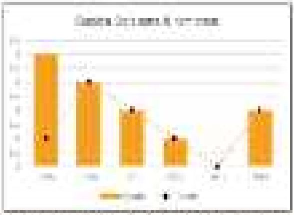

Gambar 3.1.6-1. Tren Capaian Kinerja Kerja Sama Konservasi Tahun ke Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra Jangka Menengah

IKU ini mendukung Target Rencana Jangka Menengah Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu "Kawasan dan Kerja Sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut" sebanyak 6 kesepakatan juta hektar pada tahun 2024. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 7 kesepakatan kerja sama telah berkontribusi sebesar 35% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Kerjasama Konservasi yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 1 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan Adanya Rencana Kerja Tahunan dan Monitoring Implementasi Kerja Sama dilakukan secara berkala. Sedangkan Faktor Penghambat adalah terbatasnya anggaran untuk melakukan pertemuan secara luring. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pertemuan secara daring.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melakukan pertemuan secara daring. Selain itu, optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja pembantu (satker) untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan diantaranya:

a. Inisiasi & Penyusunan Draft Perjanjian Kerja Sama

Kegiatan inisiasi dan jejaring kerja sama di Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu dilaksanakan dengan diskusi antara pihak BPSPL Pontianak dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa poin isi dokumen yang didiskusikan yaitu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu selama tahun 2024. Pembahasan dilanjutkan dengan pendetailan mengenai matriks kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan untuk finalisasi draft perjanjian kerja sama.

Gambar 3.1.4-7. Kegiatan Pembahasan Draft Kerja Sama

Kegiatan pembahasan finalisasi draft dokumen perjanjian kerja sama atau kata kesepakatan pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada tanggal 7 Mei di kantor [illegible]. Pertemuan secara daring dan luring. Kegiatan ini juga didampingi oleh Direktorat [illegible], Sekretariat Ditjen PKRL, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa poin pembahasan yaitu perubahan mengenai identitas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, merubah pertukaran data dan informasi menjadi berbagi pakai data dan informasi, serta pembahasan mengenai rencana aksi/rencana kerja.

b. Penandatanganan Kata Kesepakatan Kerja Sama

Penandatanganan Kata Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Nomor [illegible] dan Nomor [illegible] tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada 28 Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Gambar 3.1.4-8. Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [illegible] Kerja Sama, dengan Rincian Output [illegible] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut Berdasarkan [illegible].

Tabel 3.1.4-7. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 4 pada Tahun 2024

No.	Kegiatan dan Komponen	Pagu	Realisasi	Kendala
1.	[3548.PMC.001.051.A] Penyusunan Kesepakatan Bersama	Rp70.000.000	Rp69.223.471 (98,89%)	-
	TOTAL	Rp70.000.000	Rp69.223.471 (98,89%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 4 tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp69.223.471 atau 98,89% dari pagu anggaran Rp70.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Spanduk, Penggandaan Kegiatan, dan Konsumsi Rapat), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Kesepakatan [illegible]), dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Transport Peserta).

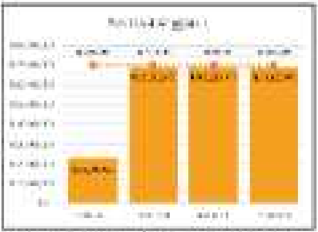

Gambar 3.1.4-8. Realisasi Anggaran Kumulatif IKU 4 Tahun 2024

Output yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tersebut adalah Kesepakatan Kerja Sama BPSPL Pontianak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kesepakatan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2024.

4. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini belum terlihat.

5. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat KKHL dan Sekretariat Ditjen PRL dalam rangka membahas target dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

IKU 7. Kemitraan konservasi yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat melalui kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Korporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Teknik perhitungan indikator kinerja dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kesepakatan kemitraan yang disusun di wilayah kerja BPSPL Pontianak untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Target IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU "Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang dibentuk di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.6-2. Capaian IKU 7 BPSPL Pontianak

SS 6	[illegible] untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU 7	Kemitraan konservasi yang dibentuk di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Target Renstra Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	% Capaian	Target IKU 2024	% Realisasi thd Target IKU	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	100	1	100	1	100	1	[illegible]

Sumber data: [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Kegiatan IKU ini pada tahun 2024 telah menghasilkan 1 (satu) kesepakatan kemitraan, sehingga untuk capaian IKU ini sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan nomor [illegible] dan Nomor [illegible] tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada [illegible] Mei 2024 di Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Target IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2024. IKU ini merupakan pengembangan dari IKU "Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang dibentuk di wilayah kerja BPSPL Pontianak" pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena tidak terdapat IKU ini pada tahun 2023. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) kesepakatan.

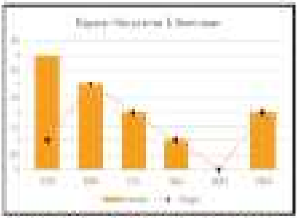

Gambar 3.1.8-5. Capaian Kinerja Kerjasama Kemitraan dalam 5 tahun terakhir

1. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Rencana Jangka Menengah

IKU ini mendukung target Rencana Jangka Menengah Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu "Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati Laut" sebanyak 5 kesepakatan pada tahun 2024. Capaian kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebanyak 1 kesepakatan kerja sama telah berkontribusi sebesar 20% dari target jangka menengah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu kemitraan konservasi yang dimiliki di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak sebanyak 1 kesepakatan pada 2024. Capaian kinerja sebanyak 1 (satu) kesepakatan telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target pada akhir tahun. Hal ini didukung dengan telah disepakatinya Draf Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengkajian, dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor pendukung pencapaian IKU ini adalah kesediaan pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari para pihak. Sementara penghambat yaitu adalah tidak adanya monitoring implementasi Perjanjian Kemitraan secara berkala.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder dan disesuaikan tempat dan melakukan pertemuan secara daring. Selain itu optimalisasi pegawai yang berada di Wilayah Kerja pemberian bantuan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

3. Kegiatan Pendukung

a. Inisiasi & Pembahasan Draft Kemitraan

Kegiatan Inisiasi kemitraan ini dilaksanakan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024 di Hotel Mercure Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Direktorat KEBP, Sekretariat Ditjen PKRL, Biro Kerjasama KKP.

Penyusunan dan pembahasan draft kesepakatan Bersama antara BPSPL Pontianak dengan FPIK Universitas Mulawarman di Kota Samarinda dilakukan pada 24 Januari 2024. Beberapa poin hasil diskusi diantaranya perlu diadakan atau dilakukan kemitraan dengan masyarakat lokal, perlu perizinan dan koordinasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. Ruang lingkup perjanjian yang disepakati adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kajian Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi.

Gambar 3.1.6.6. Kegiatan Inisiasi dan Pembahasan Kemitraan

b. Penandatanganan Nota Kesepakatan

Kegiatan pendukung dalam Pelaksanaan IKU ini adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan Nomor B.1488/BPSPL.3/KS.320/V/2024 dan Nomor 8888/UN17.8/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Pedalaman Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat pada 28 Mei 2024 di Hotel [illegible] Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

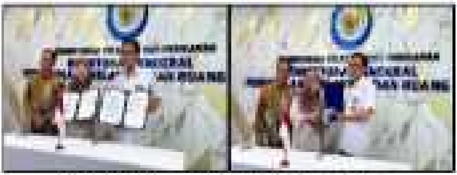

Gambar 3.1.6.7. Penandatanganan Nota Kesepakatan Kemitraan

6. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) 2043.PBD Kerja Sama dengan Rincian Output (PBD.001) Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut sebagai berikut berdasarkan komponen/subkomponen sebagai berikut:

Tabel 3.1.6-4. Realisasi Anggaran IKL [illegible]

No	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	2043.PBD.001.051.A Fasilitasi Jejaring dan Kemitraan	Rp100.000.000	Rp99.288.426 (99,29%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.288.426 (99,29%)	-

Sumber Data: BPSPL Pontianak (Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024)

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKL 7 Tahun 2024 (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp99.288.426 atau 99,29% dari pagu anggaran Rp100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan (Standee, Seminar Kit, dan Bahan Publikasi), Belanja Jasa Profesi (Honorarium Narasumber/Pembahas), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan dalam Rangka Koordinasi/Pelaksanaan Kegiatan), dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Transport Peserta dan Paket Fullday di Kalimantan Timur).

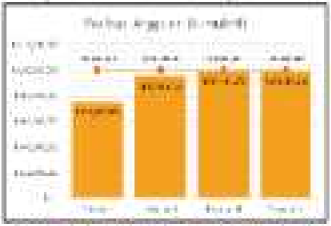

Gambar 3.1.6-5. Realisasi Anggaran Kumulatif IKL 7 hingga Tahun 2024

Output yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tersebut adalah Penandatanganan Perjanjian Kemitraan BPSPL Pontianak dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman dengan judul Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pengayaan Sumber Daya Mahakam, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKL ini belum terlihat.

8. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana kegiatan pendukung yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Direktorat [illegible] dan Sekretariat Ditjen PRL dalam rangka membahas target dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 8. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)

Bantuan Konservasi adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi. Teknis menghitung dilakukan dengan menginventarisasi dan mendaftarkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024.

Tabel 3.1.7-1. Capaian IKU 8 BPSPL Pontianak

SK 7	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU 8	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Kinerja Jangka Menengah		Kinerja Jangka Panjang	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
3	2	-1	2	100	2	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah dilakukan penyaluran bantuan sebanyak 2 (dua) Kelompok Masyarakat yang telah diberikan Bantuan Pemerintah dari target Tahun 2024 sebesar 2 (kelompok) dari target tahunan sebesar 2 (dua) kelompok, sehingga persentase realisasi kumulatif terhadap target tahunan sebesar 100%. Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 telah disampaikan melalui Nota Dinas Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 36/BPSPL.3/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. Selain itu, telah dilakukan serah terima bantuan kelompok masyarakat untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pesisir di Kabupaten Kotabaru sesuai Berita Acara Serah Terima nomor B.1678/BPSPL.3/PRL.440/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan serah terima bantuan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sempadan Laut di Kabupaten Ketapang B.2262/BPSPL.3/PRL.440/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 1 kelompok atau 33% menurun. Tren capaian kinerja IKU ini pada Tahun 2024 mengalami fluktuasi jika dibandingkan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian tersebut disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp346.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp232.848.000 pada tahun 2024.

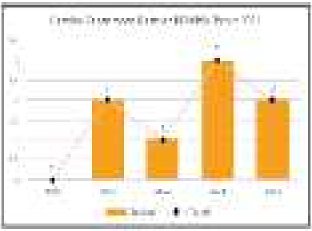

Gambar 2.1.3-1. Grafik Capaian Bantuan KOMPAK dalam 5 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL Tahun 2020 – 2024. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat target IKU tersebut dalam target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2 kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak. Capaian kumulatif Tahun 2024 sebanyak 2 kelompok masyarakat telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat penurunan capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, dari 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Penurunan target capaian kinerja disebabkan oleh berkurangnya alokasi anggaran untuk bantuan KOMPAK dari Rp300.000.000 pada tahun 2023 menjadi Rp200.000.000 pada tahun 2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini bergantung kepada keaktifan kelompok masyarakat dalam memenuhi berkas kelengkapan administrasi persyaratan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Telah dilakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok masyarakat untuk memastikan kelengkapan administrasi persyaratan telah sesuai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja penerima bantuan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan. Selain itu, pemberkasan dan pendampingan penyusunan proposal juga dilakukan secara daring dapat mendukung efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

c. Identifikasi, Eksplor, Verifikasi dan Penetapan Kelompok Masyarakat

Identifikasi kelompok masyarakat calon penerima bantuan KOMPAK dilakukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Kegiatan identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan dilakukan pada tanggal 14 s.d. 20 Januari 2024 yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang dan Desa Tanjung Sungkai, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Terdapat dua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang diidentifikasi, yaitu POKMASWAS Pelabi dan POKMASWAS Sebayar Bersatu. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pelabi merupakan kelompok masyarakat yang berlokasi di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok ini diantaranya pengawasan biota laut dilindungi, pendataan biota laut terdampar dan rehabilitasi terumbu karang. Pada tahun 2016, kelompok ini sebelumnya pernah mendapatkan bantuan KOMPAK dari Direktorat KKHL berupa peralatan selam, peralatan snorkeling dan pelampung.

Gambar 3.1.3-8. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Selatan

Kegiatan identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat dilakukan pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2024 di Kabupaten Kendawangan. Identifikasi dilakukan kepada empat kelompok masyarakat: POKMASWAS Cempedak Lestari, POKMASWAS Tengar Bersatu, POKMASWAS Sadar Wilayah Pesisir, POKMASWAS Mangrove Cinta [illegible] Bersatu. Kelompok Masyarakat Pengawas Cempedak Lestari berlokasi di Dusun Pulau Cempedak, Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kelompok ini aktif memonitoring kemunculan biota dilindungi seperti dugong, lumba-lumba, penyu dan paus. Kelompok ini juga melakukan rehabilitasi habitat satwa dilindungi dengan cara penanaman mangrove dan lamun baik secara swadaya maupun bekerjasama dengan Instansi/Lembaga/perguruan tinggi.

Gambar 3.1.3-9. Identifikasi Kelompok Masyarakat di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil identifikasi dan seleksi, terdapat dua kelompok yang berpotensi mendapatkan bantuan, yaitu Pokmaswas Padadi di Kalimantan Selatan dan Pokmaswas Dampadak Laetari di Kalimantan Barat. Kedua kelompok ini memenuhi sejumlah kriteria, antara lain telah memiliki legalitas atau pengukuhan/pengakuan dari Dinas terkait, berada di Kawasan Konservasi Daerah, serta mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam petunjuk teknis. Selain itu, Pokmaswas Padadi telah menerima Bantuan Konservasi pada tahun 2019 dan menunjukkan kinerja yang baik, yang dibuktikan melalui kegiatan evaluasi Bantuan Konservasi selama dua tahun berturut-turut dengan nilai baik serta predikat AA (Memuaskan) dalam penilaian Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua kelompok ini dinilai layak untuk menerima bantuan guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan Surat Penetapan Hasil Identifikasi dan Verifikasi dari Direktur KKHL Nomor B.[illegible]/DJPRL.5/PRL.440/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 serta Memorandum Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor B.4/BPSPL.2/PRL.440/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Konservasi TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak menetapkan Pokmaswas Padadi sebagai penerima bantuan melalui SK Nomor SK.81/BPSPL.2/PPK/V/2024. Selanjutnya, berdasarkan Surat Penetapan Hasil Identifikasi dan Verifikasi oleh Direktur KKHL Nomor B.[illegible]/DJPRL.5/PRL.440/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Memorandum Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak Nomor 11/BPSPL.2/KP.440/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Konservasi TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen BPSPL Pontianak juga menetapkan Pokmaswas Dampadak Laetari sebagai penerima bantuan melalui SK Nomor SK.93/BPSPL.2/PPK/VI/2024.

b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Bantuan

Pelaksanaan pengadaan barang Bantuan KONPAK melalui:

- SP Nomor SP.47/BPSPL.2/PPK/SP4/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 Usulan Pengadaan Barang Bantuan KONPAK TA 2024 Kelompok Padadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket.
- BAPB No. 45/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
- BAST Nomor B/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- BAP No. 46/BPSPL.2/PPK/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHP) nomor B.[illegible]/BPSPL.2/PRL.440/VI/2024 tanggal 5 Juli 2024.
- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 Usulan Pengadaan Barang Bantuan KONPAK TA 2024 Kelompok Dampadak Laetari di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket.
- Berita Acara Pembayaran No. [illegible]/BPSPL.2/PPK/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Berita Acara Pembayaran No. [illegible]/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BAPB.[illegible]/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No.58/BPSPL.2/PPK/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

c. Serah Terima Bantuan

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat [illegible] dari Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Juni 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit komposter, satu unit [illegible] dan satu unit [illegible] dengan nilai sebesar Rp 59.235.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi [illegible] tanggal 5 Juni 2024.

Gambar 3.1.7-4. Serah Terima Bantuan KOMPAK [illegible]

Serah terima bantuan KOMPAK pada Kelompok Masyarakat [illegible] Lestari dari Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 September 2024. Bantuan konservasi yang diberikan berupa satu unit kapal speedboat berbahan fiber beserta kelengkapannya dengan nilai sebesar Rp 99.900.000 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Konservasi [illegible] tanggal 23 September 2024.

Gambar 3.1.7-5. Serah Terima Bantuan KOMPAK [illegible] Lestari

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output [2963.QBH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Realisasi kegiatan berdasarkan rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7-2. Realisasi IKU 5 Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2963.QBH.001.051] Pemberian bantuan KOMPAK	Rp260.000.000	Rp259.265.484 (99,84%)	-
TOTAL		Rp260.000.000	Rp259.265.484 (99,84%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp259.265.484 atau 99,84% dari pagu anggaran sebesar Rp260.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

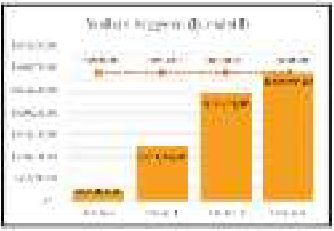

Gambar 2.1.7-3. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif hingga Tahun 2024

a. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mendorong keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan melibatkan pegawai laki-laki dan perempuan secara proporsional pada rangkaian kegiatan bantuan KOMPAK.

b. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penentuan target kinerja dan perencanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan terhadap kelompok masyarakat yang telah mendapatkan bantuan di tahun 2024.

IKU 9. Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang Difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Bentuk masyarakat merupakan kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan anggota dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. Teknik menghitung dilakukan dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di Kawasan Konservasi pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

IKU ini baru terdapat pada tahun 2024 dan tidak terdapat pada tahun-tahun sebelumnya. IKU ini merupakan pengembangan dari Sasaran Kinerja "Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak", menindaklanjuti pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Sektor Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 8 Oktober 2024, BPSPL Pontianak melakukan perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 14 Oktober 2024. Terdapat perubahan redaksi dan target pada IKU 9 menjadi "Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (Orang)" dengan target sebesar 10 orang.

Capaian IKU 4 BPSPL Pontianak sebagai berikut:

SS	Meningkatnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU 4	Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Capaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
-	70	-	60	116,67	1	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan e-SAKIP, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan. Terdapat realisasi sebanyak 70 (orang) masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Nasional wilayah kerja yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru. Capaian tersebut melebihi target sebanyak 60 orang sehingga realisasi terhadap target sebesar 116,67%. Capaian kinerja disampaikan melalui memo Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 34/BPSPL.5/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 belum terdapat IKU "Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada wilayah kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru". Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dikarenakan belum terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Target jangka menengah karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Rencana Strategis IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu sebanyak 60 Orang masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru pada tahun 2024. Capaian IKU tahun 2024 sebesar 70 orang telah memenuhi terhadap pencapaian target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak sebesar 116,67%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terdapat blokir anggaran yang baru dibuka pada bulan Juni sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2363.QCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Target Rincian Output juga mengalami perubahan dari 1 Kelompok menjadi 60 Orang, sehingga terdapat perbedaan antara target Rincian Output dengan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL untuk melakukan revisi Perjanjian Kinerja dan menyesuaikan target PK dengan target RO pada bulan Oktober 2024.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi anggaran yang berada di wilayah kerja pelaksanaan kegiatan untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

a. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat

Kegiatan identifikasi untuk mata pencaharian alternatif bertujuan untuk menggali potensi ekonomi masyarakat dan mengetahui jenis mata pencaharian yang sesuai dan berkelanjutan sebagai dasar penentuan pelatihan yang tepat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10-17 Juli 2024 bertempat di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu wawancara menggunakan alat penggali berupa kuisioner pada enam desa: Desa Sangkuliman, Desa Pela, Desa Liang Ulu, Desa Liang Ilir, Desa Sebelimbingan, Desa Kota Bangun Seberang. Sementara metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis scoring.

Gambar 3.1.7-4. Identifikasi Mata Pencaharian Masyarakat di KK Mahakam Hulu

Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,52%) berprofesi sebagai nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perikanan menjadi mata pencaharian utama di sekitar Kawasan Konservasi Mahakam Hulu. Pendapatan sebagian besar responden berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 atau kurang dari Rp3.550.558. Mayoritas responden memiliki ketertarikan terhadap pengembangan mata pencaharian alternatif yang memperhatikan keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Berdasarkan hasil scoring, kegiatan budidaya perikanan dinilai oleh responden sebagai alternatif mata pencaharian yang paling sesuai dan dapat berkelanjutan, diikuti dengan pengolahan produk kerajinan tangan dan pengembangan pariwisata yang berpotensi meningkatkan diversifikasi ekonomi masyarakat.

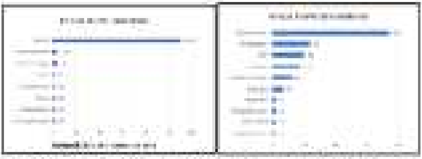

Gambar 3.1.7-5. Identifikasi Hasil Informasi Mata Pencaharian Alternatif di KK Mahakam Hulu

b. Pelatihan Peningkatan Mata Pencaharian Alternatif

Kegiatan pelatihan peningkatan mata pencaharian alternatif bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu serta mengembangkan mata pencaharian alternatif atau peluang usaha baru bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan pelatihan mata pencaharian alternatif dilakukan sebanyak dua kali yaitu pelatihan bidang perikanan pada tanggal 6 – 7 November 2024 dan pelatihan bidang pariwisata pada tanggal 18 Desember 2024.

Pelatihan bidang perikanan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari 7 desa di 3 kecamatan. Kegiatan ini mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman sebagai narasumber. Materi yang disampaikan yaitu mengenal tata cara pembenihan ikan yang berkelanjutan untuk ikan mas (Cyprinus carpio). Selain itu juga terdapat praktek di lapangan terkait dengan contoh pembenihan ikan.

Gambar 3.1.7-6. Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif KKP Mahakam Hulu

Pelatihan bidang pariwisata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari 3 kecamatan. Kegiatan ini mengundang [illegible] Craft sebagai narasumber. Materi yang disampaikan yaitu mengenal digital marketing untuk kerajinan lokal. Selain itu juga terdapat praktek untuk membuat kerajinan tangan berbahan sumber yang bisa dijadikan cinderamata untuk peningkatan sumber daya pariwisata.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2368.AEA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan. Belum terdapat realokasi anggaran karena telah anggaran baru dibuka pada bulan Juni. Terdapat perubahan Klasifikasi Rincian Output menjadi [2382.QDC.003] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 3.1.7-8. Realisasi IKU 9 Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	[illegible]
1.	[2382.QDC.003] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	Rp396.913.000	Rp395.281.262 (99,59%)	-
	TOTAL	Rp396.913.000	Rp395.281.262 (99,59%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari laki-laki dan perempuan. Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah peserta peserta kegiatan pelatihan peningkatan mata pencaharian alternatif. Pada kegiatan pelatihan partisipasi, jumlah peserta laki-laki yang ikut sebanyak 14 orang sementara perempuan sebanyak 24 orang.

Gambar 3.1.7-7. Pengarusutamaan Gender pada Pelatihan Mata Pencaharian Alternatif

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PRL terkait dengan penetapan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan identifikasi area/lokasi lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.1.8 Capaian Kegiatan 8: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah Jenis Ikan yang dilakukan intervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk keberlanjutan keanekaragaman hayati perairan. Target jenis ikan berjumlah 7 (tujuh) yaitu Penyu, Hiu, Labi Terubuk, Pari Air Tawar, Kerang, dan Mamalia Laut. Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah dilaksanakan melalui:

a. Pendataan Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis Penyu, Hiu, Labi Terubuk dan Pari Air Tawar.
b. Perbaikan Habitat/Pemulihan Populasi dan/atau Pengkayaan Stok Jenis Ikan dengan target jenis Kerang.
c. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah dengan target jenis biota laut dilindungi seperti mamalia laut.

Teknis perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan terancam punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan habitat atau Pemantauan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.8-1. Capaian IKU 10 BPSPL Pontianak

SS 4	**Meningkatnya Pengelolaan Konservasi yang menjamin Keberlanjutan Ekologi dan Jenis Ikan Dilindungi di Wilayah BPSPL Pontianak**							
IKU 10	***Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyelamatan, Perbaikan Habitat atau Pemantauan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)***							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Perbandingan Kinerja Tahunan		Perbandingan Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Penyesuaian	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
12	8	0	7	114,29	7	114	30	26

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-PROL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Metode pengumpulan dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, realisasi IKU 10 yaitu sebanyak 8 jenis meliputi Penyu, Kima, Lola, Karang, Mamalia Laut, Terubuk, Pari Air Tawar dan Bakau. Terdapat satu kegiatan jenis lain yang menjadi IKU tambahan, yaitu Penyediaan Data Populasi Bakau. Persentase capaian terhadap target perjanjian kinerja untuk IKU ini sebesar 114,29%. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 4/BPSPL.3/TU.140/I/2025 tanggal 3 Januari 2025. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

a. Penyediaan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat;
b. Penyediaan Data Populasi Kima di Kalimantan Barat;
c. Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan;
d. Penyediaan Data Populasi Ikan Terubuk di Kalimantan Barat;
e. Penyediaan Data Potensi Pari Air Tawar di Kalimantan Tengah;
f. Pemantauan Stock Ikan Karang di Kalimantan Timur;
g. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi dan Terancam Punah; dan
h. Sosialisasi Biota Dilindungi dan/atau Terancam Punah.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat capaian kinerja sebesar 12 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 (sejumlah 8 jenis), maka progres capaian mengalami penurunan sebesar 33% dari progres kegiatan pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan tidak terdapat anggaran untuk penyediaan data potensi jenis Terubuk dan Pari Air Tawar. Jika dibandingkan dengan capaian selama lima tahun ke belakang, tren capaian mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2022 dan penurunan dari tahun 2023 – 2024.

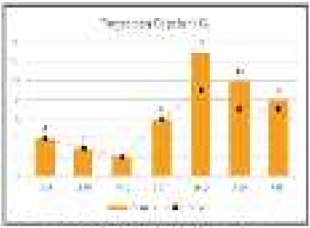

Gambar 3.1.3-1. Grafik Capaian IKU 13 dalam 5 Tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL tahun 2020 – 2024 yaitu 20 jenis pada tahun 2024. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 8 jenis memiliki persentase sebesar 40% dari capaian target jangka menengah Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan (MKP) Renstra tahun 2020 – 2024 yaitu 8 jenis pada tahun 2024. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sebanyak 8 jenis memiliki persentase sebesar 100% dari capaian target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau (Peningkatan/Penurunan) Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan data populasi penyu, respon cepat mamalia laut terdampar dan sosialisasi biota laut dilindungi/terancam punah. Respon cepat mamalia laut terdampar menghasilkan informasi yang akurat dan menyeluruh yang memadai, sehingga perlu koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan jejaring. Selain itu, akses lokasi kejadian biota terdampar yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses telekomunikasi menjadi kendala dalam pelaksanaan respon cepat. Oleh karena, dibentuk jejaring penanganan di wilayah kerja sebagai aktual untuk respon cepat biota terdampar. Faktor penghambat kegiatan ini yaitu tidak terdapat anggaran untuk penyediaan data populasi jenis Terubuk dan Pari Air Tawar. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Sekretaris Ditjen PKRL terkait dengan usulan anggaran kedua kegiatan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Pembentukan jejaring penanganan biota terdampar menjadi upaya untuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjangkau lokasi kejadian yang sulit diakses.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu:

a. Penyediaan Data Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Kegiatan penyediaan data populasi penyu di Kalimantan Barat dilaksanakan di Pantai Sungai Belacan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Sebubus, Kecamatan

Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 11 s.d. 14 Mei 2024. Sebelum survei dilakukan koordinasi dengan anggota kelompok masyarakat [illegible] Paloh. Selain itu, dilakukan kunjungan ke Kemal Tanjung Api yang melakukan pemantauan atau Pos monitoring penyu dan Kelompok Masyarakat Pengawas Kambau Borneo Konservasi juga dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

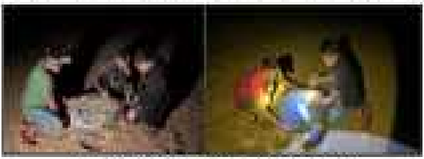

Gambar 3.1.8-2. Survei Populasi Penyu di Kalimantan Barat

Survey pendataan populasi penyu dilakukan dengan penyisiran tepi pantai pada malam hari yang dibagi menjadi 8 sektor dengan jarak antar sektor berkisar 800 meter. Pada saat melakukan monitoring penyu yang naik ke pantai pada umumnya ditemukan penyu di sektor 3 sampai dengan sektor 7, tetapi ada juga ditemukan penyu yang naik bertelur pada sektor 1. Penyu yang naik biasanya ditemukan 1 sampai 3 ekor setiap malamnya. Terdapat lebih dari 10 sarang hasil relokasi dengan jumlah telur per sarang berkisar 71 – 150 butir yang diperkirakan akan menetas sebelum pelaksanaan kegiatan Festival Pesisir Paloh. Jenis penyu yang sarangnya direlokasi adalah penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.

b. Pengumpulan Data Populasi Kima di Kalimantan Barat

Kegiatan pengumpulan data populasi kima di Kalimantan Barat dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Lemukutan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Desa Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tanggal 3 – 5 Februari 2024. Sebelum survei, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang bertempat di Aula Kantor Desa Pulau Lemukutan. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang merupakan warga Desa Pulau Lemukutan yang berprofesi sebagai nelayan, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Gambar 3.1.8-3. Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

Metode survey pendataan populasi kima yang dilakukan adalah metode Belt transek yaitu dengan menarik garis transek lurus sejajar garis pantai dengan panjang 100 meter dan lebar area pengamatan 5 meter (2,5 meter kanan dan 2,5 meter kiri pengamat) pada 7 stasiun pendataan. Total jumlah Kima (Tridacna spp.) yang ditemukan di 7 lokasi pendataan di Pulau

Lemukutan yaitu 994 ekor dengan jenis Tridacna crocea, Tridacna maxima dan Tridacna squamosa. Jumlah kima terbanyak ditemukan di Taman Kima sebanyak 270 ekor. Sementara jumlah kima paling sedikit ditemukan di [illegible] dengan sebanyak 89 ekor.

Tabel 3.1.3-2. Hasil Survei Populasi Kima di Kalimantan Barat

No	Stasiun	Spesies	Jumlah
1	Tel. [illegible]	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	89
2	Tel. [illegible]	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	197
3	Tj. [illegible]	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	132
4	Taman Kima	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	270
5	Air [illegible]	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	119
6	Tj. Batu [illegible]	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	93
7	Tj. [illegible]	T. crocea, T. maxima, T. squamosa	94
Total			994

c. Penyediaan Data Populasi Lola di Kalimantan Selatan

Kegiatan penyediaan data populasi lola (Trochus niloticus) di Kalimantan Selatan dilaksanakan di Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 5 – 14 September 2016. Sebelum survei dilakukan koordinasi dengan BKSDA dan [illegible] Kalimantan Selatan untuk mencari informasi mengenai [illegible] dan penyebaran lola di Kalimantan Selatan. Selain itu, dilakukan koordinasi juga dengan Kelompok Masyarakat Pesisir yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru untuk mendapatkan informasi mengenai informan yang mengetahui lokasi keberadaan lola. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk melakukan pemetaan partisipatif oleh masyarakat dan nelayan sekitar terkait lokasi potensial Lola di Pulau Kerayaan.

Gambar 3.1.3-4. Survei Populasi Lola di Kalimantan Barat

Survei lapangan dilakukan di 6 lokasi/stasiun pengamatan yang merupakan lokasi potensial berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan Pemetaan Partisipatif terhadap masyarakat pada kegiatan FGD. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan [illegible] dan transek garis pada titik sampel. Stasiun pertama berlokasi di bagian barat Pulau Karayaan. Ditemukan sebanyak 4 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun kedua berlokasi di bagian barat daya Pulau Karayaan. Ditemukan sebanyak 11 individu lola di sekitar transek pengamatan. Stasiun ketiga berlokasi di bagian timur Pulau Karayaan. Ditemukan sebanyak 3 individu lola di sekitar transek pengamatan. Total sebanyak 24 individu lola yang ditemukan selama pelaksanaan survei penyediaan data populasi Lola di 3 lokasi/stasiun pengamatan di sekitar Pulau Karayaan.

3. Penyediaan Data Populasi Ikan Terubuk di Kalimantan Barat

Kegiatan survey untuk penyediaan data populasi ikan terubuk dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 april tahun 2024 di Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyediaan data dengan metode penentuan sampel secara snowball sampling. Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisa deskriptif kualitatif.

Gambar 2.1.8-5. Penyediaan Data Populasi Terubuk

Di Kalimantan Barat terdapat dua jenis ikan terubuk, yaitu Tenualosa toli dan Tenualosa macrura. Keberadaan Tenualosa toli hanya diketahui berdasarkan informasi dari wawancara dengan nelayan dan pengepul, sedangkan Tenualosa macrura teridentifikasi langsung melalui sampel yang diperoleh selama survei. Dalam survei tersebut, dikumpulkan total 10 ekor ikan terubuk, dan sebanyak 7 ekor dibawa oleh tim survei untuk pengukuran lebih lanjut. Hasil identifikasi morfologi dan morfometrik terhadap seluruh sampel menunjukkan bahwa jenis ikan tersebut adalah Tenualosa macrura. Selain itu, hasil uji DNA terhadap sampel ikan terubuk dengan kode TR11 dan TR13 juga mengonfirmasi jenis Tenualosa macrura.

4. Penyediaan Data Potensi Ikan Air Tawar di Kalimantan Tengah

Survei penyediaan data potensi ikan air tawar dilakukan pada tanggal 22 – 26 Oktober 2024 di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Karau Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyediaan data dengan metode penentuan sampel secara snowball sampling. Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisa deskriptif kualitatif.

Gambar 2.1.8-6. Survei Penyediaan Data Potensi Ikan Air Tawar

Hasil survei penyediaan data potensi ikan air tawar di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa Potamotrygon signifer ([illegible]) merupakan jenis pari air tawar yang ditemukan di Kabupaten Barito Selatan. Sebaran potensinya meliputi sepanjang Sungai Barito serta beberapa danau seperti Danau Raya dan Danau Lelak, yang memiliki karakteristik perairan air jernih. Ikan ini lebih mudah ditemukan dan tertangkap pada saat kondisi air surut dengan kedalaman 2-7 meter. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara, jumlah tangkapan Potamotrygon signifer berkisar antara 2 – 6 ekor di setiap rentang waktu penangkapan ikan oleh nelayan.

f. Penyediaan Data Potensi Belida di Kalimantan Tengah

Kegiatan survey lapang penyediaan data potensi belida dilakukan pada tanggal 09 – 14 Oktober 2024 di Desa Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada nelayan di lokasi penyediaan data dengan metode penentuan sampel secara purposive sampling. Sementara Teknik Analisa yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif.

Gambar 6.1.8-7. Penyediaan Data Potensi Belida

Selama survei di Desa Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, terdapat dua nelayan yang menangkap dan membesarkan ikan belida. Berdasarkan hasil identifikasi visual, jenis ikan belida yang menjadi perhatian tersebut adalah Chitala lopis, meskipun dibutuhkan identifikasi lebih mendalam untuk memastikan jenisnya secara akurat. Lokasi potensial habitat ikan belida di Kabupaten Barito Selatan ditemukan di sekitar DAS Barito, khususnya perairan Sungai Rotih. Beberapa danau yang menjadi habitat ikan belida meliputi Danau Lelak di Desa Merandai serta Danau Raya di Desa Batu [illegible] Talang, serta Danau Lagah, Danau Hantipan, dan Danau Besar di Desa Kalahien.

g. Pembuatan Stock Center Karang di Kalimantan Timur

Pembuatan Coral Stock Center dilaksanakan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 19 - 27 Februari 2024. Kegiatan pembuatan Coral Stock Center dan Survey Pemantauan Coral Bleaching di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaksanakan oleh tim dari BPSPL Pontianak dan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas Peduli Lingkungan (MPL), Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Maratua, TNI AL Pulau Maratua, PT. [illegible] ([illegible] Resort), dan PT. Pratasaba Asia (Pratasaba Resort).

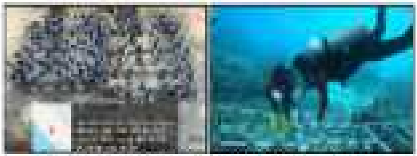

Gambar 3.1.8-8. Pembuatan Coral Stock Center di Kalimantan Timur

Transplantasi karang dilakukan menggunakan media pipa paralon berukuran 1 x 1 meter dengan jumlah 10 rak pada masing-masing media berjumlah 16 fragmen bibit karang. Bibit karang diambil dari sekitar lokasi Coral Stock Center pada kedalaman sekitar 5-10 meter. Adapun titik peletakan rak transplantasi berada pada kedalaman 5-10 meter di bawah permukaan laut dengan kondisi substrat berupa pasir. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan dari 10 (sepuluh) rak coral paralon, jenis karang yang ditanam adalah Acropora spp., Porites sp., Millepora sp. dan Hydrophora sp. dengan jumlah fragmen sebanyak 160 fragmen karang.

Gambar 3.1.8-9. Monitoring Coral Stock Center di Kalimantan Timur

Kegiatan monitoring coral stock center dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 oleh Kelompok Masyarakat Mitra Pesisir Lingkungan bekerja sama dengan Dinas Perikanan Pusat. Monitoring dilakukan kepada 160 fragmen karang hasil transplantasi pada bulan Februari 2024 oleh BPSPL Pontianak. Hasil pengamatan pertumbuhan panjang dan lebar fragmen karang dari jenis Acropora spp., Porites spp., Millepora sp., dan Montipora sp. menunjukkan rata-rata pertumbuhan panjang 0,5 – 1,5 cm dengan pertambahan lebar berkisar antara 0,2 – 0,5 cm. Tingkat kelangsungan hidup (survival rate) pada karang hasil transplantasi sebesar 80%.

b. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah

Pelaksanaan kegiatan penanganan biota dilindungi dan/atau terancam punah dilakukan untuk menindaklanjuti laporan terkait permasalahan yang terjadi pada biota laut seperti kejadian terdampar, terjerat jaring dan tindakan penanganan lainnya. Metode pelaksanaan penanganan biota laut dilindungi disesuaikan dengan kondisi biota ditemukan. Penanganan biota yang ditemukan dalam keadaan hidup berupa diselamatkan dan dikembalikan ke habitatnya. Pada penanganan biota yang ditemukan dalam kondisi mati dapat dilakukan dengan cara ditenggelamkan ke laut, dibakar, dikubur maupun ditinggalkan di laut.

Gambar 3.1.8-10. Dokumentasi Penanganan Biota Dilindungi

Sepanjang tahun 2024, tercatat 57 informasi kejadian terkait biota dilindungi dan/atau terancam punah yang meliputi kejadian terdampar, terjerat jaring, dan biota yang hanyut. Sebanyak 33 ekor biota dilaporkan dalam keadaan mati, sementara sebanyak 24 ekor masih biota dilindungi ditemukan dalam keadaan hidup. Biota yang ditemukan dalam kondisi mati masih segar (kode 2) sebanyak 9 kejadian, biota yang ditemukan dalam kondisi mati mulai membusuk (kode 3) sebanyak 10 kejadian, biota yang ditemukan dalam keadaan pembusukan tingkat lanjut (kode 4) sebanyak 12 kejadian, sedangkan biota yang ditemukan dalam bentuk kerangka (kode 5) sebanyak 2 ekor. Jenis biota laut dilindungi yang dilakukan penanganan paling banyak yaitu buaya muara (*Crocodylus porosus*) sebanyak 23 laporan kejadian. Sementara jenis biota laut dilindungi yang dilakukan penanganan paling sedikit yaitu duyung (*Dugong dugon*). Jenis lain yang dilakukan penanganan yaitu lumba – lumba, penyu, paus, ikan hiu, pesut laut dan pesut.

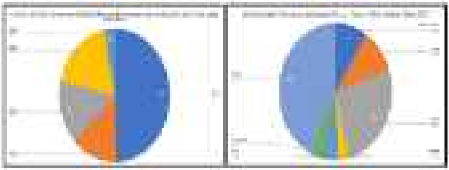

Gambar 3.1.8-11. Grafik Penanganan Biota Dilindungi

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk penanganan biota dilindungi, BPSPL Pontianak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut Terdampar pada tanggal 3 – 5 Juni 2024 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemaparan, diskusi dan praktek. Kegiatan ini mengundang beberapa stakeholder terkait dengan penanganan mamalia laut terdampar.

Gambar 3.1.8-12. Bimbingan Teknis Penanganan Biota Dilindungi

Selain itu, menindaklanjuti perubahan kewenangan beberapa spesies akuatik berdasarkan UU No. 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, BPSPL Pontianak juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Respon Cepat Penanganan dan Penyelamatan Biota pada tanggal 11 November 2024 di kantor BPSPL Pontianak. Kegiatan ini dihadiri dari berbagai kalangan dengan menghadirkan pemateri dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

i. Sosialisasi Biota Dilindungi dan/atau Terancam Punah

Sosialisasi biota dilindungi/terancam punah dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai terhadap masyarakat akan bagian penting dari keberlanjutan upaya konservasi jenis ikan dilindungi/terancam punah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pertemuan langsung/tatap muka melalui presentasi penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Gambar 3.1.8.13 Sosialisasi Biota Dilindungi

Kegiatan sosialisasi pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak lima kali di empat lokasi berbeda: Kabupaten Sambas pada tanggal 13 Mei 2024, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 13 Mei 2024, Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2024 dan 29 – 30 Juni 2024, serta Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 – 24 Oktober 2024. Sebanyak 332 peserta telah ikut serta dalam kegiatan sosialisasi biota dilindungi yang dilaksanakan, yang terdiri dari 156 orang laki-laki dan 176 perempuan. Peserta sosialisasi berasal dari pemerintah daerah, perangkat desa, kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa, serta stakeholder terkait lainnya seperti NGO, TNI dan BKSDA.

j. Workshop Penilaian E-PANJI Tahun 2024

Kegiatan Workshop Penilaian E-PANJI dilaksanakan pada tanggal 16-17 September 2024 di Hotel Ibis Styles Bogor Raya, Kab. Bogor. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks CITES (EPANJI) tahun 2024 serta yang menjadi 20 jenis ikan prioritas pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerangka penilaian EPANJI memiliki kriteria dan indikator penilaian memiliki bobot berdasarkan jumlah pertanyaan yang terbagi menjadi input, proses, output, outcome. Hasil penilaian didapatkan nilai sebesar 82,6 dengan kategori [illegible].

Gambar 3.1.8-14. Workshop Pedoman [illegible]

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (2063.RBB.071) [illegible] Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilindungi [illegible]. Rincian realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi rincian output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.8-3. Realisasi KRO [illegible] Tahun 2024

No.	Klasifikasi Rincian Output	Pagu Revisi	Realisasi	Kendala
1.	[2063.RBB.071.001] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	Rp199.261.000	Rp199.201.860 (99,97%)	-
2.	[2063.RBB.071.002] Konservasi Populasi Kelimpahan jenis ikan dilindungi/terancam punah	Rp132.790.000	Rp132.784.418 (99,99%)	-
3.	[2063.RBB.071.003] Rencana Aksi Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	Rp83.730.000	Rp83.687.513 (99,97%)	-
4.	[2063.RBB.071.004] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	Rp277.334.000	Rp277.275.859 (100%)	-
	TOTAL	Rp746.070.000	Rp745.960.231 (99,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp745.960.231 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp746.070.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Sewa.

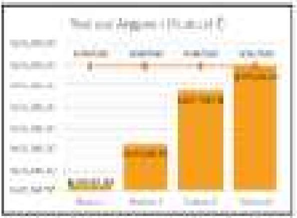

Gambar 3.1.8-12. Grafik Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada [illegible] ini dilakukan dengan

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKBL terkait dengan penetapan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan penanganan [illegible] yang [illegible].

3.1.9. Sasaran Kegiatan 9: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 11. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutannya melalui:

a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau [illegible] atau spesies (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana);
b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana);
c. Verifikasi atas jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana).

Target jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Teripang dan Arwana di wilayah kerja BPSPL Pontianak. Teknik perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau [illegible] atau spesies, penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dan verifikasi atas jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3.1.9-1. Capaian IKU 11 BPSPL Pontianak

SK 9	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU 11	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	[illegible]	Target Tahunan	% Realisasi thd Target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
8	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Realisasi IKU ini yaitu sebanyak 8 jenis meliputi Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Pontianak, Arwana Brazil, Napoleon, Sidat, Belida dan Teripang. Terdapat empat jenis ikan yang menjadi IKU tambahan, yaitu Arwana Brazil, Napoleon, Belida dan Sidat. Persentase capaian terhadap target perjanjian kinerja untuk IKU ini sebesar [illegible]%. Capaian IKU ini ditetapkan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor [illegible] tanggal 6 Januari 2025. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya:

a. Pengkajian pedoman pemanfaatan jenis ikan dilindungi, Appendiks CITES, dan/atau ikan elite spesies (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terubuk, Napoleon, Sidat, Belida, Arwana Formosus dan Arwana Brazil)
b. Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi, appendiks Appendiks CITES (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Terubuk, dan Arwana).
c. Verifikasi stok jenis ikan yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Arwana Formosus dan Arwana Brazil).
d. Bimbingan Teknis Identifikasi Terubuk
e. Evaluasi dan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 terdapat capaian kinerja sebesar 6 jenis. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024 (kumulatif 7 jenis), maka progres kegiatan mengalami peningkatan sebanyak 1 jenis atau sebesar 16,67% dari capaian pada tahun 2023. Hal ini disebabkan terdapat tambahan capaian jenis berupa Arwana Brazil, Napoleon dan Sidat. Jika dibandingkan dengan capaian selama lima tahun ke belakang, tren capaian mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2022 dan fluktuatif dari tahun 2022 – 2024.

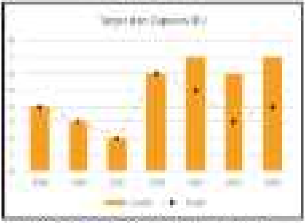

Gambar 3.1.9-1. Grafik Capaian IKU 11 dalam 7 tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PRL tahun 2020 – 2024 sebanyak 20 jenis pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 8 jenis telah tercapai sebesar 40% dari Target Jangka Menengah Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan Ditjen PRL Perubahan tahun 2020 – 2024 sebanyak 8 jenis pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 8 jenis telah tercapai sebesar 100% dari Target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena pelaksanaan kegiatan Operasional Perizinan dilakukan rutin setiap bulan (Januari – Desember), sebagaimana progres kegiatan didukung oleh penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pelayanan dan pengelola PNBP. Kendala yang muncul aplikasi tersebut gangguan atau perbaikan pada aplikasi terkait sehingga mempercepat proses perizinan PNBP. Untuk menghadapi hal tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP melakukan pelayanan dan pencatatan secara manual. Selain itu, banyaknya permohonan perizinan pemanfaatan jenis ikan menyebabkan jumlah petugas pelayanan yang banyak. Hal ini tidak dimungkinkan dengan keterbatasan pegawai sehingga dibutuhkan Petugas Pelayanan untuk membantu pelayanan operasional perizinan jenis ikan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu inovasi yang dilakukan BPSPL Pontianak dalam rangka efisiensi pelayanan perizinan jenis ikan pada tahun 2024 yaitu melalui Formulir Elektronik Pemeriksaan Jenis Ikan (FORSIKI). Merupakan formulir elektronik sederhana untuk membuat dokumen hasil pemeriksaan lapangan secara otomatis pada pemeriksaan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) di lingkup BPSPL Pontianak. Formulir ini dikembangkan dengan menggunakan form elektronik google secara gratis yang ditautkan otomatisasi ke dokumen pdf dengan menggunakan formulasi phyton, sehingga pelayanan langsung bisa saat dapat langsung diserahkan dapat menggunakan ponsel pintar, di lokasi dan saat itu juga. Formulir ini dapat mempersingkat waktu pelayanan khususnya pada pemeriksaan lapangan dengan cetak berkas bisa saat. Efisiensi waktu sangat signifikan menjadi maks 1 jam dari sebelumnya mencapai 3 hari. Hal ini membuat pemohon/ petugas PNBP dokumen SAJI di proses selanjutnya menjadi lebih cepat.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung diantaranya ini, yaitu:

a. **Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional perizinan dilakukan sepanjang tahun 2024 pada hari dan jam kerja sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal PKRL pada BPSPL Pontianak. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di seluruh kantor wilayah kerja BPSPL Pontianak. Kegiatan ini terdiri dari:

- Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)

Pelayanan Verifikasi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dilakukan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kembali kesesuaian dan kelayakan dan persyaratan administratif pelaku usaha melalui kunjungan langsung. Hasil verifikasi permohonan SIPJI pada tahun 2024 telah dilakukan verifikasi SIPJI sebanyak 40 kali dari 22 pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Lokasi paling banyak pelaku usaha yang mengajukan verifikasi didominasi oleh Kalimantan Barat sebanyak 19 pelaku usaha, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 2 pelaku usaha dan Kalimantan Utara sebanyak 1 pelaku usaha.

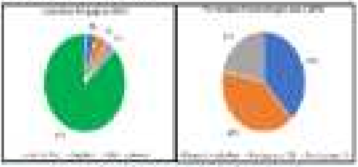

Gambar 3.1 IPS Pemanfaatan Surat Rekomendasi

Berdasarkan jenis SIPJ yang diterbitkan, terdapat tiga jenis SIPJ yaitu SIPJ pengambilan/penangkapan sebanyak 38% SIPJ perdagangan dalam negeri sebanyak 41% dan SIPJ perdagangan luar negeri sebanyak 21%. Sebagian besar pelaku usaha yang mengajukan SIPJ bergerak pada pemanfaatan jenis ikan arwana, sementara sisanya untuk jenis [illegible] [illegible], [illegible] hanya 4% dari keseluruhan verifikasi.

- Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi

Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang memiliki kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman [illegible]. Kemudian verifikasi dan identifikasi jenis ikan dilakukan secara kunjungan langsung atau daring (jarak remote). Hasil verifikasi dan identifikasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang memuat data pelaku usaha, jumlah ikan, jenis ikan, ukuran sampel yang diukur.

Gambar 3.1.9-5. Pelaksanaan Surat Rekomendasi

Selama Tahun 2024 terdapat total 312 Surat Rekomendasi Hiu pari dan 81 Surat Rekomendasi Terbatas telah diterbitkan oleh BPSPL Pontianak. Surat Rekomendasi Hiu/pari paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Utara sebanyak 88 surat, sementara surat rekomendasi Hiu/pari paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi Hiu/pari didominasi untuk dalam negeri (DN) sebanyak 238 surat dengan provinsi Jawa Timur menjadi tujuan dalam negeri (DN) yang paling banyak sebesar 77 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ke luar negeri paling banyak ditujukan ke Negara Malaysia. Terdapat 27 jenis hiu dan pari look alike species yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan Maculabatis gerrardi (Pari Bintang) menjadi spesies paling banyak diterbitkan.

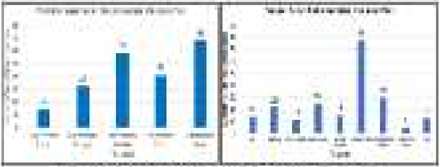

Gambar 3.1.9-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Hiu dan Pari

Surat rekomendasi tangkap paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Timur sebanyak 32 surat, sementara surat rekomendasi tangkap paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Tengah sebanyak 1 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi tangkap didominasi untuk dalam negeri (DN) sebanyak 88 surat dengan provinsi Jawa Timur menjadi tujuan dalam negeri (DN) yang paling banyak sebesar 30 surat. Tujuan pengiriman surat rekomendasi ke luar negeri paling banyak ditujukan ke Negara Malaysia. Terdapat 25 jenis tangkap yang direkomendasikan pada tahun 2024 dengan jenis Holothuria scabra (Teripang Pasir) menjadi jenis paling banyak direkomen.

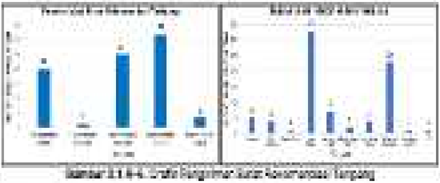

Gambar 3.1.8-4. Grafik Pengiriman Surat Rekomendasi Tangkap

- Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN)

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi [illegible] yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama Tahun 2024 terdapat 158 SAJI DN untuk jenis hiu dan pari appendiks CITES telah diterbitkan. Sementara itu sebanyak 1.358 SAJI DN untuk jenis Arwana Scleropages formosus telah diterbitkan, 170 SAJI DN SAJI DN untuk Arwana Osteoglossum bicirrhosum (Arwana Brazil). Selain itu terdapat penerbitan SAJI DN untuk jenis Napoleon (Cheilinus undulatus) dan Belida (Chitala spp.).

Gambar 3.1.8-5. Pemeriksaan SAJI

SAJI DN Hiu/pari paling banyak diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 73 surat, sementara SAJI DN hiu/pari paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Tengah sebanyak 17 surat. Tujuan pengiriman SAJI DN Hiu/pari didominasi oleh pengiriman ke Provinsi Jawa Timur sebanyak 59 surat. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak satu surat. Terdapat 55 spesies hiu dan pari Apendiks CITES yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan Rhynchobatus springeri (Pari Kamejan) menjadi spesies paling banyak diterbitkan.

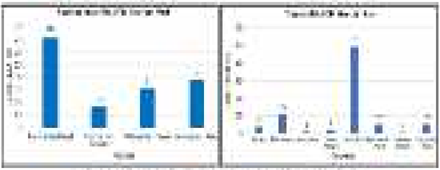

Gambar 3.1.5-1 Grafik [illegible] SAJI DN Arwana dan Ikan

Penerbitan SAJI DN Arwana Kalimantan (Scleropages formosus) didominasi untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 1.843 surat, sementara SAJI DN Arwana Kalimantan paling sedikit diterbitkan untuk pengiriman yang berasal dari Kalimantan Selatan sebanyak 4 surat. Tujuan pengiriman SAJI DN Arwana Kalimantan paling banyak ditujukan ke DKI Jakarta sebanyak 877 surat. Sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi di wilayah Timur Indonesia sebanyak masing-masing satu surat. Terdapat 3 jenis strain (varian) Arwana Kalimantan yang dikirimkan sepanjang tahun 2024 dengan Arwana Super Red menjadi varian yang paling banyak dikirim sebanyak 56.323 ekor. Penerbitan SAJI DN Arwana Brazil (Osteoglossum bicirrhosum) seluruhnya berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 176 surat. Tujuan pengiriman SAJI DN Arwana Brazil paling banyak ditujukan ke Provinsi Jawa Barat sebanyak 101 surat, sementara tujuan pengiriman paling sedikit ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau sebanyak masing-masing satu surat. Jumlah Ikan Arwana Brazil yang dikirimkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 376.636 ekor.

Jenis ikan lain yang diterbitkan SAJI pada tahun 2024 yaitu jenis napoleon (Cheilinus undulatus) sebanyak satu surat dan jenis belida (Chitala lopis) sebanyak satu surat. SAJI untuk jenis napoleon berupa SAJI [illegible] yang dikirimkan dari Kalimantan Timur ke Sulawesi Selatan sebanyak 35 ekor. Pemanfaatan napoleon masih tergantung dengan stok alam yang berasal di [illegible] hasil pembesaran, hal tersebut karena nilai NDF dari napoleon masih negatif, sehingga pemanfaatan dari alam tidak diperkenankan. Sementara SAJI untuk jenis belida berupa SAJI untuk kepentingan penelitian dan pengembangan sebanyak 70 ekor yang dikirimkan dari Kalimantan Selatan ke Jawa Timur.

- Pelayanan Penerbitan SAJI DN Bawaan

Pelayanan penerbitan SAJI DN dilakukan untuk lalu lintas jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan dilindungi, dan/atau appendiks CITES pada pengiriman di dalam negeri yang merupakan Barang Bawaan dengan jumlah Maksimal 2 ekor. Pada tahun 2024, sebanyak 436 SAJI DN Barang Bawaan telah diterbitkan. Jumlah SAJI DN Barang Bawaan paling banyak terdapat pada bulan Januari – Maret dengan jumlah lebih dari 100 surat setiap bulannya. Namun, jumlah penerbitan menurun tajam pada bulan berikutnya hingga kurang dari 20 surat tiap bulannya. Hal tersebut karena penambahan persyaratan berupa tiket pesawat guna mencegah penyalahgunaan SAJI DN barang bawaan.

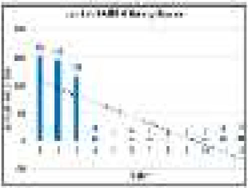

Gambar 3.1 948 Grafik Pengiriman SAJI DN Barang Bawaan

- Verifikasi Lapangan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Luar Negeri (LN)

Verifikasi Lapangan SAJI LN dilakukan untuk jenis ikan jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES untuk pengiriman ke luar negeri. Hasil akhir dari Verifikasi Lapangan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagai syarat untuk Penerbitan SAJI LN oleh Direktorat KKHL. Pelayanan dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman saji.kkp.go.id. Selama tahun 2024 terdapat 913 Verifikasi SAJI LN untuk untuk jenis Arwana Kalimantan telah dilakukan. Verifikasi Lapangan untuk SAJI LN terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 335 kali. Negara dengan tujuan ekspor terbanyak diterbitkan dari yaitu China dengan 317 ekor, kemudian Vietnam dengan 182 ekor dan Taiwan dengan 80 ekor. Negara dengan tujuan ekspor paling sedikit yaitu Kanada sebanyak 1 ekor.

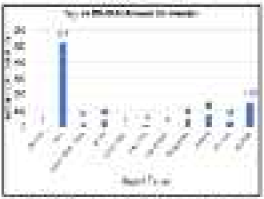

Gambar 3.1 949 Grafik Pengiriman SAJI LN Barang Bawaan

- Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana

Pemeriksaan Penandaan Microchip Ikan Arwana dilakukan untuk pengiriman Ikan Arwana yang telah memiliki SAJI-LN terbit. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip Ikan Arwana yang dikirim telah sesuai dengan SAJI LN yang sudah terbit. Pemeriksaan dilakukan dengan observasi pemasangan chip ikan dan penandaan (scan) pada ikan Arwana. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan 487 pemeriksaan penandaan.

Gambar 2.1.8-10 Penandaan Arwana

- Pemeriksaan Keberangkatan

Pemeriksaan Keberangkatan dilakukan untuk pengiriman ikan Arwana yang akan diberangkatkan dan telah memiliki SAJI baik LN maupun DN. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa jenis, ukuran dan nomor chip ikan yang diberangkatkan telah sesuai dengan dokumen SAJI yang akan terbit. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan keberangkatan untuk 2.798 dokumen SAJI yang telah diterbitkan dengan total ikan terkirim sebanyak 846.490.

Gambar 2.1.8-11 Pemeriksaan Keberangkatan

- Verifikasi Hasil Panen dan Penerbitan Sertifikat

Verifikasi Hasil Panen dilakukan untuk jenis ikan yang termasuk dalam jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES yang sudah dapat dimanfaatkan dengan cara pengembangbiakan. Hasil akhir dari Verifikasi Hasil Panen berupa Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu, penerbitan sertifikat hasil pemanenan digunakan sebagai penanda bahwa ikan tersebut merupakan ikan hasil pengembangbiakan dan bukan berasal dari tangkapan alam. Pada tahun 2024, telah dilakukan verifikasi hasil pemanenan sebanyak 330 kali dengan jenis ikan Arwana Kalimantan. Lokasi verifikasi hasil pemanenan paling banyak dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat untuk 168.527 ekor ikan arwana. Sementara lokasi verifikasi hasil panen paling sedikit dilakukan di Kalimantan Timur sebanyak 214 ekor.

Tabel 2.1.8-3. Jumlah BAP Panen Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah BAP	Jumlah Ikan (Ekor)	Jumlah Pelaku Usaha
1	Kalimantan Barat	[illegible]	168.527	[illegible]
2	Kalimantan Selatan	2	725	1
3	Kalimantan Timur	1	214	1

Sepanjang tahun 2024 telah diterbitkan sertifikat untuk Arwana Kalimantan sebanyak 67.658 sertifikat. Penerbitan sertifikat paling banyak dilakukan pada bulan Januari sebanyak 13.576 sertifikat. Sementara penerbitan paling sedikit berada di bulan Agustus sebanyak 2.416 sertifikat. Berdasarkan strain (varian) arwana. Jenis super red paling banyak diterbitkan sertifikatnya sebanyak 66.378 sertifikat, diikuti banjar red sebanyak 1.163 sertifikat, green 115 sertifikat dan golden red 12 sertifikat.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan PNBP yang berasal dari Pelayanan Operasional sampai dengan tahun 2024 (kumulatif) sebesar Rp2.469.418.xxx. Tren penerimaan PNBP tertinggi pada tahun 2024 cenderung menurun dengan fluktuasi tiap bulannya. Rata-rata penerimaan PNBP Operasional Pertahun sebesar Rp206.585.270 tiap bulannya. Nilai PNBP tertinggi pada tahun 2024 didapatkan pada bulan Mei sebesar Rp271.112.143, sementara terendah didapatkan pada bulan November sebesar Rp164.371.798.

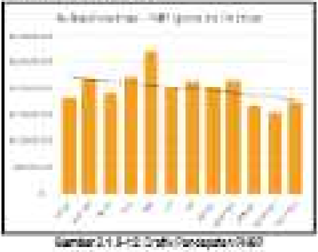

Gambar 2.1.3-43 Grafik Pendapatan PNBP

a. Survei Pemanfaatan Arwana di Kalimantan Barat

Kegiatan Survei Pemanfaatan Arwana bertujuan untuk mengetahui sebaran dan jenis pemanfaatan arwana, mengetahui data potensi produksi hasil pengembangbiakan, mengetahui alur perdagangan arwana dan mengetahui laju pemanfaatan arwana di Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bertahap selama kurun waktu Juli – November 2024. Lokasi kegiatan survei pemanfaatan arwana dilakukan di Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sekadau, Kab. Landak, Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan purposive sampling atau berdasarkan pertimbangan karakteristik tertentu. Selain itu, dilakukan pengumpulan data spasial pengambilan titik koordinat dan foto udara menggunakan drone pada farm arwana di lokasi survei. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif data hasil wawancara, analisis Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) dan analisis laju pertumbuhan spesifik.

Gambar 3.1.3-10. Survei Pemanfaatan Arwana

Dari hasil pengumpulan data di lapangan, terdapat 488 tempat yang disurvei dan 486 pelaku usaha dengan hanya 5% yang telah memiliki izin. Sebanyak 17% pelaku usaha melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain yang telah memiliki izin dan 74% sisanya tidak memiliki izin. Tingginya pelaku usaha yang tidak memiliki izin disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, tingginya permintaan pasar, dan kurangnya pengawasan/penegakan hukum. Sebaran lokasi budidaya dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, infrastruktur dan kemudahan akses pasar. Alur distribusi arwana di Kalimantan Barat menunjukkan kompleksitas rantai pasok yang melibatkan berbagai aktor dari hulu ke hilir. Sanggau juga menjadi pusat utama produksi benih yang kemudian dipasok ke hilir. Kubu Raya dan Kota Pontianak sebagai pusat pembesaran dan pendistribusian ikan sebelum dikirim ke pasar domestic maupun internasional.

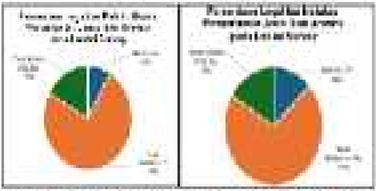

Gambar 3.1.3-11. Persentase Legalitas Pemanfaatan Jenis Ikan Arwana

Pada survei pemanfaatan arwana tahun 2024 yang melibatkan 16 pelaku usaha di Kapuas Hulu, Kubu Raya, Mempawah, Sekadau, dan Sintang, analisis Potensi Produksi Hasil Pengembangbiakan (PPHP) menunjukkan nilai berkisar antara 104 hingga 12.312 ekor, dengan PS. Dian Arjuna menghasilkan PPHP tertinggi sebesar 12.312 ekor, sedangkan kategori perseorangan tertinggi diraih oleh Sudiono dengan 2.117 ekor. Beberapa perusahaan seperti PT. Jaya Arwana Indonesia, CV. Lucky Indo Aquatic, PT. New Borneo Arwana, dan PS. Dian Arjuna telah memiliki SKP berdasarkan surat PPHP 2023, dengan nilai masing-masing 5.584, 7.584, 3.888, dan 4.095 ekor. Dibandingkan dengan hasil survei tahun 2024, terjadi peningkatan produksi di tiga perusahaan, yaitu PT. Jaya Arwana Indonesia dari 5.584 menjadi 11.507 ekor (+5.923), CV. Lucky Indo Aquatic dari 7.584 menjadi 8.165 ekor (+581), dan PS. Dian Arjuna dari 4.095 menjadi 12.312 ekor (+8.217), sedangkan PT. New Borneo Arwana mengalami penurunan dari 3.888 menjadi 2.788 ekor (-1.100).

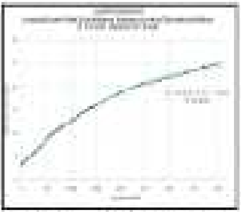

Gambar 3.1.9-15. Kurva Laju Pertumbuhan Arwana Super Red di Kalimantan Barat

Hasil wawancara dengan pelaku usaha arwana di Kalimantan Barat menunjukkan laju pertumbuhan spesifik arwana Super Red pada berbagai kelas ukuran 1–11 cm sebesar 1,13 mm/hari, 12–22 cm sebesar 1,055 mm/hari, 21–30 cm sebesar 0,785 mm/hari, 31–40 cm sebesar 0,307 mm/hari, dan 41–50 cm sebesar 0,205 mm/hari. Kurva pertumbuhan arwana Super Red yang divisualisasikan digambarkan menggunakan model polinomial dengan persamaan $y = 8 \times 10^{-8}x^{4} - 7{,}0293$ dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9995. Nilai R^2 yang sangat mendekati 1 menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam menjelaskan pola pertumbuhan ikan arwana berdasarkan data yang diamati.

c. **Survei Pemanfaatan Teripang di Kalimantan Timur**

Kegiatan survey pemanfaatan teripang bertujuan untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis teripang dan potensi ekonomi dari yang pemanfaatan teripang di Kabupaten Berau. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 19 Oktober 2024 di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan purposive sampling atau berdasarkan pertimbangan keterwakilan tertentu. Dari hasil wawancara, terdapat 14-17 jenis teripang yang umum dijual dari nelayan. Jenis teripang yang dominan diperdagangkan yaitu jenis teripang gamat batu/gamat bolu (S. monotuberculatus dan S. hermanni). Jenis ini juga memiliki harga yang paling tinggi dibandingkan dengan teripang lainnya, berkisar antar Rp10.000 – Rp60.000 per kg dalam kondisi basah dan Rp500.000 – Rp1.000.000 per kg setelah produk dikeringkan.

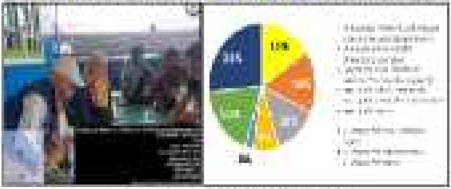

Gambar 3.1.9-16. Survei Pemanfaatan Teripang

f. Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang

Kegiatan Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Teripang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Kantor BPSPL Pontianak secara daring dan luring. Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai peningkatan kapasitas pegawai BPSPL Pontianak yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan verifikasi SAJI maupun Rekomendasi. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi mengenai etika pelayanan publik dengan narasumber dari Balai Diklat Aparatur (BDA) KKP Sukamandi. Disampaikan bahwa etika publik merupakan refleksi tentang standar norma yang menentukan baik/benar dan buruk/salah untuk mengambil kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik sehingga menghasilkan fokus pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Gambar 3.1.9-13. Bimbingan Teknis Identifikasi Teripang

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai biologi, identifikasi, pemanfaatan dan status perlindungan teripang dengan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Disampaikan bahwa teripang merupakan salah satu famili dari hewan laut, yaitu famili Holothuriidae. Dalam penentuan jenis teripang, salah satu bagian tubuh yang dapat dijadikan acuan yaitu spikula (kerangka dalam) yang terdapat di dalam teripang. Teripang umumnya dimanfaatkan sebagai obat-obatan untuk mengontrol stamina tubuh manusia serta untuk kosmetik. Terdapat beberapa jenis teripang yang masuk ke dalam Appendiks CITES yaitu *Holothuria fuscogilva*, *Holothuria nobilis*, *Holothuria whitmaei*, *Thelenota ananas*, *Thelenota anax*, dan *Thelenota rubralineata*. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan praktek identifikasi teripang dan penutupan sebagai akhir kegiatan.

g. Sosialisasi/Pendataan Hiu Pari Appendiks

Kegiatan pendataan data hiu dan pari appendiks di wilayah Kalimantan dilaksanakan oleh tenaga enumerator dari bulan Januari – Desember 2024. Kegiatan pendataan ini dilakukan di tiga lokasi yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Kalimantan Barat, Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) Sungai Kakap Kalimantan Barat, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manggar Kalimantan Timur. Hasil dari pendataan hiu dan pari appendiks dari tiap-tiap lokasi:

- *Hiu dan pari appendiks di PPN Pemangkat*

Berdasarkan hasil enumerasi Hiu dan Pari Appendiks di PPN Pemangkat pada periode Januari – Desember, didapatkan total 1.754 ekor hiu dengan hiu yang termasuk appendiks sebanyak 72,68%. Jenis hiu appendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 1.182 ekor. Sementara itu, sebanyak total 237 ekor pari didaratkan sepanjang tahun 2024 dengan pari appendiks yang didaratkan sebanyak 42% ekor. Jenis pari appendiks terbanyak yang ditemukan yaitu pari famili Rhinidae sebanyak 134 ekor. Jenis hiu jenis paling sedikit didapatkan yaitu dari famili Sphyrnidae sebanyak 143 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Myliobatidae sebanyak 1 ekor.

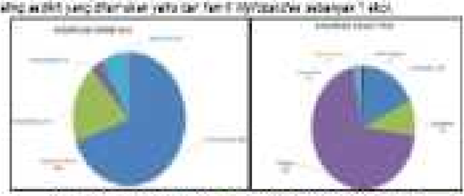

Gambar 3.1.9-18. Grafik Hasil Pendataan Hiu Pari Apendiks di PPN Pemangkat

Gambar 3.1.9-19. Dokumentasi pengukuran

- Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

Berdasarkan hasil pendataan Hiu dan Pari apendiks di TPI Sungai Kakap pada periode Januari – Desember, didapatkan total 877 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 334 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak [illegible] ekor. Sementara itu, sebanyak total [illegible] ekor pari ditemukan sepanjang tahun 2024 dengan pari apendiks yang tercatat sebanyak [illegible] ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 14.617 ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didapatkan yaitu dari famili Sphyrnidae sebanyak 27 ekor dan jenis pari paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili [illegible] sebanyak 4 ekor.

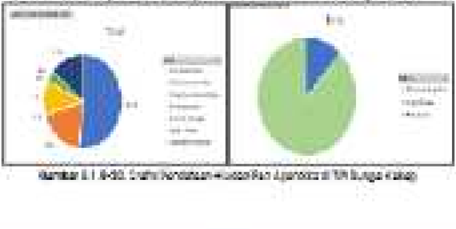

Gambar 3.1.9-20. Grafik Pendataan Hiu Pari Apendiks di TPI Sungai Kakap

- Hasil sebaran Hiu Pari Apendiks di PPI Manggar

Berdasarkan hasil enumerasi hiu dan Pari Apendiks di PPI Manggar pada periode Januari – Desember, didapatkan total 3.778 ekor hiu dengan hiu yang termasuk apendiks sebanyak 3.677 ekor. Jenis hiu apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Carcharhinidae sebanyak 3.137 ekor. Sementara itu, sebanyak total 985 ekor pari didaratkan sepanjang Tahun 2024 dengan pari apendiks yang didaratkan sebanyak 81 ekor. Jenis pari apendiks terbanyak yang ditemukan yaitu dari famili Rhynchobatidae sebanyak 72 ekor. Jenis hiu yang paling sedikit didaratkan yaitu dari famili Hemiscylliidae sebanyak 4 ekor dan jenis pari apendiks paling sedikit yang ditemukan yaitu dari famili Rhinidae sebanyak 3 ekor.

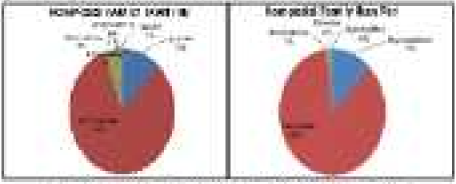

Gambar 3.1.5-85. Grafik Komposisi Hiu dan Pari Apendiks PPI Manggar

Gambar 3.1.5-86. Dokumentasi Pengukuran

4. Kegiatan Pendukung Lainnya

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, apendiks CITES dan look alike species lainnya adalah:

- Kegiatan tata niaga pelayanan jenis ikan

Rapat tata niaga pelayanan jenis ikan dilakukan secara rutin setiap bulan dalam rangka membahas perkembangan pelayanan dan tata niaga perdagangan jenis ikan dilindungi, apendiks CITES dan look alike species.

- Pemantauan dan Penilaian Bisnis Proses Ekspor Jenis Ikan Apendiks CITES Hasil Pari penangkapan

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 28 November dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Asosiasi Penangkap dan Pedagang Hiu Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan perpindahan hiu dari KLHK ke KKP untuk beberapa jenis dapat berjalan secara lancar pasca pengalihan. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memberi informasi lanskap yang diharapkan untuk selanjutnya dapat dilakukan penilaian tata kelola mengenai informasi dari pelaku usaha dan tinjauan ke lapangan.

Gambar 2.1.9-33. Pemantauan dan Pembinaan Status Proses Pengajuan Jenis Ikan Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.RBS.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.9-3. Realisasi IKU 11 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	[illegible]
1.	[2362.RBS.002.001] Penyediaan data potensi dan status pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Rp174,880,000	Rp170,480,333 (98,34%)	-
2.	[2362.RBS.002.002] Pelayanan Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES	Rp1,072,848,000	Rp1,070,879,132 (99,82%)	-
TOTAL		Rp1,247,728,000	Rp1,241,359,465 (99,49%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 11 pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp1.241.362.985 atau 99,57% dari pagu anggaran sebesar Rp1.247.735.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Bahan dan Belanja Barang Operasional Lainnya.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada PKL ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan gender yang terlibat dalam pelayanan operasional yang akan dihitung. Hal ini dibuktikan melalui keseimbangan gender pada tim pelayanan SPSPL. Pembentukan sesuai dengan Surat Tugas tim pelayanan nomor [illegible] tanggal 6 Agustus 2024.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKPL terkait dengan penetapan target kinerja dan penyelesaian kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melaksanakan pelayanan operasional pelatihan (Verifikasi SIPL, SKA dan Rekomendasi) pada bulan tahun 2025.

3.1.10. Sasaran Kegiatan 10 Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak

IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/kelompok tertentu yang berasal dari laut dalam dengan skala lebih besar dari 50 ton/hari dan/atau berada pada kawasan konservasi serta dilakukan untuk kepentingan tertentu dalam hari yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari. Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dokumen pelaku yang akan ditindaklanjuti proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk kebenaran dan kelengkapan dokumen dan data pengusulan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Teknis perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi proposal pemanfaatan air laut selain energi. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan tidak terdapat IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan IKU ini disesuaikan untuk mengakomodir anggaran Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang diturunkan ke UPT.

Tabel 3.1.10-1 Capaian IKU 10 PNBP BPSPL Pontianak

SK 10	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
IKU 10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Rencana Strategis Kementerian		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	[illegible]	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
-	1	-	1	100	1	100	5	20

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-PARPL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini dilakukan secara tahunan. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1 (satu) dokumen berupa Laporan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sehingga persen realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.3/TU.140/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat IKU "Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak". Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 pada tahun 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) kawasan yang terfasilitasi perizinan pemanfaatan perairan. Terdapat perbedaan satuan antara target yang tertuang dalam Renstra [illegible], dengan target kinerja tahun 2024 sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah. Namun, pencapaian IKU ini masih berkontribusi dalam pencapaian target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebesar 1 dokumen pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen telah berkontribusi sebesar 100% dibandingkan dengan target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun karena kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu Sosialisasi perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan telah dilaksanakan. [illegible] progres kegiatan didukung oleh [illegible] pemohon dalam mengajukan permohonan perizinan air laut selain energi. Telah dilakukan sosialisasi kepada stakeholder yang terkait dengan perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan pada pelaksanaan IKU ini yaitu penggunaan zoom meeting dalam kegiatan Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan ALSE. Hal ini membantu menjaring peserta lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini yaitu:

a. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan dilaksanakan pada tanggal [illegible] Maret 2024 di Hotel [illegible] Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh [illegible] orang yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan stakeholder terkait. Saat ini, PP nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sedang direvisi, termasuk perizinan berusaha di bidang jasa kelautan dan sektor kelautan dan perikanan lainnya. Contoh perizinan berusaha di bidang jasa kelautan antara lain izin pemanfaatan pasir laut, izin pelaksanaan reklamasi, izin pemanfaatan air laut dan contoh lainnya. Pemanfaatan ALSE dibagi menjadi dua KBLI: 36001 (penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum) dan 36002 (penampungan dan penyaluran air baku). Dokumen dan persyaratan kriteria merujuk pada [illegible] pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2.1.18-1 Sosialisasi/Pembinaan Pelaksana Jasa Kalibrasi

c. **Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)**

Identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kegiatan identifikasi di Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 September 2024 pada 3 objek perusahaan yaitu PT PLN Indonesia Power UBP Singkawang, PT SSL Indo Tenaga yang berlokasi di Kab. Mempawah dan PT Energi Unggul Persada yang berlokasi di Kabupaten Mempawah. Selain kegiatan identifikasi, dilakukan sosialisasi dengan menyampaikan jenis-jenis pemanfaatan ALSE yang digunakan, dasar hukum, gambaran umum pemanfaatan ALSE, pembagian kewenangan dan tarif PNBP.

Gambar 2.1.18-2 Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat

Metode yang digunakan dalam kegiatan identifikasi yaitu wawancara dengan alat bantu berupa kuisioner. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam wawancara diantaranya tujuan pemanfaatan ALSE, kapasitas pemanfaatan ALSE, metode dan teknologi yang digunakan, sarana yang digunakan, waktu operasi dan informasi dan tenaga kerja yang digunakan. Dari hasil wawancara pada ketiga perusahaan tersebut didapatkan informasi bahwa tujuan dari pemanfaatan ALSE yaitu untuk bahan baku pembuatan uap, metode demineralisasi, air pendingin kompresor dan bahan baku untuk kebutuhan domestik. Selanjutnya, hasil identifikasi pemanfaatan ALSE ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan profil pemanfaatan ALSE di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.18-3 Identifikasi Pemanfaatan ALSE di Kalimantan Barat

Kegiatan identifikasi pemanfaatan ALSHI di Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Identifikasi dilakukan pada PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan dan PT Kutai Refinery Nusantara. Pemanfaatan air laut selain energi yang dilakukan PT PLN Nusantara Power UP Kaltim Teluk Balikpapan digunakan sebagai cooler pendingin kondensor (cooling water), bahan produksi dan kebutuhan domestik/service water. Sedangkan Pemanfaatan air laut selain energi yang dilakukan PT Kutai Refinery Nusantara pada air baku sebagai bahan baku pembuatan uap melalui demineralisasi dan sebagai air pendingin kondensor.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari klasifikasi Rincian Output [2360.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

Tabel 3.1.10-3. Capaian IKU 12 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[2360.PBW.002.052] Pengendalian dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut	Rp100.000.000	Rp99.981.400 (99,98%)	-
TOTAL		Rp100.000.000	Rp99.981.400 (99,98%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp99.981.400 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp 100.000.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Bahan.

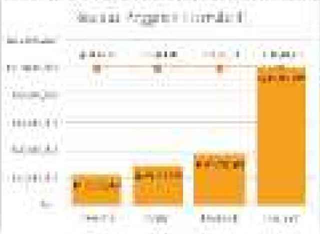

Gambar 3.1.10-4 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

C. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan IKU ini masih didominasi oleh laki-laki, namun terdapat beberapa perempuan terlibat baik hadir dalam sosialisasi, maupun dari pihak pelaku usaha yang diidentifikasi.

D. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PRL terkait dengan penentuan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

3.1.11. Sasaran Kegiatan 11 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilestarikan dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak

IKU 13. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL). Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada satuan wilayah Kabupaten/Kota. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang masuk laut dan mensosialisasikan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Teknis perhitungan capaian dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kegiatan gerakan bersih sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Tabel 3-1.11-1. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SK 11	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilestarikan dalam rangka Penanggulangan Pencemaran di Wilayah BPSPL Pontianak							
IKU 13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)							
Real s/d 2023	Tahun 2024				Kinerja Renstra & Perjanjian		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Penjelasan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024
-	4	-	4	100	4	100	5	80

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak Nomor [illegible] tanggal 31 Desember 2024. Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut telah dilaksanakan di 4 lokasi wilayah kerja BPSPL Pontianak yaitu Kota Balikpapan, Kab. Tanah Laut, Kab. Kubu Raya dan Kota Singkawang sehingga capaian terhadap target IKU ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja "Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak" merupakan IKU baru di tahun 2024 ini. Capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Jangka Menengah yaitu sebanyak 3 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran pada tahun 2024. Capaian IKU ini berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DJPKRL sebesar 67%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU ini telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024 sebanyak 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 telah berkontribusi sebesar 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dapat mendorong tercapainya target di akhir tahun. Walaupun begitu, keberhasilan progres kegiatan yang dilaksanakan bergantung pada kesiapan stakeholder terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Miskomunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor aksesibilitas lokasi yang mudah diakses juga mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu optimalisasi pegawai yang berada di wilayah kerja pembantu setempat untuk melakukan identifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan.

7. Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan diantaranya:

a. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gernas BCL

Kegiatan identifikasi calon lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di tiga lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Desa Tambak Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar dan Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 14 – 20 Januari 2024. Di Desa Tambak, sudah ada mesin pengolah sampah yang berasal dari bantuan pemerintah tahun 2019. Namun mesin pengolah sampah tersebut tidak berfungsi karena ada komponen yang hilang dicuri. Terdapat kelompok nelayan aktif yang sebagian besar anggotanya sudah memiliki KUSUKA di kedua lokasi tersebut. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut didominasi oleh sampah kayu dan sampah rumah tangga. Tidak ada bank sampah di sekitar Desa Tambak, namun terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjar yang berjarak 22 km. Terdapat bank sampah di Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut, namun belum diverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.11-1. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Selatan

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Tengah dilakukan Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam dan Desa Keraya Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada tanggal 15 – 16 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Hanya Desa Teluk Bogam yang sudah memiliki mobil pengangkut sampah dan fasilitas TPA meskipun pengelolaan sampah di TPA masih dibakar. Sementara di Desa Sungai Bakau dan Desa Keraya belum memiliki TPA dan pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kegiatan.

Gambar 3.1.11-2. Identifikasi Lokasi BCL di Kalimantan Tengah

Identifikasi calon lokasi di Kalimantan Barat dilakukan di Desa Setapuk Besar, Desa Kuala dan Desa Naram di Kota Singkawang pada tanggal 18 – 19 Januari 2024. Hasil survei kondisi pengelolaan sampah di ketiga desa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah laut, khususnya sampah plastik masih belum menjadi prioritas program desa. Sampah yang ditemukan umumnya sampah plastik sampah rumah tangga. Jarak antara lokasi pengambilan sampah dengan titik pengolahan adalah 3 s.d. 7 km.

Identifikasi lokasi calon pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kalimantan Timur dilakukan di Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 15 – 17 Januari 2024. Hasil identifikasi pada beberapa calon lokasi di Kelurahan Sepinggan Raya, nelayan dan kelompok masyarakat telah rutin melakukan kegiatan pengumpulan sampah laut dan pembersihan disekitar wilayah pesisirnya, namun sampah yang mereka kumpulkan hanya dibiarkan atau dibuang ke TPS terdekat dan belum ada kerjasama dengan mitra bank sampah untuk penjualan sampah yang terkumpul atau model ekonomi sirkular lainnya dari sampah dan nelayan.

b. Identifikasi dan Verifikasi Nelayan dan Mitra

Kegiatan identifikasi dan verifikasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilakukan di empat lokasi: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Terdapat [illegible] nelayan dan KUB yang dapat diidentifikasi. Identifikasi terhadap mitra yang berkomitmen untuk mendukung kegiatan BCL berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Barat dan Universitas Antakusuma. Beberapa bank sampah/pengepul sampah juga berhasil diidentifikasi sebagai mitra offtaker potensial. Indikator penilaian lainnya seperti harga [illegible] [illegible] dan [illegible] melaut serta [illegible] [illegible] juga sudah dilakukan. Harapannya data dan informasi dari hasil identifikasi awal potensi lokasi ini dapat mendukung pertimbangan dalam penentuan lokasi kegiatan Gernas BCL.

Gambar 3.1.11-3 Identifikasi dan verifikasi di Kalimantan Tengah

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut dengan melibatkan instansi daerah dan kelompok nelayan setempat. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan data kelompok nelayan di Daerah Aluh-Aluh Kab. Banjar dan Sungai [illegible] Kab. Tanah Laut. Sementara hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan didapatkan data bank sampah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja dari data bank sampah tersebut, belum terverifikasi keaktifannya.

Gambar 3.1.11-4 Identifikasi dan verifikasi di Kalimantan Selatan

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan di Kota Singkawang dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang. Hasilnya diperoleh informasi tentang bank sampah yang ada di kota tersebut dan diperoleh data [illegible] [illegible] di kota

Singkawang terdapat sebanyak 17 unit Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kota Singkawang dengan hasil berupa data kelompok nelayan di Setapuk Besar dan Kuala sebanyak 9 (sembilan) kelompok.

Identifikasi dan verifikasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan di Kota Balikpapan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan meliputi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Hasil koordinasi dengan OPD Kota Balikpapan pada umumnya mendukung pelaksanaan kegiatan Gernas BCL Tahun 2024 dan mengusulkan agar kegiatan Gernas ini dapat dilaksanakan pada lokasi yang berbeda dari dua tahun sebelumnya, sehingga lebih banyak nelayan yang dapat terlibat dalam kampanye dan edukasi terhadap nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih melalui Gernas BCL.

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan sosialisasi dan edukasi nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 8 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 60 orang). Kegiatan ini juga melibatkan mitra pengelola sampah yaitu Maju Jaya Plastik dan Dinas PUPRPKP Kab. Kubu Raya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-5. Jumlah Nelayan yang terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Kubu Raya

Kelurahan	Kelompok	Jumlah Orang
Desa Jeruju Besar	KUB Galah Sopat	10
	KUB Kakap Merah	10
Desa Sungai Rengas	KUB Mekar Jaya	10
	KUB Lumbung	10
	KUB Berembang Laut I	10
	KUB Berembang Laut II	10
	KUB Berembang Laut III	10
	KUB Berembang Laut IV	10

➤ Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 30 Mei dan 28 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah dan strategi usaha pengelolaan sampah dari mitra dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh SPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.11-6. Bimbingan Teknis di Kab. Kubu Raya

- Kegiatan Penimbangan dan Evaluasi Pelaksanaan

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 25.447,5 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 69% sampah berupa non-plastik, sementara sampah plastik terkumpul sebanyak 31%. Sampah yang bernilai ekonomis dijual dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp 385.000. KUB Senambang Laut I menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 6.076,2 kg.

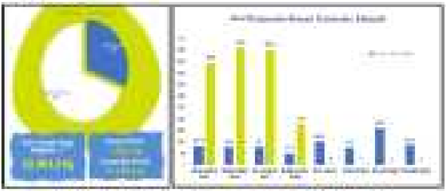

Gambar 3.1.11-6 Data Pengumpulan Sampah BCL Kota Singkawang

c. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dimulai pada tanggal 30 April 2024 dengan Sosialisasi dan aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 65 orang nelayan tradisional dari 6 kelompok nelayan di tiga kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 23 orang, Kel. Pasiran sebanyak 22 orang dan Kel. Kuala sebanyak 20 orang). Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-3 Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Singkawang

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Setapuk Besar	KUB Bunga Pandang	9
	KUB Sumber Rejeki	3
	KUB Nelayan Muhara	11
Kel. Pasiran	KUB Pasiran Jaya Abadi	22
Kel. Kuala	KUB Nelayan Baru	10
	KUB Bersaudara	10

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 31 Mei dan 15 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, upaya penanganan sampah oleh bank sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL oleh BPSPL Pontianak.

Gambar 3.1.11-7. Bimbingan Teknis di Kota Singkawang

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 11.993,03 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 56% sampah berupa non plastik, sementara sampah plastic terkumpul sebanyak 44%. Sampah yang bernilai ekonomis sebanyak 47% dengan total hasil penjualan sampah sebesar Rp13.424.000. KUB Harapan Baru menjadi kelompok nelayan dengan pengumpulan sampah paling banyak sebesar 3.233 Kg.

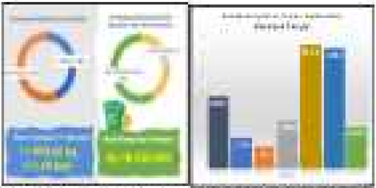

Gambar 3.1.11-8. Grafik Data Pengumpulan Sampah di Kota Singkawang

a. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dimulai pada tanggal 26 April 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 5 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 74 orang dan Desa Bawah Layung sebanyak 6 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Rumah Banjarmasin. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 3.1.11-4. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kab. Tanah Laut

Kelurahan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Desa Sungai Bakau	KUB Bina Bersama	20
	KUB Bintang Laut	10
	KUB Kuda Laut	10
	KUB Bina Lestari	34
Desa Bawah Layung	KUB Bina Harapan Bersama	6

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Singkawang dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 21 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yakni upaya pengurangan sampah, pemilahan sampah, analisa usaha pengelolaan sampah, teknologi tepat guna sampah dan evaluasi pelaksanaan BCL dari BPSPL Pontianak.

Gambar 2.1.11-9. Bimbingan Teknis di Kab. Tanah Laut

Hasil pengumpulan sampah pada pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang bulan Mei – Juni 2024 didapatkan sebanyak 4.084,8 kg total sampah terkumpul. Sebanyak 3.358 kg sampah berupa plastik dengan nilai ekonomis penjualan sampah sebesar Rp4.796.000.

Gambar 2.1.11-10. Dokumentasi pengumpulan dan penimbangan sampah di Tanah Laut

5. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

Kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dimulai pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Sosialisasi dan Aktivasi Nelayan. Kegiatan ini melibatkan 68 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di satu Kecamatan (Kel. Manggar) sebanyak 68 orang. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis serta Penimbangan dan Pengangkutan yang dilaksanakan tiap dua minggu sekali.

Tabel 2.1.11-6. Jumlah Nelayan yang Terlibat dalam Kegiatan BCL di Kota Balikpapan

Kecamatan	Kelompok	Jumlah (Orang)
Kel. Manggar	KUB Minasari	26
	KUB Bintar Bahari	12
	KUB Bintar Laut Sejaya	10
	KUB Laut Bahari Fajar	12
	KUB Anugrah Sinergi	12

- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah

Kegiatan Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan dilakukan sebanyak 3 kali pada tanggal 17 Mei, 21 Mei dan 14 Juni. Adapun materi yang disampaikan yaitu upaya pengurangan sampah, analisis usaha pengolahan sampah plastik dan evaluasi pelaksanaan BCL dan BPSPL Pontianak.

GERAKAN NASIONAL BULAN CINTA LAUT

Gambar 3.1.11-11. Bimbingan Teknis di Kota Balikpapan

g. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya dilakukan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 60 orang nelayan tradisional dari 2 kelompok nelayan di dua desa (Desa Jeruju Besar sebanyak 20 orang dan Desa Sungai Rengas sebanyak 40 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya selama 8 (delapan) minggu telah mengumpulkan sebanyak 23,7 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 7,15 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sejumlah Rp.[illegible].

GERAKAN NASIONAL
BULAN CINTA LAUT

Gambar 3.1.11-12. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Kubu Raya

h. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 80 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di tiga Kelurahan (Kel. Setapuk Besar sebanyak 25 orang, Kel. Naram sebanyak 22 orang dan Kel Kuala sebanyak 33 orang). Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang telah mengumpulkan 11,5 ton sampah dengan total sampah plastik sebanyak 4,27 ton. Sampah terpilah dari kegiatan ini telah menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp10.428.000.

Gambar 3.1.11-13. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Singkawang

i. **Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut dilakukan pada tanggal 8 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dari 3 kelompok nelayan di dua Desa (Desa Sungai Bakau sebanyak 26 orang dan Desa Bawah Layang sebanyak 4 orang). Kegiatan ini juga didukung oleh mitra Bank Sampah Induk Bakhan Banjarmasin. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Tanah Laut telah mengumpulkan sebanyak 4,6 ton sampah dengan sampah yang bernilai ekonomis sebesar Rp4.136.230.

Gambar 3.1.11-14. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kab. Tanah Laut

j. **Pelaksanaan Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan**

Kegiatan Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2024. Kegiatan ini melibatkan 30 orang nelayan tradisional dari 4 kelompok nelayan di satu Kelurahan (Kel. Sepinggan sebanyak 30 orang). Kegiatan ini juga bermitra dengan Bank Sampah Kota Hijau. Kegiatan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan telah mengumpulkan sebanyak 38,64 ton sampah dengan nilai insentif sampah untuk nelayan sebesar Rp211.191.300.

Gambar 3.1.11-15. Evaluasi dan Penutupan Bulan Cinta Laut di Kota Balikpapan

k. **Monitoring Sampah Pesisir dan Laut di Kota Singkawang**

Monitoring sampah pesisir dan laut dilakukan pada tanggal 7 – 10 September 2024 di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang untuk memantau kondisi sampah yang ada di pesisir dan laut sekitarnya pasca pelaksanaan kegiatan Bakti Cinta Laut. Metode survei yang digunakan yaitu dengan menarik garis transek dan memantau jumlah sampah pada tiga lokasi sampling: Pantai Singka Island Park, Pantai Kuala Singkawang dan Pantai Viral. Pada masing-masing lokasi terkumpul sampah sebanyak 1,240 kg di Pantai Singka; 7,807 kg di Pantai Kuala Singkawang; dan 3,570 kg sampah di Pantai Viral. Jenis sampah yang ditemukan di ketiga lokasi tersebut yaitu plastik, karet, busa/foam, kertas, kain, kaca dan logam.

Gambar 3.1.11-16. Monitoring Sampah Pesisir di Kota Singkawang

l. **Bersih Pantai dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah di Kab. Sambas**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 September 2024 dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dan Stasiun PSDKP Pontianak melalui kegiatan bersih pantai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui potensi sampah yang ada di pesisir Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Temajuk dan Desa Sebubus. Kegiatan bersih pantai dihadiri oleh PSDKP Pontianak, Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sambas, TNI dan POLRI, POKMASWAS dan pelajar setempat. Sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta didapatkan sebanyak 1,4 ton yang terdiri dari sampah plastik atas kemasan makanan, bungkus rokok, puntung rokok, botol minum plastik, botol minum kaca, kaleng cat/oli dan lain sebagainya.

Gambar 3.1.11-17. Kegiatan Bersih Sampah dan Identifikasi Lokasi Monitoring Sampah

Identifikasi lokasi monitoring sampah dilakukan di Pantai Camar Bulan, Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Lokasi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan monitoring sampah yaitu di Pantai Sungai Belacan dan Pantai Tanjung Api. Sampah yang ditemukan di kedua lokasi tersebut berupa sampah atas kemasan makanan dan minuman, botol lotion dan puntung rokok. Terdapat sampah kemasan yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Rincian Output [4046.QDD.001] Fasilitasi Pembinaan dan Kelompok Masyarakat. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Rincian Realisasi anggaran berdasarkan komponen/subkomponen disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.11-4. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu	Realisasi	Sisa
1.	[4046.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp800.000.000	Rp 799.732.235 (99,97%)	-
TOTAL		Rp800.000.000	Rp 799.732.235 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp799.732.235 atau 99,97% dari pagu anggaran sebesar Rp 800.000.000. Progres realisasi anggaran berdasarkan triwulan disajikan pada grafik berikut ini:

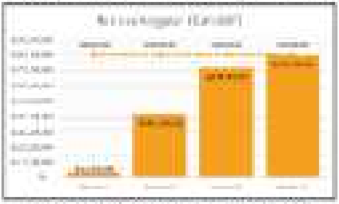

Gambar 3.1.11-18. Realisasi Anggaran IKU 2 Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan empat parameter: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Partisipasi gender pada keseluruhan kegiatan Gernas BCL masih didominasi oleh laki-laki, namun tercapai keterlibatan perempuan sebesar [illegible]% dalam Gernas BCL. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Gernas BCL berupa keterlibatan dalam kepanitiaan kegiatan, pemberian materi dan evaluasi kegiatan.

Gambar 3.1.77-78 Pengarahan dan Diskusi pada Pelaksanaan Gernas BCL

Pada pelaksanaan Gernas BCL dilaksanakan diskusi terkait pelaksanaan kegiatan. Secara umum, pertanyaan dan permasalahan didominasi oleh peserta laki-laki. Keberhasilan penyampaian kegiatan ini karena sebanyak 230 nelayan yang menjadi peserta Gernas BCL kebanyakan laki-laki. Perempuan yang menyampaikan pertanyaan berasal dari Dinas dan Lembaga terkait pengelolaan sampah. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan Gernas BCL ini yaitu peningkatan kesadaran dari nelayan peserta dan tamu undangan tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dari sampah baik laki-laki maupun perempuan.

Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait dengan keberlanjutan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut pada tahun 2024.

3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak

IKM 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan 8 (delapan) indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), indikator tersebut diantaranya:

a. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
b. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%
c. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%
d. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
e. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
f. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
g. Dispensasi Penyampaian SPM – Bobot Penilaian 5%
h. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat) antara lain:

a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89 atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Formulasi nilai IKPA BPSPL Pontianak mengadopsi dari Aplikasi daring OM-SPAN Kementerian Keuangan pada laman https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/

Tabel 3.1.12-1. Capaian IKM 14 Nilai IKPA BPSPL Pontianak

SK-12	3.1.12. Sasaran Kegiatan 12 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM-14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible] Perubahan		[illegible] 2020-2024	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
93,63	94,55	+1,00	92,5	102,2	90	105,0	90	105,0

Sumber data: [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKU ini tahun 2024 dilakukan secara semesteran. Berdasarkan hasil pemantauan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terakhir pada situs OMSPAN, progres nilai IKPA lingkup BPSPL Pontianak sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 94,55 dengan kategori baik. Capaian IKM nilai IKPA disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN KKP nomor [illegible]. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2024 telah melampaui target tahunan sebesar 93,75 atau tercapai sebesar 101,28%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian nilai IKPA pada tahun 2023 sebesar 93,00. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terdapat peningkatan capaian sebesar 1,95 atau meningkat sebesar 2,09%. Peningkatan nilai tersebut dikarenakan terdapat peningkatan pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan tren target dan capaian nilai IKPA selama 5 tahun terakhir, nilai IKPA tahun 2024 berada pada nilai tengah (median). Nilai IKPA tertinggi didapatkan pada tahun 2021 sebesar 96,26 sementara nilai IKPA terendah didapatkan pada tahun 2020 sebesar 74,02. Tren target dan capaian nilai IKPA selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

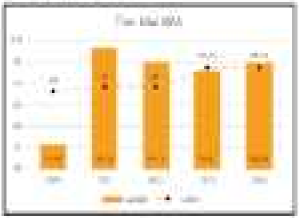

Gambar 3.1.12-1. Tren Target dan Capaian Nilai IKPA Tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini tertuang dalam Rencana Strategis [illegible] 2020 – 2024, yaitu nilai IKPA sebesar 90 pada tahun 2024. Progres capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 105,50% (94,95 dari 90). Sehingga progres capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan [illegible] tahun 2020 – 2024 yaitu Nilai IKPA sebesar 93 untuk tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target Matriks Kinerja & Pendanaan tahun 2024 sebesar 102,10% (94,95 dari 93). Capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan periode tahunan untuk tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Pencapaian nilai IKPA yang baik didukung oleh kedisiplinan, konsistensi, ketertiban dan ketepatan waktu dalam unsur pelaksanaan anggaran. Selanjutnya dalam rangka mengupayakan peningkatan nilai IKPA dan mengatasi permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA, Tim Pengelola Anggaran melakukan monitoring secara berkala. Sehingga permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangannya.

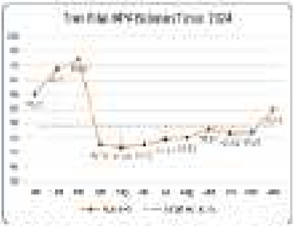

Gambar 3.1.13.3. Tren Nilai IKPA Tahun 2024 (Sumber: Aplikasi OM SPAN)

Selain itu, berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada KPKNL Pontianak, terdapat rekomendasi untuk melakukan pemantauan IKPA secara rutin setiap bulan hingga akhir Tahun. Berdasarkan hasil pemantauan, Tren bulanan nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami penurunan tajam pada bulan Maret ke bulan April. Namun, nilai IKPA mengalami peningkatan secara perlahan dari bulan Mei hingga melebihi target pada bulan Desember. Nilai IKPA tertinggi dicapai pada bulan Maret dengan nilai 98,40 sementara nilai IKPA terendah didapatkan pada bulan Mei dengan nilai 83,23.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu melakukan penyampaian Revisi DIPA secara daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi berupa penggunaan excel dan whatsapp group untuk membantu staf pengelola keuangan dalam memonitor penatausahaan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti permasalahan.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung terlaksananya IKU, yaitu :

a. Revisi DIPA
- 1 (satu) kali pada 30 Januari 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK);
- 1 (satu) kali pada 13 Februari 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil);
- 1 (satu) kali pada 12 Maret 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 22 April 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Halaman III DIPA);
- 1 (satu) kali pada 29 April 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 3 Juni 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 11 Juni 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi DJA)
- 1 (satu) kali pada 8 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 12 Juli 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 5 Agustus 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)

- 1 (satu) kali pada 20 September 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 8 Oktober 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 31 Oktober 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 14 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi DJA)
- 1 (satu) kali pada 20 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 28 November 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Revisi POK)
- 1 (satu) kali pada 17 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (Kanwil)
- 1 (satu) kali pada 21 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (POK)
- 2 (dua) kali pada 23 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (POK)
- 1 (satu) kali pada 23 Desember 2024 yang merupakan revisi anggaran Satker (POK dan Pemutakhiran KPA)

b. Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp[illegible] atau 98,59% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp[illegible] (Sumber Data: OMSPAN per 31 Desember 2024)

c. Data Kontrak sebanyak 27 sepanjang tahun 2024 (bulan Januari – Desember):

- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.26/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 2 Februari 2024
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pengawasan sebanyak 3 Unit Standar selama 1 Tahun sesuai SP.27/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pengawasan sebanyak 1 Unit Pemandu selama 1 Tahun sesuai SP.28/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pangkalan Bun sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.29/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Putussibau sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.30/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.31/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Mahakam Hulu sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.32/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 Unit tanggal SP.33/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Tablet sebanyak 1 Unit dan Alat Komunikasi Pelayanan sebanyak 1 Unit sesuai SP.34/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.

- Belanja Keperluan Perkantoran – Pengadaan Seragam Pegawai BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 35 Stel sesuai SPK/43/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kapal dan Longboat sebanyak 1 Paket sesuai SPK.42/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 2 Paket sesuai SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kursi, Brankas dan Lemari sebanyak 1 Paket sesuai SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai SP.45/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 03 April 2024.
- Belanja Jasa Lainnya – Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.46/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda – Pengadaan Barang Bantuan KONPAK TA 2024 Kelompok Pesisir di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai SP.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan – Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.50/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa CCTV sebanyak 1 Paket sesuai SP.51/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Belanja Pemeliharaan Nilai Gedung dan Bangunan – Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP.53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor 53/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 54/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan KONPAK TA 2024 Kelompok Lembaga Lokal di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 55/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 56/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.

- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 37/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wilker Mahakam Hulu Berupa Meubelair Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 47/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.
- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 4 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 38A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Enumerator Kelautan dan Perikanan Selama 4 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 38B/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 50/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024.
- Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya (Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 02/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display KKP sebanyak 1 Unit SP Nomor 51/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Apung Monitoring Point di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 62/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebanyak 1 Paket sesuai SP.59/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Profil Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket sesuai SPK.61/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- Pembayaran honorarium Pegawai Non ASN periode Januari s.d. Desember 2024
- Pembayaran atas Belanja Gaji
- Pembayaran atas Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

d. Penyelesaian Tagihan setiap bulan
e. Penyelesaian UP sebanyak 3 kali dan TUP 2 kali
f. Pengisian Capaian Rincian Output (CRO) periode Juli – September 2024.
g. Kegiatan yang dilaksanakan selain internal maupun memenuhi undangan eksternal dalam rangka pelaksanaan anggaran:
   - Menghadiri kegiatan Finalisasi Penyelesaian Target dan Pagu Penggunaan PNBP TA 2024 pada 3 – 5 Januari 2024 di [illegible] Hotel Cikini Jakarta.
   - Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.22/DJPRL.1/TU/140/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Tindak Lanjut atas Usulan Pengajuan PNBP Inisiatif Unit Eselon I/II, melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.188/BPSPL.2/KU.440/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP di BPSPL Pontianak.
   - Menghadiri kegiatan Rapat Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 dan Manual IKU DJPRL 2024 pada 17 – 19 Januari 2024 secara daring berdasarkan Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.226/DJPRL.1/TU.220/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Rapat Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Lingkup DJPRL.
   - Menghadiri kegiatan Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi pada 29 – 31 Januari 2024 di Mercure Bandung City Centre Bandung berdasarkan Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.608/DJPRL.1/TU.220/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 hal Undang

Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi Capaian Target serta Penggunaan Pagu PNBP Tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL.

- Menghadiri undangan pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 13 Februari 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Nomor S-077/KPN.1701/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Penyampaian Informasi Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Penetapan Target dan Capaian Output.
- Menghadiri undangan Sekretaris DJPRL Nomor B.1235/DJPRL.1/TU.230/II/2024 hal Undangan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan DJPRL yang didanai RSP dan Penetapan Kegiatan yang Termasuk Program Pengelolaan Kemitraan Ekonomi pada 28 Februari 2024 secara daring.
- Menghadiri pembahasan penggunaan PNBP SDA 2024 pada 22 Februari 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1336.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1416/DJPRL.1/KKC.410.1/II/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Tim Pengelola Penyaluran dan Kesiapan Lingkup Ditjen PKRL.
- Menghadiri pembahasan Rencana Kerja Pelayanan Publik (RKPP) dan Penyusunan Penilaian PMPRB Lanjutan secara daring pada 14 Maret 2024 berdasarkan Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1461/DJPRL.1/TU.230/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 hal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerja DBN DJPRL.
- Melakukan penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1104/BPSPL.2/PL.730/IV/2024 tanggal 16 April 2024 hal Permohonan Hibah Aset Tanah untuk UPT Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada Bupati Kabupaten Ketapang.
- Melakukan penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1166/BPSPL.2/PL.730/IV/2024 tanggal 23 April 2024 hal Penyampaian Berkas Proposal Profil Organisasi dan Site Plan Permohonan Hibah Tanah BPSPL Pontianak Wilayah Kerja Pangkalan Bun kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan pada 20 s.d. 22 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2716/DJPRL.1/TU.230/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Pembahasan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1505/BPSPL.2/KU.440/V/2024 tanggal 23 Mei 2024 hal Penyampaian Usulan dan Data Dukung Penggunaan PNBP SDA 2024. Selanjutnya rekapitulasi disampaikan melalui Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.3075/DJPRL.1/TU.140/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Hasil Rapat Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan.
- Menyampaikan Permohonan usulan revisi Usulan Revisi Anggaran di BPSPL Pontianak TA 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1930/BPSPL.2/KU.520/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 kepada Sekretaris Ditjen PKRL.
- Menghadiri kegiatan Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkungan Ditjen PKRL dengan LAPKA-E1 Periode Semester I TA 2024 pada 10 s.d. 13 Juli 2024 di Yogyakarta.

- Menghadiri kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Realisasi PNBP DJPKRL s.d 31 Agustus 2024 pada 10 September 2024 pada tautan [illegible] https://bit.ly/Lap_Realisasi_PNBP_Agust2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Penyusunan Prognosa PNBP DJPKRL s.d 31 Agustus 2024 pada 11 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menghadiri undangan Penyusunan Dokumen Penganggaran Satker Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plt. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penganggaran PNBP non SDA Tahun 2025-2027 pada 18 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Rencana Penggunaan PNBP non SDA TA. 2025-2027 pada 20 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/IX/2024 tanggal 17 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Rencana Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September - 3 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran TA. 2025 Satker lingkup Ditjen PKRL pada 30 September - 3 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/IX/2024 tanggal 26 September 2024.
- Menghadiri kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Satker Pusat dan UPT lingkup Direktorat Jenderal PKRL pada 7 Oktober 2024 secara daring berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA. 2024 di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 29 Oktober 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.[illegible]/SJ.2/TU.200/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 hal Undangan Rapat.
- Melakukan penyampaian Usulan Target PNBP Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Tahun 2027 - 2029 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/PRL.[illegible]/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.[illegible]/SJ/KU.[illegible]/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Bendahara dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Pedoman Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pelaksanaan/penyusunan RKA sudah melibatkan pihak yang berkompeten baik secara aspek teknis, kinerja, dan keuangan. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan pegawai dan penunjukan Tim Kerja BPSPL Pontianak secara luring dan daring dalam penyusunan RKA. Selanjutnya hasil penyusunan RKA telah ditelaah terlebih dahulu oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal KKP.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2067.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [2067.EBD] Layanan Manajemen Keuangan. Realisasi anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output sebagai berikut.

Tabel 3.1.13-5. Realisasi Anggaran IKU 11 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2067.EBA.956.001] Layanan BMN	Rp40.000.000	Rp39.774.064 (99,44%)	-
2.	[2067.EBA.962.001] Layanan Komunikasi	Rp 55.565.000	Rp 55.565.000 (100,00%)	-
3.	[2067.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 4.737.812.000	Rp 4.690.744.208 (99,01%)	-
4.	[2067.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 4.534.834.000	Rp 4.514.179.484 (99,55%)	-
5.	[2067.EBD.955.001] Layanan Manajemen Keuangan	Rp180.000.000	Rp 180.000.000 (100,00%)	-
	TOTAL	Rp9.548.211.000	Rp9.507.501.006 (99,41%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (kumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp9.507.501.006 atau 99,41% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp9.548.211.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Gaji dan Tunjangan Lingkup BPSPL Pontianak, Operasional dan Pemeliharaan Kantor BPSPL Pontianak dan Belanja Pengadaan Barang/Jasa.

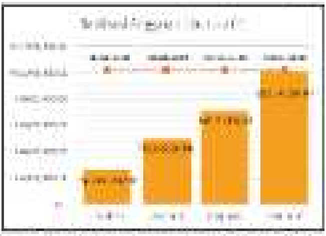

Gambar 3.1.13-5 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung modal kesetaraan gender pada SDM pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 1/BPSPL.2/KU.110/I/2024 tentang Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

b. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan penetapan target kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Selain itu juga melakukan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan anggaran seperti pengajuan Uang Persediaan TA 2025, Revisi DIPA, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan dan penyelesaian tagihan serta penyerapan anggaran.

IKM 13. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja pelaksanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024 sebagai perubahan dari IKU "Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Pontianak" mengacu pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor B2953/SJ.3/TU.210/X/2024 dan memperhatikan pembahasan perubahan Perjanjian Kinerja Satker Lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 3 Oktober 2024.

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 463 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

a. Sangat Baik, apabila NKPA ≥ 95;
b. Baik, apabila NKPA ≥ 89 – 95;
c. Cukup, apabila NKPA ≥ 70 – 89;
d. Kurang, apabila NKPA ≥ 50 – 70;
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50.

Teknik Menghitung :

NKPA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (70)	1. Capaian RO	70
Efisiensi (30)	1. Penggunaan SBK	15
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

c. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVRO : Realisasi Volume RO i
TVRO : Target Volume RO i
n : Jumlah RO

d. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ yang\ telah\ ditetapkan\ menjadi\ SBKK + \sum RO\ yang\ memenuhi\ kriteria\ untuk\ menggunakan\ SBKU}\right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ Rl\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \times \frac{1}{n}\right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_SBK : Efisiensi SBK tingkat Satker
Indeks SBK : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks Rl SBK : Indeks Realisasi RO i SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

NKPA Satker = (CRO x Nkuo) + (Penggunaan$_{SBK}$ x NPenggunaan$_{SBK}$) + (NE$_{SBK}$ x NE$_{Lokal}$)

Keterangan:
NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker
CRO : Capaian RO
Penggunaan SBK : Penggunaan SBK
NEkuo : Nilai Efisiensi Aktual

Capaian IKU 15 NKPA BPSPL Pontianak sebagai berikut:

Tabel 3.1.19.3 Capaian IKU 15 NKPA BPSPL Pontianak

SS.3	3.1.12. Terwujudnya Pengelolaan Kinerja yang Efektif lingkup BPSPL Pontianak							
IKU.15	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Kinerja Jangka Menengah		Kinerja Jangka Panjang	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	93,11	-	91	102	91	102	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan E-MONEV, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU 15 dilakukan secara tahunan. Berdasarkan data pada aplikasi SMART DJA (https://smart.kemenkeu.go.id), Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Pontianak pada tahun 2024 sebesar 93,11. Nilai ini didapatkan dari perhitungan efektivitas (capaian RO) sebesar 100, efisiensi penggunaan SBK sebesar 100 dan efisiensi SBK sebesar 77,4. Persentase realisasi terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 102%. Capaian NKPA BPSPL Pontianak disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 192/SJ.3/TU.213/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.

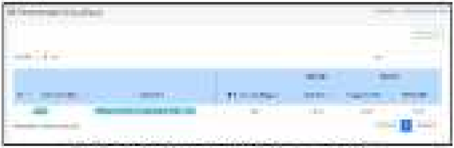

Gambar 3.1.19.4. Capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat capaian "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran". Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 karena tidak terdapat IKU tersebut pada tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tidak terdapat target mengenai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 sehingga capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024 tidak dapat dibandingkan. Namun, terdapat target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 89 pada Renstra Ditjen PKRL tahun 2024. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran sehingga capaian NKPA BPSPL Pontianak berkontribusi terhadap pencapaian NKA Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Terdapat target mengenai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 sebesar 71 pada tahun 2024. Capaian NKPA BPSPL Pontianak tahun 2024 sebesar 99,11 telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar lebih dari 120% jika dibandingkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut ditunjang dengan metode pelaksanaan dan pengawasan yang berjenjang. Tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak menerapkan monitoring untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya hal tersebut mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusinya. Faktor penghambat capaian kinerja ini yaitu akomodasi dalam penentuan/penetapan target capaian output setiap triwulan dengan rencana kegiatan. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke KPPN Pontianak untuk mendapatkan konfirmasi data yang sudah sinkron.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu kecepatan penyampaian Kertas Kerja/RKA dapat terjadi karena, tahun ini, penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA cukup melengkapi capaian rincian output. Perhitungan NKA yang berbasis aplikasi dilakukan secara otomatis, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan manual.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKA, yaitu input Capaian Rincian Output (CRO) bulan Januari hingga Desember 2024. 2024 pada aplikasi SAKTI yang kemudian divalidasi pada aplikasi SMART DJA Kemenkeu. Kegiatan yang dilaksanakan secara internal maupun menghadiri undangan eksternal dalam rangka optimalisasi anggaran:

a. Menghadiri kegiatan Finalisasi Penyesuaian Target dan Pagu Penggunaan PNBP TA 2024 pada 3 – 6 Januari 2024 di Mercure Hotel Cikini Jakarta.

b. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.227/DJPKRL.1/TU.1.4/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP lingkup Ditjen PKRL melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.136/BPSPL.2/KU.440/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Usulan Penggunaan PNBP di BPSPL Pontianak.

c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Nomor S-877/KPN.1701/2024 tanggal 1 Februari 2024 hal Penyampaian Informasi Batas Waktu Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.

d. Menghadiri pembahasan penetapan PNBP SDA 2024 pada 22 Februari 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1205/DJPRL.1/HK.410/II/2024.

e. Menghadiri pembahasan Rencana Rerata Penetapan Biaya (RBPP) dan Penetapan Besaran PNBP Laut secara daring pada 14 Maret 2024 berdasarkan Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1401/DJPRL.1/TU.520/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Perubahan Waktu Rapat Koordinasi Rencana DIPA DJPRL.

f. Menghadiri kegiatan Penyusunan TOR dan RAB Penggunaan PNBP SDA Kelautan pada 20 s.d. 23 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2716/DJPRL.1/TU.520/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

g. Menyampaikan Permohonan Arahan terkait Usulan Revisi Anggaran di BPSPL Pontianak TA 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1480/BPSPL.2/KP.520/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Ditjen PRL.

h. Menghadiri undangan Penyusunan Dokumen Penganggaran Satker Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Kota Jakarta Pusat pada 14 s.d. 20 Juli 2024 di Jakarta Pusat sesuai Surat Plh. Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.3975/DJPRL.1/TU.520/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

i. Menghadiri kegiatan Pembahasan Usulan Penggunaan PNBP Non SDA Tahun 2025-2027 pada 16 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.5415/DJPRL.1/TU.520/IX/2024 tanggal 11 September 2024.

j. Menghadiri kegiatan Pembahasan Pagu Penggunaan PNBP Non SDA TA 2025-2027 pada 23 September 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.4756/DJPRL.1/TU.520/IX/2024 tanggal 17 September 2024.

k. Melakukan tindak lanjut atas Surat Direktur Jenderal PRL Nomor B.5410/DJPRL.1/TU.520/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2331/BPSPL.2/KU.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024 hal Tindak Lanjut Usulan Penggunaan PNBP BPSPL Pontianak Tahun 2025 – 2027.

l. Menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Penganggaran Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Satker lingkup Ditjen PRL pada 30 September - 3 Oktober 2024 di Bandung, Jawa Barat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.5700/DJPRL.1/TU.520/IX/2024 tanggal 24 September 2024.

m. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.5940/DJPRL.1/TU.140/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 hal Hasil Rapat Pembahasan Pagu Penggunaan PNBP Tahun 2025 – 2027.

n. Menghadiri Undangan Rapat Penyusunan Usulan Target dan Pagu Penggunaan PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 pada tanggal 3 – 4 Desember 2024 sesuai Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor B.2615/SJ.3/KU.540/XI/2024.

B. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

C. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kegiatan perencanaan anggaran. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada tim pengelola keuangan BPSPL Pontianak sesuai dengan

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor [illegible] tentang Pejabat Pengelola Anggaran Satuan Kerja BPSPL Pontianak.

4. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan target kinerja IKU/IKSK.

IKM 19. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)

Suatu predikat yang diberikan unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Adapun standar penilaian antara lain:

a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit sebesar 40.
b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,5 dan sub komponen Persentase TLHP minimal 3,5.
d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 14.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal / KKP pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 dengan hasil evaluasi sebesar 90,01. Selain itu, BPSPL Pontianak juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju WBK pada tanggal 6 Desember 2022.

Tabel 3.1.19-4. Capaian IKM 19 Nilai WBK BPSPL Pontianak

[illegible]	[illegible] Tata Kelola Pemerintahan yang [illegible] BPSPL Pontianak							
IKM 19	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Kinerja Jangka Menengah		Kinerja Jangka Panjang	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target Renstra	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2025	% Capaian thd Target 2025
90,01	90,01	0	75	120	75	120	75	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Itjen KKP, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKM 19 dilakukan secara tahunan. Capaian IKU ini disampaikan melalui memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor [illegible] tanggal 6 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Berdasarkan memorandum tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar 93,81 yang didapatkan dari hasil pemantauan penilaian TPI KKP tahun 2023. Persen realisasi capaian IKU ini terhadap target Perjanjian Kinerja sebesar 125%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian nilai WBK BPSPL Pontianak pada tahun 2023 sebesar 93,81. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian kinerja. Hal ini dikarenakan tidak ada penilaian WBK dari Kementerian PANRB untuk BPSPL Pontianak pada tahun 2023 dan 2024 sehingga capaian kinerja kedua tahun tersebut menggunakan capaian tahun 2022 sebesar 93,81. Berdasarkan tren capaian nilai WBK BPSPL Pontianak selama 5 tahun terakhir, nilai tertinggi didapatkan pada tahun 2020 sebesar 91,73. Sementara nilai terendah didapatkan pada tahun 2021 sebesar 93,85.

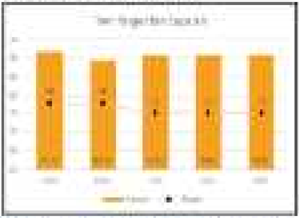

Gambar 2.1.15-6. Tren target dan capaian IKU BPSPL Pontianak

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU ini tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024 yaitu sebanyak 10 Unit kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perbedaan target antara yang tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL dengan target Perjanjian Kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun, capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang didapatkan BPSPL Pontianak telah berkontribusi terhadap capaian target jangka menengah Ditjen PKRL sebesar 10%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target yang tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu nilai WBK BPSPL Pontianak sebesar 75 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 sebesar 93,81 telah berkontribusi sebesar lebih dari 100% dari target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai nilai WBK yang maksimal, BPSPL Pontianak melakukan pemantauan pembangunan zona integritas secara berkala pada perkembangan dan penyusunan dokumen eviden setiap area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan dokumen sehingga dapat disusun sesuai dengan kriteria.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan yaitu rapat kontrol internal dilakukan secara hybrid menggunakan aplikasi zoom meeting.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya [illegible], yaitu:

a. Pengumpulan dokumen komponen pengungkit setiap bulannya untuk periode Januari – Desember 2024.
b. Melaksanakan rangkaian persiapan dan pelaksanaan Surveilance ISO 9001:2015 di BPSPL Pontianak pada tanggal 28 Februari hingga 15 Maret 2024. Hasil Surveilance ISO 9001:2015 ini berupa Sertifikat Nomor QMS/[illegible]17144 tanggal 15 Maret 2024.
c. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1812/DJPRL.1/TU.210.1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis.
d. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1810/DJPRL.1/TU.210.1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Hasil Kategorisasi [illegible] UPT Lingkup Ditjen PRL Tahun 2024.
e. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris DJPRL Nomor B.1814/DJPRL.1/TU.210.1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi.
f. Melaksanakan Rapat Bulan Maret dan Dialog Kinerja 2024 pada 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/TU.[illegible]/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Undangan Rapat Bulan Maret dan Dialog Kinerja.
g. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1842/DJPRL.1/TU.210.1/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 hal Permohonan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2024.
h. Pengumuman Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/OT.710/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Pengendalian Gratifikasi Pegawai pada Hari Raya di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.
i. Pengumuman Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/OT.710/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 hal Pengendalian Gratifikasi Pengguna Jasa Layanan pada Hari Raya di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak.
j. Mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 terhadap Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada 14 Mei 2024 di Kota Jakarta Pusat sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.[illegible]/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
k. Melakukan tindak lanjut atas Surat Plh. Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2201/DJPRL.1/TU.140/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Permohonan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Lingkup Ditjen PRL.
l. Menghadiri Rapat Reviu Akhir Data Dukung PMPRB Nasional dengan Lokus BPSPL Pontianak Tahun 2024 pada 7 s.d. 9 Juli 2024 di Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari Sekretariat Jenderal KKP Nomor B.[illegible]/SJ.[illegible]/TU.[illegible]/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
m. Menghadiri Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL pada 15 s.d. 16 Agustus 2024 di Yogyakarta berdasarkan Undangan dari Sekretariat Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.[illegible]/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
n. Menghadiri Rekonsiliasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan III Tahun 2024 pada 14 dan 15 November 2024 sesuai Surat Plt. Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.[illegible]/XI/2024.

a. Melakukan penetapan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.4220/BPSPL.2/KP.440/XI/2024 tanggal 13 November 2024 hal Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak.
b. Melaksanakan Tindak Lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.4562/DJPKRL.1/KP.430/XI/2024 tanggal 15 November 2024 hal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional pada UPT Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.
c. Melaksanakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan Sertifikasi ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak pada tanggal 13 Februari hingga 6 Desember 2024. Hasil Sertifikasi ISO 37001:2016 ini berupa Sertifikat Nomor QAIC/ID/11/1040, tanggal 6 Desember 2024.
d. Melaksanakan Internalisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada tanggal 4 November dan 11 Desember 2024 di Kantor BPSPL Pontianak.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [5367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dan [5367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal. Realisasi anggaran berdasarkan komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.13-6 Realisasi Anggaran IKU ke Tahun 2024

No.	Komponen/Sub Komponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	[5367.EBA.956.000] Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	Rp84.250.000	Rp84.221.482 (99,96%)	-
	TOTAL	Rp84.250.000	Rp84.221.482 (99,96%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp84.221.482 atau 99,96% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp Rp84.250.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Bahan Penunjang RBK dan Konsumsi Rapat.

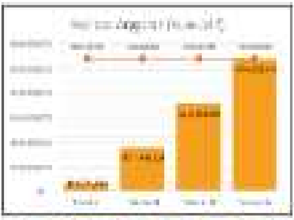

Gambar 3.1.13-6 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU 16 dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pelayanan publik. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Tim Sistem Manajemen Integrasi BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Tugas Kepala BPSPL Pontianak Nomor [illegible] tanggal 11 November 2024 tentang Tim Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 di BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi pada tahun 2025 yaitu melakukan persiapan dan pemenuhan dokumen dalam rangka penilaian Zona Integritas tahun 2025. Diharapkan pada tahun 2025 BPSPL Pontianak bisa mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA Setjen KKP. Analisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi memiliki bobot 25%
b. Kompetensi memiliki bobot 40%
c. Kinerja memiliki bobot 30%
d. Disiplin memiliki bobot 5%

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: (a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan (b) Perilaku Kerja. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Profesional/Sangat Tinggi
81 - 90	Cenderung Profesional/Tinggi
71 - 80	Kurang Profesional/Sedang
61 - 70	Cenderung Tidak Profesional/Rendah
≤ 60	Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah

Hasil pengukuran terhadap capaian indikator tersebut diambil langsung dari dashboard IP ASN KKP yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di laman [illegible]

Tabel 3.1.12.6. Capaian IKU 17 BPSPL Pontianak

SK-13	S.1.13 [illegible] BPSPL Pontianak							
IKU 17	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Pontianak (Indeks)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Rencana Jangka Menengah	
	Target 2024	Realisasi	Target [illegible]	% Capaian thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber data: [illegible]

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada Manual IKU dilakukan secara semesteran. Berdasarkan pemantauan nilai IP ASN melalui situs [illegible] per tanggal 31 Desember 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar [illegible] dengan kategori sangat tinggi. Progres capaian nilai ini telah melebihi target pada perjanjian kinerja dengan persentase [illegible]%. Capaian IKU ini disampaikan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor B.[illegible] tanggal [illegible] Januari 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Periode pelaporan kinerja tahun 2023 dan 2024 dilakukan secara semesteran. Namun capaian nilai IP ASN pada tahun 2024 sebesar [illegible] ([illegible]% dari target tahunan [illegible]), sedangkan capaian tahun 2023 sebesar [illegible] ([illegible]% dari target tahunan [illegible]). Sehingga progres capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sejumlah [illegible] dibandingkan progres capaian tahun 2023 atau meningkat sebesar [illegible]% jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Tren nilai IP ASN mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dengan nilai tahun 2024 menjadi yang tertinggi. Nilai terendah didapatkan pada tahun 2020 sebesar [illegible]. Peningkatan nilai IP ASN didukung oleh pemenuhan [illegible] untuk pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Selain itu pengumpulan sertifikat diklat, pelatihan dan seminar menjadi nilai tambah untuk penilaian IP ASN.

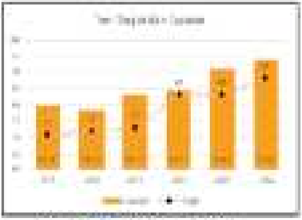

Gambar 3.1.12.7. Tren Capaian IP ASN

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap terhadap angka menengah Ditjen PKRL sebesar 120% (90,63 dari 76), sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah tahun 2024.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024, yaitu Indeks Profesionalitas ASN sebesar 76 pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap terhadap target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar 120% (90,85 dari 76), sehingga capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan tahun 2024.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan pengembangan kompetensi pegawai yang diikuti oleh setiap pegawai. Pengembangan kompetensi ini tersedia secara luring dan daring untuk meningkatkan perolehan indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak. Selain itu, telah adanya pemberian kesempatan tugas belajar/izin belajar dalam rangka peningkatan jenjang pendidikan formal pegawai menjadi faktor pendukung. Salah satu kendala dalam pencapaian IKU ini yaitu proses unggah di aplikasi SIASN yang terkendala dalam sistem. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan secara bimbingan teknis pada tiap pegawai.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pegawai secara daring. Selain itu, pengumpulan sertifikat kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun seminar dilakukan secara mandiri oleh pegawai untuk diunggah langsung sehingga mempercepat proses pemutakhiran IP ASN pada situs ropeg.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu :

a. Pelatihan, Diklat, Bimtek, workshop dan seminar secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh pihak lain telah diikuti oleh pegawai pada Januari – Desember 2024

b. Kegiatan pendukung terkait dengan kepegawaian lingkup BPSPL Pontianak pada Januari – Desember 2024, diantaranya adalah:

- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.131/DJPKRL.1/KP.720/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Penyelesaian Pengisian dan Penilaian SKP Triwulan IV dan Akhir Periode Tahun 2023 lingkup Ditjen PKRL.
- Menghadiri Kegiatan Penyusunan Dokumen Bezetting dan Peta Jabatan DJPKRL Serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dan APUK Pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada 16 – 18 Januari 2024 di Surabaya berdasarkan Surat Sekretaris DJPKRL Nomor B.208/DJPKRL.1/TU.330/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal Undangan Penyusunan Dokumen Bezetting dan Peta Jabatan DJPKRL Serta Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PELP dan APUK Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Melakukan tindak lanjut atas [illegible] Tugas atas nama [illegible], S.E. tanggal 11 Januari 2024 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak ke Balai Pengelolaan Sumber Daya

Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor [illegible] tanggal 15 Januari 2024 hal Mutasi/Alih Tugas.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat DJPRL Nomor [illegible] tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian Data PPNPN terkait Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Melakukan penyampaian Surat Sekretaris DJPRL Nomor [illegible] tanggal 26 Januari 2024 hal Penyampaian Jadwal Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi terkait Keuangan Negara di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- Menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembelajaran Pilot Aplikasi Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 1 Februari 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Timeline Pengajuan PAK Integrasi Tahunan di e-Kinerja 2024.
- Menghadiri undangan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat Nomor UND-5/PWK.19/2024 tanggal 19 Februari 2024 hal Undangan Sosialisasi Beasiswa LPDP Tahun 2024 di Kalimantan Barat pada 29 Februari di Balai Diklat Keuangan Pontianak.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL B.1348 hal Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai ke dalam Jabatan Fungsional PELP dan APUK.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1344 hal Usulan Kenaikan Pangkat Periode April 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor [illegible] tanggal 7 Februari 2024 hal Pemberlakuan [illegible] Cuti Elektronik.
- Menghadiri Pengarahan PPPK Lingkup Ditjen PKRL pada 26 Februari 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Pengumuman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Statistisi.
- Melakukan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai BPSPL Pontianak Tahun 2023.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor [illegible] tanggal 1 Maret 2024 hal Pengisian LHKPN dan SPT Tahunan Periode Tahun 2023 lingkup DJPKRL.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor [illegible] tanggal 4 Maret 2024 hal Informasi Beasiswa Kebutuhan Pendidikan Gelar Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KKP Tahun 2024.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor [illegible] tanggal 7 Maret 2024 hal Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS Lingkup DJPKRL.
- Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor [illegible] tanggal 13 Maret 2024 hal Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Jalur Pendidikan.
- Mengikuti kegiatan Sosialisasi Hasil IP ASN Lingkup Ditjen PKRL, Usulan Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024, serta Penyelesaian Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi Lain pada Rabu 3 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor [illegible] tanggal 25 Maret 2024

- Mengikuti kegiatan Implementasi Manajemen Talenta ASN Serta Penyusunan Soal Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan dan Kenaikan Jenjang JF pada 29 April 2024 secara daring.
- Melakukan tindak lanjut atas Permohonan Mutasi a.n. Tugas melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.3/KP.[illegible]/IV/2024 tanggal 17 April 2024.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.[illegible]/IV/2024 tanggal April 2024 hal Permohonan Pengisian Form Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi.
- Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/KP.[illegible]/IV/2024 tanggal 19 April hal Penyampaian Hasil Kenaikan Pangkat Pegawai Periode April 2024 dan Usul Kenaikan Pangkat Periode Juni 2024. Adapun pegawai di BPSPL Pontianak yang mendapatkan kenaikan Pangkat yaitu a.n. Andhar Saputra, Herty Priyandi Effendi, Hardianti, dan Veronica Lusi Mading.
- Melakukan Penyampaian Usulan Calon Peserta Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian dan Pemohonan Tahap Tengah sesuai Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.3/KP.[illegible]/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.
- Menghadiri Coaching Clinic Kepegawaian ASN dan Pemenuhan Jabatan Fungsional [illegible] dan [illegible] serta Pelaksanaan Layanan Kepegawaian pada 29 s.d. 31 Mei 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.220/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.
- Menghadiri kegiatan Asistensi Penerapan Cara Cepat Kenaikan pada aplikasi Siap ASN BKN secara daring pada 28 Juni 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.220/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- Menghadiri Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Risiko pada 19-20 September 2024 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat sesuai Surat Undangan Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.220/IX/2024.
- Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat Undangan Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.220/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024.
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Identifikasi [illegible] pada tanggal 22 Agustus 2024.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada tanggal 12 - 14 Agustus 2024 sesuai undangan Sekretaris Ditjen PRL nomor [illegible] tanggal 6 Agustus 2024.
- Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.220/IX/2024 tanggal 9 September 2024.
- Menyelenggarakan Pelatihan Monitoring dan Pengawasan Kawasan Konservasi dan Pelayanan Umum tanggal 22 - 25 Juli 2024.
- Menghadiri Forum Koordinasi, Kolaborasi dan Evaluasi Jabatan Fungsional Statistisi, Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaan pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024 sesuai Undangan Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.[illegible] tanggal 17 Juli 2024.
- Menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Jaminan Sosial pada tanggal 30 Agustus 2024, acara ini turut mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai narasumber.

c. Rekapitulasi pengembangan kompetensi pegawai pada Januari – Desember 2024 dan Monitoring Tahun 2024.

5. Penilaian prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Januari – Desember 2024.
6. Rekapitulasi prestasi kerja pegawai pada aplikasi E-Kinerja BKN pada Januari – Desember 2024.
7. Rekapitulasi dan monitoring presensi pegawai pada Januari – Desember 2024.

8. Realisasi Anggaran

Komponen RO ini didukung dengan alokasi anggaran dan Realisasi Rincian Output [2357.EBD] Layanan Dukungan Manajemen SDM Internal. Realisasi anggaran dan Realisasi Rincian Output dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.10.7 Realisasi Anggaran RO 17

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2357.EBD.5.xx.xxx] Layanan Manajemen SDM	Rp 304.482.000	Rp 304.371.025 (99,97%)	-
TOTAL		Rp 304.482.000	Rp 304.371.025 (99,97%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung RO ini pada Tahun 2024 (akumulasi dari Januari 2024) yaitu Rp 304.371.025 atau 99,97% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp304.482.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Barang.

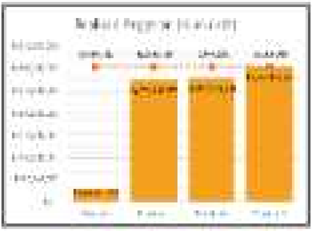

Gambar 3.1.10-5 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada RO ini dilakukan dengan membuka akses peningkatan kompetensi pegawai baik kepada laki-laki maupun perempuan.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 10. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Pontianak dihitung berdasarkan Peraturan PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Kinerja (25%). Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Pontianak adalah didasarkan atas hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3.1.10-4. Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 - 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 - 60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di satker/unit kerja.
E	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IKU 13 Sebagai berikut:

Tabel 3.1.13-9. Capaian IKU 13 BPSPL Pontianak

SS-13	SS.13: Sasaran Kegiatan 13 Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Pontianak							
IKU-13	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Kondisi Target & Renstra		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target Perjanjian	% Realisasi terhadap PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
80,5	85,55	5,05	81	105,62	80	106,9	85,71	100

Sumber data: BPSPL Pontianak Ditjen PRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PRL yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 September 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar 85,55 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PRL nomor [illegible] perihal hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak. Berdasarkan nilai tersebut, BPSPL Pontianak telah mencapai target perjanjian kinerja dengan persentase capaian sebesar 105,62%. Hasil penilaian per komponen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.13-10. Komponen Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	25,56
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3	Pelaporan Kinerja	15	13,00
4	Evaluasi Internal	25	19,99
Nilai Hasil Evaluasi		100	85,55
Predikat Penilaian			A

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Berbeda pencapaian nilai ini pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan adanya perubahan. Capaian nilai PM SAKIP pada tahun 2023 sebesar [illegible] sehingga terdapat penurunan nilai PM SAKIP sejumlah [illegible] atau menurun sebesar [illegible] jika dibandingkan dengan nilai PM SAKIP tahun 2024. Jika dibandingkan dengan nilai per komponen antara tahun 2023 dengan 2024, terdapat penurunan yang signifikan pada komponen Evaluasi Kinerja. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terdapat penurunan nilai kinerja anggaran dan persentase capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2023. Walaupun begitu, terdapat peningkatan nilai pada komponen pengukuran dan perencanaan anggaran.

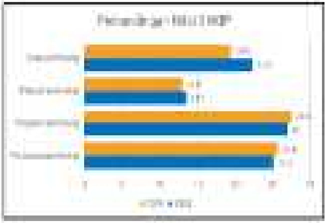

Gambar 3.1.10.9. Perbandingan Komponen Nilai PM SAKIP Tahun 2023 dan 2024

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PRL sebesar [illegible]. Capaian tahun 2024 sebesar [illegible] telah berkontribusi terhadap target jangka menengah Ditjen PRL 2020 – 2024 sebesar [illegible].

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak sebesar 80. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2024 dengan Matriks Kinerja & Pendanaan, capaian tahun 2024 sebesar [illegible] telah mencapai target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar [illegible].

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Tahun 2024 dapat menunjang tercapainya target di akhir tahun. Hal ini didukung oleh koordinasi yang baik antara tim pengelola kinerja dan seluruh tim pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pemahaman tim pengelola kinerja mengenai kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Terdapat beberapa target Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang belum sepenuhnya achievable. Laporan Kinerja BPSPL Pontianak telah memuat tabel perbandingan capaian kinerja dengan unit kerja lain. Namun, belum memuat analisis lebih lanjut terkait perbedaan capaian kinerja, khususnya justifikasi capaian kinerja yang lebih rendah. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja secara keseluruhan. Hasil TKA pada BPSPL

Pontianak terdapat penurunan efisiensi kinerja. Nilai efisiensi BPSPL Pontianak pada tahun 2022 sebesar 0,52 sedangkan 2023 sebesar 1,15.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi sumber daya yang dilakukan yaitu pengukuran kinerja berbasis daring, pemantauan capaian kinerja berbasis daring, pembuatan basis data laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan dropbox, google drive dan aplikasi penyimpanan lainnya. Selain itu, terdapat pengembangan google form Monev (Monitoring Kegiatan) BPSPL Pontianak, sebagai wadah pemantauan dan evaluasi kinerja internal berbasis google form untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan, serta persiapan ke depannya. Pengisian form ini dapat membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja, Laporan output di SAKTI, Laporan SPIP MR, dan lain-lain pada setiap bulan.

7. Kegiatan Pendukung

a. Melakukan reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat dan UPT lingkup DJPRL dengan hasil Berita Acara Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 BPSPL Pontianak tanggal 7 Februari 2024.

b. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1238/DJPRL.1/TU.420.1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1238/DJPRL.1/TU.420.1/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

d. Menghadiri undangan Rapat Finalisasi Manual Indikator Kinerja Level 2 Tahun 2024 lingkup DJPRL pada 20 – 21 Maret 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1451/DJPRL.1/TU.420/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

e. Mengikuti kegiatan Sosialisasi, Approval dan Verifikasi Pelaporan melalui Aplikasi Kinerjaku dan e-Monev Bappenas Triwulan I Tahun 2024 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat pada tanggal 1 s.d. 4 April 2024 sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.1582/DJPRL.1/TU.220/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.

f. Mengikuti kegiatan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Rencana Aksi dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2024 Lingkup DJPRL pada 16 s.d. 19 April 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.2120/DJPRL.1/TU.420/IV/2024 tanggal 15 April 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I tahun 2024, didapatkan hasil capaian kinerja 113 (Istimewa).

g. Mengikuti kegiatan Forum Manajemen Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2024 secara daring sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B.1274/SJ.1/RO.3/TU.210/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.

h. Memorandum Kepala BPSPL Pontianak Nomor [illegible]/BPSPL.3/TU.210/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

i. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja/SAPK (www.kinerjaku.kkp.go.id) sesuai Surat Sekretaris Ditjen PRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.410/V/2024 tanggal 27 Mei 2024. Berdasarkan surat tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113 (Istimewa) dan NKO Verifikasi sebesar 113 (Istimewa).

j. Mengikuti kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di lingkungan DJPRL pada tanggal 24 – 27 Juni 2024 di [illegible] sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PKRL Nomor B.3446/SJ/PKRL.1/TU.370/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024. Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai PM SAKIP sementara sebesar 81,76. Nilai ini belum mencapai target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, namun masih menunggu disandingkan nilai tahun lalu. Untuk itu, perlu disampaikan dokumen tambahan dalam rangka menambah nilai SAKIP hingga diharapkan pada saat panel.

k. Mengikuti kegiatan Verifikasi Rekapitulasi e-Monev Bappenas dan SMART DJA pada tanggal 7 - 9 Juli 2024 di Gedung Mina Bahari, Kota Jakarta Pusat. Pada verifikasi e-Monev Bappenas untuk BPSPL Pontianak, persentase kemanfaatan hingga bulan Juni 2024 telah mencapai 45%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Persentase serapan anggaran hingga bulan Juni 2024 sebesar 49,33% sementara persentase pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2024 sebesar 30,25%.

l. Pengisian Capaian Kinerja Triwulan II pada aplikasi Kinerjaku (https://kinerjaku.kkp.go.id). Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) untuk IKU dan IKM BPSPL Pontianak pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 105,24% dengan kategori Hijau (Baik). Capaian Kinerja Triwulan II mengalami penurunan sebesar 11% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I yang sebesar 116%.

m. Menghadiri kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 15 dan 16 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4280/SJ/PKRL.1/TU.140/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.

n. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja BPSPL Pontianak Triwulan II tahun 2024. Laporan Kinerja telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui surat nomor B.3460/BPSPL.2/TU.140/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

o. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP di Yogyakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4403/SJ/PKRL.1/TU.330/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

p. Berdasarkan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2024, BPSPL Pontianak mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,24 dengan predikat baik sesuai surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.4494/SJ/PKRL.1/TU.410/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

q. Menghadiri Desk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKRL pada tanggal 11 – 13 September 2024. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai sebesar 88,66 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (memuaskan) sesuai dengan surat Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.5727/SJ/PKRL.1/TU.410/IX/2024 perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

r. Menghadiri Undangan Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Triwulan III dan Pemantauan Kegiatan DJPKRL secara daring pada tanggal 7 s.d. 8 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6617/SJ/PKRL.1/TU.330/X/2024.

s. Menghadiri Undangan Pembahasan Perubahan Perjanjian Kinerja Satker lingkup DJPKRL Tahun 2024 secara daring pada tanggal 8 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.6681/SJ/PKRL.1/TU.330/X/2024.

t. Menghadiri Undangan Verifikasi Laporan Online melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 lingkup DJPKRL pada tanggal 9 - 11 Oktober 2024 secara daring sesuai dengan surat undangan Sekretaris Ditjen

PKRL nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024. Pada verifikasi e-Monev Bappenas untuk SPSPL Prioritas, persentase kemanfaatan hingga bulan September 2024 telah mencapai 88%. Pelaksanaan dan Serapan Anggaran cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Juni 2024. Sementara itu, hasil verifikasi capaian kinerja SPSPL Prioritas pada Triwulan III menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 107,3% dengan predikat Baik.

u. Menghadiri Undangan Penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL dan Satker PKRL Triwulan III Tahun 2024 secara daring pada tanggal 15 – 17 Oktober 2024 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/10/2024.

v. Menghadiri Undangan Pemantauan Kegiatan Prioritas dan Kinerja DJPKRL sampai dengan Bulan November Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 secara daring sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/12/2024.

w. Menghadiri Undangan Pembahasan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Satker Lingkup Ditjen PKRL tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 di Jakarta Pusat sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/12/2024.

x. Menghadiri Undangan Finalisasi Rencana Strategis Ditjen PKRL tahun 2025 – 2029 pada tanggal 17 – 19 Desember 2024 di Jakarta Pusat sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen PKRL nomor B.[illegible]/DJPKRL.1/TU.200/12/2024.

Gambar 3.1.13-[illegible] Kegiatan [illegible] LKIP

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKSK ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2317.EBD.[illegible]] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2317.EBD.[illegible]] Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel 3.1.13-11. Realisasi Anggaran IKSK 13 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	2317.EBD.[illegible] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 94.[illegible]	Rp 94.[illegible] (99,[illegible]%)	-
2.	2317.EBD.[illegible] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 100.[illegible]	Rp [illegible] (99,[illegible]%)	-
TOTAL		Rp194.[illegible]	Rp194.[illegible] (99,[illegible]%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKSK ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp194.[illegible] atau 99,[illegible]% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp194.[illegible]. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

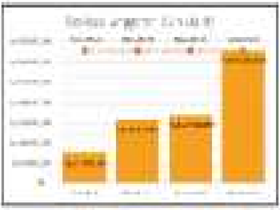

Gambar 5.1.12-11 Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024.

A. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kinerja. Hal ini didukung melalui keterlibatan gender pada tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor [illegible] tanggal 23 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan Nama Anggota Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.6 Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi pada tahun 2025 yaitu menyusun Laporan Kinerja Triwulan IV atau Tahunan 2024. Perlu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Selain itu dalam rangka pengelolaan kinerja tahun 2025, perlu melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rencana Aksi dan Rencana Kerja.

IKM 19: Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Pontianak (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024. Teknik perhitungan dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Tabel 3.1.19-12. Capaian IKSK 19 BPSPL Pontianak

SS 7.19	7.1.19. Rasio Capaian ... Kinerja Pemerintahan yang Sesuai ... BPSPL Pontianak								
IKSK 19	Laporan SPIP yang disusun ... BPSPL Pontianak (Dokumen)								
Realisasi 2023	Tahun 2024					Matriks Kinerja & Pendanaan		Rencana Jangka Menengah	
	Target PK/TW	Realisasi TW IV	Rencana Aksi	Target Renstra 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
4	4	4	4	4	100	4	100	3	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan DJPKRL, Desember 2024

1. Capaian IKSK Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah tercapai 4 (empat) dokumen (100%) dari target 4 (empat) dokumen. Capaian IKSK 19 berdasarkan:

a. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.30/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Desember dan Triwulan IV Tahun 2023.

b. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.1102/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 10 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

c. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2264/BPSPL.2/TU.140/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024.

d. Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.2442/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 adalah sama nilainya 4 (empat) dokumen (100%).

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah tertuang dalam Renstra DJPKRL 2020 – 2024 yaitu nilai Maturitas SPIP Ditjen PKRL sebesar 3. Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena berbeda satuan dan cara perhitungan. Namun, capaian kinerja pada Tahun 2024 telah berkontribusi untuk nilai maturitas SPIP Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu 4 (empat) dokumen SPIP yang disampaikan pada tahun 2024. Capaian kinerja pada Tahun 2024 dengan jumlah 4 (empat) dokumen telah mencapai 100% dari Target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian dokumen SPIP telah berhasil sebesar 100% dari target Tahun 2024 1 tahun 2024. Hal ini dikarenakan telah disusun Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan telah disampaikan ke Sekretariat DJPKRL tepat waktu setiap triwulan (hingga paling lambat setelah triwulan berakhir maksimal tanggal 10). Sedangkan Laporan SPIP Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu pada tanggal 10 Januari 2025 (berdasarkan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.30/BPSPL.2/TU.140/I/2024 tanggal 1 Januari 2025). Salah satu kendala dalam pencapaian kinerja yaitu kurangnya pemenuhan dokumen pendukung Laporan SPIP triwulan yang masih belum optimal.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaksanaan dan penyampaian Laporan SPIP dapat dilakukan secara daring. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghadiri kegiatan pemantauan SPIP yang dilakukan setiap bulan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya, seperti :

a. Melaksanakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B-[illegible]/DJPRL.1/KP.[illegible]/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Pengisian Penerapan SPIP melalui Model Tiga Lini (Three Lines Model).

b. Menghadiri kegiatan Pembahasan Hasil Evaluasi MR Lingkup Ditjen PKRL TA 2024 pada 24 Juli 2024 secara daring sesuai Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.[illegible]/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024.

c. Melakukan tindak lanjut atas Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.1/TU.[illegible]/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 hal Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko (MR) dan Pengendalian Penyusunan Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2025.

d. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan IV Tahun 2023 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/TU.140/I/2024 15 Januari 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan IV Tahun 2023.

e. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan I Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/TU.140/IV/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024.

f. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan II Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/TU.140/VIII/2024 8 Agustus 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Bulan Triwulan II Tahun 2024.

g. Pelaporan Penyelenggaraan Triwulan III Tahun 2024 telah disampaikan melalui Surat kepada BPSPL Pontianak Nomor B.[illegible]/BPSPL.2/TU.140/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) 2287.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan Rincian Output (EBD.962) Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU 15 Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp [illegible] atau 99,[illegible]% dari Pagu Revisi anggaran Rp [illegible].

Tabel 3.1.15-13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU 15 pada Tahun 2024

No	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Ket.
1.	[2287.EBD.962.[illegible]] Layanan Penyelenggaraan Pengendalian Internal (SPIP/MR)	Rp 6.348.000	Rp 6.[illegible] (99,[illegible]%)	-
	TOTAL	Rp 6.348.000	Rp 6.[illegible] (99,[illegible]%)	-

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU 15 dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara pembatasan laman dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan SPIP. Hal ini didukung melalui kesediaan [illegible] pada Tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor [illegible]/2024 tanggal 4 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim SPIP BPSPL Pontianak Tahun 2024.

Rencana Aksi Tahun 2024

Rencana aksi tahun 2024 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2024, penyusunan dan penyampaian laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2023, serta melakukan penyusunan manajemen risiko untuk kegiatan tahun 2024.

IKM 20: Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, mendapatkan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu komponen keaktifan akun dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal Collaboration Office KKP pada laman [illegible]. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi target minimal mendapatkan 2 poin dan poin maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin apabila keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Komponen konten yang dinilai adalah:

a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/sosialisasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan poin 0,5.
b. Konten berupa infografis dengan poin 1.
c. Konten video/pembelajaran [illegible] bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 2.

Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan metode:

- Keaktifan akun dihitung setiap hari dalam satu triwulan.
- Penghitungan keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 2 poin dan maksimal 4 poin apabila keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran akan dihitung dari keaktifan [illegible].
- Sekretariat PRL menyediakan data hasil rekapan [illegible] yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKM-MP masing-masing unit kerja eselon II.

Tabel 2.1.19-16. Capaian IKM 20 BPSPL Pontianak

SP-7.2	2.7.12. Sasaran Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPSPL Pontianak"								
IKM-20	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Pontianak yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi 2022	Tahun 2023					[illegible]		[illegible]	
	Target TW IV	Realisasi TW IV	[illegible]	Target [illegible]	Capaian thd Target (%)	Target 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
18,33	80	100,00	0	80	125	80	125	85	[illegible]

Sumber data: BPSPL Pontianak [illegible], Desember 2023.

1. Capaian IKM Tahun 2024

Pada Triwulan IV Tahun 2024 IKM tersebut telah tercapai melebihi target tahunan yaitu 135% dengan persentase capaian 133.33% dari target nilai 94. Sehingga target pada Matriks Kinerja & Pendanaan maupun Renstra DJPKRL telah tercapai melebihi yang ditargetkan. Capaian IKM 33 didasarkan dari Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024.

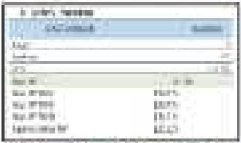

Gambar 3.1.13-13. Nilai KM BPSPL Pontianak

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Kinerja pada tahun 2024 yaitu 133.33 sedangkan capaian tahun 2023 yaitu 133. Artinya tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian manajemen pengetahuan terstandar pada tahun 2023 dan 2024. Jika dibandingkan dengan tren 5 tahun sebelumnya, capaian kinerja pada tahun 2024 cenderung meningkat. Hal ini karena terdapat perubahan metode perhitungan dan teknologi informasi yang diterapkan.

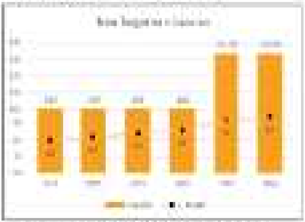

Gambar 3.1.13-14. Tren Pengetahuan Capaian Tahunan

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKM tersebut tertuang dalam Rencana Strategis PKRL 2020 – 2024, yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 93 pada tahun 2024. Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 133% (133.33 dari 93). Sehingga capaian indikator telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian BPSPL Pontianak pada Tahun 2024 telah berkontribusi dalam pencapaian target renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 90 pada tahun 2024. Capaian Tahun 2024 tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 100% (100,00 dari 90), sehingga capaian tersebut telah melebihi target rencana jangka menengah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Progres capaian sampai dengan Tahun 2024 sebesar 100,00% (100% dari target triwulanan IV). Hal ini didukung dari pemanfaatan aplikasi Portal KKP yang digunakan oleh pegawai dan pejabat eselon lingkup BPSPL Pontianak dan memenuhi target keaktifan minimal 3 pola.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya 100% karena kegiatan pendukung dilakukan secara daring. Selain itu, kategori kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pegawai dan pejabat BPSPL Pontianak pada grup whatsapp membantu mempercepat pengisian kegiatan pada aplikasi portal.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu Keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office KKP. Dokumentasi kegiatan rapat/seminar yang diunggah telah dilengkapi dengan foto dan notulensi serta surat ST/ND.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang menunjang IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan menjunjung kesetaraan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen pengetahuan terstandar. Hal ini didukung melalui kesetaraan gender pada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSPL Pontianak sesuai dengan penetapan Surat Kepala BPSPL Pontianak Nomor B.234/BPSPL.2/KP.440/1/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Surat Tugas Tim PPID BPSPL Pontianak Tahun 2024.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Pada keaktifan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja), Kepala Subbagian Umum dan Kepala Balai dalam konten portal Collaboration Office KKP pada tahun 2025.

IKM 21. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian IKU ini dihitung dari Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada periode Tahun 2024 Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TL/HTAS) oleh BPSPL Pontianak. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sistem maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Sekditjen PRL. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan maka perhitungan capaian sama dengan target. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi, maka perhitungan capaian 100 sehingga capaiannya menjadi sebesar 100%.

Tabel 3.3.53-18. Capaian IKM 21 BPSPL Pontianak

SK-16	SK-16 : Sasaran Kegiatan 16 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKM 21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				[illegible]		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	[illegible]	Target PK 2024	Capaian terhadap target (%)	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	0	80	125	80	125	80	125

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PRL, Desember 2024

1. Capaian IKM Tahun 2024

Pada Tahun 2024, IKM 21 Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan telah tercapai 100% (125%) dari target 80. Capaian IKM 17 disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor B.84/DJPRL.1/KP.470/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Ditjen PRL" Tahun 2024 (Sumber: Setditjen PRL, 9 Januari 2025). Hal ini juga didukung dengan capaian 100% pada aplikasi SIGAK KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian tahun 2024 adalah 100% (125% dari target triwulan IV 80%), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100% (100% dari target triwulanan IV). Sehingga Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini disebabkan meskipun terdapat peningkatan target secara bertahap.

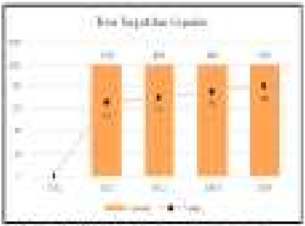

Gambar 3.1.13-14. Tren Target dan Capaian IKU

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 90% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target jangka menengah tersebut adalah 111% (100% dari 90%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target jangka menengah periode tahunan untuk tahun 2024. Capaian sebesar 100% tindak lanjut hasil rekomendasi telah berkontribusi terhadap target jangka menengah.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 90% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 terhadap target Renstra tersebut adalah 111% (100% dari 90%). Sehingga capaian tersebut telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Pontianak. Dalam tindak lanjutnya BPSPL Pontianak memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya. Salah satu faktor penghambat yaitu update tindak lanjut LHA lain yang belum dapat diakomodir aplikasi SIDAK. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Inspektorat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDAK untuk melakukan monitoring data temuan beserta status tindak lanjutnya.

7. Kegiatan Pendukung

Untuk periode tahun 2024 (Januari – Desember) terdapat beberapa rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya:

a. Audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 20 – 23 Januari 2024. Laporan hasil audit kinerja disampaikan melalui Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor [illegible] tanggal 8 Maret 2024 hal Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak.
b. Evaluasi PNBP TA 2023 – 2024 pada tanggal 24 – 28 Juni 2024. Hasil evaluasi PNBP disampaikan melalui Nota Dinas Nomor [illegible] tanggal 2 Juli hal Laporan Hasil Evaluasi PNBP TA 2023 – 2024 pada BPSPL Pontianak.

Adapun rekomendasi yang diberikan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan diunggah pada SIGAK sebagai berikut:

a. Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor [illegible] tanggal 27 Maret 2024.
b. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. [illegible] Tanggal 3 Juli 2024 hal Laporan Penggunaan PNBP Semester I Tahun 2024.
c. Penyampaian Surat Kepala BPSPL Pontianak No. [illegible] Tanggal 11 Juli 2024 hal Konfirmasi Hasil Rekomendasi Kepada [illegible].
d. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. [illegible] Tanggal 11 Juli 2024 hal Instruksi Kpd Ketua Tim Kerja dan Bendahara Penerimaan.
e. Penyampaian Memorandum Kepala BPSPL Pontianak No. [illegible] Tanggal 11 Juli 2024.
f. Penyampaian BAP Stok No. [illegible] Tanggal 3 Juli 2024.

Selanjutnya BPSPL Pontianak menghadiri Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Ditjen PKRL Periode Tahun 2024 secara daring pada 24 September 2024 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor [illegible] tanggal 20 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKU ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal dengan memanfaatkan aplikasi SIGAK.

IKM 22. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) BPSPL Pontianak yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Pontianak Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Tabel 3.1.19-18. Capaian IKU [illegible] BPSPL Pontianak

[illegible]	3.1.19. Sasaran Kegiatan 19 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
[illegible]	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Pontianak (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pembinaan		Rencana Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target Kinerja	% Realisasi thd Target IKU	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	0	100	100	100	100	≤1	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan [illegible], Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2024 ini tidak terdapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan di lingkup BPSPL Pontianak, sehingga capaian untuk IKU ini sebesar 100. Capaian IKU ini dibuktikan melalui memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut nomor 150/DJPRL.1/HP.520.1/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pemutakhiran Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas KKP tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian tahun 2024 adalah 100% (100% dari target tahunan 100), sedangkan capaian tahun 2023 adalah 100% (100% dari target tahunan 100). Sehingga Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun 2023. Berdasarkan perbandingan target dan capaian selama lima tahun terakhir, capaian kinerja IKU ini stagnan dan tidak terdapat peningkatan target secara gradasi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Renstra Ditjen PRL 2020 – 2024 yaitu batas toleransi maksimal jumlah temuan pengawasan eksternal lebih kecil atau sama dengan 1 pada tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena terdapat perbedaan satuan dan metode perhitungan. Namun capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap capaian Renstra Ditjen PRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pembinaan

Target Jangka Menengah IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pembinaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 yaitu persentase penyelesaian temuan LHP BPK sebesar 100% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah berkontribusi terhadap pencapaian target Matriks Kinerja & Pembinaan sebesar 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut dapat didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi BPK terhadap BPSPL Pontianak. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan oleh BPK pada tahun 2024 terhadap BPSPL Pontianak menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan capaian IKU ini.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pencapaian kinerja. Tidak terdapat temuan BPK pada tahun 2024 ini, sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 tidak ada audit dari BPK sehingga tidak terdapat kegiatan pendukung pada Tahun 2024.

8. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat anggaran khusus untuk pencapaian kegiatan yang mendukung IKM ini, sehingga tidak terdapat realisasi anggaran pada Tahun 2024.

9. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Tidak terdapat temuan BPK pada tahun 2024 ini sehingga tidak dapat dilakukan analisis atas pengarusutamaan gender.

10. Rencana Aksi Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara spesifik akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKM ini di Tahun 2025.

IKM 23. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

a. Desk Evaluation, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program kegiatan.
b. Field Evaluation dan Physical Check (pemeriksaan fisik dan uji petik/sampling), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria keberhasilan bantuan pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan [illegible]. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah ditetapkan pada paparan hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup DJPKRL. Nilai Efektivitas tersebut terbagi kedalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.75-17. Kategori Nilai Efektivitas Bantuan Pemerintah

No	Predikat	Nilai	Keterangan
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan
2.	A	> 80 - 90	Baik Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu ditambah pemanfaatan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
3.	C	> 40 - 60	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan promosi/bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	D	> 20 - 40	**Kurang Efektif** Kegiatan promosi/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan barang/jasa tidak berkelanjutan
5.	E	0 - 20	**Tidak Efektif** Kegiatan promosi/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan promosi/bantuan pemerintah tersebut

Capaian IKK 33 tercapai penuh.

Tabel 3.4.13-18. Capaian IKK 33 BPSPL Pontianak

SK-13	S.K.13. [illegible] BPSPL Pontianak							
IKK-33	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Kinerja Periode Renstra & Rencana Jangka			
					Menengah		Panjang	
	Realisasi 2024	Peningkatan	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2029	% Realisasi thd Target 2029
100	100	0	80	125	100	100	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PRL, Desember 2024

1. Capaian IKK Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada IKK ini dilakukan secara tahunan. Capaian kegiatan ini disampaikan melalui surat Sekretaris Ditjen PRL nomor B.[illegible]/DJPRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2024. BPSPL Pontianak mendapatkan nilai efektivitas sebesar 100 terhadap bantuan yang diberikan pada tahun 2024.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian kinerja IKK ini pada tahun 2023 ini yaitu sebesar 100 sehingga perbandingan capaian tahun 2024 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Berdasarkan hasil capaian dalam 5 tahun terakhir, capaian IKK ini juga tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan melainkan tercapai penuh sesuai target secara konsisten.

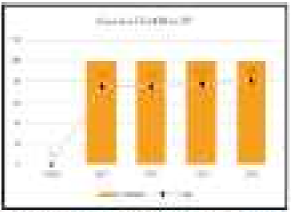

Gambar 3.1.13.45. Tren Capaian Kinerja Efektivitas Bantuan Pemerintah

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Renstra IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak terdapat target tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target Renstra IKU tersebut tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan 2020 – 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Pontianak sebesar 73,0% pada tahun 2024. Capaian tahun 2024 telah melebihi target Matriks Kinerja & Pendanaan sebesar lebih dari 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor Pendukung utamanya adalah pemanfaatan bantuan telah memenuhi aspek yang dievaluasi meliputi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan secara daring.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU, yaitu :

a. Monitoring Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring Bantuan Pemerintah dilakukan dalam rangka pemantauan terhadap kondisi dan manfaat barang bantuan yang telah diberikan oleh BPSPL Pontianak sesuai dengan Kepdirjen PKRL nomor 71 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring yaitu observasi langsung, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Pada tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melakukan monitoring bantuan konservasi kepada seluruh penerima bantuan tahun 2023 yaitu sebanyak 3 (tiga) kelompok.

- Pokmaswas Pesut Lestari

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pesut Lestari dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024 berlokasi di Desa Pela, Kecamatan Kotabangun, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan kelompok ini yaitu Perlindungan kawasan konservasi perairan nasional dan pelestarian jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi (Pesut) serta ikan ekonomis di wilayah Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu. Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp59.840.[illegible] berupa teropong, papan informasi dan peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan kelompok. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi fisik barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat sehingga kegiatan pemantauan aktivitas penangkapan ikan lebih optimal.

Gambar 3.1.13-16. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Pesut Lestari

- Pokmaswas Penyu Baru

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Penyu Baru dilakukan pada tanggal 13 September 2024 berlokasi di Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan kelompok ini yaitu Perlindungan kawasan konservasi dan pelestarian jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi (Penyu). Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp[illegible] berupa sarana pendukung kegiatan seperti GPS, Handy Talkie, Radio Rig dan lainnya. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi fisik barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat dalam pemantauan penyu.

Gambar 3.1.13-17. Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK Penyu Baru

- Perkumpulan Pokdi Mangrove Surya Perdana Mandiri

Kegiatan monitoring bantuan pemerintah untuk Perkumpulan Pokdi Mangrove Surya Perdana Mandiri dilakukan pada tanggal 11 September 2024 berlokasi di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan kelompok ini yaitu perlindungan kawasan dan pelestarian mangrove. Pada tahun 2023, kelompok ini mendapatkan bantuan KOMPAK senilai Rp69.112.760 berupa perahu fiber dan peralatan elektronik untuk penunjang kegiatan. Berdasarkan hasil monitoring, kondisi fisik barang bantuan dalam keadaan baik dan telah memberikan manfaat dalam menunjang kegiatan pemantauan pesisir.

Gambar 3.1.13-18. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kelompok Surya Pandawa Mangrove

b. Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Kegiatan evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP bekerja sama dengan Sekretariat Ditjen PRL pada tanggal 9 – 13 Oktober 2024 secara daring melalui zoom meeting. Berdasarkan hasil penilaian pada kertas kerja evaluasi efektivitas bantuan pemerintah TA 2023, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai efektivitas sebesar 100 terhadap bantuan yang disalurkan pada tahun 2023 sesuai surat Sekretaris Ditjen PRL nomor: B.[illegible]/DJPRL.1/TU.140/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi. Realisasi anggaran per klasifikasi Output tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.13-18. Realisasi Anggaran IKU 13 Tahun 2024

No	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa
1.	2362.QEH.001.052 Monitoring dan Evaluasi KOMPAK	Rp17.216.000	Rp17.216.000 (100%)	-
TOTAL		Rp17.216.000	Rp17.216.000 (100%)	-

Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp17.216.000 atau 100% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp17.216.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa.

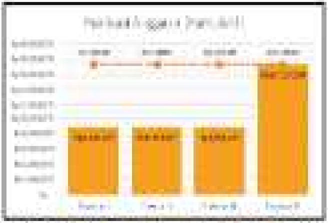

Gambar 3.1.13-19. Realisasi Anggaran Kumulatif pada Tahun 2024

h. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan lingkup BPSPL Pontianak tahun 2024.

i. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 yaitu melakukan koordinasi dengan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terkait target kinerja dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

IKM 24. Nilai Pengawasan Internal Keuangan Lingkup BPSPL Pontianak (NKI)

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2024, dan belum ada IKU ini pada tahun-tahun sebelumnya. Penambahan IKU ini dilakukan untuk mengakomodir penilaian kualitas (NQKu) KKP yang dilaksanakan setiap tahun.

Audit Keuangan Internal adalah Audit Keuangan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Keuangan Internal atas pengelolaan aset dinamis di lingkungan penerima aset. Pengawasan keuangan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan keuangan internal in-depth. Pengawasan sistem keuangan internal: Pengawasan Pengelolaan Aset, KKP dan Pengawasan penyelamatan aset pada internal.

Nilai pengawasan keuangan internal BPSPL Pontianak akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan membentuk Tim PKNI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan keuangan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Tabel 3.1.13-98 Kategori Nilai Pengawasan Keuangan

Kategori		Interval Nilai
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 3.1.13-01. Capaian Kinerja IKU BPSPL Pontianak

SK 1.3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Pontianak							
IKU 13	Nilai Pengawasan Internal Keuangan Lingkup BPSPL Pontianak (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Matriks Kinerja & Pendanaan		Renstra Jangka Menengah	
	Realisasi 2024	Peringkat	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	91,25	-	85	107	85	107	-	-

Sumber data: BPSPL Pontianak dan Ditjen PKRL, Desember 2024

1. Capaian IKU Tahun 2024

Periode pengukuran dan pelaporan capaian pada untuk IKU ini dilakukan secara tahunan. Capaian Kinerja IKU ini disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa nomor 2467/SJ.4/TU.220/X/2024 tanggal 14 Oktober perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PKRL. Berdasarkan Verifikasi Data Pengawasan Internal Keuangan Internal Lingkup UPT, BPSPL Pontianak mendapatkan nilai pengawasan internal keuangan sebesar 91,25 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 3.1.13-02. Tabel nilai pengawasan keuangan

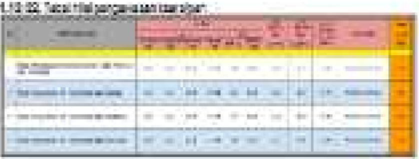

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Pada tahun 2023 tidak terdapat Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Internal Keuangan sehingga capaian tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah IKU tersebut belum tertuang dalam Renstra Ditjen PKRL 2020 – 2024. Capaian tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PKRL karena tidak terdapat IKU tersebut dalam Renstra Ditjen PKRL.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Matriks Kinerja & Pendanaan

Target IKU tersebut telah tertuang dalam Matriks Kinerja & Pendanaan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 sebesar 85. Capaian tahun 2024 telah mencapai target sebesar lebih dari 100% jika dibandingkan dengan Matriks Kinerja & Pendanaan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung penyebab keberhasilan capaian kinerja IKU ini yaitu adanya Analis Anggaran Ahli Pertama yang mutasi ke BPSPL Pontianak sehingga tugas keuangan dapat dilakukan oleh SDM yang berkompeten.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pencapaian kinerja. Upaya efisiensi yang dilakukan pada pencapaian IKU ini yaitu mengikuti kegiatan pelatihan pengawasan informasi keuangan secara daring sehingga dapat mengurangi pemanfaatan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja.

7. Kegiatan Pendukung

Pada Tahun 2024 ini telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pendukung tercapainya IKU yaitu:

a. Menetapkan Tindak lanjut atas Surat Sekretaris DJPRL Nomor B.1476/DJPRL.1/HK.410/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Tim Pengelola Persuratan dan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL.

b. Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Rencana Kerja Kearsipan secara daring pada 4 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.2930/SJ.5/TU.220/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

c. Mengikuti Bimbingan Teknis Alih Media Arsip secara daring pada 13 Juni 2024 berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan PBJ Nomor B.3119/SJ.5/TU.220/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Undangan Bimbingan Teknis Alih Media Arsip.

d. Menghadiri Undangan kegiatan Pemusnahan Arsip BPN Pemangkat pada tanggal 14 Desember 2024 sesuai surat undangan nomor B.3364/PRN.PMK/TU.360/XII/2024.

e. Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai Undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4364/SJ.5/TU.220/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

f. Koordinasi Kearsipan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 s.d. 8 Juni 2024 di Bandung sesuai Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.2940/SJ.5/TU.220/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

g. Menghadiri Verifikasi Data Pengawasan Internal Kearsipan Internal Lingkup UPT Selaku Unit Pengolah Tahap II tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus sesuai Undangan Sekretaris Jenderal KKP nomor B.4180/SJ.5/TU.220/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

h. Menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Lingkup Ditjen PKRL pada 12 s.d. 14 September 2024 di Yogyakarta berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen PKRL Nomor B.5050/DJPRL.1/TU.320/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

8. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2267.EBA.962.001] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan. Realisasi anggaran dari kegiatan pendukung IKU ini pada Tahun 2024 (akumulatif dari Januari 2024) yaitu Rp 23.039.960 atau 67,33% dari Pagu Revisi anggaran sebesar Rp 34.048.000. Realisasi anggaran digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Tabel 3.1.05.33 Realisasi Anggaran IKU 34 Tahun 2024

No.	Komponen/Subkomponen	Pagu Revisi	Realisasi	Blokir
1.	[2267.EBA.962.001] Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	Rp 34.048.000	Rp 34.011.182 (99,89%)	-
	TOTAL	Rp 34.048.000	Rp 34.011.182 (99,89%)	-

h. Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat dari program pembangunan. Upaya pengarusutamaan gender pada IKU ini masih belum terlihat dikarenakan partisipasi pegawai dalam kegiatan ini masih didominasi oleh perempuan seluruhnya.

i. Rencana Aksi Tahun 2025

Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan akan dilaksanakan untuk menunjang tercapainya IKU ini di Triwulan IV.

3.1.2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Lain

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Pontianak dengan unit kerja Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) lain di Lingkup Ditjen PRL dapat dilihat pada Tabel 3.1.12-1 di bawah ini. Berdasarkan perbandingan, unit kerja lain memiliki indikator kinerja yang sama sebanyak **22 indikator dari 24 indikator kinerja di BPSPL Pontianak**. Hal ini dikarenakan BPSPL Pontianak mendapatkan tugas tambahan untuk mengelola Kawasan Konservasi Perairan yang umumnya tidak dikelola oleh unit kerja PSPL lainnya. Perbandingan capaian kinerja tiap indikator kinerja yang sama dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai PNBP (Rp000)

Berdasarkan perbandingan, nilai PNBP yang diterima oleh BPSPL Pontianak pada tahun 2024 berada di urutan ketiga di bawah BPSPL Denpasar dan LPSPL Serang. Capaian nilai PNBP BPSPL Pontianak lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPSPL Padang, BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Namun jika dibandingkan persentase capaian dengan target penerimaan PNBP, BPSPL Pontianak berada di urutan ke lima dari enam unit kerja. Hal ini dikarenakan target penerimaan PNBP BPSPL Pontianak pada tahun 2024 merupakan yang paling tinggi diantara unit kerja lainnya.

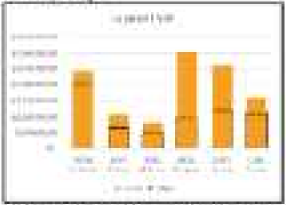

Gambar 3.1.12-1. Perbandingan Penerimaan PNBP dengan Unit Kerja Lain

2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Orang)

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk tenaga kerja yang terlibat dalam Gernas BCL sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 320 orang dari 320 orang. Hanya BPSPL Padang yang memiliki capaian melebihi target, yaitu 333 orang dari 320 orang. Sementara itu, BPSPL Denpasar memiliki target dan capaian yang lebih kecil jika dibandingkan dengan unit lain yaitu 160 orang dari 160 orang.

3. **Dokumen Operasionalisasi Pemantauan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Disusun (Dokumen)**

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk Dokumen Operasionalisasi Pemantauan Pemanfaatan Ruang Laut sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 2 dokumen dari 8 dokumen.

4. **Daerah Yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Pencadangan Kawasan Konservasi (Daerah)**

Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak untuk Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Pencadangan Kawasan Konservasi menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

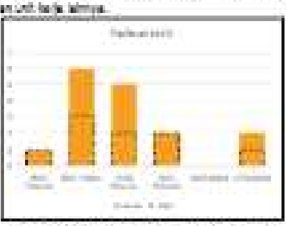

Gambar 3.1.12-2. Perbandingan Capaian Fasilitasi KKPD dengan Unit Kerja Lain

5. **Kerjasama Konservasi yang Dilakukan (Kesepakatan)**

Berdasarkan perbandingan, capaian BPSPL Pontianak bersama dengan BPSPL Denpasar untuk Kerjasama Konservasi yang Dilakukan menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal ini dikarenakan pada sasaran kinerja kerjasama/kemitraan hanya BPSPL Pontianak yang memiliki dua indikator kinerja yaitu kerja sama dan kemitraan sehingga capaian realisasinya hanya bisa dihitung sebanyak 100%.

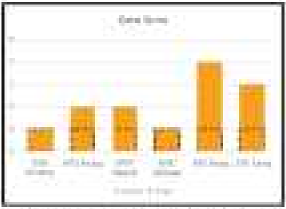

Gambar 3.1.13-3. Perbandingan Capaian Kesepakatan Kerja Sama dengan Unit Kerja Lain

6. **Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kelompok)**

Berdasarkan perbandingan, secara umum target capaian BPSPL Pontianak untuk bantuan KOMPAK sama dengan unit kerja lainnya. Terdapat perubahan target dan capaian menjadi 2 kelompok bila dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Hal itu dikarenakan terdapat perubahan anggaran yang signifikan untuk bantuan KOMPAK di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

7. **Masyarakat di Kawasan Konservasi yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif (Masyarakat)**

Berdasarkan perbandingan capaian BPSPL Pontianak untuk jumlah orang pada Fasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif berada di urutan ketiga di bawah BPSPL Makassar dan LPSPL Sorong. Jumlah orang yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian alternatif di BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar, BPSPL Padang dan LPSPL Serang. Namun jika dibandingkan dengan target, persen capaian BPSPL Pontianak termasuk rendah jika dibandingkan dengan persen capaian unit kerja lain.

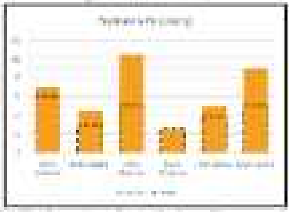

Gambar 3.1. 134 Perbandingan Capaian [illegible] dengan Unit Kerja Lain

8. **Jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan dan pelestarian (Jenis)**

Berdasarkan perbandingan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak untuk jumlah jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan dan pelestarian berada di atas nilai tengah (median). Jumlah jenis ikan terancam punah yang dilakukan perlindungan dan pelestarian di BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar, LPSPL Serang dan LPSPL Sorong. Namun jika dibandingkan dengan target, persen capaian BPSPL Pontianak termasuk rendah jika dibandingkan dengan persen capaian unit kerja lain.

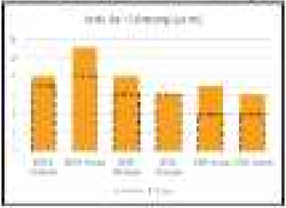

Gambar 3.1. 135 Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain

9. **Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)**

Berdasarkan perbandingan unit kerja lain, capaian BPSPL Pontianak untuk jumlah jenis ikan terancam punah yang dimanfaatkan sama dengan BPSPL Padang dan lebih tinggi dari BPSPL Denpasar, LPSPL Serang dan LPSPL Sorong. Hanya BPSPL Makassar yang memiliki capaian lebih tinggi dari BPSPL Pontianak. Jika dibandingkan dengan target, persentase capaian BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi diantara unit kerja lainnya.

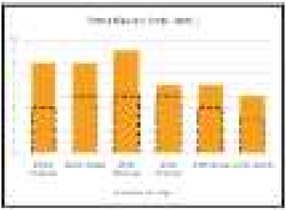

Gambar 2.1.13-6 Perbandingan Capaian Jenis Ikan Dilindungi dengan Unit Kerja Lain

10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi (Dokumen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum capaian BPSPL Pontianak untuk identifikasi pemanfaatan air laut selain energi sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 1 dokumen dari 1 dokumen.

11. Kawasan PJK yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)

Berdasarkan perbandingan, secara umum persen capaian BPSPL Pontianak kawasan yang dilakukan penanggulangan pencemaran dengan unit kerja lainnya, yaitu 100%. Hanya LPSPL Serang yang memiliki target dan capaian yang lebih sedikit yaitu 2 kawasan dari 2 kawasan.

12. Nilai IKPA

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian Nilai IKPA BPSPL Pontianak merupakan yang paling rendah. Nilai IKPA paling tinggi dicapai oleh BPSPL Makassar dengan nilai 99,73.

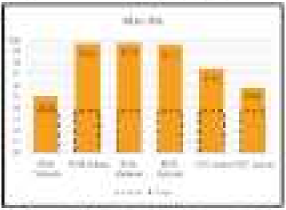

Gambar 2.1.13-7. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain

13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Pontianak lebih tinggi dibandingkan dengan BPSPL Denpasar. Namun, jika dibandingkan dengan unit kerja lain, nilai kinerja perencanaan anggaran BPSPL Pontianak masih lebih rendah.

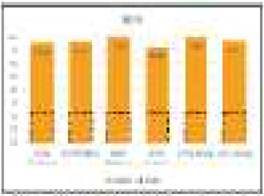

Gambar 3.1.19-8. Perbandingan Capaian Nilai IKPA dengan Unit Kerja Lain

14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai evaluasi pembangunan Zona Integritas BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat penilaian WBK sehingga nilai yang digunakan oleh BPSPL Pontianak merupakan nilai pada tahun 2023.

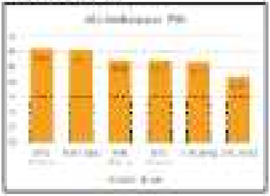

Gambar 3.1.19-9. Perbandingan Capaian WBK dengan Unit Kerja Lain

15. Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai indeks profesionalitas ASN BPSPL Pontianak merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan unit kerja lain.

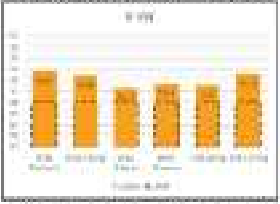

Gambar 3.1.19-10. Perbandingan Capaian IP ASN dengan Unit Kerja Lain

16. Nilai PM SAKIP (Nilai)

Berdasarkan perbandingan dengan unit kerja lain, capaian nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPSPL Sorong, namun capaian nilai PM SAKIP BPSPL Pontianak lebih rendah jika dibandingkan unit kerja lainnya.

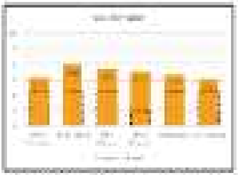

Gambar 3.1.13-11. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Unit Kerja Lain

17. Laporan BMN yang disusun (Laporan)

Berdasarkan perbandingan, secara umum posisi capaian laporan BMN yang disusun oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu 100% atau 4 laporan dari target 4 laporan.

18. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum posisi capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diselesaikan oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 100% dari target 80%.

19. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum posisi capaian persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang diselesaikan oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 100% dari target 100%.

20. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum posisi capaian efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah oleh BPSPL Pontianak sama dengan unit kerja lainnya, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 100% dari target 80%. Hanya BPSPL Denpasar yang mendapatkan nilai 97,50% dari target 80%.

21. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar (Persen)

Berdasarkan perbandingan, secara umum posisi capaian laporan SPIP yang disusun oleh BPSPL, yaitu lebih dari 100% atau sebesar 106,38% dari target 94%.

22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan (Nilai)

Berdasarkan perbandingan, secara umum posisi capaian Nilai Pengawasan Internal Kearsipan yang didapatkan oleh BPSPL Pontianak sedikit lebih besar dari BPSPL Makassar. Namun nilai pengawasan internal kearsipan BPSPL Pontianak lebih rendah jika dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

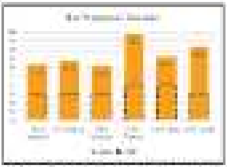

Gambar 3.1.13-12. Perbandingan Nilai Pengawasan Kearsipan

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2024 BPSPL Pontianak didukung dari anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 nomor SP DIPA [illegible] dengan Pagu Revisi anggaran sebesar Rp[illegible]. Realisasi anggaran diperoleh dari aplikasi online OMSPAN di [illegible]. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran BPSPL Pontianak sebesar [illegible] atau [illegible]% dari Pagu Revisi anggaran. Adapun Pagu Revisi dan realisasi per kegiatan sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel [illegible] Realisasi Anggaran BPSPL Pontianak Tahun 2024

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	[illegible]
1.	([illegible]) Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	RM dan PNP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
2.	([illegible]) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	RM	100.000.000	[illegible]	[illegible]	-
3.	([illegible]) Perencanaan Ruang Laut	RM dan PNP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
4.	([illegible]) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	RM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
5.	([illegible]) Pengelolaan dan Pemanfaatan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	RM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
	Total		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Sumber: [illegible]

Selain itu, alokasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja. Di BPSPL Pontianak terdapat 3 (tiga) jenis belanja yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik yang bertugas didalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja barang dikelompokkan antara:
3. Belanja Barang Operasional, merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

4. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
5. Belanja Modal pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau penambahan nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Untuk realisasi anggaran [illegible] Pontianak per jenis belanja tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.[illegible] Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Periode	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	
				Rp	%
1.	51) Pegawai	Tahun 2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	52) Barang	Tahun 2024	11.420.281.000	11.345.847.116	99,34
3.	53) Modal	Tahun 2024	946.130.000	944.230.022	99,80

*) Pagu Anggaran

Sumber Data : aplikasi Monsakti (aplikasi sinergi) per tanggal 31 Desember 2024

Dari total Pagu Revisi anggaran berdasarkan jenis belanja (Bulan Desember Tahun 2024) alokasi untuk belanja pegawai sebesar [illegible], untuk belanja barang sebesar 99,34% dan untuk belanja modal 99,80%. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp[illegible] ([illegible]). Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji (pokok) dan tunjangan (Suami/Istri PNS, anak PNS, struktural PNS, fungsional PNS, PPh PNS, Beras PNS dan tunjangan umum PNS) yang melekat pada pembayaran gaji PNS, uang makan dan tunjangan kinerja PNS. Selain itu, realisasi belanja pegawai juga digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK.
2. Realisasi anggaran belanja barang pada Tahun 2024 sebesar Rp11.345.847.116 atau 99,34% dari Pagu Revisi anggaran Rp11.420.281.000. Rincian realisasi anggaran belanja barang sebagai berikut:
   a. Belanja barang operasional digunakan untuk untuk belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, barang persediaan barang konsumsi, langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air), jasa [illegible] pengamanan, jasa lainnya, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin.
   b. Belanja barang non operasional digunakan untuk belanja bahan, sewa, jasa profesi, jasa lainnya, perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota.
3. Realisasi anggaran belanja modal sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp944.230.022 (99,80%). Belanja modal digunakan untuk pengadaan sebagai berikut:
   - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Banjarmasin sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK [illegible] tanggal 9 Februari 2024.
   - Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 2 Unit [illegible] selama 1 Tahun sesuai [illegible] tanggal 9 Februari 2024.

- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Pelayanan sebanyak 1 Unit Fortuner selama 1 Tahun sesuai SPK.23/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Pangkalan Bun sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.29/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Putussibau sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan SPK.30/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja Tarakan sebanyak 1 Unit selama 12 Bulan sesuai SPK.31/BPSPL.2/PPK/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sewa Kantor Wilayah Kerja [illegible] sebanyak 1 Unit selama 10 Bulan sesuai SPK.35/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Drone DJI sebanyak 1 Unit tanggal SP.37/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Tablet sebanyak 1 Unit dan Alat Konsultasi Pelayanan sebanyak 1 Unit sesuai SP.39/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
- Belanja Keperluan Perkantoran - Pengadaan Seragam Pegawai BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 55 Stel sesuai SPK.40/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Kapal dan Longboat sebanyak 2 Paket sesuai SPK.42/BPSPL.2/PPK/SPK/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 3 Paket sesuai SP.43/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Selam, Alat Lainnya sebanyak 1 Paket sesuai SP.44/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 1 April 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Televisi sebanyak 1 Unit dan Dispenser sebanyak 1 Unit sesuai SP.45/BPSPL.2/PPK/SPK/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
- Belanja Jasa Lainnya - Pengadaan Jasa Peningkatan Kompetensi SDM BPSPL Pontianak TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK.46/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda - Pengadaan Barang Bantuan KONTAK TA 2024 Kelompok Pasadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1 Paket sesuai SP.47/BPSPL.2/PPK/SPK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Alat Pengukur Arus Laut sebanyak 1 Unit sesuai SP.48/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarpras Pendukung Konservasi berupa Laptop sebanyak 1 Unit sesuai SP.49/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan - Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket sesuai SPK 30/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan [illegible] Pendukung Konservasi berupa [illegible] sebanyak 1 Paket sesuai SP 31/BPSPL.2/PPK/SPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP 35/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Pelayanan sebanyak 1 Paket sesuai SP Nomor [illegible]/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Pelayanan TA 2024 sebanyak 1 Paket SPK Nomor 34/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
- Pengadaan Barang Bantuan [illegible] TA 2024 Kelompok [illegible] di Kalimantan Barat sebanyak 1 Paket SPK Nomor 35/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya berupa Konsultansi Penyusunan Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket SPK Nomor 36/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wisata Mahakam Hulu berupa Kebutuhan Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 37/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Wisata Mahakam Hulu berupa Kebutuhan Meja dan Kursi Meeting sebanyak 1 Paket SP Nomor 37/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024.
- Pengadaan Pramubakti Kebersihan dan Keamanan Selama 4 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 39A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Pramubakti Keamanan dan Kebersihan Selama 4 Bulan sebanyak 1 Tenaga Kerja sebanyak 1 Paket SP Nomor 40A/BPSPL.2/PPK/SPK/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Air Conditioner sebanyak 1 Unit SP Nomor 40/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
- Adendum Kontrak Pengadaan Tenaga Alih Daya (Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Keamanan) sebanyak 4 Paket SP Nomor 38/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- Pengadaan Sarpras Kantor BPSPL Pontianak berupa Display [illegible] sebanyak 1 Unit SP Nomor 41/BPSPL.2/PPK/SPK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Pengadaan Rumah Rakit Monitoring Pesut di Kawasan Mahakam Wilayah Hulu TA 2024 sebanyak 1 Paket SP Nomor 43/BPSPL.2/PPK/SPK/IX/2024 tanggal 6 September 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebanyak 1 Paket sesuai SP 45/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.
- Belanja Jasa Lainnya berupa Pengadaan Jasa Lainnya Pembuatan Video Profil Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu sebanyak 1 Paket sesuai SPK 47/BPSPL.2/PPK/SPK/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja tahun 2024, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada program untuk mencapai sasaran kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 terdiri atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM) dengan total 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Aplikasi Kinerjaku, nilai kinerja Organisasi (NKO) [illegible] atau nilai Capaian Kinerja BPSPL Pontianak pada tahun 2024 yaitu 107,98% (kategori Hijau = Baik). Realisasi anggaran BPSPL Pontianak Pada tahun 2024 sebesar Rp16.739.996.813 atau [illegible] dari Pagu Revisi anggaran sebesar [illegible]. Secara umum, seluruh kegiatan telah berjalan dengan baik dan target kinerja telah tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian unit kerja lain, masih banyak capaian kinerja BPSPL Pontianak yang lebih rendah. Capaian kinerja diatas dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi untuk peningkatan kinerja BPSPL Pontianak. Untuk itu, ke depannya perlu melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi dan upaya pemecahan masalah pada saat pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga perlu mengidentifikasi Sasaran Kinerja pada tahun 2025 yang dapat meningkatkan Nilai Kinerja Organisasi secara signifikan sehingga kegiatan pendukung untuk Sasaran Kinerja tersebut dapat diprioritaskan.

4.2. Rekomendasi

Upaya ke depan dalam optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melakukan pemantauan evaluasi kinerja tahun 2024 dan perencanaan kinerja tahun 2025 secara intensif sebagai upaya untuk optimalisasi capaian kinerja pada tahun 2025.
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2025.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari rekomendasi laporan kinerja periode sebelumnya sebagai upaya optimalisasi capaian target kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.19-1. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja pada tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan IV Tahun 2023			
1	Melakukan koordinasi secara aktif terkait dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut	Telah melakukan koordinasi secara aktif ke Direktorat Perencanaan Ruang Laut pada tanggal berikut ini: 1. 15 – 20 Januari 2024, Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. 4 – 7 Februari 2024, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KKPRL UPT Lingkup Ditjen PKRL	[illegible]
Triwulan I Tahun 2024			
2	Mengupayakan untuk proses revisi anggaran dalam rangka [illegible]	Telah mengupayakan untuk buka blokir anggaran pada RBA 005. Anggaran sudah	[illegible]

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
	anggaran yang diblokir	dibuka pada bulan Juni dan berubah menjadi [illegible]	
3	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat	[illegible]
Triwulan II Tahun 2024			
4	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring.	[illegible]
5	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terkait dengan dasar hukum untuk melakukan Pelayanan Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan Darat	Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) terkait dengan dasar hukum Pelayanan Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan Umum Daratan oleh KKP	[illegible]
Triwulan III Tahun 2024			
6	Mendorong peningkatan kualifikasi IP ASN melalui pengumpulan sertifikat keikutsertaan pegawai pada diklat, bimbingan teknis, dan seminar.	Peningkatan kualifikasi IP ASN melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat, bimbingan teknis dan seminar juga telah dilakukan melalui pengumpulan sertifikat pegawai pada diklat, bimbingan teknis dan seminar secara luring atau daring.	[illegible]
7	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Dicadangkan yang	Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Direktorat Jenderal PKRL terkait dengan Perubahan Perjanjian Kinerja pada satuan IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Dicadangkan yang [illegible]	[illegible]

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
	efektifitas mutu pengamanan serta mengacu ke [illegible]		

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di Lingkungan KKP. Informasi dan data dukung pengukuran kinerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran pada dokumen Laporan Kinerja ini dapat diakses pada laman [illegible]. Lampiran ini mencakup:

1. Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja BPSPL Pontianak tahun 2024.
2. Penghargaan yang diterima oleh BPSPL Pontianak Pada tahun 2024:
   - Satker Dengan Realisasi Anggaran Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Pusat dan UPT pada tanggal 16 Januari 2024.
   - Unit Kerja Berpredikat "Informatif" dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik lingkup KKP Tahun 2024 tanggal 08 Juli 2024.
   - 10 Terbaik Kategori Kementerian dengan predikat Pelayanan Prima pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tanggal 3 Oktober 2024
   - Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan tanggal 5 Desember 2024
   - Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik III di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024.
3. Matriks Kinerja Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020 – 2024
4. Memorandum Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Sekretariat Ditjen PKRL nomor [illegible] tanggal 11 Januari 2024 perihal Capaian IKPA Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024.
5. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor [illegible] tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
6. Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor [illegible] tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Dukungan Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilakukan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
7. Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor [illegible] tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
8. Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor [illegible] tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
9. Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor [illegible] dan nomor [illegible] tentang

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pesisir Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Perjanjian Kerja sama antara BPSPL Pontianak dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor B.1485/BPSPL.2/KS.220/1/2025 dan Nomor 6062/UN17.8/KS/2024 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pesisir Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 26/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang disalurkan di wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kelompok).
12. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Masyarakat di Kawasan Konservasi Nasional pada Wilayah Kerja BPSPL Pontianak yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang).
13. Memorandum Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian BPSPL Pontianak nomor 2/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 Penyampaian Capaian Kinerja IKU Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Penetapan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Terdampar di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
14. Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 3/BPSPL.2/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Laporan Kegiatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan.
15. Memorandum Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak nomor 24/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Difasilitasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
16. Memorandum Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat BPSPL Pontianak nomor 25/BPSPL.2/TU.140/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyampaian Capaian Kinerja IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak.
17. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 184/SJ.2/TU.410/I/2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024.
18. Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024.
19. Memorandum Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Sekretariat Ditjen PKRL nomor 26 /DJPKRL.1/TU.210/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Program Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

20. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.105/DJPKRL.1/TU.140/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Semester II Tahun 2024 lingkup Direktorat Jenderal PKRL.

21. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.5721/DJPKRL.1/PC.610/10/2024 tanggal 27 September 2024 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada BPSPL Pontianak.

22. Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan IV tahun 2023 dan Laporan SPIP BPSPL Pontianak Triwulan I - III tahun 2024.

23. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.104/DJPKRL.1/TU.140.1/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Persentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengendalian yang Terstandar Triwulan IV Tahun 2024.

24. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.84/DJPKRL.1/HP.140/1/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan IV Tahun 2024.

25. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.156/DJPKRL.1/HP.220.1/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK KKP tahun 2023.

26. Surat Direktur Jenderal PKRL nomor B.6920/DJPKRL.1/TU.140.3/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Tahun 2023.

27. Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal KKP nomor 2487/SJ.6/TU.220/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Kepatuhan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PKRL tahun 2024.

RENCANA KERJA

BSPJI PONTIANAK
TAHUN 2025

2024

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	
		[illegible]	[illegible]				[illegible]	

[illegible]

Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

2020 - 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak 2020-2024 dapat diselesaikan. Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjabarkan rencana strategis Renstra Ditjen PRL tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021).

Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan, serta mampu mengantisipasi segala perubahan dalam upaya menuju menjadi instansi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan: (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam upaya mewujudkan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil lestari, produktif, berkelanjutan dan menyejahterakan bagi masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak, 28 Desember 2021

Kepala BPSPL Pontianak

Ir. R. Andry I. Sukmoputro, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .... - 26 -

DAFTAR ISI .... - 26 -

BAB I PENDAHULUAN .... - 1 -

- A. Latar Belakang .... - 1 -
- B. Kondisi Umum .... - 3 -
- C. Potensi dan Permasalahan .... - 9 -
- D. Lingkungan Strategis .... - 23 -

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS .... - 26 -

- A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan .... - 26 -
- B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan .... - 26 -
- C. Tujuan .... - 27 -
- D. Sasaran .... - 28 -

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .... - 31 -

- A. Arah Kebijakan dan Strategi Unit PPI .... - 31 -
- B. Kerangka Kelembagaan .... - 33 -

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .... - 37 -

- A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024 .... - 37 -
- B. Kerangka Pendanaan .... - 42 -

BAB V PENUTUP .... - 43 -

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SPSPL PONTIANAK TAHUN 2020-2024 .... - 37 -

[illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 - 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperbaiki dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024.

[illegible]

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 - 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Periode lima tahun waktu 2015-2019, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Pontianak, Ditjen PRL baik secara kelembagaan maupun kegiatan di lapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam pesisir laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang ada, BPSPL Pontianak berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut di seluruh wilayah kerjanya yaitu pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah se-Kalimantan.

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSPL Pontianak telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSPL Pontianak terkait mendukung upaya perencanaan ruang laut yaitu pendampingan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur untuk melakukan penetapan dokumen RZWP3K menjadi Peraturan Daerah [illegible].

[illegible]

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2039
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041

Adanya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu :

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari PP ini disimplifikasi 2 menjadi 1 Permen KP
2. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari PP ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP
3. PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, amanah dari PP ini disimplifikasi dari 40 menjadi 11 Permen KP

PP Nomor 21 Tahun 2021 mengamanatkan penyusunan dokumen rencana zonasi di Dit. Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain :

- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) untuk kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW P).

Hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi TA. 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya UU Cipta Kerja mengubah proses bisnis termasuk dengan adanya PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana Dit. PRL memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan bersama

[illegible]

pesisir. UPT DJPRL mengidentifikasi serta memetakan pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir.

Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kalimantan, BPSPL Pontianak telah melaksanakan survei biofisik dan sosial ekonomi dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) pada tahun 2019. Selain itu juga melakukan pengumpulan data dukung RPZ di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

BPSPL Pontianak juga melakukan beberapa kegiatan dalam rangka konservasi jenis diantaranya :

1. Pelayanan perizinan rekomendasi Hiu dan Pari di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Rekomendasi yang telah terbit dalam kurun tahun 2015 - 2019 yaitu sebanyak 1000 surat.
2. Penyediaan data sebaran Penyu yang dimulai sejak tahun 2015 di Pantai Paloh, Kalimantan Barat ; Pulau Denawan, Pulau Pemalikan, dan Pulau Sambar Gelap (Kalimantan Selatan) ; dan Pulau Birah-Birahan (Kalimantan Timur). Dalam kurun tahun 2015 – 2019 jenis penyu yang ditemukan Penyu Hijau, Penyu Sisik, dan Penyu Lekang.
3. Penyediaan data sebaran Hiu dan Pari yang dimulai sejak tahun 2015 - 2019 di lokasi pelabuhan pendaratan ikan Kalimantan Barat, PPI Sungai Kakap dan PPN Pemangkat dan tahun 2016 – 2019 di Muara Kintap, Kalimantan Selatan dan di PPI Manggar, Kalimantan Timur.
4. Monitoring Kima yang dikembalikan di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2015.
5. Monitoring Kima dan pembuatan Taman Kima di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2016. Taman

[illegible]

Kima Lemukutan selanjutnya diresmikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bersama Bupati Bengkayang.

6. Monitoring Dugong yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Lokasi kemunculannya terdapat di perairan Kecamatan Kumai (Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, dan Desa Teluk Bogam).
7. Monitoring Hiu Paus yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Talisayan, Kalimantan Timur. Hiu paus ditemukan sebanyak 17 ekor yang terdiri dari 16 ekor jantan dan 1 ekor betina.
8. Monitoring terumbu karang yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
9. Monitoring Pesut yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kalimantan Barat. Lokasi kemunculan terdapat di Perairan Tanjung, Desa Pulau Simpang Lidah, Teluk Batang, dan Muara Bamban.
10. Survei potensi ekosistem pesisir dan laut dalam rangka penyediaan data series di KKPD Pulau Derawan, Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2019.
11. Pengembangbiakan dan restocking Taman Kima di Pulau Lemukutan dan Pulau Derawan pada tahun 2019.
12. Respon cepat penanganan Biota Laut terdampar di wilayah kerja BPSPL Pontianak dalam kurun tahun 2015 – 2019.

BPSPL Pontianak berperan dalam pemberian bantuan pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) melalui pelaksanaan proses identifikasi calon kelompok penerima bantuan KOMPAK. Pada tahun 2018, ada 6 kelompok masyarakat yang menerima bantuan pemerintah yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahun 2019, ada 4 kelompok yang menerima bantuan pemerintah yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Dalam mendukung upaya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatan diantaranya :

1. Identifikasi kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kalimantan Barat pada tahun 2016. Penyerahan bibit sebanyak 50.000 bibit di Kabupaten Singkawang, 130.000 bibit di Kabupaten Bengkayang, dan 80.000 di Kabupaten Mempawah untuk dilakukan penanaman mangrove.
2. Jejaring kemitraan dengan melakukan Pengawasan Ekowisata melalui Kemah Pemuda Pesisir pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada tahun 2018 dilakukan Kemah Pemuda Pesisir 3 Negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam);
3. Pemberian Bantuan Sarana Pengolah Sampah Plastik untuk KUBDes Berkah di Desa Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dan KSM Bilang Alam Hijau di Desa Sui Bilang, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tahun 2017
4. Pendampingan dalam rangka pemberian bantuan berupa satu paket peralatan selam di Pulau Maratua, Kab. Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2018
5. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan Pantai Saloloang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2018 serta di Pantai Kura-Kura, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2019
6. Validasi kelompok penerima dalam rangka penetapan kebutuhan bantuan sarana dan prasarana di Pulau Marabatuan, Kalimantan Selatan pada tahun 2019

BPSPL Pontianak juga menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas prestasi memperoleh predikat sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018.

[illegible]

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan memiliki sumber daya alam yang penting bagi pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya alam hayati dan non hayati pesisir terdiri dari terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 543.430,35 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 1.700,21 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 338 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata, sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah serta sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ekosistem mangrove hampir terdapat di semua pesisir Kalimantan Barat. Luas ekosistem mangrove di Kalimantan Barat yaitu 177.479,51 Ha yang tersebar di 7 kabupaten/ kota pesisir. Keanekaragaman jenis mangrove di Kalimantan Barat sangat unik dan langka, di Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa spesies pohon langka seperti *Bruguiera hainesii* (Bakau Mata Buaya) yang hanya terdapat di Singapura, Malaysia, Papua Nugini dan Indonesia, serta *Kandelia candel* (Lenggadai Betina) yang merupakan endemik Kalimantan dan Sumatera. Mangrove di Kalimantan Barat juga merupakan habitat dari Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Pesut (*Orcaella brevirostris*). Dari total luasan mangrove di

[illegible]

Kalbar; Kubu Raya merupakan kawasan terluas, yakni 129.604,125 hektar. Di hutan mangrove Kubu Raya juga terdapat 33 jenis mangrove sejati dari 40 jenis mangrove sejati yang ada di Indonesia. Kondisi mangrove di Kalimantan Barat secara keseluruhan tergolong dalam kondisi "sedang" hingga "baik" dengan spesies dominan adalah *Avicennia* spp. dan *Rhizopora* spp.

Ekosistem terumbu karang di Kalimantan Barat banyak terdapat di perairan Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Ketapang. Luas ekosistem Terumbu Karang secara keseluruhan yaitu 71.634, 47 Ha. Dari hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019 di Kabupaten Bengkayang, kondisi terumbu karang tergolong dalam kondisi "sedang" hingga "baik" dengan tutupan karang hidup berkisar antara 34% - 57%.

Ekosistem lamun di Kalimantan Barat hanya terdapat di perairan Kabupaten Bengkayang dan Ketapang dengan luas keseluruhan yaitu 29.245,30 Ha. Dari hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019 di Kabupaten Bengkayang ekosistem lamun hanya berupa spot - spot kecil yang tersebar di Pulau Lemukutan dan pulau Penata Besar dengan kategori tutupan jarang dan tergolong dalam kondisi "miskin", dengan spesies yang ditemukan yaitu *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*.

Sedangkan di perairan Kabupaten Ketapang, berdasarkan hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019, lamun disana berupa hamparan yang bisa disebut dengan padang lamun. Padang lamun di perairan Pulau Gelam Ketapang memiliki tutupan tergolong kategori padat dengan rata-rata tutupan lamun sebesar 61,49 %, mengacu pada KepMen LH No. 200 Tahun 2004 status kondisi padang lamun termasuk ke dalam kurang kaya. Terdapat 7 spesies lamun yang ditemukan di perairan Ketapang yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium* dan *Thalassodendron Ciliatum*.

[illegible]

Di Kalimantan Barat terdapat habitat peneluran penyu sepanjang 63 km di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Penyu yang sering bertelur adalah jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Selain di Sambas, habitat peneluran penyu juga terdapat di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, Pulau Randayan, Pulau Selaus dan Pulau Baru Kabupaten Bengkayang serta Pantai [illegible] Kabupaten Kubu Raya. Dari beberapa kejadian mamalia laut terdampar, diduga perairan laut Kalimantan Barat juga merupakan habitat dari beberapa jenis mamalia laut yaitu Pesut Pesisir (*Orcaella brevirostris*), Lumba-Lumba Bungkuk Indo Pasifik (*Sousa chinensis*), Lumba-Lumba Tanpa Sirip (*Neophocaena phocaenoides*) dan Duyung (*Dugong dugon*). Duyung banyak dijumpai di perairan laut Kabupaten Ketapang dikarenakan banyak ditemukan lamun sebagai makanan utamanya. WPP 711 juga merupakan daerah penangkapan hiu dan pari yang sebagian besar hasil tangkapannya didaratkan di TPI Sungai Kakap Kubu Raya. Dari hasil pendataan oleh enumerator hiu dan pari yang didaratkan di TPI Sungai Kakap didominasi jenis hiu yaitu *Sphyrna lewini* dan *S. mokarran* serta dari genus *Carcharhinus*, sedangkan jenis pari yang didaratkan yaitu *Rhynchobatus australiae*, *R. springeri*, *Glaucostegus typus* dan *Rhina ancylostoma*. Di perairan tawar Kalimantan Barat juga terdapat spesies endemik yaitu Arwana (*Scleropages formosus*) terutama di danau-danau yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, selain itu juga terdapat Ikan Belida (*Chitala borneensis*).

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah dengan topografi datar terutama pada wilayah bagian selatan provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah pesisir Kalimantan Tengah dengan ketinggian sekitar 23,92% terletak pada ketinggian 0-7 m dpl. Untuk wilayah pesisir, sebagian besar wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah, yang berkisar antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian wilayah Kecamatan Arut Selatan dan Kumai yang memiliki ketinggian yang bisa mencapai 500 m terutama

[illegible]

di tingkat atas. Kondisi wilayah pesisir dengan ketinggian < 5 m, menyebabkan terjadinya secara periodik terutama pada saat pasang tertinggi dan curah hujan cukup tinggi, seperti Kecamatan Jelai, sebagian Pantai Lunci, Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, sebagian Katingan Kuala dan Kapuas Kuala. Kemiringan lahan wilayah pesisir Kalimantan Tengah dominan pada wilayah datar dan landai (0-8 %) yang mencapai 96,10% dari luas total wilayah pesisir, tersebar di di seluruh Kecamatan Pesisir, kecuali di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai yang memiliki kemiringan bergelombang sampai berbukit (8 – 25%). Hasil analisis batimetri dari Peta Bathimetri AL (2010) menunjukkan di perairan < 4 mil laut kedalaman maksimum hanya 8 m. Kedalaman landai terutama terdapat di wilayah Kecamatan Jelai yakni Tanjung Selaka (tengah), dimana kontur kedalaman 3 mencapai jarak 7,2 km. Sedangkan di wilayah Pantai Lunci kontur kedalaman 3 m mencapai jarak 3,7 – 4,5 km. Untuk perairan sungai terutama alur dan muara Sungai Jelai maksimal 5 m. Perairan pesisir Kalimantan Tengah merupakan daerah yang relatif cukup terbuka dari serangan gelombang laut dalam karena berhadapan dengan Laut Jawa. Akibat hantaman gelombang tersebut, menyebabkan wilayah ini sebagian besar pantainya telah terabrasi dari Pantai Jelai sampai Pantai Kapuas, sedangkan di muara sungai relatif terjadi sedimentasi.

Ekosistem mangrove wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Luas hutan mangrove di provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan kurang lebih 316.540 Ha yang tersebar di sepanjang pantainya. Mangrove di Kalimantan Tengah dapat ditemukan hampir pada semua kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, mulai dari Kabupaten Sukamara di wilayah paling barat sampai ke Kabupaten Kapuas di wilayah paling timur. Mangrove di Kabupaten Sukamara tersebar mulai pantai di sebelah barat Sungai Jelai sampai Desa Sungai Pasir. Sungai Jelai sebelah timur juga

[illegible]

didominasi oleh hutan mangrove sampai Desa Sungai Pandaung. Secara umum jenis mangrove yang dominan adalah jenis Api-api, Bakau, Rijah, Cemara Laut dan Rambai. Sedangkan di Kabupaten Kabupaten Kapuas, jenis mangrove yang dominan adalah Api-api, Bakau, Pidada dan Rijah. Perbedaan komposisi tegakan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Tengah ini diperkirakan karena adanya pengaruh salinitas tanah (Supriharyono, 2000).

Terumbu karang di provinsi Kalimantan Tengah secara umumnya tersebar dengan tipe gosong/taka (patch reef) yang terpusat di Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan peta Pushidros TNI AL ditemukan di sekitar Gosong Senggora dan Gosong Sepagar yang terletak di sisi barat pantai Tanjung Puting atau arah tenggara dari Tanjung Penghujan. Terumbu karang di Gosong Senggora tumbuh pada kedalaman 1-8 m, dimana jarak puncak terumbu memiliki kisaran 1,11-3,27 m sampai dasar perairan pada saat surut, di saat pasang 3,11-3,88 m. Karakteristik karang di perairan Gosong Senggora merupakan karang yang umum dijumpai di perairan keruh. Beberapa genera karang yang dijumpai pada rataan terumbu seperti Acropora bercabang, Goniopora, Favia, Favites, Gardineroseris, Galaxea, Fungia, Turbinaria, Montipora, Pectinia, Diploastrea dan Porites. Sementara pada lereng terumbu umumnya dijumpai Galaxea, Turbinaria, Porites, Favia, Pectinia dan Tubastrea. Semua jenis karang termasuk kedalam filum Cnidaria (Coelenterata). Ancaman terhadap terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah banjir akibat kegiatan deforestasi dan illegal logging sehingga limpahan air tawar bersama sedimen ikut memasuki kawasan terumbu, selain itu penggunaan alat tangkap seperti bom yang mengaduk dasar perairan dapat menyebabkan peningkatan kekeruhan.

Padang lamun di pesisir Kalimantan Tengah sejauh ini hanya ditemukan di pesisir perairan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang tersebar di sepanjang pantai dan Laut. Lamun yang tumbuh di sepanjang pantai pada kedalaman berkisar antara 0,5 meter hingga 3 meter, sedangkan yang tumbuh di perairan laut pada kedalaman yang berkisar antara 1 meter hingga 6 meter. Sebaran di sepanjang pantai meliputi Desa Kuala, Tanjung Kelumpang, Tanjung Pandan, Sungai Bakau, Teluk Sugara dan Tanjung Penghujan dengan memperlihatkan lamun yang tumbuh berpola dominasi tunggal jenis Enhalus acoroides. Sedangkan di perairan laut meliputi Gosong Pinggir, Gosong Sepagar, Gosong Serundum dan Gosong Senggora dengan jenis lamun cenderung berpola campuran pada Thalassia hemprichii, Halophila minor, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides berkembang bersama-sama dengan saling membagi ruang tumbuh. Jenis lamun yang teridentifikasi ini termasuk dalam famili Hydrocharitaceae, kecuali jenis Cymodocea serrulata yang termasuk famili Potamogetonaceae.

Biota dilindungi di Kalimantan Tengah antara lain dugong, tuntong, penyu, pesut, lumba-lumba, dugong, hiu dan pari. Dugong diketahui bermigrasi ke daerah gosong senggora-sepagar, gosong beras basah di kawasan perairan Kumai untuk mencari makan di kawasan padang lamun yang terdapat di perairan tersebut. Rute migrasi penyu di Kalimantan Tengah dapat ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah seperti pantai Sungai Cabang Barat, Pantai Sungai Perlu dan Pantai Tanjung Kelumpang.

Secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan laut (Kabupaten pesisir) terdiri 31 kecamatan pesisir dari lima kabupaten pesisir sesuai dengan rincian pada Kabupaten Barito Kuala dan Banjar (masing-masing memiliki 1 kecamatan pesisir), Tanah Laut dan Tanah Bumbu (masing-masing memiliki 6 kecamatan pesisir) dan Kabupaten Kotabaru (memiliki 17 kecamatan pesisir). Total luas kecamatan pesisir tersebut sebesar 10.723,98 km2 atau 42,49% dari total luas kabupaten pesisir atau 28,78% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

[illegible]

Tipe ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan, didominasi oleh Rhizophora sp., Sonneratia sp dan Excoecaria spp., Xylocarpus sp., Bruguiera sp. Berdasarkan pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan muara sungai Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan 28 jenis mangrove.

Wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki ekosistem terumbu karang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Hamparan terumbu karang di wilayah Tanah Bumbu tersebar mulai dari Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui, dengan jarak antara 200 – 9.500 meter (0,11 – 5,13 mil laut) dari garis pantai dan kedalaman berkisar 0 – 16 meter. Angka 0 menunjukkan bahwa karang berada sangat dekat dengan permukaan air laut, bahkan timbul pada saat surut terendah. berdasarkan hasil analisa citra Alos tahun rekam 2010/2011 dan Citra Landsat (2016) diidentifikasi lebih banyak titik gugusan karang di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebanyak 77 titik dengan total luas gugusan 390,42 Ha. Sedangkan di Kabupaten Kotabaru didapatkan luas gugusan terumbu karang seluas 10042,236 ha. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa genera karang dari ordo Scleractinia (true coral), Non Scleractinia dan ordo Alcyonacea (soft coral).

Ekosistem padang lamun (sea grass) di wilayah pesisir Kalimantan Selatan hanya dijumpai pada perairan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Pada umumnya, tumbuhan ini berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kedalaman yang dangkal 1 – 6 m, pada substrat pasir halus, pasir lumpur ataupun bercampur dengan sedikit pecahan karang. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Alos (2011) dan Landsat (2016) diperoleh luas lamun/alga sebesar 1.375,23 ha di perairan Kabupaten Kotabaru dan luas lamun/alga sebesar 30,37 ha. Di wilayah Kabupaten Kotabaru antara lain di perairan Kecamatan Pulau Laut Barat, perairan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan perairan Kecamatan Pulau Sebuku dan perairan Sungai Dua Laut Kabupaten

[illegible]

Tanah Bumbu. Jenis lamun yang ditemukan di Kecamatan Pulau Laut Barat adalah jenis *Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides* dan *C. rotundata* yang tersebar di beberapa lokasi seperti Teluk Tamiang dan Tanjung Kunyit. Di perairan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, jenis lamun yang ditemukan seperti *Halodule pinifolia, Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*, sedangkan jenis *Halophila beccarii* hanya di pantai Timur Pulau Kerayaan. Jenis lamun ini umumnya tersebar di Pulau Kerayaan, Pulau Tepian Mataja, Pulau Kerasian, Pulau Kerumputan dan Pulau Tepian Induk. Untuk jenis *Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata* dan *Enhalus acoroides* umumnya ditemukan di perairan Kecamatan Pulau Sebuku, yakni di Pulau Samber Gelap. Sedangkan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu hanya antara lain perairan Desa Sungai Dua Laut (Tanjung Kandang Haur, Tanjung Penyulingan, Tanjung Kalumang dan Pulau Burung. Di perairan kabupaten ini cukup sedikit potensi padang lamunnya. Berdasarkan hasil lapangan jenis lamun yang ada di perairan Desa Sungai Dua laut adalah *Cymodocea serrulata, Halodule pinifolia, Halophila ovalis* dan *Thalassia hemprichii* sedangkan di perairan Pulau Burung hanya ditemukan 1 jenis yakni *Enhalus acoroides*.

Beberapa biota endemik dan dilindungi di Kalimantan Selatan yaitu penyu dengan wilayah migrasi di Kabupaten Kotabaru seperti wilayah selatan yakni pulau-pulau di Kecamatan Pulau Sembilan, Teluk Tamiang, pulau-pulau kecil di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Kepulauan, wilayah timur yakni Kepulauan Samber Gelap, Gusung Mangkok dan Pulau Laut Selatan, wilayah utara yakni Tanjung Pemancingan. Ikan paus (cetacea) jenis *Pseudorca crassidens* atau yang biasa dikenal dengan *False killer whale*, di perairan sebelah barat Pulau Tepian Mataja atau sebelah selatan Pulau Kerumputan. Duyung/ Dugong (*Dugong dugon*). Pesut di wilayah perairan Kotabaru, Tanah Bumbu, [illegible] dan [illegible]

Morfologi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di Provinsi Kalimantan timur didominasi berupa daratan bergelombang (33,98%)

[illegible]

dengan kelas kelerengan (0% - 8%) (65,15%) yang tersebar di sepanjang pesisir kecuali di wilayah Biduk – Biduk Berau yang merupakan wilayah karst, daerah perbukitan dengan kemiringan lereng (8% - 15%) sebanyak 22,01% tersebar di wilayah yang jauh dari pesisir terutama di wilayah barat Paser, Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Timur dan Barat Berau. Kondisi DAS juga sangat mempengaruhi wilayah pesisir, setidaknya terdapat 80 DAS yang berada di wilayah ini. Dari peta Pushidrosal (2013) dan pengolahan, menunjukkan bahwa kedalaman perairannya sangat beragam mulai dari 1 – 4800 m. Hal ini sebagai pembatas antar lempeng Kalimantan dan lempeng Sulawesi yang terpisah oleh Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Alur ALKI II dari pengaruh oseanografi dan letak geografis diperlihatkan bahwa kondisi pesisir dan pulau – pulau kecil di Kalimantan timur berada di pesisir timur Kalimantan, sehingga mempengaruhi pembangkitan gelombang.

Hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di wilayah pesisir, pulau – pulau kecil dan muara sungai Provinsi Kalimantan Timur ditemukan 27 spesies mangrove di kawasan ekosistem. Mangrove tersebut diantaranya terdapat 14 jenis mangrove sejati yaitu *Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Avicennia rumphiana*, *Avicennia officinalis*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera cylindrica*, *Bruguiera sexangula*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris*, *Nypa fruticans*, *Xylocarpus granatum*, *Excoecaria agallocha*. Berdasarkan hasil analisis, luas hutan mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Timur sebesar 144.432,33 Ha, sebagaimana diketahui mangrove hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan kondisi luas dan kerapatan yang berbeda dominan di sekitar teluk dan muara sungai.

Wilayah perairan Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki ekosistem terumbu karang dengan keanekaragaman yang sangat tinggi (setidaknya terdapat 460 jenis) yang tersebar mulai dari pesisir utara (laut Sulawesi) sampai selatan (selat Makassar) dengan tipe-

[illegible]

karang cincin (atoll), karang tepi (fringing), karang penghalang (barrier) dan karang datar atau gosong dari kedalaman 1 m sampai dengan 40 m. Tingginya keanekaragaman biodiversitas berada di wilayah ini merupakan sub sistem ekologi dalam suatu kawasan region Coral triangle. Kawasan Coral Triangle dikenal sebagai pusat karang dunia yang merupakan wilayah terumbu karang terluas di dunia dengan luas 75.000 km2, memiliki sekitar 500 spesies terumbu karang, 3000 spesies ikan, sumber penghidupan 120 juta penduduk dengan perputaran ekonomi US$ 2,3 Milyar/Tahun. Selain itu, kawasan ini berfungsi sebagai sumber plasma nutfah dan sumber bahan farmasi di masa depan, wilayah migrasi ikan dan mamalia, kawasan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mencegah perubahan iklim dunia. Berdasarkan hasil analisis citra Landsat (2017 – 2018) total luas gugusan terumbu karang di wilayah perairan Kalimantan Timur: 118.963,418 ha.

Ekosistem padang lamun (sea grass) di wilayah pesisir Kalimantan Timur banyak tumbuh dan berkembang pada daerah – daerah yang relatif tenang dan terdapat gugusan karang didepan sebagai penghalang. Pada umumnya, tumbuhan ini berada di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dengan kedalaman dangkal 1 – 4 m, pada substrat pasir halus, pasir lumpur ataupun bercampur dengan sedikit pecahan karang. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat (2017/2018) dan Data LIPI dan BIG diperoleh luas lamun/alga sebesar 13.119,004 ha. Secara spasial sebaran ini ditampilkan pada beberapa lokasi, namun demikian untuk membedakan lamun atau alga yang terdapat di lokasi tersebut dilakukan survey lapangan (ground check) sehingga didapatkan wilayah persen lamun dan/atau asosiasi dengan alga. Oleh karena itu sifatnya parsial, maka dilakukan beberapa pengamatan yang dilakukan secara perwakilan daerah lamun yang dianggap cukup banyak. Data hasil perhitungan tutupan lamun dikaitkan untuk menentukan status padang lamun menurut Kepmen LH Nomor 200 tahun 2004, dapat dikategorikan status baik kondisi kaya/sehat dengan penutupan ≥ 30 – 59,9% dan status

[illegible]

masuk kondisi rusak dengan penutupan < 29.9%. Jenis yang ditemukan di wilayah ini seperti *Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Halodule uninervis, Halodule pinifolia, Halophila ovalis, Syringodium isoetifolium*. Wilayah perairan Berau dan Bontang merupakan daerah yang memiliki padang lamun, karena wilayah ini relatif terlindung dengan substrat dasar pasir dan pasir lumpur.

Salah satu biota endemik dan dilindungi di Kalimantan Timur adalah Pesut Mahakam (*Orcaella brevirostris*) yang sering juga disebut dengan lumba – lumba air tawar. Pesut Mahakam sendiri merupakan kerabat dari pesut sungai di Asia Tenggara dan satu - satunya habitat mamalia langka ini ada di Sungai Mahakam dan Delta Berau Kalimantan Timur. Pada tahun 2016 diestimasi kurang lebih terdapat 71 ekor berdasarkan metode foto identifikasi sirip punggung. Beberapa biota laut yang termasuk dilindungi seperti Hiu Paus di Talisayan, Napoleon dan beberapa jenis spesies Hiu dan Pari yang masuk dalam kategori Appendiks II CITES yang sering ditemukan diantaranya *Mobula japanica, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus, Sphyrna lewini* dan *Alopias pelagicus* masih sering didapatkan di wilayah perairan Kalimantan Timur. Saat ini juga terdapat penurunan tempat peneluran penyu yang semula berjumlah 8 pulau menjadi 6 pulau yang terdapat di pesisir Kabupaten Berau, adapun jenis penyu yang ditemukan adalah penyu Hijau.

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Kalimantan. Secara geografis, Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur di bagian utara dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di bagian Selatan. Sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jumlah pulau

[illegible]

pulau kecil di Provinsi Kaltara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 km². Pulau-pulau terbesar yaitu Pulau Tarakan (249 km²), Pulau Sebatik (245 km²), Pulau Nunukan (232 km²), dan Pulau Tanah Merah (252 km²). Pulau-Pulau Kecil Terluar terletak di Pulau Sebatik dan Pulau Karang Unarang yang juga merupakan alokasi ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Adapun panjang garis pantai provinsi Kaltara adalah sepanjang 3.955 km, 908 km (23%) merupakan garis pantai daratan dan 3.047 km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

Morfologi pantai di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh wilayah estuari yang ditumbuhi mangrove dengan persentase sekitar 89,24% dari panjang total garis pantai Provinsi Kalimantan Utara. Delta merupakan jenis morfologi pantai yang paling sedikit dijumpai di Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah estuaria didominasi banyak ditemukan di Kabupaten Bulungan dengan luas 3951,18 Ha yang ditumbuhi mangrove. Selain itu Kabupaten Bulungan juga merupakan daerah terluas untuk pantai jenis pantai berpasir, pantai berbatu, dan pantai tebing.

Kawasan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil analisis spasial, luasannya mencapai 180.981,2 ha dengan kondisi substrat dominan lumpur berpasir. Dari luas tersebut, kawasan mangrove terbesar berada di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan dengan luas sekitar 77.171,3 Ha atau sekitar 42,64% dari luas total. Sementara itu, wilayah dengan luas hutan mangrove paling sedikit adalah Kota Tarakan hanya sekitar 587,9 Ha atau sekitar 0,32% dari luas total. Jenis vegetasi mangrove yang ditemukan di Provinsi Kaltara diantaranya *Bruguiera gymnorhiza*, *Bruguiera cylindrica*, *Nypa fruticans*, *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora apiculata*, *Avicennia officinalis*, *Acanthus ilicifolius*.

Alokasi ruang untuk zona hutan Mangrove yang masuk dalam wilayah perencanaan RZWP3K Provinsi Kalimantan Utara hanya terdiri dari satu zona (KPU-HM-PT) dan satu subzona (KPU-HM-PT-01) dengan luasan sekitar 49,26 ha. Kawasan Hutan Mangrove ini terdapat di perairan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Dari segi jenis

[illegible]

pemanfaatannya. Hutan mangrove yang masuk dalam alokasi ruang ini termasuk dalam kategori hutan mangrove Pemanfaatan terbatas.

Provinsi Kaltara juga memiliki sebaran ekosistem lamun yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan luas mencapai sekitar 10,8 Ha. Jenis lamun yang ditemui yaitu jenis *Halophila ovalis*, *Halodule uninervis*, dan *Thalassia hemprichii* dengan kerapatan yang bervariasi dari 40 – 70 %.

Terumbu karang di Provinsi Kalimantan Utara ditemukan beberapa jenis kategori terumbu karang, yakni kategori dead coral alga, pecahan karang, dan karang hidup. Luas terumbu karang terluas ditemukan di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yakni seluas 68,49 Ha. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan tropis dengan tingkat produktivitas dan keanekaragaman biota yang sangat tinggi. Salah satu biotanya yang dilindungi ditemukan yaitu Ikan Napoleon dengan status Appendiks II CITES.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu jalur migrasi biota yaitu penyu. Penyu yang paling banyak ditemukan yaitu Penyu Hijau. Salah satu Jalur migrasi penyu hijau di Provinsi Kalimantan Utara adalah berawal dari Filipina melewati Pulau Sebatik, Bunyu, Tanah Kuning. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat bertelur penyu. Selain penyu, Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu jalur migrasi lumba-lumba. Salah satu lokasi migrasi (ruaya) lumba-lumba adalah di perairan Sungai Sesayap Tana Tidung mulai dari perairan Tarakan sampai ke Sesayap dan alur migrasi lumba-lumba lainnya, dari Bunyu ke Sesayap. Penyu dan lumba-lumba merupakan biota laut yang dilindungi penuh dengan status Appendiks I CITES.

Wilayah Kalimantan juga mempunyai potensi dalam pengelolaan bioteknologi seperti pemanfaatan sumber daya ular laut yang ditemui di perairan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Barat.

[illegible]

2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1) Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang memiliki daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang/zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
2) Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
3) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
4) Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya keberadaan biota laut yang dilindungi. Hal ini perlu dilakukan kegiatan

[illegible]

sosialisasi perizinan yang diterbitkan dan/atau rencana dalam penyediaan KKPRL kepada masyarakat.

5) Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana akan diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

6) Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.

7) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan keterbatasan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

8) Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil telah dapat dipetakan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisa SWOT berikut ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kekuatan	Kelemahan
• Mempunyai potensi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) yang berlimpah • Mempunyai keanekaragaman hayati ikan dan jenis ikan prioritas pengelolaan SKP yang tinggi • Dukungan mitra seperti Pemerintah Daerah, NGO, dan kelompok masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	• Kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan • Pendataan dan Penelitian belum komprehensif serta konsisten untuk menggali potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. • Sarana prasarana pelayanan di wilayah kerja yang masih belum lengkap
Peluang	**Ancaman**
• Adanya potensi PNBP melalui penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) rekomendasi; Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), dan rekomendasi untuk para pengusaha yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak	• Konversi lahan pesisir yang dapat merusak ekosistem pesisir. • Pemanfaatan jenis ikan yang tidak sesuai ketentuan perundangan. • Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. • Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung • Perizinan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Meningkatnya kolaborasi dengan mitra dalam pengelolaan konservasi	pulau-pulau kecil terluar di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang belum [illegible] [illegible] [illegible], terletak di wilayah kerja BPSPL Pontianak memiliki Pulau Maratua dan Pulau Sambit yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

[illegible]

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah "Pengelolaan Ruang Laut Yang Menyejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP". Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah **"Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL"**

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP [illegible] melaksanakan [illegible] dari sebagian misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan".

[illegible]

2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi, yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Pontianak, maka ditetapkan Misi BPSPL Pontianak yaitu:

1. Perencanaan Ruang laut di lingkup wilayah kerja BPSPL Pontianak
2. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
3. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
4. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Kerja Pontianak;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup wilayah kerja BPSPL Pontianak.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
   1) meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   2) Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut :

[illegible]

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Tujuan meningkatkan daya saing wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Tujuan meningkatkan perizinan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
   2) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   3) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
   4) Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
5. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
   1) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

6. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan terwujudnya pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah "Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait". Berdasarkan kebijakan ini maka dirumuskan arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4) percepatan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5) penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6) tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

Strategi pelaksanaan kegiatan BPSPL Pontianak yang akan ditempuh untuk masing – masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
   a. Pendampingan dalam penetapan KTPRL yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

c. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

d. Pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:

   a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   b. Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKD di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   f. Rehabilitasi Habitat biota jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   h. Pelayanan perizinan/ peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   i. Inisiasi jejaring dan kerjasama konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

   j. Pembentukan Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

[illegible]

3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
    a. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja BPSPL Pontianak

4. Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil melalui:
    a. Identifikasi Kawasan Mangrove di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
    b. Penanaman Mangrove di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
    c. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
    a. Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
    a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BPSPL Pontianak;
    b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di BPSPL Pontianak;
    c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di BPSPL Pontianak;
    d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di BPSPL Pontianak.

B. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi BPSPL Pontianak diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

[illegible]

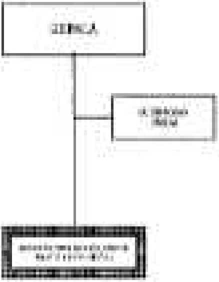

Struktur Organisasi BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah pesisir dan laut Kalimantan. Saat ini, ada 2 (dua) kantor wilayah kerja yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selanjutnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Adapun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada di BPSPL Pontianak yaitu Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Perencana Ahli Muda, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, dan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama.

Total SDM yang dimiliki BPSPL Pontianak hingga tahun 2021 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 60 orang, yang terdiri dari 46 berstatus ASN dan 14 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di BPSPL Pontianak pada saat Penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum, dengan total SDM 9 orang yang terdiri dari 2 Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan 8 Jabatan Fungsional Umum, yaitu:
   - JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda (1 Orang)
   - JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (1 Orang)
   - Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (1 Orang)
   - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (1 Orang)
   - Bendahara Pengeluaran (2 Orang)
   - Analis Organisasi dan Tata Laksana (1 Orang)
   - Pengadministrasian Barang Milik Negara (1 Orang)
   - Pengadministrasian Persuratan (1 Orang)
   - Pengadministrasian Umum (1 Orang)
2. Sub Koordinator Program dan Evaluasi, dengan total SDM 7 orang yang terdiri dari 1 Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan 6 Jabatan Fungsional Umum, yaitu:
   - JF Perencana Muda (1 Orang)
   - Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (3 Orang)
   - Analis Perencanaan (3 Orang)
3. Sub Koordinator Pendayagunaan dan Pelestarian, dengan total SDM 29 orang yang terdiri dari 16 Jabatan Fungsional PKLP dan 13 Jabatan Fungsional Umum:
   - JF PKLP Muda (1 Orang)
   - JF PKLP Pertama (15 Orang)
   - Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir (4 Orang)
   - Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2 Orang)
   - Analis Kelautan dan Perikanan (3 Orang)
   - Pengadministrasian Umum (3 Orang)

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin kompleks, ke depan diperlukan pengembangan SDM yang lebih profesional dengan penambahan jabatan fungsional lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu JF Analis

[illegible]

Pengelolaan Jasa Kelautan, JF Bidang Perencanaan dan Penataan Ruang Laut serta JF lainnya.

Untuk meningkatkan efektivitas dan rentang kendali yang lebih dekat, maka SDM tersebut ditempatkan pada 3 provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Total mencakup 30 Kabupaten/Kota Pesisir yang tersebar di 5 Provinsi di Pulau Kalimantan. Wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah seperti pada peta dan gambar di bawah ini.

Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah

[illegible]

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ditjen PRL, maka BPSPL Pontianak telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini.

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]		
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]					
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kerangka kebutuhan dana dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BPSPL Pontianak selama lima tahun ke depan. Sumber dana pendanaan BPSPL Pontianak diperoleh dari sumber APBN yang secara rinci tercantum pada lampiran matriks kerangka pendanaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB V

PENUTUP

Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis RPJMN Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), Renstra KKP tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020), dan Renstra Ditjen PRL tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Pontianak dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024 di wilayah kerja BPSPL Pontianak, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga ditentukan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]											
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

[illegible]

[illegible]

				[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]											
[illegible]							[illegible]	[illegible]				[illegible]
	[illegible]						[illegible]					[illegible]
	[illegible]	[illegible]										
	[illegible]	[illegible]										
	[illegible]	[illegible]										
[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]				[illegible]	[illegible]						
[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]											
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]											

[illegible]

[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**[illegible]**
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

		[illegible]					[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]											
[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]									[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]										
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

[illegible]